



LAPORAN CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG



20
23

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
Daftar Gambar	iii

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

2.3 Rencana Strategis	2
2.3.1 Visi dan Misi	2
A. Visi	2
B. Misi	4
2.3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	10
2.3.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2023	12
2.3.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.3.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
2.3.6 Rencana Anggaran Tahun 2023	20
2.3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama	24
2.3.8 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisa Kinerja Sasaran Strategis	29
2.3.9 Akuntabilitas Keuangan	35
2.3.10 Analisis Pencapaian Per Sasaran Strategi	41
Sasaran 1 : Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	41
Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	68
Sasaran 3 : Meningkatnya Masyarakat Kota Yang Humanis	83
Sasaran 4 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	117
Sasaran 5 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	145
Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	160
Sasaran 7 : Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	207
Sasaran 8 : Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	238

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah	5
Tabel 2.2	Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	6
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023	11
Tabel 2.4	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung (Sebelum Perubahan)	14
Tabel 2.5	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung (Setelah Perubahan)	15
Tabel 2.6	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung (Berdasarkan Hasil Reviu)	16
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	18
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	19
Tabel 2.9	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 (Sebelum Audit BPK-RI)	21
Tabel 2.10	Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 (Sebelum Audit BPK-RI)	22
Tabel 2.11	Alokasi Anggaran Perubahan Per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023	22
Tabel 2.12	Predikat Nilai Capaian Kinerja dalam Skala Pengukuran Ordinal	25
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	25
Tabel 2.14	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	26
Tabel 2.15	Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	31
Tabel 2.16	Pencapaian Target Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	33
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	33
Tabel 2.18	Pencapaian Target Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	34
Tabel 2.19	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 (Sebelum Audit BPK-RI)	36
Tabel 2.20	Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 (Sebelum Audit BPK-RI)	37
Tabel 2.21	Pagu Dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023	38
Tabel 2.22	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023	39
Tabel 2.23	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	40
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendidikan Masyarakat Tahun 2023	42
Tabel 2.25	Analisis Pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah	45
Tabel 2.26	Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program	48
Tabel 2.27	Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program	60
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023	68
Tabel 2.29	Pencapaian Indikator Sasaran 1 Dibandingkan Target Akhir RPJMD Kota Bandung Tahun 2023	71
Tabel 2.30	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023	72
Tabel 2.31	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2023	77
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis Tahun 2023	83
Tabel 2.33	Sub Wilayah Kota pada RTRW Kota Bandung	89
Tabel 2.34	Ketercapaian Data	93
Tabel 2.35	Indikator Objektif	93
Tabel 2.36	Sebaran Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal	97
Tabel 2.37	Sebaran Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Kerja	99
Tabel 2.38	Faktor Penyebab Persoalan	113
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Tahun 2023	117
Tabel 2.40	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	119
Tabel 2.41	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2023	120
Tabel 2.42	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022-2023	137
Tabel 2.43	Capaian Kinerja LPPD dan EPPD Kota Bandung Tahun 2019-2023	144
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Tahun 2023	145
Tabel 2.45	Indeks Daya Saing Pariwisata Kota Bandung Tahun 2023	147
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Tahun 2023	160
Tabel 2.47	Target dan Capaian IKLH Kota Bandung 2023	165
Tabel 2.48	Rekapitulasi Data Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Kota Bandung Tahun 2023	173
Tabel 2.49	Perhitungan Beban Pencemaran dari Sumber Pencemar di Beberapa Ruas Sungai Kota Bandung	175
Tabel 2.50	Rekapitulasi Persetujuan Lingkungan, Rekomendasi SPPL dan Rekomendasi Teknis yang Dikeluarkan Tahun 2023	177
Tabel 2.51	Rekapitulasi RTH di Kota Bandung sampai dengan Tahun 2023	192
Tabel 2.52	Daftar RW di Kota Bandung yang Telah Menerapkan Pola Kawasan Bebas Sampah (KBS)	202
Tabel 2.53	Daftar Kelurahan di Kota Bandung yang Telah Menerapkan Pola Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS)	202
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Tahun 2023	207

Tabel 2.55	Presentase Tingkat Pelayanan Jalan	217
Tabel 2.56	Kondisi Jalan Kota Bandung	218
Tabel 2.57	Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung berdasarkan SK Wali Kota Nomor 648/Kep.1227-DPKP/2020 (per Kecamatan)	222
Tabel 2.58	Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2023 Kota Bandung	223
Tabel 2.59	Data Sambungan Langganan Tahun 2023	230
Tabel 2.60	Data Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) Tahun 2019-2023	230
Tabel 2.61	Rekapitulasi Pekerjaan Kerja Sama B to B PT Adaro	232
Tabel 2.62	Data Lokasi Titik Genangan/Cileuncang Kota Bandung Tahun 2023	233
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan Tahun 2023	238
Tabel 2.64	Akumulasi Biaya Non-APBD Kota Bandung	239
Tabel 2.65	Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat (Swadaya Murni) Per Kecamatan Tahun 2023	240
Tabel 2.66	Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 Sumber Biaya APBD Kota Bandung	243
Tabel 2.67	Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 Sumber Biaya APBD Provinsi Jawa Barat	246
Tabel 2.68	Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 Sumber Biaya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR	247
Tabel 2.69	Rekapitulasi Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta Melalui Fasilitas Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Tahun 2023	251
Tabel 2.70	Status Implementasi Infrastruktur ISWMP - Kota Bandung	253



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	23
Grafik 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	28
Grafik 2.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	32
Grafik 2.4	Perkembangan Capaian Harapan Lama Sekolah	46
Grafik 2.5	Perkembangan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah	58
Grafik 2.6	Realisasi UHH Kota Bandung Tahun 2019-2023	70
Grafik 2.7	Keterkaitan Konsep-Konsep Kota	86
Grafik 2.8	Distribusi Responden Berdasarkan Usia	101
Grafik 2.9	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	102
Grafik 2.10	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	103
Grafik 2.11	Distribusi Responden Berdasarkan Status Tempat Tinggal	104
Grafik 2.12	Distribusi Responden Berdasarkan Lama Tinggal di Kota Bandung	105
Grafik 2.13	Distribusi Responden Berdasarkan Status Pernikahan	106
Grafik 2.14	Distribusi Responden Berdasarkan Luas Bangunan Tempat	107
Grafik 2.15	Distribusi Responden Berdasarkan Luas Tanah Tempat Tinggal	108
Grafik 2.16	Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Menuju Tempat Kerja	109
Grafik 2.17	Distribusi Responden Berdasarkan Waktu Tempuh	109
Grafik 2.18	Distribusi Responden Berdasarkan Rata-rata Pendapatan per Bulan	110
Grafik 2.19	Distribusi Responden Berdasarkan Rata-rata Pengeluaran per Bulan	111
Grafik 2.20	Capaian Nilai AKIP Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023	123
Grafik 2.21	Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek	136
Grafik 2.22	Target dan Realisasi SPBE Kota Bandung	136
Grafik 2.23	Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia dan Kota Bandung	147
Grafik 2.24	Perbandingan Capaian Kinerja TPT Tahun 2019-2023 Tingkat Pengangguran Terbuka	152
Grafik 2.25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2023	154
Grafik 2.26	Perbandingan Jumlah Pengangguran Tahun 2019-2023	154
Grafik 2.27	Perbandingan Jumlah Pengangguran Tahun 2022-2023 Berdasarkan Jenis Kelamin	155
Grafik 2.28	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen)	155
Grafik 2.29	Capaian IKLH Kota Bandung Tahun 2019-2023	163
Grafik 2.30	Perkembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung	191
Grafik 2.31	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota Bandung Tahun 2019-2023	200
Grafik 2.32	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kota Bandung Tahun 2019-2023	221
Grafik 2.33	Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Bandung Tahun 2020-2023	229
Grafik 2.34	Capaian Partisipasi Masyarakat Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)	240
Grafik 2.35	Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah)	243
Grafik 2.36	Rekapitulasi Besaran TJLS Tahun 2023 Per Bidang Prioritas	248
Grafik 2.37	Realisasi Program TJLS Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)	249
Grafik 2.38	Rekapitulasi Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta Melalui Fasilitasi Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Tahun 2020-2023 (Dalam Miliar Rupiah)	252

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pembelajaran di Sekolah Dasar	43
Gambar 2.2	Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama	44
Gambar 2.3	Peresmian Gedung Baru SDN 257 Pelita Kota Bandung	46
Gambar 2.4	Pembelajaran Angklung	57
Gambar 2.5	Aplikasi Survei yang Digunakan Tahun 2023	90
Gambar 2.6	Pembagian Wilayah Survei Menurut Kelurahan/Desa di Kota Bandung	91
Gambar 2.7	Sebaran Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal	96
Gambar 2.8	Sebaran Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Kerja	98
Gambar 2.9	Verifikasi dan Validasi LPPD di Sistem ELPPD Kemendagri oleh Inspektorat Kota Bandung	143





PEMERINTAH KOTA BANDUNG



BAB 2

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

2.3 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dituangkan merupakan pemaparan dari kerangka pembangunan strategis Kota Bandung untuk periode lima tahun. Segala hal terkait seperti penjabaran visi, misi, serta program pemerintah Kota Bandung tertuang di dalamnya. Pedoman RPJMD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tak hanya itu, RPJPN dan RPJMN Nasional juga turut menjadi bahan pertimbangan. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.



2.3.1 Visi dan Misi

A. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2018-2023 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL,
NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS”.**

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

- Bandung** Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul** Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.
- Sejahtera** Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga, dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil, dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.
- Agamis** Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023.

Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing - masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan,

agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Visi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Daerah yaitu “Kota Bandung Bermartabat”. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.



B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	MISI
TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS	Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
	Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
	Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
	Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

Misi Pertama	Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata
Misi Kedua	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.
Misi Ketiga	Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.
Misi Keempat	Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Misi Kelima	Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.



Penjabaran pelaksanaan kelima misi di atas, telah diuraikan melalui janji politik Wali Kota Bandung. Semuanya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penetapan janji politik, merupakan cerminan tentang urgensi permasalahan yang jadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Wali Kota Bandung.

Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 merupakan dokumen strategis Kota Bandung untuk mengimplementasikan janji-janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Janji-janji dimaksud menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan RPJMD, dan oleh karenanya menjadi contoh baik dalam tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan, bahwa janji-janji yang telah disampaikan mutlak harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan. Berkenaan dengan janji-janji wali kota dan wakil wali kota terpilih, tercatat ada 26 item janji politik yang terbagi atas aspek, diantaranya : Bandung Unggul (10 item), Bandung Nyaman (8 item), Bandung Sejahtera (14 item), dan Bandung Agamis (3 item). Berikut janji-janji dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

NO	JANJI POLITIK/ KAMPANYE	PENJELASAN	KATEGORI	PENANGGUNG JAWAB
1	PIPPK Plus	100 juta per LKK pada tahun pertama mengacu pada pelaksanaan PIPPK periode sebelumnya, sedangkan pada tahun pelaksanaan kedua terdapat kenaikan pada anggaran RW	Bandung Unggul	Kecamatan
				Bagian Pemerintahan
2	1 Pusat Kreativitas Pemuda per Wilayah	6 pusat kreativitas pemuda di 6 wilayah	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pemuda dan Olahraga

3	Youthspace di Setiap Kelurahan	151 kelurahan	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pemuda dan Olahraga
4	1 Perpustakaan Keliling / Kecamatan	Melayani seluruh kelurahan di 30 kecamatan	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Perpustakaan
5	Beasiswa Pendidikan bagi Siswa, Guru dan ASN Berprestasi	Beasiswa yang dimaksudkan adalah beasiswa prestasi, perlu disusun kriteria penerima	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
			Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian
6	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan	Penanganan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak: (1). Call center, (2). Konselor untuk pendampingan penanganan kasus	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Partisipasi perempuan dalam ruang publik (1). pembinaan perempuan di bidang politik, (2). pembinaan perempuan di bidang ekonomi, (3). pembinaan perempuan di bidang	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pd Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Anak per Kelurahan	Pembentukan kelurahan ramah anak dengan maksud untuk memotivasi dan mendorong kelurahan agar mampu mempromosikan, memenuhi dan menghormati hak-hak anak kreatifitas anak	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Kampung Wisata di Setiap Wilayah	Konsep kampung wisata disesuaikan dengan konsep penembangan kawasan strategis pengembangan pariwisata sebagaimana tertuang dalam rencana induk pembangunan	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
9	Pembangunan flyover/underpass	Pembangunan flyover/underpass	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Urusan PUPR
10	Pembangunan Kolam/Saluran Retensi	Pembangunan kolam/ saluran retensi	Bandung Nyaman	PD penanggung Jawab urusan PUPR
11	Fasilitas Disabilitas di Semua Ruang Publik	Fasilitas disabilitas, adanya di SKPD lintas sektoral, aksesibilitas di semua layanan publik	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial, PUPR, Kawasan Permukiman,
		Penbanguan taman RW dan taman tematik yang ramah disabilitas	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Sub Urusan Pertamanan
		diantaranya disediakan jalur untuk pengguna kursi roda, toilet yang ramah untuk kaum difabel dan sarana		
12	25.000 Sambungan Air Bersih Baru	Dalam kaitan mengatasi kehilangan air (bukan kebocoran saja), kehilangan dalam faktor administrasi (meteran tidak bagus, sambungan ilegal).	Bandung Nyaman	PDAM Tirtawening
		Saat ini angka kehilangan air PDAM sebesar 42%. Target kehilangan air dalam		
		5 tahun ke depan bisa 30% (berkurang 12%). Sambungan air saat ini		
13	Revitalisasi Sarana Olahraga/ Kecamatan	30 Kecamatan	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Urusan Pemuda dan Olahraga dan Kecamatan
14	Bank Sampah per Kecamatan	Membangun bank sampah per kecamatan dengan tujuan utama untuk mengurangi sampah dari sumber.	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
15	Menuntaskan Revitalisasi Pasar Tradisional	Melakukan revitalisasi, rehabilitasi dan renovasi pasar-pasar tradisional	Bandung Nyaman	PD Pasar Bermartabat, PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan

16	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co- Working space) Per Kecamatan	Pendampingan WUB pada 30 kecamatan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan KUMKM
		Pusat pemberdayaan ekonomi dan Kreatifitas masyarakat (co-working space) di dispangtan terkait dengan 4 subsektor, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan urban farming.	Bandung Sejahtera	Pd Penanggung Jawab Urusan Pertanian, Peter- nakan dan Perikanan
		Konsep co-working space digabungkan dengan konsep kampung wisata kreatif:	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
		konsep pembentukan co- working space, direncanakan dibangun dengan konsep social business hub, yakni menitikberatkan pada pemben- tukan kelompok ekonomi dan kreatif berbasis teknologi yang dikembangkan dengan platform bisnis sosial.		
		(1). Bandung Bersih melalui KANG PISMAN (kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah per keluarga), (2). Kerja sama dengan BPR fasilitas Kredit Bagja per kelompok masyarakat	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		1. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi tepat guna dengan maksud meningkatkan usaha ekonomi dan mengembangkan kewirausahaan	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Masyarakat
		2. Fasilitas kredit Bagja per kelompok masyarakat, bekerja sama dengan PD. BPR Kota Bandung		
17	UMK untuk Guru Honorer	Guru honorer mendapatkan kompensasi sesuai dengan UMK secara bertahap	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
18	Gratis Biaya Pemakaman Bagi Warga Tidak Mampu	Pembebasan biaya pemakaman bagi warga miskin	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab sub urusan Pemakaman
19	Peningkatan Insentif RT dan RW	Besaran tidak didefinitifkan, yang ditekankan ada peningkatan	Bandung Sejahtera	Kecamatan
			Bandung Sejahtera	Bagian Pemerintahan
20	Subsidi Harga Sembako	Subsidi harga sembako di Dispangtan diaplikasikan dalam Program Penguatan Cadangan Pangan dan ATM Beras. Pengadaan beras diperuntukkan pengisian ATM Beras dan apabila terjadi bencana	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan Pangan
		Anggaran subsidi bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan Perdagangan
		Disdagin Kota Bandung memfasilitasi dalam hal penyaluran komoditi yang disubsidi di seluruh Kecamatan se-Kota Bandung		
21	Kartu Bandung Se- jahtera bagi Warga Tidak Mampu	Kartu Bandung sejahtera bagi warga tidak mampu yang multifungsi (untuk akses bansos, akses atm beras, akses proteksi kesehatan, akses Koperasi Juara, dan hal- hal kebutuhan yg terkait dukungan kepada warga tidak mampu)	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan Sosial
22	Menciptakan 1 Koperasi Juara Setiap Kelurahan	Seluruh kelurahan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan KUMKM

23	1 Koperasi di Setiap Tempat Ibadah di Kelurahan	Seluruh kelurahan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan KUMKM
24	Peningkatan Intensif untuk Guru Ngaji	Guru ngaji di Kota Bandung berjumlah kurang lebih	Bandung Agamis	Bagian Kesra
25	Gratis Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah	Dari 3.802 masjid yang ada di Kota Bandung, belum seluruhnya memiliki tanah yang bersertifikat begitupula beberapa rumah ibadah agama lain. Dalam Mewujudkan Bandung Agamis, Pemerintah Kota Bandung memfasilitasi sertifikasinya secara gratis	Bandung Agamis	Bagian Kesra
26	Gerakan Meyemarakan Tempat Ibadah	Dengan telah dikeluarkannya program Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah, Gerakan Maghrib Mengaji dan Berjama'ah Shalat Waktu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung untuk menyemarakkan tempat ibadah. Kegiatan ini tidak lepas pula dari bantuan berbagai pihak terkait, seperti Kementrian Agama Kota Bandung, MUI, dan Ormas Islam	Bandung Agamis	Bagian Kesra

Janji-janji tersebut bukanlah sekadar janji belaka. Banyak sisi positif yang bermanfaat bagi kesejahteraan warga Kota Bandung. Dengan janji-janji tersebutlah, Walikota Bandung terus memelihara keinginan dan tekad kuat untuk menyelesaikan permasalahan kota, terutama terkait bebas sampah, bebas banjir, bebas macet, serta persoalan infrastruktur. Tak hanya soal infrastruktur permasalahan pelayanan publik, juga terus diperhatikan Pemerintah Kota Bandung. Seluruh jajaran pemerintahan sadar, pelayanan publik merupakan satu hal penting yang bersentuhan langsung dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja unsur pemerintah. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga kota juga menjadi pembentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandung dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan selain ukuran-ukuran keberhasilan pendukung lainnya.





2.3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama dengan lebih menekankan pada target kinerja.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun. Penentuan target indikator dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2020 dengan kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan.

Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai tahun 2021 ini, menyebabkan pemerintah pusat bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.

Pada Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebelum perubahan, tujuan tidak memiliki indikator sehingga tingkat keberhasilannya tidak dapat diukur, pada perubahan RPJMD ini disertakan indikator untuk setiap tujuan sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dilakukan reviu atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Perubahan Kota Bandung 2018-2023 menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran dan 20 (dua puluh) indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kota Bandung
Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing		
Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah
		Angka Kelulusan
		Rata-rata Nilai Ujian SD
	Rata-rata Nilai Ujian SMP	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih		
Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”
		Nilai Evaluasi AKIP Kota
		Nilai LPPD Kota
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
		Level Kematangan Smart City Kota Bandung
Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan		
Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Kota	PDRB Per kapita
		Indeks Daya Saing Pariwisata
		Pengeluaran Per Kapita
	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan
Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	
Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		
Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman, dan Berkelanjutan	Persentase RTH
	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Lama Genangan yang Tertangani Pada Titik Genangan
		Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh
	Meningkatnya Layanan Air Bersih	Cakupan Layanan Air Bersih
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota		
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi		
Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan Kepentingan Lainnya	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan
	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta Dalam Pembangunan	Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga
		Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta (Akumulasi)

2.3.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai tahun 2021 ini, menyebabkan pemerintah pusat bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, tentu saja harus ada beberapa kebijakan yang dijadikan dasar dalam perumusan perencanaan. Kebijakan tersebut adalah : Kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

RPJMD Kota Bandung 2018-2023, itu kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah, serta sasaran pokok, dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah, serta strategi dan arah kebijakannya.

Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Implementasi program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun periode 2018-2023 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri atas:

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
4. Peningkatan perekonomian kota
5. Tata kelola pemerintahan
6. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
7. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
8. Sinergitas pembiayaan Pembangunan

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab visi misi kepala daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Selain dalam rangka

menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial



2.3.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran akan tercapai ketika strategi yang digunakan tepat. Pemerintah Kota Bandung selalu optimistis mampu mencapai sasaran berbekal strategi matang untuk seluruh lini yang ingin dibenahi. Adapun strategi Pemerintah Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program, serta kegiatan. Untuk itu sebaiknya terlebih dahulu membahas secara singkat tentang arti dari kebijakan, program, serta kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait lalu ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Maka pedoman itulah yang nanti dijadikan petunjuk bagi setiap kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung melaksanakan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Terutama, indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam BAB VIII Tabel 8.3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Tabel 2.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Bandung
(Sebelum Perubahan)

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun
		1.2	Angka Kelulusan	Persentase
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1	Umur Harapan Hidup	Tahun
3	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	3.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Persentase
		3.2	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat
		3.3	Nilai LPPD Kota	Predikat
		3.4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat
		3.5	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Tingkat
4	Meningkatnya Perekonomian Kota	4.1	PDRB Per kapita	Juta Rp
		4.2	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin
		4.3	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah/ org/Tahun
5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	5.1	Angka Kemiskinan	Persen
6	Meningkatkan Kesempatan Kerja	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen
7	Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman, dan Berkelanjutan	7.1	Persentase RTH	Persen

8	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	8.1	Lama Genangan yang Tertangani Pada Titik Genangan	Menit
		8.2	Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	Aspek
		8.2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%
9	Meningkatnya Layanan Air Bersih	9.2	Cakupan Layanan Air Bersih	%
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	10.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin
		10.2	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	%
11	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta Dalam Pembangunan	11.1	Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	%
		11.2	Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta (Akumulasi)	%



Tabel 2.5
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Bandung
(Setelah Perubahan)

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing				
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1.1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun
		1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	3.1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Poin
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih				

4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”	Persentase
		4.2	Nilai AKIP	Predikat
		4.3	Opini BPK	Predikat
		4.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin
		4.5	Nilai EPPD	Skor
Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan				
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	5.1	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin
		5.2	Angka Kemiskinan	Persen
		5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen
Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan				
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	6.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin
		6.2	Persentase Luasan RTH	Poin
		6.3	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	Persen
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	7.1	Persentase Penurunan Kemacetan	Persen
		7.2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen
		7.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen
		7.4	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi				
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	8.1	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	Persen

Tabel 2.6
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Bandung
(Berdasarkan Hasil Reviu)

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KET
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	IKU
		1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	IKU
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1	Umur Harapan Hidup	Tahun	IKU
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	3.1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Poin	IKU
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”	Persen	IKU
		4.2	Nilai AKIP	Predikat	IKU
		4.3	Opini BPK	Predikat	-
		4.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	-
		4.5	Nilai EPPD	Skor	-
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	5.1	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	-
		5.2	Angka Kemiskinan	Poin	IKU
		5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	IKU

6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	6.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	IKU
		6.2	Persentase Luasan RTH	Persen	-
		6.3	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	Persen	-
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	7.1	Persentase Penurunan Kemacetan	Persen	-
		7.2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	-
		7.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	-
		7.4	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen	-
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	8.1	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	Persen	-

Sumber: Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.2223-Bappelitbang/2022

2.3.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang



seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih, dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan sistem manajerial dalam perjanjian kinerja, segala sesuatu menjadi terbuka dan bukannya sekadar tandatangan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023. Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2023

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing					
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1.1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,23
		1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,78
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,98
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	3.1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Poin	6,80
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih					
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”	Persentase	100
		4.2	Nilai AKIP	Predikat	A
		4.3	Opini BPK	Predikat	WTP
		4.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,35
		4.5	Nilai EPPD	Skor	3,4044
Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan					
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	5.1	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	3,31
		5.2	Angka Kemiskinan	Persen	3,14
		5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,26
Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan					
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	6.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	51,79
		6.2	Persentase Luasan RTH	Poin	13,77
		6.3	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	Persen	99

7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	7.1	Persentase Penurunan Kema- cetan	Persen	7,83
		7.2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	2,16
		7.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	83
		7.4	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen	41,18
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi					
8	Meningkatnya Partsisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	8.1	Persentase Kolaborasi Pemi- ayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	Persen	6,69



Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing					
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1.1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,23
		1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,78
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,98
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	3.1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Poin	6,80
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih					
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Persentase	100
		4.2	Nilai AKIP	Predikat	A
		4.3	Opini BPK	Predikat	WTP
		4.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,35
		4.5	Nilai EPPD	Skor	3,4044

Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan					
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	5.1	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	3,31
		5.2	Angka Kemiskinan	Persen	3,14
		5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,26
Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan					
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	6.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	51,79
		6.2	Persentase Luasan RTH	Poin	13,77
		6.3	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	Persen	99
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	7.1	Persentase Penurunan Kema- cetan	Persen	7,83
		7.2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	2,16
		7.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	83
		7.4	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen	41,18
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi					
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	8.1	Persentase Kolaborasi Pembi- ayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	Persen	6,69

2.3.6 Rencana Anggaran Tahun 2023

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.



Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah belanja daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan Pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan berbasis kinerja dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7.813.746.736.717 dengan capaian realisasi Rp6.743.350.893.479 atau 86,30% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2023
(Sebelum Audit BPK RI)

NO	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE
1	Belanja Operasi	6.589.031.247.280,00	5.773.135.238.945,00	86,62
2	Belanja Modal	1.104.227.033.515,00	920.167.932.025,00	83,33
3	Belanja Tidak Terduga	93.036.955.922,00	22.759.422.509,00	24,46
4	Belanja Transfer	27.451.500.000,00	27.288.300.000,00	99,41
JUMLAH		7.813.746.736.717,00	6.743.350.893.479,00	86,30

Sumber: BKAD Kota Bandung 2023



Belanja operasi Kota Bandung pada tahun 2023 terbagi menurut jenis belanja, yang terdiri atas :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Subsidi;
4. Belanja Hibah; dan
5. Belanja Bantuan Sosial;

Belanja Operasi pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 6.589.031.247.280 dengan capaian realisasi Rp 5.773.135.238.945 atau 87,62% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2023
(Sebelum Audit BPK RI)

NO	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE
1	Belanja Pegawai	2.854.902.595.424,00	2.506.722.494.050,00	87,80
2	Belanja Barang dan Jasa	3.345.009.721.234,00	2.894.451.733.651,00	86,53
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	358.070.330.622,00	343.898.891.244,00	96,04
5	Belanja Bantuan Sosial	31.048.600.000,00	28.062.120.000,00	90,38
JUMLAH		6.589.031.247.280,00	5.773.135.238.945,00	87,62

Sumber: BKAD Kota Bandung 2023

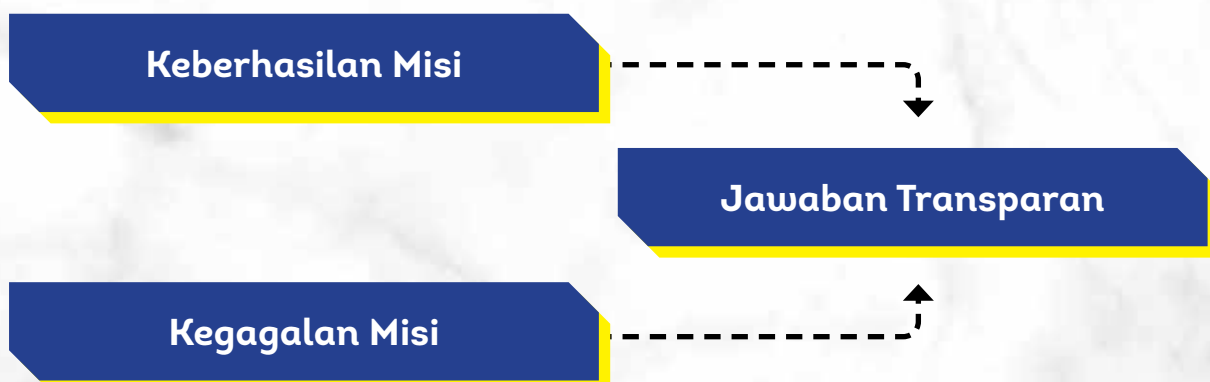
Tabel 2.11
Alokasi Anggaran Perubahan Per Sasaran Strategis
Tahun Anggaran 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	849.292.798.917,00	806.029.484.259,00
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	4.101.454.147,00	3.795.488.103,00
3	Umur Harapan Hidup (UHH)	1.790.147.578.631,00	1.466.910.119.580,00
4	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	522.599.403.651,00	486.400.801.009,00
5	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	447.724.131.755,00	374.958.115.938,00
6	Nilai AKIP	14.658.698.410,00	12.682.208.586,00
7	Opini BPK	145.148.739.572,00	71.623.491.954,00
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	15.378.496.419,00	14.811.001.998,00
9	Nilai EPPD	1.110.426.000,00	919.757.500,00
10	Indeks Daya Saing Pariwisata	66.472.537.581,00	62.323.491.066,00
11	Angka Kemiskinan	10.746.461.423,00	10.669.362.199,00
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	52.334.657.119,00	49.554.338.236,00
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	14.667.403.411,00	12.805.650.265,00
14	Persentase Luasan RTH	70.864.031.619,00	69.230.824.860,00

15	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	359.686.209.533,00	258.087.243.624,00
16	Persentase Penurunan Kemacetan	292.817.321.286,00	242.542.993.194,00
17	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	154.474.531.867,00	133.943.943.399,00
18	Cakupan Pelayanan Air Minum	21.916.058.226,00	21.059.790.069,00
19	Persentase Penurunan Titik Genangan	114.193.602.677,00	104.770.623.891,00
20	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	-	-
JUMLAH		4.948.334.542.244,00	4.203.118.729.730,00



Grafik 2.1
Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2023





2.3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama

Guna mempertanggungjawabkan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Bandung menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung. Sebelum pembahasan lebih jauh, ada baiknya memahami terlebih dahulu pengertian Akuntabilitas Kinerja.

Secara umum, Akuntabilitas Kinerja artinya jawaban transparan terkait keberhasilan misi dan kegagalan misi. Jawaban tentang dua hal itu, disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menerima laporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Lantas, siapa saja yang punya kewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja itu sendiri? Jawabannya, ada tiga: Perorangan, Badan Hukum, Pimpinan Kolektif. Berakuntabilitas jadi hal wajib dilakukan Pemerintah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat. Kewajiban ini sudah dilakukan dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung.

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2023, RKPD Tahun 2023, dan PK Tahun 2023. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 2.12
Predikat Nilai Capaian Kinerja dalam Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	



Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dan Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) Indikator yang tertuang dalam BAB VIII Tabel 8.3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2021.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bandung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,23	14,24	100,07%
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,78	11,06	102,60%
3	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,98	75,04	100,08%
4	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Poin	6,80	7,50	110,29%
5	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Persentase	100,00	98,33	98,33%
6	Nilai AKIP	Predikat	A	A	100,00%
7	Opini BPK	Predikat	WTP	N/A	N/A
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,35	3,98	118,81%
9	Nilai EPPD	Skor	3,40	3,34	98,00%
10	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	3,31	3,53	106,59%
11	Angka Kemiskinan	Persen	3,14	3,96	73,89%
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,26	8,83	113,94%
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	51,79	56,32	108,75%
14	Persentase Luasan RTH	Poin	13,77	12,49	90,70%
15	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	Persen	99,00	98,57	99,57%
16	Persentase Penurunan Kemacetan	Persen	7,83	7,83	100,00%
17	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	2,16	1,88	112,96%
18	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	83,00	91,30	110,00%
19	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen	41,18	11,76	171,44%
20	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	Persen	6,69	10,56	157,85%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

- a. **Misi 1** : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing. Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya

pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

1. Angka Harapan Lama Sekolah, dengan capaian 100,07%
 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah, dengan capaian 102,60%
 3. Umur Harapan Hidup, dengan capaian 100,08%
 4. Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya, dengan capaian 110,29%
- b. **Misi 2** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih. Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.
1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”, dengan capaian 98,33%
 2. Nilai AKIP, Nilai 80,56 atau predikat A dengan capaian 100%
 3. Opini BPK, N/A atau belum keluar penilaian
 4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan capaian 118,81%
 5. Nilai EPPD, dengan realisasi 3,3362 atau dengan capaian 98,00%
- c. **Misi 3** : Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan. Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.
1. Indeks Daya Saing Pariwisata, mencapai 3,528 atau dengan capaian 106,59%
 2. Angka Kemiskinan, mencapai 3,96 atau dengan capaian 73,89%
 3. Tingkat Pengangguran Terbuka, mencapai 8,83 atau dengan capaian 113,94%
- d. **Misi 4** : Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan. Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.



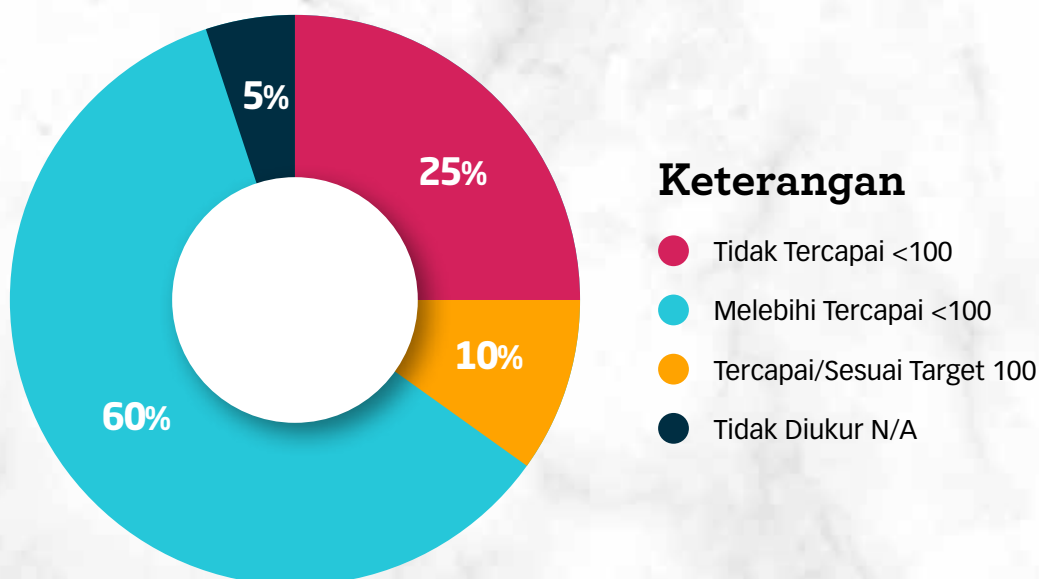
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, mencapai 56,32 atau dengan capaian 108,75%
2. Persentase Luasan RTH, mencapai 12,49 atau dengan capaian 90,70%
3. Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah, mencapai 98,57 atau dengan capaian 99,57%
4. Persentase Penurunan Kemacetan, mencapai 7,83 atau dengan capaian 100%
5. Persentase Luasan Kawasan Kumuh, mencapai 1,88 atau dengan capaian 112,96%
6. Cakupan Pelayanan Air Minum, mencapai 91,3 atau dengan capaian 110%
7. Persentase Penurunan Titik Genangan, mencapai 11,76 atau dengan capaian 171,44%

- e. **Misi 5** : Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.
Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan , mencapai 10,56 atau dengan capaian 157,85%.



Grafik 2.2

**Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023**



Hasil dari capaian di atas turut didukung program prioritas daerah di Kota Bandung. Itu telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Bandung. Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan tentang Capaian Janji Walikota dan Wakil Walikota sebagai substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Berkenaan dengan janji-janji Walikota dan Wakil Walikota, tercatat ada 26 item janji politik yang terdiri atas aspek: Bandung Unggul, Bandung Nyaman, Bandung Sejahtera dan Bandung Agamis. Tidak seluruh item janji tersebut merupakan indikator outcome sasaran strategis RPJMD Kota Bandung tetapi merupakan output penting, sehingga diperlukan penjelasan tersendiri. Pencapaian kinerja terhadap Janji Walikota dan Wakil Walikota diuraikan dalam sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang relevan.



2.3.8 Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja Sasaran Strategis

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran

yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kota Bandung Tahun 2022, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

1	Sasaran	1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Sebanyak	2	Indikator
2	Sasaran	3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Sebanyak	1	Indikator
3	Sasaran	4	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	Sebanyak	1	Indikator
4	Sasaran	9	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Sebanyak	5	Indikator
5	Sasaran	10	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Sebanyak	3	Indikator
6	Sasaran	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Sebanyak	3	Indikator
7	Sasaran	16	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Sebanyak	4	Indikator
8	Sasaran	20	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	Sebanyak	1	Indikator



Berdasarkan hasil reviu oleh KemenPAN-RB telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 050/Kep.2223-Bappelitbang/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, menjadi 8 (delapan) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja (outcome). Secara umum Pemerintah Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023, sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Tabel 2.15
Pengukuran Kinerja
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022, sebagaimana grafik dan tabel berikut :

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1.1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,23	14,24	100,07%
		1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,78	11,06	102,60%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,98	75,04	100,08%
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	3.1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Poin	6,80	7,50	110,29%
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4.1	Persentase Peringkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Persentase	100	98,33	98,33%
		4.2	Nilai AKIP	Predikat	A	A	100,00%
		4.3	Opini BPK	Predikat	WTP	N/A	N/A
		4.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,35	3,98	118,81%
		4.5	Nilai EPPD	Skor	3,4044	3,3362	98,00%
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	5.1	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	3,31	3,528	106,59%
		5.2	Angka Kemiskinan	Persen	3,14	3,96	73,89%
		5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,26	8,83	113,94%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	6.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	51,79	56,32	108,75%
		6.2	Persentase Luasan RTH	Poin	13,77	12,49	90,70%
		6.3	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	Persen	99	98,57	99,57%
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	7.1	Persentase Penurunan Kemacetan	Persen	7,83	7,83	100,00%
		7.2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	2,16	1,88	112,96%
		7.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	83	91,3	110,00%
		7.4	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen	41,18	11,76	171,44%
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	8.1	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	Persen	6,69	10,56	157,85%

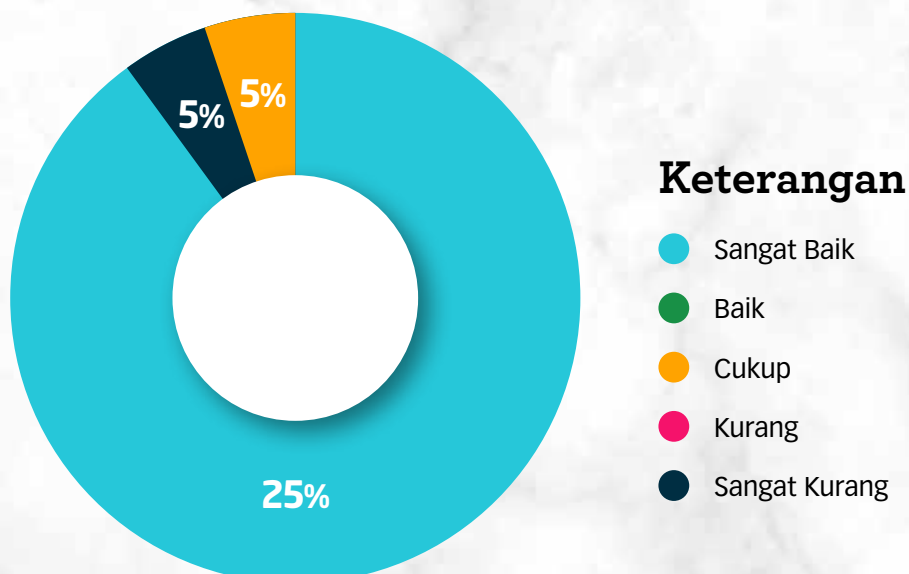


Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasaran dirinci dalam

Grafik 2.3

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023**





tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.16
Pencapaian Target Sasaran Strategis
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023

No.	Predikat	Rata-Rata Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat Baik	>90	18
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	1
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	1
Jumlah			20

2.3.9 Akuntabilitas Keuangan

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah
Kota Bandung Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49.9	50.00 – 64.99	65.00 – 74.99	75.00 – 89.99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
A Misi 1								
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2	101,33					Sangat Baik
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	100,08					Sangat Baik
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	1	110,29					Sangat Baik

B Misi 2								
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	5	N/A	Sangat Kurang				
C Misi 3								
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	3	98,14					Sangat Baik
D Misi 4								
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3	99,67					Sangat Baik
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	4	123,60					Sangat Baik
E Misi 5								
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	1	157,85					Sangat Baik



Tabel 2.18
Pencapaian Target Sasaran Strategis
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target (<100%)	
				(>100%)		(100%)			
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
A. Misi 1									
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2	101,33	2	101,33				

2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	100,08	1	100,08				
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	1	110,29	1	110,29				
B. Misi 2									
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	5	N/A	1	118,81	1	100	3	98,16
C. Misi 3									
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	3	98,14	2	110,26			1	73,89
D. Misi 4									
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3	99,67	1	108,75			2	95,23
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	4	123,60	3	131,47	1	100		
E. Misi 5									
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	1	157,85	1	157,85				



Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.

Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah belanja daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan

pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan berbasis kinerja dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan Masyarakat.

Belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7.813.746.736.717 dengan capaian realisasi Rp6.743.350.893.479 atau 86,30% dengan rincian pada tabel berikut :

Belanja operasi Kota Bandung pada tahun 2023 terbagi menurut jenis belanja, yang terdiri atas :



Tabel 2.19
Realisasi Belanja
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023
(Sebelum Audit BPK-RI)

NO	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE
1	Belanja Operasi	6.589.031.247.280,00	5.773.135.238.945,00	86,62
2	Belanja Modal	1.104.227.033.515,00	920.167.932.025,00	83,33
3	Belanja Tidak Terduga	93.036.955.922,00	22.759.422.509,00	24,46
4	Belanja Transfer	27.451.500.000,00	27.288.300.000,00	99,41
JUMLAH		7.813.746.736.717,00	6.743.350.893.479,00	86,30

Sumber: BKAD Kota Bandung Tahun 2023



1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Subsidi;
4. Belanja Hibah; dan
5. Belanja Bantuan Sosial;

Belanja Operasi pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 6.589.031.247.280 dengan capaian realisasi Rp 5.773.135.238.945 atau 87,62% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2023
(Sebelum Audit BPK RI)

NO	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE
1	Belanja Pegawai	2.854.902.595.424,00	2.506.722.494.050,00	87,80
2	Belanja Barang dan Jasa	3.345.009.721.234,00	2.894.451.733.651,00	86,53
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	358.070.330.622,00	343.898.891.244,00	96,04
5	Belanja Bantuan Sosial	31.048.600.000,00	28.062.120.000,00	90,38
JUMLAH		6.589.031.247.280,00	5.773.135.238.945,00	87,62

Sumber: BKAD Kota Bandung 2023

Tabel 2.21
Pagu dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	849.292.798.917,00	806.029.484.259,00	94,91%
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	4.101.454.147,00	3.795.488.103,00	92,54%
3	Umur Harapan Hidup (UHH)	1.790.147.578.631,00	1.466.910.119.580,00	81,94%
4	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	522.599.403.651,00	486.400.801.009,00	93,07%
5	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	447.724.131.755,00	374.958.115.938,00	83,75%
6	Nilai AKIP	14.658.698.410,00	12.682.208.586,00	86,52%
7	Opini BPK	145.148.739.572,00	71.623.491.954,00	49,34%
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	15.378.496.419,00	14.811.001.998,00	96,31%
9	Nilai EPPD	1.110.426.000,00	919.757.500,00	82,83%
10	Indeks Daya Saing Pariwisata	66.472.537.581,00	62.323.491.066,00	93,76%
11	Angka Kemiskinan	10.746.461.423,00	10.669.362.199,00	99,28%
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	52.334.657.119,00	49.554.338.236,00	94,69%
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	14.667.403.411,00	12.805.650.265,00	87,31%
14	Persentase Luasan RTH	70.864.031.619,00	69.230.824.860,00	97,70%
15	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	359.686.209.533,00	258.087.243.624,00	71,75%
16	Persentase Penurunan Kemacetan	292.817.321.286,00	242.542.993.194,00	82,83%
17	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	154.474.531.867,00	133.943.943.399,00	86,71%
18	Cakupan Pelayanan Air Minum	21.916.058.226,00	21.059.790.069,00	96,09%
19	Persentase Penurunan Titik Genangan	114.193.602.677,00	104.770.623.891,00	91,75%
20	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	-	-	-
JUMLAH		4.948.334.542.244,00	4.203.118.729.730,00	84,94%



Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja sasaran, yang diperjanjikan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2023. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.22
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pre-sentase Rata-rata Capaian Sasaran	Anggaran		Tingkat efektifitas
				Realisasi (Rp)	%	
A. Misi 1						
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2	101,33	809.824.972.362,00	93,72%	108,12%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	100,08	1.466.910.119.580,00	81,94%	122,14%
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	1	110,29	486.400.801.009,00	79,75%	138,29%
B. Misi 2						
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	5	N/A	474.994.575.976,00	79,75%	N/A
C. Misi 3						
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	3	98,14	122.547.191.501	95,91%	102,33%
D. Misi 4						
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3	99,67	340.123.718.749	85,59%	116,45%
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	4	123,60	502.317.350.553	89,35%	138,33%
E. Misi 5						
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	1	157,85	-	-	-



Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Bandung.

Analisa Efisiensi

Data yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 8 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 5 sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.23
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
A. Misi 1					
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2	101,33	93,72	7,61
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	100,08	81,94	18,14
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	1	110,29	79,75	30,54

B. Misi 2					
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	5	N/A	79,75	N/A
C. Misi 3					
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	3	98,14	95,91	18,14
D. Misi 4					
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3	99,67	85,95	13,72
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	4	123,60	89,35	34,25
E. Misi 5					
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	1	157,85	0,00	157,85



2.3.10 Analisis Pencapaian Per Sasaran Strategis

Sasaran 1 : Meningkatnya Pendidikan Masyarakat

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,00	14,19	101,29	14,01	14,20	100,71	14,21	14,21	100
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	N/A	10,74	N/A	N/A	10,75	N/A	10,76	10,99	102,13
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		N/A			N/A			101,07		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,22	14,23	100,07	14,23	14,24	100,07
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,77	11,00	102,14	10,78	11,06	102,60
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		101,10			101,33		

Sumber: Data Badan Pusat Statistika (BPS)

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 2 (dua) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator ke-1 (satu) “Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)” yaitu dari target tahun 2023 yaitu 14,23 tercapai melebihi target yaitu 14,24 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100,07%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2022 sebesar 100,07% tahun tidak mengalami peningkatan dan penurunan.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 14,23 tahun maka capaian kerjanya 100,07%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian HLS Kota Bogor tahun 2023 sebesar 13,45 tahun.

Capaian kinerja indikator ke-2 (dua) “Angka Rata-rata Lama Sekolah” dari target tahun 2023 yaitu 10,78 tercapai melebihi target yaitu 11,06 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 102,60%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2022 sebesar 11,00 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,06 tahun. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 10,78 maka capaian kerjanya 102,60%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota Bogor tahun 2023 sebesar 10,64 tahun.



1. Angka Harapan Lama Sekolah

BADAN PUSAT STATISTIK			
Beranda	Bencana Terbit	Produk	Layanan Informasi Publik
Sorontalo	12,36	12,36	
Indragaya	12,27	12,29	
Sulawesi	11,78	11,91	
Pangkalbata	12,53	12,58	
Karawang	12,59	12,2	
Bekasi	13,71	13,57	
Bandung Barat	11,89	11,91	
Pangandaran	12,71	12,3	
Kota Bogor	13,43	13,45	
Kota Sukabumi	13,59	13,6	
Kota Bandung	14,23	14,24	
Kota Cirebon	13,54	13,56	
Kota Bekasi	14,71	14,32	
Kota Depok	13,94	13,96	
Kota Cimahi	13,82	13,84	
Kota Tasikmalaya	13,47	13,48	
Kota Banjar	13,25	13,27	
JAWA TENGAH	12,81	12,85	
Cilecep	12,96	12,67	
Banuwani	13,11	13,18	

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Gambar 2.1
Pembelajaran di Sekolah Dasar



Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$EYS_a^t = FK_x \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Dimana:

- EYS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ;
 E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ;
 P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;
 i : Usia ($a, a+1, \dots, n$) ;
 FK : Faktor koreksi.

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan Pendidikan dan digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Gambar 2.2
Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama



Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pengetahuan di Indonesia menunjukkan kemajuan sepanjang 2011-2023. Ini tercermin dari membaiknya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menunjukkan anak-anak yang pada 2023 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,24 tahun (hingga Diploma III) lebih lama 0,01 tahun dari tahun sebelumnya yang 14.23 tahun.



Tabel 2.25
Analisis Pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
		Tar-get	Real-isasi		Tar-get	Real-isasi		Tar-get	Real-isasi		Tar-get	Real-isasi	
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.01	14.20	101,36	14.21	14.21	100,00	14,22	14,23	100,07	14,23	14,24	100,07

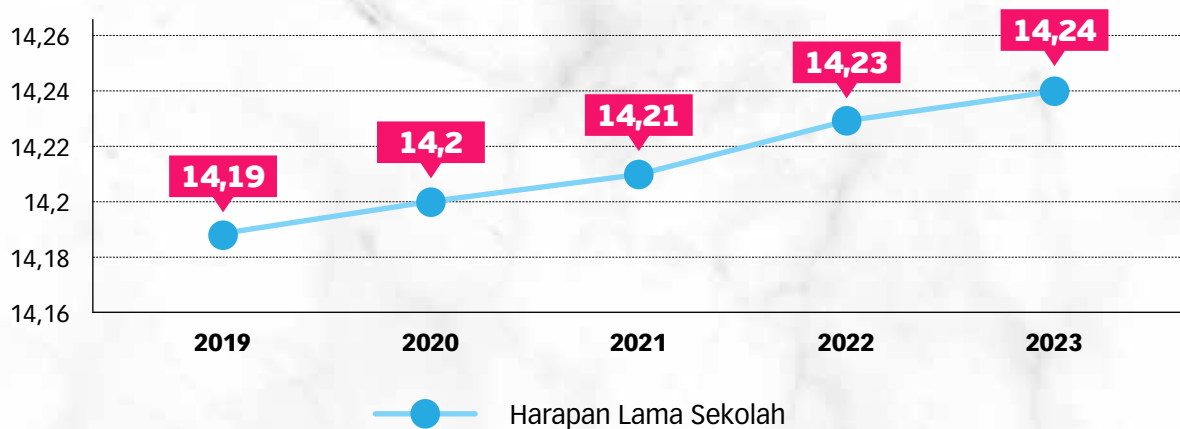
Capaian kinerja indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2023 yaitu dari target 14,23 tahun tercapai melebihi target yaitu 14,24 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100,07%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 14,23 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 14,23 maka capaian kerjanya 100,07%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian HLS Kota Bogor tahun 2023 sebesar 13,45 tahun.

Gambar 2.3
Peresmian Gedung Baru SDN 257 Pelita Kota Bandung



Dengan semakin tingginya HLS maka pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan upaya agar anak-anak yang saat ini sedang bersekolah SD/MI dan SMP/MTs dapat mengikuti proses pendidikan selanjutnya. Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Berikut grafik perkembangan capaian Harapan Lama Sekolah dari tahun 2019 sampai dengan 2023:

Grafik 2.4
Perkembangan Capaian Harapan Lama Sekolah



Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah adalah :

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- c. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- d. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

2. Program Pengembangan Kurikulum

Kegiatan :

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan :

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan



Tabel 2.26
Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program

No	Sasaran	Indikator Sasaran	No	Strategi	Indikator Strategi	No	Kebijakan	Indikator Kebijakan	No	Program	Indikator Program
1	Meningkatnya Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	1	Terwujudnya aksesibilitas siswa PAUD	Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan Rombongan Belajar	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan Rombongan Belajar
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	2	Terwujudnya aksesibilitas siswa SD	Rasio siswa SD terhadap ketersediaan Ruang Kelas			Rasio siswa SD terhadap ketersediaan ruang kelas
						3	Meningkatnya aksesibilitas siswa SMP Negeri	Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar			Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar
		2	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kese-taraan	4			Terimplementasi Kurikulum Pendidikan			Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi
						Cakupan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar	2		Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar	
					Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan			Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan			
					5			Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	3



Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa untuk mencapai sasaran kota meningkatnya Pendidikan Masyarakat dengan indikator sasaran harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah kota Bandung memiliki dua strategi yaitu meningkatnya aksesibilitas Pendidikan dengan meningkatnya APK PAUD dan Pendidikan Dasar serta APM Pendidikan Dasar dan terwujudnya mutu pembelajaran dengan meningkatkan angka kelulusan pendidikan dasar dan kesetaraan. Untuk meningkatkan indicator startegi tersebut, Dinas Pendidikan melaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Harapan Lama Sekolah terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

- Ketersediaan sarana, prasarana dan bangku sekolah yang mencukupi
- Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD dan SMP
- Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten
- Terimplementasinya Kurikulum Pendidikan yang memenuhi standar

Faktor Penghambat :

- Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik
- Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak

Solusi :

- Dilakukan Pendataan Anak Tidak Sekolah ke tiap wilayah di Kota Bandung
- Pendayagunaan penilik dan pengawas dalam pendataan sekolah yang belum terdata dalam dapodik

Intervensi Dinas Pendidikan dalam mendukung Capaian Harapan Lama Sekolah didukung melalui 3 program dan 7 kegiatan total pagu anggaran sebesar Rp 850.486.562.397 dan realisasi sebesar 806.518.692.950 atau penyerapan sebesar 94,83% dengan rincian sebagai berikut:

Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Dinas Pendidikan	807.486.562.397	850.486.562.397	806.518.692.950	94,83%
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	805.618.993.917	848.618.993.917	804.812.806.950	94,84%
1.01.02.2.03 Pengelo- laan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	57.071.147.090	57.071.147.090	51.602.938.333	90,42%
1.01.02.2.03.01 Pem- angunan Gedung/Ru- ang Kelas/Ruang Guru PAUD	116.897.975	116.897.975	116.286.417	99,48%
1.01.02.2.03.02 Pemba- ngunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	778.958.699	778.958.699	763.886.806	98,07%
1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	65.408.748	65.408.748	64.602.000	98,77%
1.01.02.2.03.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	17.760.000	17.760.000	17.760.000	100,00%
1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	515.311.062	515.311.062	511.359.720	99,23%
1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	428.654.200	428.654.200	259.623.740	60,57%
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	82.228.356	82.228.356	78.810.000	95,84%
1.01.02.2.03.13 Penyeleng- garaan Proses Belajar PAUD	984.210.000	984.210.000	888.211.350	90,25%
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manaje- men PAUD	498.090.000	498.090.000	473.963.400	95,16%
1.01.02.2.03.18 Pengelo- laan Dana BOP PAUD	27.468.200.000	27.468.200.000	26.678.262.000	97,12%
1.01.02.2.03.19 Peningka- tan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	441.152.000	441.152.000	427.417.000	96,89%
1.01.02.2.03.25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	67.080.000	67.080.000	66.180.000	98,66%
1.01.02.2.03.26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	661.237.000	661.237.000	604.018.000	91,35%
1.01.02.2.03.15 Penyedi- aan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	22.459.920.000	22.459.920.000	18.484.440.000	82,30%
1.01.02.2.03.16 Pengem- bangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.191.511.650	1.191.511.650	1.066.615.500	89,52%
1.01.02.2.03.27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasi- tas Bidang Pendidikan	1.294.527.400	1.294.527.400	1.101.502.400	85,09%

Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Peruba- han (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.01.02.2.04 Pengelo- laan Pendidikan Non- formal/Kesetaraan	24.742.816.706	24.742.816.706	24.325.269.802	98,31%
1.01.02.2.04.02 Pamban- gunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non- formal/Kesetaraan	1.751.247.500	1.751.247.500	1.704.700.972	97,34%
1.01.02.2.04.05 Pemeli- haraan Rutin Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	211.690.680	211.690.680	211.090.680	99,72%
1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Keseta- raan	99.542.400	99.542.400	91.457.650	91,88%
1.01.02.2.04.12 Penyeleng- garaan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	469.073.296	469.073.296	389.995.500	83,14%
1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evalu- asi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	293.792.000	293.792.000	288.567.000	98,22%
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manaje- men Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	496.840.830	496.840.830	463.853.000	93,36%
1.01.02.2.04.17 Pengelo- laan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	21.169.580.000	21.169.580.000	20.995.175.000	99,18%
1.01.02.2.04.18 Peningka- tan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonfor- mal/Kesetaraan	238.200.000	238.200.000	180.430.000	75,75%
1.01.02.2.04.22 Penyeleng- garaan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Keseta- raan	12.850.000	12.850.000		0,00%
1.01.02.2.01 Pengelo- laan Pendidikan Sekolah Dasar	370.022.143.511	384.022.143.511	367.697.619.267	95,75%
1.01.02.2.01.02 Penamba- han Ruang Kelas Baru	22.345.318.000	22.345.318.000	19.161.073.859	85,75%
1.01.02.2.01.04 Pamban- gunan Ruang Unit Keseha- tan Sekolah	262.362.000	262.362.000	173.364.945	66,08%
1.01.02.2.01.05 Pem- bangunan Perpustakaan Sekolah	225.083.000	225.083.000	181.877.189	80,80%
1.01.02.2.01.06 Pamban- gunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.808.995.560	5.808.995.560	5.305.050.742	91,32%
1.01.02.2.01.08 Rehabili- tasi Sedang/Berat Ruang Kelas	27.761.618.000	27.761.618.000	26.181.208.109	94,31%

Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Peruba- han (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.01.02.2.01.09 Rehabili- tasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	617.976.000	617.976.000	471.272.819	76,26%
1.01.02.2.01.10 Rehabili- tasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	54.102.000	54.102.000	53.276.761	98,47%
1.01.02.2.01.11 Rehabili- tasi Sedang/Berat Perpus- takaan Sekolah	135.050.000	135.050.000	133.188.901	98,62%
1.01.02.2.01.12 Rehabili- tasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.495.769.458	2.495.769.458	2.212.114.609	88,63%
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	24.047.205.600	24.047.205.600	22.880.798.000	95,15%
1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	12.833.752.000	26.833.752.000	26.556.255.400	98,97%
1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	-		#DIV/0!
1.01.02.2.01.21 Penyedi- aan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.585.600.000	6.585.600.000	6.530.720.000	99,17%
1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.375.000.000	2.375.000.000	1.639.643.000	69,04%
1.01.02.2.01.23 Penyeleng- garaan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	493.823.300	493.823.300	487.323.250	98,68%
1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	283.088.000	283.088.000	274.618.000	97,01%
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativi- tas Siswa	694.547.600	694.547.600	664.807.600	95,72%
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manaje- men Sekolah	528.528.500	528.528.500	527.325.000	99,77%
1.01.02.2.01.29 Pengelo- laan Dana BOS Sekolah Dasar	189.830.484.594	189.830.484.594	189.830.219.006	100,00%
1.01.02.2.01.30 Peningka- tan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	288.800.000	288.800.000	281.000.000	97,30%
1.01.02.2.01.31 Pem- angunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.967.008.000	1.967.008.000	1.849.247.927	94,01%
1.01.02.2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	304.375.000	304.375.000	294.290.250	96,69%
1.01.02.2.01.39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.109.436.500	1.109.436.500	1.069.175.000	96,37%

Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Peruba- han (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.01.02.2.01.26 Penyedi- aan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	65.708.400.000	65.708.400.000	58.560.600.000	89,12%
1.01.02.2.01.27 Pengem- bangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	371.460.000	371.460.000	348.180.000	93,73%
1.01.02.2.01.35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	265.210.800	265.210.800	157.050.000	59,22%
1.01.02.2.01.40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasi- tas Bidang Pendidikan	2.629.149.599	2.629.149.599	1.873.938.900	71,28%
1.01.02.2.02 Pen- gelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	353.782.886.610	382.782.886.610	361.186.979.548	94,36%
1.01.02.2.02.01 Pembana- gunan Unit Sekolah Baru (USB)	29.558.291.847	29.558.291.847	22.970.438.578	77,71%
1.01.02.2.02.02 Penamba- han Ruang Kelas Baru	24.776.017.895	24.776.017.895	24.210.112.410	97,72%
1.01.02.2.02.04 Pembana- gunan Ruang Unit Keseha- tan Sekolah	802.785.200	802.785.200	789.721.173	98,37%
1.01.02.2.02.06 Pembana- gunan Laboratorium	1.837.134.000	1.837.134.000	1.681.604.973	91,53%
1.01.02.2.02.12 Pembana- gunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.192.089.229	5.192.089.229	5.024.205.608	96,77%
1.01.02.2.02.14 Rehabili- tasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.529.570.000	5.529.570.000	4.675.735.992	84,56%
1.01.02.2.02.15 Rehabili- tasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	401.654.500	401.654.500	399.154.075	99,38%
1.01.02.2.02.16 Rehabili- tasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	80.349.100	80.349.100	78.739.243	98,00%
1.01.02.2.02.17 Rehabili- tasi Sedang/Berat Perpus- takaan Sekolah	327.955.800	327.955.800	326.679.373	99,61%
1.01.02.2.02.18 Rehabili- tasi Sedang/Berat Labora- torium	249.764.823	249.764.823	233.556.935	93,51%
1.01.02.2.02.24 Rehabili- tasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	521.207.300	521.207.300	511.626.059	98,16%
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	44.499.032.909	44.499.032.909	43.863.282.391	98,57%

Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Peruba- han (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	59.277.859.960	88.277.859.960	86.888.439.000	98,43%
1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	-	-	#DIV/0!
1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.146.340.659	9.146.340.659	9.086.473.163	99,35%
1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	14.418.000.000	14.418.000.000	14.258.400.000	98,89%
1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	125.000.000	125.000.000	86.497.000	69,20%
1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	484.600.000	484.600.000	477.850.000	98,61%
1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	488.450.000	488.450.000	486.100.000	99,52%
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	846.992.000	846.992.000	832.103.025	98,24%
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	774.160.000	774.160.000	764.905.000	98,80%
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	111.812.452.688	111.812.452.688	111.665.438.851	99,87%
1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	275.000.000	275.000.000	270.898.250	98,51%
1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	382.800.000	382.800.000	380.932.049	99,51%
1.01.02.2.02.51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	96.400.000	96.400.000	96.400.000	100,00%
1.01.02.2.02.52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	102.440.000	102.440.000	102.375.000	99,94%
1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	38.539.200.000	38.539.200.000	29.105.100.000	75,52%
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	905.985.000	905.985.000	729.125.000	80,48%

Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Peruba- han (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.01.02.2.02.48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	90.771.600	90.771.600	37.800.000	41,64%
1.01.02.2.02.53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasi- tas Bidang Pendidikan	2.240.582.100	2.240.582.100	1.153.286.400	51,47%
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURI- KULUM	673.805.000	673.805.000	669.028.000	99,29%
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	449.300.000	449.300.000	444.525.000	98,94%
1.01.03.2.01.01 Penyus- sunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	267.600.000	267.600.000	264.025.000	98,66%
1.01.03.2.01.01 Penyus- sunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	181.700.000	181.700.000	180.500.000	99,34%
1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendi- kan Nonformal	224.505.000	224.505.000	224.503.000	100,00%
1.01.03.2.02.01 Penyus- sunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pen- didikan Nonformal	109.013.000	109.013.000	109.012.000	100,00%
1.01.03.2.02.02 Penyusu- nan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	115.492.000	115.492.000	115.491.000	100,00%
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.193.763.480	1.193.763.480	1.036.858.000	86,86%
1.01.04.2.01 Pemer- ataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendi- kan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.193.763.480	1.193.763.480	1.036.858.000	86,86%
1.01.04.2.01.01 Perhi- tungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pen- didikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.193.763.480	1.193.763.480	1.036.858.000	86,86%



2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

BADAN PUSAT STATISTIK			
	Brandis	Rencana Tertit	Produk
	Layanan	Informasi Publik	
Majalengka	7,49	7,52	
Sumedang	8,72	8,73	
Indramayu	6,83	6,84	
Subang	7,2	7,45	
Purwakarta	8,11	8,13	
Karawang	7,96	8,04	
Bekasi	9,53	9,57	
Bandung Barat	8,22	8,23	
Pengandaran	8,03	8,04	
Kota Bogor	10,63	10,64	
Kota Sukabumi	10,34	10,37	
Kota Bandung	11	11,00	
Kota Cirebon	10,33	10,37	
Kota Bekasi	11,44	11,66	
Kota Depok	11,47	11,58	
Kota Cimahi	11,21	11,39	
Kota Tasikmalaya	9,53	9,54	
Kota Banjar	8,78	8,79	
JAWA TENGAH	7,93	8,01	

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Gambar 2.4
Pembelajaran Angklung



Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$MYS = \frac{1}{P15+} \sum_{i=1}^{P15+} xi$$

Keterangan:

MYS: Rata-rata lama sekolah

P15+ : Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas

Xi: Lama sekolah penduduk ke i

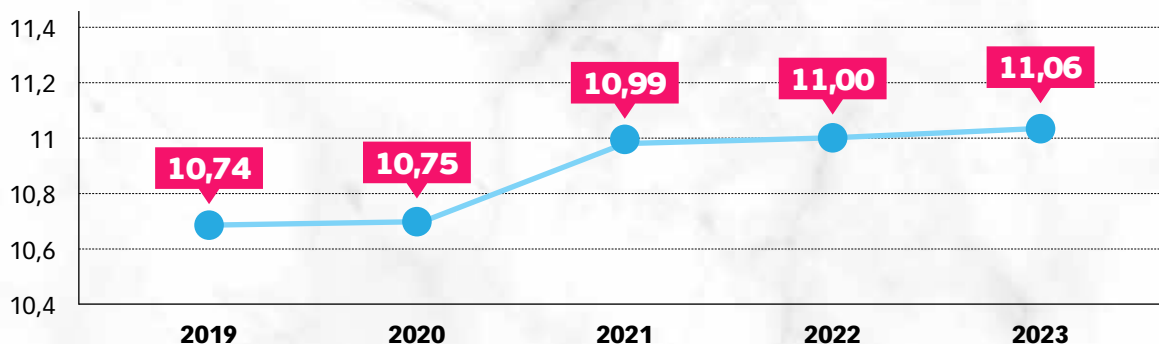
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menunjukkan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bandung mencapai 11.00 tahun, naik 0,01 tahun dibandingkan tahun 2020.



Capaian kinerja indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 yaitu dari target 10.78 tahun tercapai melebihi target yaitu 11.06 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 102.60%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 11,00 tahun mengalami peningkatan sebesar 0.06 tahun. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 10.78 maka capaian kerjanya 102.60%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian RLS Kota Bogor tahun 2023 sebesar 10,64 tahun. Dengan semakin tingginya RLS maka pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan upaya agar anak-anak yang saat ini sedang bersekolah SD/MI dan SMP/MTs dapat mengikuti proses pendidikan selanjutnya.

Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah diukur oleh Badan Pusat Statistika (BPS) dan terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Berikut grafik perkembangan capaian Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun 2019 sampai dengan 2021:

Grafik 2.5
Perkembangan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah



Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja indikator Rata-Rata Lama Sekolah adalah :

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- c. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- d. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

2. Program Pengembangan Kurikulum

Kegiatan :

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan :

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan



Tabel 2.27
Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program

No	Sasaran	Indikator Sasaran	No	Strategi	Indikator Strategi	No	Kebijakan	Indikator Kebijakan	No	Program	Indikator Program
1	Meningkatnya Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	1	Terwujudnya aksesibilitas siswa PAUD	Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan Rombongan Belajar	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan Rombongan Belajar
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	2	Terwujudnya aksesibilitas siswa SD	Rasio siswa SD terhadap ketersediaan Ruang Kelas			Rasio siswa SD terhadap ketersediaan Ruang Kelas
						3	Meningkatnya aksesibilitas siswa SMP Negeri	Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar			Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar
			Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi	Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi							
		2	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kese-taraan	4	Terimplementasi Kurikulum Pendidikan	Cakupan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar		Cakupan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar		
							Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan	2	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan	
					5	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	



Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa untuk mencapai sasaran kota meningkatnya Pendidikan Masyarakat dengan indicator sasaran harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah kota Bandung memiliki dua strategi yaitu meningkatnya aksesibilitas Pendidikan dengan meningkatnya APK PAUD dan Pendidikan Dasar serta APM Pendidikan Dasar dan terwujudnya mutu pembelajaran dengan meningkatkan angka kelulusan pendidikan dasar dan kesetaraan. Untuk meningkatkan indicator startegi tersebut, Dinas Pendidikan melaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Rata-rata Lama Sekolah terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

- Ketersediaan sarana, prasarana dan bangku sekolah yang mencukupi
- Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD dan SMP
- Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten
- Terimplementasinya Kurikulum Pendidikan yang memenuhi standar

Faktor Penghambat :

- Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik
- Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak

Solusi :

- Dilakukan Pendataan Anak Tidak Sekolah di tiap wilayah Kota Bandung
- Pendayagunaan penilik dan pengawas dalam pendataan sekolah yang belum terdata dalam dapodik

Intervensi Dinas Pendidikan dalam mendukung Capaian Harapan Lama Sekolah didukung melalui 3 program dan 7 kegiatan total pagu anggaran sebesar Rp850.486.562.397 dan realisasi sebesar 806.518.692.950 atau penyerapan sebesar 94,83% dengan rincian sebagai berikut:

Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Dinas Pendidikan	807.486.562.397	850.486.562.397	806.518.692.950	94,83%
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	805.618.993.917	848.618.993.917	804.812.806.950	94,84%
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	57.071.147.090	57.071.147.090	51.602.938.333	90,42%
1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	116.897.975	116.897.975	116.286.417	99,48%
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	778.958.699	778.958.699	763.886.806	98,07%
1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	65.408.748	65.408.748	64.602.000	98,77%
1.01.02.2.03.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	17.760.000	17.760.000	17.760.000	100,00%
1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	515.311.062	515.311.062	511.359.720	99,23%
1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	428.654.200	428.654.200	259.623.740	60,57%
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	82.228.356	82.228.356	78.810.000	95,84%
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	984.210.000	984.210.000	888.211.350	90,25%
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	498.090.000	498.090.000	473.963.400	95,16%
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	27.468.200.000	27.468.200.000	26.678.262.000	97,12%
1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	441.152.000	441.152.000	427.417.000	96,89%
1.01.02.2.03.25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	67.080.000	67.080.000	66.180.000	98,66%
1.01.02.2.03.26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	661.237.000	661.237.000	604.018.000	91,35%
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	22.459.920.000	22.459.920.000	18.484.440.000	82,30%
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.191.511.650	1.191.511.650	1.066.615.500	89,52%
1.01.02.2.03.27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.294.527.400	1.294.527.400	1.101.502.400	85,09%

Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.01.02.2.04 Pengelo- laan Pendidikan Non- formal/Kesetaraan	24.742.816.706	24.742.816.706	24.325.269.802	98,31%
1.01.02.2.04.02 Peman- gungan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non- formal/Kesetaraan	1.751.247.500	1.751.247.500	1.704.700.972	97,34%
1.01.02.2.04.05 Pemeli- haraan Rutin Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	211.690.680	211.690.680	211.090.680	99,72%
1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Keseta- raan	99.542.400	99.542.400	91.457.650	91,88%
1.01.02.2.04.12 Penyeleng- garaan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	469.073.296	469.073.296	389.995.500	83,14%
1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evalu- asi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	293.792.000	293.792.000	288.567.000	98,22%
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manaje- men Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	496.840.830	496.840.830	463.853.000	93,36%
1.01.02.2.04.17 Pengelo- laan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	21.169.580.000	21.169.580.000	20.995.175.000	99,18%
1.01.02.2.04.18 Peningka- tan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonfor- mal/Kesetaraan	238.200.000	238.200.000	180.430.000	75,75%
1.01.02.2.04.22 Penyeleng- garaan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Keseta- raan	12.850.000	12.850.000		0,00%
1.01.02.2.01 Pengelo- laan Pendidikan Sekolah Dasar	370.022.143.511	384.022.143.511	367.697.619.267	95,75%
1.01.02.2.01.02 Penamba- han Ruang Kelas Baru	22.345.318.000	22.345.318.000	19.161.073.859	85,75%
1.01.02.2.01.04 Peman- gungan Ruang Unit Keseha- tan Sekolah	262.362.000	262.362.000	173.364.945	66,08%
1.01.02.2.01.05 Pem- bangunan Perpustakaan Sekolah	225.083.000	225.083.000	181.877.189	80,80%
1.01.02.2.01.06 Peman- gungan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.808.995.560	5.808.995.560	5.305.050.742	91,32%
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	27.761.618.000	27.761.618.000	26.181.208.109	94,31%

Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	617.976.000	617.976.000	471.272.819	76,26%
1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	54.102.000	54.102.000	53.276.761	98,47%
1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	135.050.000	135.050.000	133.188.901	98,62%
1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.495.769.458	2.495.769.458	2.212.114.609	88,63%
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	24.047.205.600	24.047.205.600	22.880.798.000	95,15%
1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	12.833.752.000	26.833.752.000	26.556.255.400	98,97%
1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	-		#DIV/0!
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.585.600.000	6.585.600.000	6.530.720.000	99,17%
1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.375.000.000	2.375.000.000	1.639.643.000	69,04%
1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	493.823.300	493.823.300	487.323.250	98,68%
1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	283.088.000	283.088.000	274.618.000	97,01%
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	694.547.600	694.547.600	664.807.600	95,72%
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	528.528.500	528.528.500	527.325.000	99,77%
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	189.830.484.594	189.830.484.594	189.830.219.006	100,00%
1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	288.800.000	288.800.000	281.000.000	97,30%
1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.967.008.000	1.967.008.000	1.849.247.927	94,01%
1.01.02.2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	304.375.000	304.375.000	294.290.250	96,69%
1.01.02.2.01.39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.109.436.500	1.109.436.500	1.069.175.000	96,37%

Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	65.708.400.000	65.708.400.000	58.560.600.000	89,12%
1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	371.460.000	371.460.000	348.180.000	93,73%
1.01.02.2.01.35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	265.210.800	265.210.800	157.050.000	59,22%
1.01.02.2.01.40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.629.149.599	2.629.149.599	1.873.938.900	71,28%
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	353.782.886.610	382.782.886.610	361.186.979.548	94,36%
1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	29.558.291.847	29.558.291.847	22.970.438.578	77,71%
1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	24.776.017.895	24.776.017.895	24.210.112.410	97,72%
1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	802.785.200	802.785.200	789.721.173	98,37%
1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	1.837.134.000	1.837.134.000	1.681.604.973	91,53%
1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.192.089.229	5.192.089.229	5.024.205.608	96,77%
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.529.570.000	5.529.570.000	4.675.735.992	84,56%
1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	401.654.500	401.654.500	399.154.075	99,38%
1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	80.349.100	80.349.100	78.739.243	98,00%
1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	327.955.800	327.955.800	326.679.373	99,61%
1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	249.764.823	249.764.823	233.556.935	93,51%
1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	521.207.300	521.207.300	511.626.059	98,16%
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	44.499.032.909	44.499.032.909	43.863.282.391	98,57%
1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	59.277.859.960	88.277.859.960	86.888.439.000	98,43%

Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	-	-	#DIV/0!
1.01.02.2.02.30 Pemeli- haraan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.146.340.659	9.146.340.659	9.086.473.163	99,35%
1.01.02.2.02.32 Penyedi- aan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	14.418.000.000	14.418.000.000	14.258.400.000	98,89%
1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	125.000.000	125.000.000	86.497.000	69,20%
1.01.02.2.02.36 Penyeleng- garaan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	484.600.000	484.600.000	477.850.000	98,61%
1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	488.450.000	488.450.000	486.100.000	99,52%
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativi- tas Siswa	846.992.000	846.992.000	832.103.025	98,24%
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manaje- men Sekolah	774.160.000	774.160.000	764.905.000	98,80%
1.01.02.2.02.42 Pengelo- laan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	111.812.452.688	111.812.452.688	111.665.438.851	99,87%
1.01.02.2.02.43 Peningka- tan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menen- gah Pertama	275.000.000	275.000.000	270.898.250	98,51%
1.01.02.2.02.44 Rehabilita- si Sedang/Berat Ruang TU	382.800.000	382.800.000	380.932.049	99,51%
1.01.02.2.02.51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	96.400.000	96.400.000	96.400.000	100,00%
1.01.02.2.02.52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	102.440.000	102.440.000	102.375.000	99,94%
1.01.02.2.02.39 Penyedi- aan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Me- nengah Pertama	38.539.200.000	38.539.200.000	29.105.100.000	75,52%
1.01.02.2.02.40 Pengem- bangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	905.985.000	905.985.000	729.125.000	80,48%
1.01.02.2.02.48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	90.771.600	90.771.600	37.800.000	41,64%

Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.01.02.2.02.53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.240.582.100	2.240.582.100	1.153.286.400	51,47%
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	673.805.000	673.805.000	669.028.000	99,29%
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	449.300.000	449.300.000	444.525.000	98,94%
1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	267.600.000	267.600.000	264.025.000	98,66%
1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	181.700.000	181.700.000	180.500.000	99,34%
1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	224.505.000	224.505.000	224.503.000	100,00%
1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	109.013.000	109.013.000	109.012.000	100,00%
1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	115.492.000	115.492.000	115.491.000	100,00%
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.193.763.480	1.193.763.480	1.036.858.000	86,86%
1.01.04.2.01 Pemertaaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.193.763.480	1.193.763.480	1.036.858.000	86,86%
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.193.763.480	1.193.763.480	1.036.858.000	86,86%

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Sasarannya berupa Umur Harapan Hidup. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ke 5 atau tahun terakhir RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Umur Harapan Hidup	73,9	74,14	100,32	73,92	74,28	100,48	73,94	74,46	100,70
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		100,32			100,49			100,70		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Umur Harapan Hidup	73,96	74,75	101,07	74,98	75,04	100,08
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		101,07			100,08		

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dapat dilihat dari indikator sebagai berikut, yaitu :

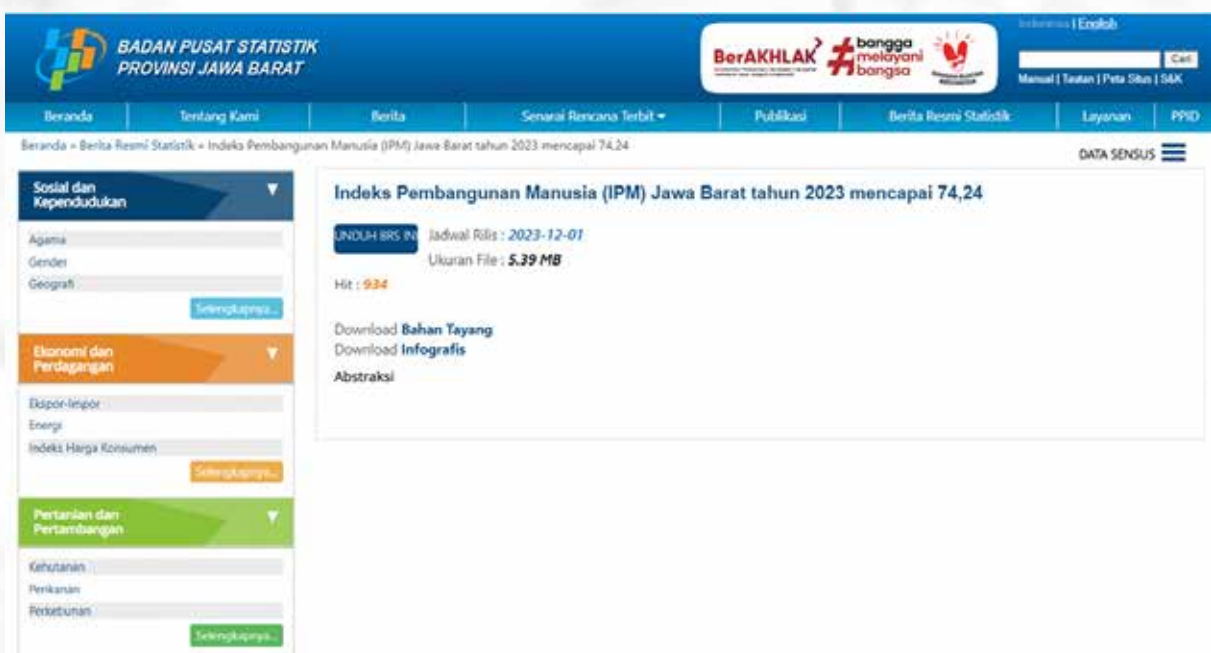
Capaian indikator kinerja “Umur Harapan Hidup” yaitu dari target tahun 2023 yaitu 75,04 tercapai melebihi target yaitu 74,98 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100,08. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2022 sebesar 74,75 mengalami peningkatan sebesar 0,29. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 74,98 tahun maka capaian kerjanya 100,08%. Realisasi UHH Kota Bandung pada Tahun 2023 yaitu 75,04 telah melebihi realisasi UHH Provinsi Jawa Barat yaitu 73,80 . Kota Bandung menempati urutan ketiga capaian UHH tertinggi setelah Kota Bekasi dengan 75.79 dan Kota Depok dengan 75.23.





1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Cara menghitung Umur Harapan hidup menggunakan Serangkaian Age specific rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian. Umur Harapan Hidup dijadikan indikator sasaran dan Indikator Kinerja pada Misi I RPJMD karena UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



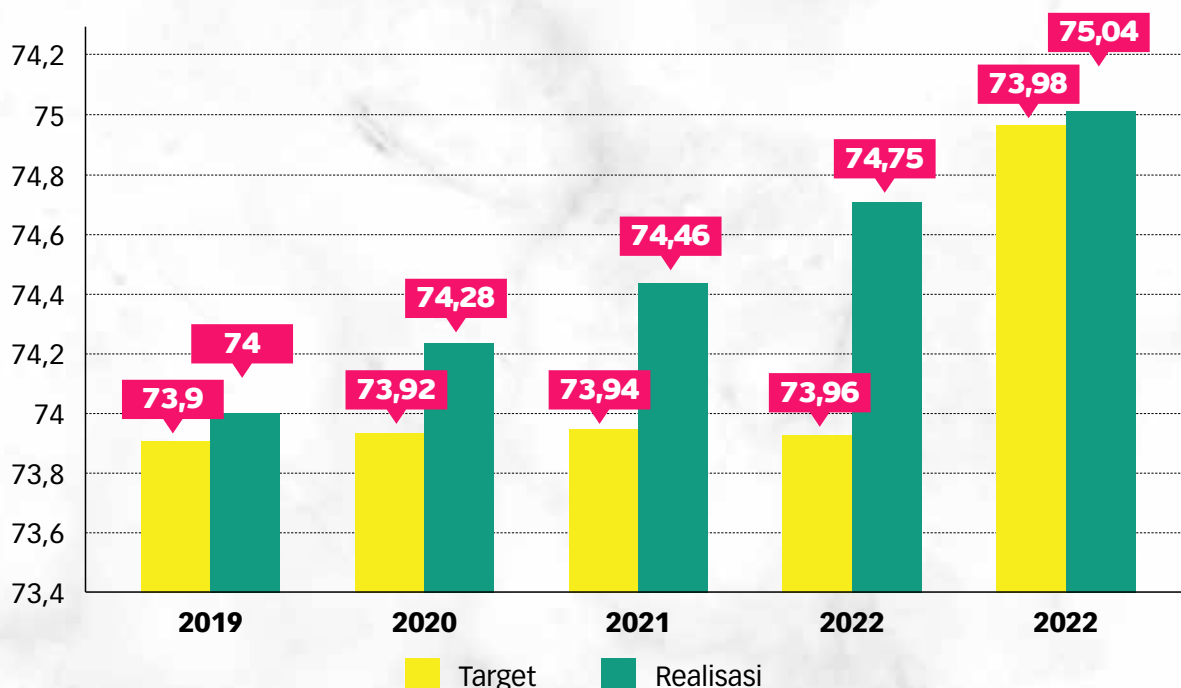
The screenshot shows the website of Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. The main headline reads: "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat tahun 2023 mencapai 74,24". Below this, it states "Jadwalkan Rilis: 2023-12-01" and "Ukuran File: 5.39 MB". There are links to download "Bahan Tayang", "Infografis", and "Abstraksi". The left sidebar contains navigation links for "Sosial dan Kependudukan", "Ekonomi dan Perdagangan", "Pertanian dan Pertambangan", and "Kesehatan".

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Barat

Provinsi	UHH (SP2010) (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengekasan RAI per Kapita (ribu rupiah)		IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Bogor	71,65	71,92	12,50	12,64	8,34	8,37	10,860	11,153	71,20	71,78
Sukabumi	71,54	71,83	12,25	12,38	7,11	7,33	9,210	9,482	67,64	68,49
Cianjur	70,58	70,79	12,01	12,03	7,20	7,22	8,244	8,626	65,94	66,55
Bandung	74,01	74,27	12,71	12,73	9,08	9,10	10,588	11,018	73,16	73,74
Garut	71,85	72,07	12,15	12,16	7,83	7,84	8,227	8,685	67,41	68,11
Tasikmalaya	69,95	70,19	12,59	12,63	7,73	7,96	8,177	8,562	66,84	67,76
Ciamis	72,30	72,57	14,28	14,29	8,00	8,09	9,428	9,750	71,45	72,05
Kuningan	74,03	74,29	12,24	12,26	7,88	7,89	9,620	10,011	70,16	70,72
Cirebon	72,47	72,76	12,28	12,41	7,40	7,64	10,791	11,128	70,06	70,95
Majalengka	70,76	71,05	12,24	12,26	7,49	7,52	9,950	10,340	68,56	69,13
Sumedang	72,91	73,19	12,99	13,01	8,72	8,73	10,776	11,136	72,69	73,18
Indramayu	72,15	72,46	12,27	12,29	6,83	6,94	10,166	10,580	68,55	69,25
Subang	72,92	73,24	11,78	11,91	7,20	7,45	11,294	11,537	69,87	70,70
Purwakarta	71,47	71,74	12,13	12,18	8,11	8,13	12,193	12,619	71,56	72,09
Karawang	72,62	72,90	12,19	12,20	7,96	8,04	11,927	12,392	71,74	72,35
Bekasi	74,04	74,30	13,11	13,17	9,53	9,57	11,757	12,123	75,22	75,76
Bandung Barat	72,79	73,10	11,89	11,91	8,22	8,23	9,044	9,392	69,04	69,61
Pangandaran	71,89	72,17	12,11	12,30	8,03	8,04	9,389	9,406	69,03	69,38
Kota Bogor	74,13	74,45	13,43	13,45	10,63	10,64	12,058	12,656	77,17	77,85
Kota Sukabumi	72,85	73,11	13,59	13,60	10,14	10,37	11,229	11,799	75,40	76,32
Kota Bandung	74,75	75,04	14,23	14,24	11,00	11,06	17,639	18,236	82,50	83,04
Kota Cirebon	72,74	73,08	13,14	13,16	10,33	10,37	12,087	12,506	75,89	76,46
Kota Bekasi	75,48	75,79	14,11	14,12	11,44	11,66	16,239	16,479	82,46	83,03
Kota Depok	74,92	75,23	13,94	13,96	11,47	11,58	15,926	16,279	81,86	82,38
Kota Cimahi	74,50	74,80	13,82	13,84	11,21	11,39	12,500	12,883	78,77	79,46
Kota Tasikmalaya	72,63	72,92	13,47	13,49	9,53	9,54	10,578	11,063	73,83	74,47
Kota Banjar	71,49	71,80	13,25	13,27	8,78	8,79	10,967	11,356	72,55	73,08
Jawa Barat	73,52	73,80	12,62	12,66	8,78	8,83	11,277	11,695	73,12	73,74

UHH 75.04 mempunyai interpretasi bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 75.04 tahun. Realisasi UHH dibandingkan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini dapat terlihat secara lebih jelas pada grafik sebagai berikut :

Grafik 2.6
Realisasi UHH Kota Bandung Tahun 2019-2023



Sumber: Data Olahan Substansi Program Data dan Informasi Tahun 2024

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 sampai dengan tahun 2023 . UHH mengalami peningkatan . Peningkatan pada tahun 2023 adalah sebesar 0.29. Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian Sasaran 1 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana telah direncanakan dalam Target akhir RPJMD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.29
Pencapaian Indikator Sasaran 1
Dibandingkan Target Akhir RPJMD Kota Bandung
Tahun 2023

NO	INDIKATOR KIN- ERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TAHUN 2023	RENCANA SESUAI DENGAN RPJMD TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESEN- JANGAN
1	Umur Harapan Hidup	%	75.04	74.98	100.08	0.06

Sumber: Data Olahan Substansi Program Data dan Informasi Tahun 2024



Jika dilihat dari tabel diatas maka pencapaian Sasaran 1 sampai dengan tahun 2023 telah melebihi Target akhir RPJMD yang ditetapkan. Perbandingan capaian indikator kinerja UHH Kota Bandung dengan Kabupaten Kota di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.30
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2023

No	Wilayah Jawa Barat	Angka Harapan Hidup				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Provinsi Jawa Barat	72.85	73.04	73.23	73.52	73.80
1	Bogor	71.01	71.17	71.36	71.65	71.92
2	Sukabumi	70.73	70.97	71.21	71.54	71.83
3	Cianjur	69.91	70.13	70.32	70.58	70.79
4	Bandung	73.4	73.53	73.72	74.01	74.27
5	Garut	71.22	71.41	71.59	71.85	72.07
6	Tasikmalaya	69.21	69.47	69.67	69.95	70.19
7	Ciamis	71.57	71.83	72.02	72.3	72.57
8	Kuningan	73.35	73.59	73.78	74.03	74.29
9	Cirebon	71.82	71.99	72.18	72.47	72.76
10	Majalengka	69.97	70.27	70.46	70.76	71.05
11	Sumedang	72.29	72.43	72.62	72.91	73.19
12	Indramayu	71.37	71.63	71.84	72.15	72.46
13	Subang	72.13	72.35	72.58	72.92	73.24
14	Purwakarta	70.8	70.99	71.18	71.47	71.74
15	Karawang	71.98	72.15	72.33	72.62	72.90
16	Bekasi	73.56	73.68	73.81	74.04	74.30
17	Bandung Barat	72.18	72.34	72.52	72.79	73.10
18	Pangandaran	71.12	71.4	71.6	71.89	72.17
19	Kota Bogor	73.41	73.61	73.82	74.13	74.45
20	Kota Sukabumi	72.26	72.42	72.58	72.85	73.11
21	Kota Bandung	74.14	74.28	74.46	74.75	75.04
22	Kota Cirebon	72.13	72.26	72.44	72.74	73.08
23	Kota Bekasi	74.89	75.01	75.19	75.48	75.79
24	Kota Depok	74.31	74.44	74.62	74.92	75.23
25	Kota Cimahi	73.89	74.03	74.21	74.5	74.80
26	Kota Tasikmalaya	71.93	72.15	72.34	72.63	72.92
27	Kota Banjar	70.79	70.99	71.19	71.49	71.80

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 75/12/32/Th.XXV. 1 Desember 2023

Dari table di atas dapat dilihat bahwa realisasi UHH Kota Bandung pada Tahun 2023 (75.04) telah melebihi realisasi UHH Provinsi Jawa Barat (73.80) . Kota Bandung menempati urutan ketiga capaian UHH tertinggi setelah Kota Bekasi (75.79) dan Kota Depok (75.23).

Faktor pendorong tercapainya AHH dari bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan. hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kota Bandung . Pada Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki :
 - a. 3 RS milik Pemerintah yaitu RSKIA, RSUD, RSKGM dan 41 RS Milik Swasta
 - b. 82 UPT terdiri dari 80 UPT Puskesmas yang tersebar di 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan, 1 UPT P2KT dan 1 UPT Laboratorium Kesehatan



2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan. hal ini dapat dilihat dari tercapainya indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2023 . pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran dengan menggunakan 7 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023. Dari 7 indikator diperoleh 3 indikator (42.86%) melebihi/melampaui target, 2 indikator (28.57%) sesuai target, dan 2 indikator (28.57%) tidak mencapai target.

Adapun faktor pendorong tercapai dan terlampauinya pencapaian indikator tersebut di atas adalah :

A. **Angka Kematian Ibu** . faktor yang mendorong tercapainya target adalah:

- Perbaikan kualitas layanan kesehatan bagi ibu melalui penambahan jumlah Fasyankes, pemenuhan sarana prasarana di Fasyankes dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).
- Optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan melalui pemanfaatan aplikasi MPDN serta pelaksanaan audit kematian ibu secara berjenjang, mulai dari Fasyankes hingga tingkat Kota untuk menghasilkan rekomendasi pencegahan kematian berikutnya.
- Peningkatan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam perawatan kehamilan dan pencegahan komplikasi pada ibu.
- Pelibatan lintas sektor selain urusan kesehatan melalui Keputusan Walikota Nomor 440/Kep.1001-Dinkes/2021 tentang Tim Penyelamat Ibu dan Bayi sebagai upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menggalang dukungan dan partisipasi semua pihak untuk menurunkan kematian Ibu dan Bayi

B. **Cakupan Rumah Sehat**. faktor yang mendorong tercapainya target adalah:

- Masyarakat secara mandiri melakukan perbaikan sarana rumahnya.
- Kolaborasi lintas sektor melalui Kelompok Kerja perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dalam mendukung koordinasi dan sinkronisasi urusan perumahan dan Kawasan permukiman.

- c. Adanya perbaikan melalui kegiatan “bedah rumah” melalui anggaran PIPPK, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), serta anggaran Dana Alokasi Khusus (DAU) Kelurahan. Kegiatan “bedah rumah” juga dilakukan dengan bantuan pihak swasta.
- d. Terjadinya peningkatan akses terhadap sanitasi dasar yang tinggi pada tahun 2023. Dimana Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk menghilangkan sumber pencemaran dari limbah, yaitu dengan meningkatkan akses terhadap sanitasi dasar yang layak. Kondisi Open Defecation Free (ODF) untuk semua Kelurahan yang ada di Kota Bandung. Akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar yang layak merupakan salah satu komponen penilaian rumah sehat.
- e. Terjadinya peningkatan akses terhadap air minum yang aman. Seperti halnya sanitasi dasar, akses terhadap air minum yang aman juga merupakan salah satu faktor determinan rumah sehat.

C. Persentase balita gizi buruk. faktor yang mendorong tercapainya target adalah:

- a. Sistem surveilans gizi melalui aplikasi e-PPGBM, sehingga setiap penemuan kasus gizi buruk dapat langsung dilakukan penanganan intervensi sesuai standar berupa pemberian makanan tambahan (PMT) Pemulihan maupun peningkatan pemahaman ibu dan keluarga mengenai pengasuhan serta asupan gizi seimbang melalui konseling terintegrasi.
- b. Keberadaan kader posyandu yang aktif di tiap wilayah menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya target dimana para kader di Kota Bandung mempunyai wadah organisasi khusus berupa FORKAGI (Forum Komunikasi Kader Gizi). Kader FORKAGI ini merupakan kader khusus yang telah dilatih untuk membantu tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan serta penemuan kasus masalah gizi di wilayahnya.
- c. Kolaborasi serta dukungan dari lintas sektor dan kewilayahan dalam penanganan permasalahan gizi buruk di Kota Bandung.
- d. Edukasi dan promosi kesehatan terkait gizi yang diberikan oleh tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan dapat lebih mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan pemantauan kesehatan dan status gizi balita secara rutin.



D. Cakupan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

- a. Dukungan kebijakan dan peraturan perundangan baik pusat maupun daerah dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- b. Adanya Sumber Daya Manusia yang terlatih, mendapat orientasi terkait penguatan program dan tatalaksana pencegahan dan pengendalian penyakit
- c. Terdapat dukungan anggaran bersumber dana: APBN (Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun non Fisik), APBD Kota Bandung dan dana bantuan dari Mitra Pembangunan (WHO, Global Fund)
- d. Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan melalui Aplikasi Terpadu
- e. Kerjasama lintas program termasuk dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta dalam implementasi program
- f. Penguatan promosi kesehatan, sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan serta pelibatan masyarakat

E. Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kategori Baik

- a. Persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya sudah sesuai dengan yang ada di puskesmas
- b. Pemahaman tentang Kemudahan prosedur pelayanan disetiap unit sudah dimengerti oleh pasien
- c. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan sudah sesuai standar
- d. Biaya/ tarif dalam pelayanan sudah sesuai dengan Perda Kota Bandung
- e. Kesesuaian jenis pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan
- f. Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan tupoksi
- g. Sikap petugas dalam memberikan pelayanan sudah bagus dan dan pelaksanaan 5S (Senyum, sapa, salam, sopan dan santun) sudah diterapkan
- h. Penanganan pengaduan selalu ditindaklanjuti
- i. Sarana dan prasarana sudah memadai



2. Analisis Data dan Informasi

A. Formulasi Pengukuran

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Angka harapan Hidup dihitung oleh BPS berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian.

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia. Ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk.



3. Realisasi Anggaran Program Kegiatan

Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.31
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.144.544.551.905.00	928.001.362.602.00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.144.544.551.905.00	928.001.362.602.00	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.144.544.551.905.00	928.001.362.602.00	81.08
I	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000.00	418.313.345.00	83.66
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	289.492.000.00	208.206.040.00	71.92
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.508.000.00	210.107.305.00	99.81
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	462.444.699.443.00	433.728.748.945.00	93.79
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	461.418.677.489.00	432.786.675.225.00	93.79
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	276.021.954.00	267.673.720.00	96.98
3	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	750.000.000.00	674.400.000.00	89.92
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.107.619.050.00	1.101.796.860.00	99.47
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	115.318.100.00	113.387.610.00	98.33
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	346.929.550.00	343.752.335.00	99.08
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	370.121.400.00	369.975.700.00	-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.250.000.00	274.681.215.00	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.166.958.000.00	1.143.200.000.00	-
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.164.000.000.00	1.143.200.000.00	-
2	Pengadaan Mebel	-	-	-
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.958.000.00	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.265.368.750.00	31.056.363.206.00	96.25
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	8.317.680.000.00	8.049.517.752.00	96.78
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.947.688.750.00	23.006.845.454.00	96.07
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.355.472.866.00	10.424.538.786.00	91.80
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.555.472.866.00	1.452.419.940.00	93.37
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.800.000.000.00	8.972.118.846.00	91.55
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
VIII	Peningkatan Pelayanan BLUD	635.704.433.796.00	450.128.401.460.00	70.81
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	635.704.433.796.00	450.128.401.460.00	70.81
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	515.638.387.120.00	430.706.997.127.74	83.53
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	515.638.387.120.00	430.706.997.127.74	83.53
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	497.348.755.363.00	413.294.690.488.74	83.10
I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	124.572.896.623.00	105.172.530.677.00	84.43
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	-	-
2	Pembangunan Puskesmas	61.976.206.802.00	48.209.724.477.00	77.79
3	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	-	-
5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.479.237.083.00	19.008.343.196.00	92.82
7	Pengadaan Obat. Vaksin	16.594.916.442.00	16.446.201.362.00	99.10
8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	13.905.330.709.00	11.285.402.757.00	81.16
9	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.645.745.000.00	5.543.707.681.00	98.19

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
10	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.924.660.587.00	4.637.501.204.00	78.27
11	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. BMHP. Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	46.800.000.00	41.650.000.00	89.00
II	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	365.854.175.542.00	301.366.976.278.74	82.37
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.570.941.516.00	1.740.895.885.00	12.83
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	24.500.000.00	24.448.750.00	99.79
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	64.492.000.00	47.945.640.00	74.34
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	814.828.000.00	197.187.500.00	24.20
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.386.396.000.00	463.173.000.00	33.41
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	588.369.000.00	227.848.000.00	38.73
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	551.150.000.00	321.539.500.00	58.34
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	63.400.000.00	63.400.000.00	100.00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.529.467.000.00	2.427.525.100.00	95.97
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	234.515.500.00	131.284.000.00	55.98
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.418.172.439.00	400.554.000.00	11.72
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.740.418.000.00	2.259.949.771.00	82.47
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	12.687.500.00	-	-
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	369.931.387.00	-	-
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16.407.711.000.00	15.355.521.826.00	93.59
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	869.184.000.00	415.542.300.00	47.81
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	756.124.000.00	417.225.450.00	55.18
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	612.914.000.00	368.962.967.00	60.20
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100.000.000.00	98.467.500.00	98.47
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	518.268.000.00	145.547.000.00	28.08

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	36.000.000.00	32.800.000.00	91.11
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	308.024.000.00	93.500.000.00	30.35
23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	162.700.000.00	157.250.000.00	96.65
24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.942.651.561.00	1.778.313.900.00	45.10
25	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	292.354.710.502.00	261.618.081.000.00	89.49
26	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	20.664.000.00	20.664.000.00	100.00
27	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/ Nasional	109.794.000.00	8.030.000.00	7.31
28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	43.135.000.00	30.282.765.00	70.20
29	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	200.000.000.00	186.149.799.00	93.07
30	Operasional Pelayanan Puskesmas	11.795.902.978.00	1.875.591.660.74	15.90
31	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.627.501.159.00	8.366.399.310.00	96.97
32	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	256.390.000.00	158.196.051.00	61.70
33	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	153.951.000.00	26.150.000.00	16.99
34	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	-	-
35	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.875.000.000.00	1.786.999.604.00	95.31
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	334.282.000.00	121.550.000.00	36.36
III	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.950.000.000.00	1.889.180.536.00	96.88
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	379.676.400.00	379.606.018.00	99.98
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-
3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1.570.323.600.00	1.509.574.518.00	96.13
IV	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.971.683.198.00	4.866.002.997.00	97.87
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	73.170.000.00	68.825.650.00	94.06
2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.353.610.000.00	4.350.323.000.00	99.92
3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	544.903.198.00	446.854.347.00	82.01
4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	15.981.558.437.00	15.399.185.311.00	96.36
I	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-	-	-
II	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	13.809.505.688.00	13.304.322.261.00	96.34
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.000.000.00	30.000.000.00	100.00
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	13.723.046.000.00	13.223.262.261.00	96.36
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	56.459.688.00	51.060.000.00	90.44
III	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.172.052.749.00	2.094.863.050.00	96.45
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.172.052.749.00	2.094.863.050.00	96.45
D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	134.171.000.00	90.666.500.00	67.58
I	Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	53.235.000.00	47.688.500.00	89.58
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	19.540.000.00	17.606.000.00	90.10
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawaasn Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-
3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	33.695.000.00	30.082.500.00	89.28
II	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	51.620.000.00	42.978.000.00	83.26

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	51.620.000.00	42.978.000.00	83.26
III	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	29.316.000.00	-	-
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	29.316.000.00		-
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.173.902.320.00	1.922.454.828.00	88.43
I	Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.138.936.349.00	1.128.977.878.00	99.13
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.138.936.349.00	1.128.977.878.00	99.13
II	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-
III	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.034.965.971.00	793.476.950.00	76.67
1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.034.965.971.00	793.476.950.00	76.67
JUMLAH		1.660.182.939.025.00	1.358.708.359.729.74	81.84

Sumber: Subag Keuangan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2023

Dari table di atas dapat dilihat bahwa Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat didukung oleh Program sebanyak 5 (Lima) dan 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan serta 93 (sembilan puluh tiga) yang jika dirinci per unit ada 2162 (Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua) subkegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja. Adapun anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.660.182.939.025.00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, anggaran pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp30.256.840.400.00 dari anggaran semula di Tahun 2022 sebesar Rp1.690.439.779.425.

Sasaran 3 : Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis

Meningkatnya Masyarakat Kota Yang Humanis. Sasarannya berupa Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ke 5 atau tahun terakhir RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	7,58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,6	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		N/A			N/A			N/A		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	6,70	7,05	105,22	6,80	7,50	110,29
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		105,22			110,29		



Sasaran Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis dapat dilihat dari indikator sebagai berikut, yaitu :

Capaian indikator kinerja “Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya” dari target tahun 2023 yaitu 6,80 dengan realiasi yaitu 7.50 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 110.29%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,05 mengalami kenaikan 0,45.



1. Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya

Kota adalah sebuah ekosistem yang harus selalu dikelola dan dilindungi layaknya ekosistem lainnya. Apalagi, tantangan kehidupan di perkotaan saat ini semakin besar, dengan tekanan urbanisasi yang tidak dapat dihindari, tuntutan dalam mewujudkan elemen-elemen lingkungan yang berkualitas serta isu perubahan iklim. Pada umumnya, semakin tinggi aktivitas yang terjadi di perkotaan, akan menimbulkan penurunan tingkat kenyamanan, seperti pencemaran lingkungan yang meningkat, buruknya sanitasi dan air bersih serta meluasnya lahan perumahan yang sempit dan kumuh.

Kota Bandung yang menjalankan prinsip-prinsip dalam Smart City, yaitu bagaimana sebuah kota mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Kota yang nyaman sebagai tempat beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lain-lain) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lain-lain) merupakan cita-cita bersama di Kota Bandung. Kreativitas dan aktivitas warganya yang didukung dengan ruangruang yang nyaman menciptakan sebuah interaksi dan keselarasan dalam kehidupan perkotaan.

Untuk mengenali tingkat kenyamanan kota, perlu diukur persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayakhunian kota tempat tinggalnya. Pengukuran ini telah dilakukan melalui Most Livable city Index yang diukur melalui survei yang sifatnya “snapshot”. Indeks ini merupakan pionir indeks yang berbasiskan pada survei dan persepsi warga kota terhadap kotanya, yang diharapkan dapat menjadi benchmark terkait kualitas kehidupan di kota-kota di Indonesia.

Tindak lanjut dari Livable city Index (LCI) ini adalah dapat dimanfaatkan bagi stakeholders dalam proses perencanaan dan pembangunan kota. Keuntungan dari indeks ini adalah sederhana, aktual, dan bersifat snapshot. Karena merupakan persepsi

warga kota terhadap kota tempat tinggalnya masing-masing, maka keberadaan indeks ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pemeringkatan “kota yang lebih baik”. Indeks ini lebih dimaksudkan mengukur kualitas kehidupan warga kota. Dengan indeks ini, maka identifikasi awal faktor-faktor kritis pembangunan pada masing-masing kota (Identifying the Hotspot) berdasarkan persepsi dan impresi warganya dapat diketahui secara cepat dan aktual dengan lingkup wilayah sampai tingkat Kecamatan.

Adapun 7 indikator dari ketercapaian Bandung Nyaman adalah:

- (1) Persentase RTH;
- (2) Lama Genangan yang tertangani pada titik genangan;
- (3) Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan;
- (4) Persentase Luasan Kawasan Kumuh;
- (5) Cakupan layanan air bersih;
- (6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- (7) Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota.



Sehubungan dengan terbitnya Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 mengamanatkan bagi Bupati/Wali Kota yang habis masa jabatannya tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, maka selain mengacu pada RPJMD, dalam beberapa aspek ada pendalaman yang perlu dilakukan dengan indikator- indikator yang terdapat dalam RPD Kota Bandung 2024-2026.

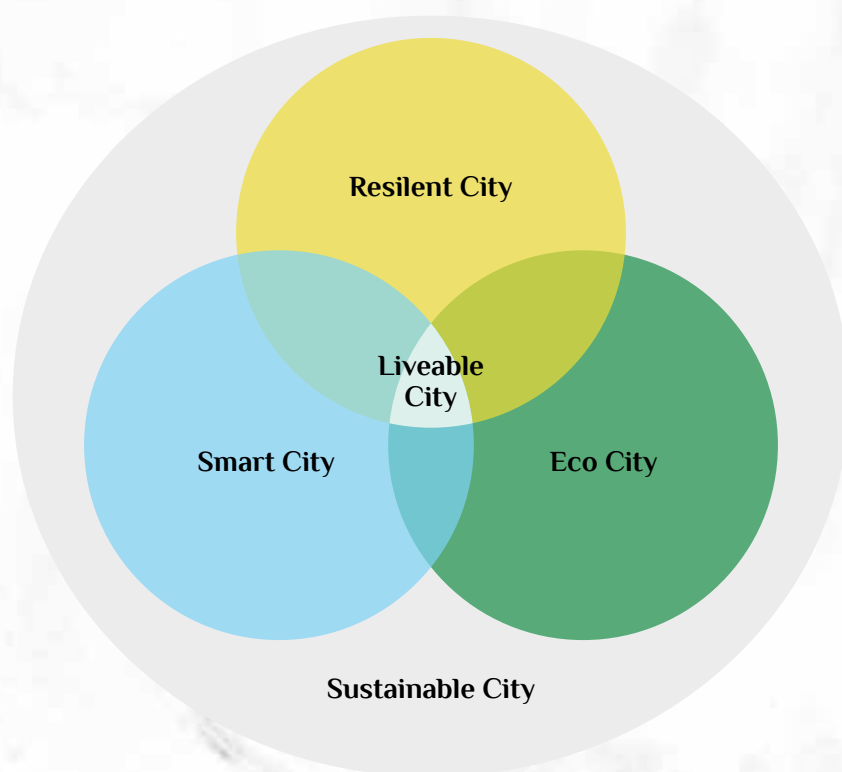
Berdasarkan tinjauan terhadap konsep-konsep kota yang ada, disimpulkan bahwa konsep livable city adalah irisan dari konsep-konsep lain seperti smart city, resilient city, dan eco-city. Ada sejumlah aspek dari konsep-konsep tersebut yang berkaitan dengan substansi dari livable city, namun ada juga yang tidak. Konsep eco-city, misalnya, menekankan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan melebihi dari kenyamanan atau kemudahan penduduk dalam mengonsumsi sumberdaya. Aspek-aspek tersebut yang terdapat di luar irisan konsep livable city dengan eco-city.

Lebih jauh, ciri utama dari konsep livable city adalah sifatnya anthropocentric atau berorientasi pada manusia. Artinya, mengukur livability dari sebuah kota harus mempertimbangkan aspek preferensi atau opini dari manusia yang menempatinnya. Selain itu, orientasi pada opini manusia juga dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi mengutamakan kenyamanan manusia melebihi aspek lain seperti keberlanjutan lingkungan, kekuatan politik pemerintah, atau ketersediaan teknologi.

Konsep yang melingkupi konsep-konsep yang disebut di atas adalah sustainable city yang menilai kualitas kota secara komprehensif. Livable city Index lebih sempit dibandingkan sustainable city karena sifatnya yang lebih berorientasi pada manusia.

Gambar berikut menunjukkan keterkaitan antara konsep livable city dengan konsep-konsep lainnya.

Grafik 2.7
Keterkaitan Konsep-Konsep Kota



Pada akhir tahun 2019 terjadi pandemi COVID-19, akibatnya terjadi perubahan yang signifikan dari keberjalanan kehidupan sehari-hari yang awalnya berjalan secara bebas namun kala terjadi pandemi dilakukan lockdown dan penjagaan jarak. Dalam The Global Liveability Index 2022: Recovery and hardship, selama dua tahun terakhir selama pandemic COVID-19, peringkat kelayakan hidup global EIU sebagian besar didorong oleh pandemi COVID-19, dengan lockdown dan penjagaan jarak yang memengaruhi skor untuk budaya, pendidikan, dan perawatan kesehatan di kota-kota di seluruh dunia. Namun setelah pembatasan telah dicabut di banyak negara terjadi pemulihan.

Di tengah pergeseran status COVID-19 dari pandemi ke endemi dan peningkatan tingkat vaksinasi global, skor kelayakan hidup rata-rata global telah pulih. Skor sekarang berdiri di 73,6 (dari 100), naik dari 69,1 tahun lalu; Ini masih lebih rendah dari rata-rata 75,9 yang dilaporkan sebelum pandemi. Dari lima kategori, peningkatan utama selama setahun terakhir adalah budaya dan lingkungan, pendidikan, dan perawatan kesehatan, yang semuanya sangat terpengaruh oleh lockdown. Skor untuk infrastruktur tetap stabil



secara luas, sementara stabilitas telah memburuk. Namun, meskipun pandemi telah surut, ancaman baru terhadap kelayakan hidup muncul ketika Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, terjadi pembatasan budaya dan lingkungan sebagai akibat dari sanksi ekonomi Barat. Dengan perang menghambat ekspor energi dan pangan Rusia dan Ukraina yang memperburuk inflasi global dan meredam pertumbuhan global. Sepuluh besar peringkat kami tetap didominasi oleh kota-kota Eropa barat, bersama dengan beberapa dari Kanada. Sepuluh kota teratas juga termasuk di antara kota-kota dengan sedikit pembatasan COVID. Toko-toko, restoran, dan museum telah dibuka kembali, seperti halnya sekolah, dan rawat inap yang disebabkan pandemi telah menurun, yang menyebabkan berkurangnya tekanan pada sumber daya dan layanan kesehatan, dan bahkan persyaratan untuk memakai masker tidak lagi berlaku di sebagian besar situasi. Secara umum, kota-kota menengah di negara-negara terkaya cenderung berjalan sangat baik. Pandemi terus mendorong pergerakan terbesar. Bagi negara dengan pembatasan COVID akibat gelombang delta atau yang lebih menular, berpengaruh pada penurunan nilai skor.

Penentuan target tahunan mempertimbangkan baseline data, dukungan sumber daya, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas penanganan masalah pembangunan daerah dalam misi 4. Tujuan dan sasaran pembangunan kota akan dicapai dengan dukungan dari seluruh perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah akan berkontribusi dalam pencapaian sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dukungan tersebut merupakan bentuk dari faktor penentu keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis. Tujuan keempat Meningkatkan Kelayakhunian Kota, dengan sasaran: Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya, Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur, dan Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi. Ketiga sasaran RPD di atas dicapai secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) perangkat daerah. Faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian sasaran menjadi kinerja beberapa urusan pemerintahan daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya didukung oleh kinerja Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur didukung oleh kinerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi didukung oleh kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, ditetapkan beberapa strategi yang paling tepat dengan kondisi kota. Strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang akan memuat program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RPD Tahun 2024-2026 untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota dilakukan melalui penerapan arah kebijakan peningkatan kelayakhunian kota pada beberapa aspek berikut :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Ekonomi
- d. Ketentraman
- e. Sosial
- f. Tataruang
- g. Lingkungan
- h. Transportasi
- i. Infrastruktur-utilitas



Tabel 2.33
Sub Wilayah Kota pada RTRW Kota Bandung

No	Arah Pengembangan Wilayah	Kecamatan
1	Wilayah Bandung Timur, terdiri atas :	
a	SWK Arcamanik	1. Kecamatan Arcamanik 2. Kecamatan Mandalajati 3. Kecamatan Antapani
b	SWK Ujungberung	1. Kecamatan Ujungberung 2. Kecamatan Cibiru 3. Kecamatan Cinambo 4. Kecamatan Panyileukan
c	SWK Kordon	1. Kecamatan Bandung Kidul 2. Kecamatan Buahbatu
d	SWK Gedebage	1. Kecamatan Gedebage 2. Kecamatan Rancasari
2	Wilayah Bandung Barat, terdiri atas :	
a	SWK Bojonagara	1. Kecamatan Sukasari 2. Kecamatan Sukajadi 3. Kecamatan Cicendo 4. Kecamatan Andir
b	SWK Cibeunying	1. Kecamatan Cidadap 2. Kecamatan Coblong 3. Kecamatan Bandung Wetan 4. Kecamatan Sumur Bandung 5. Kecamatan Cibeunying Kidul 6. Kecamatan Cibeunying Kaler
c	SWK Tegallega	1. Kecamatan Bandung Kulon 2. Kecamatan Babakan Ciparay 3. Kecamatan Bojongloa Kaler 4. Kecamatan Bojongloa Kidul 5. Kecamatan Astana Anyar
d	SWK Karees	1. Kecamatan Regol 2. Kecamatan Lengkong 3. Kecamatan Kiaracondong 4. Kecamatan Batununggal

Sumber: RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2024

Dalam mengukur indeks livable city Kota Bandung tahun 2023, akan terdapat 9 aspek livable city yang dihitung, antara lain adalah tata ruang, lingkungan, transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, infrastruktur-utilitas, ekonomi, keamanan, dan sosial. Kemudian, untuk mengukur aspek tata ruang terdiri atas indikator-indikator terkait dengan ruang terbuka hijau (RTH), kebencanaan, penataan bangunan, dan kawasan kumuh. Selanjutnya, aspek lingkungan terdiri atas indikator-indikator terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persepsi kebersihan lingkungan, Persepsi kualitas udara, Jumlah taman per penduduk, dan Prevalensi Penyakit (TB dan DBD).

Untuk aspek transportasi terdiri atas Persepsi tentang kemacetan, Persepsi tentang kenyamanan berjalan kaki, dan Persepsi tentang kualitas angkutan umum. Aspek

infrastruktur utilitas terdiri atas Layanan Air Bersih, Persepsi kualitas jalan, Persepsi kualitas layanan listrik, dan Persepsi kualitas air bersih. Sedangkan untuk fasilitas Kesehatan dan Pendidikan dilihat dari persebaran fasilitas serta persepsi terhadap fasilitas tersebut. Untuk aspek ekonomi terdiri atas Tingkat Pengangguran Terbuka, Persepsi kemudahan mencari penghidupan, Persepsi keseimbangan hidup-kerja, dan Persepsi biaya hidup. Untuk aspek keamanan meliputi Persepsi keamanan dari tindak kejahatan, Persepsi keamanan dari kekerasan dan teror, dan Persepsi keamanan dari bencana buatan manusia. Terakhir, untuk aspek sosial terdiri atas Persepsi kerukunan warga dan Persepsi keaktifan di lingkungan tempat tinggal.

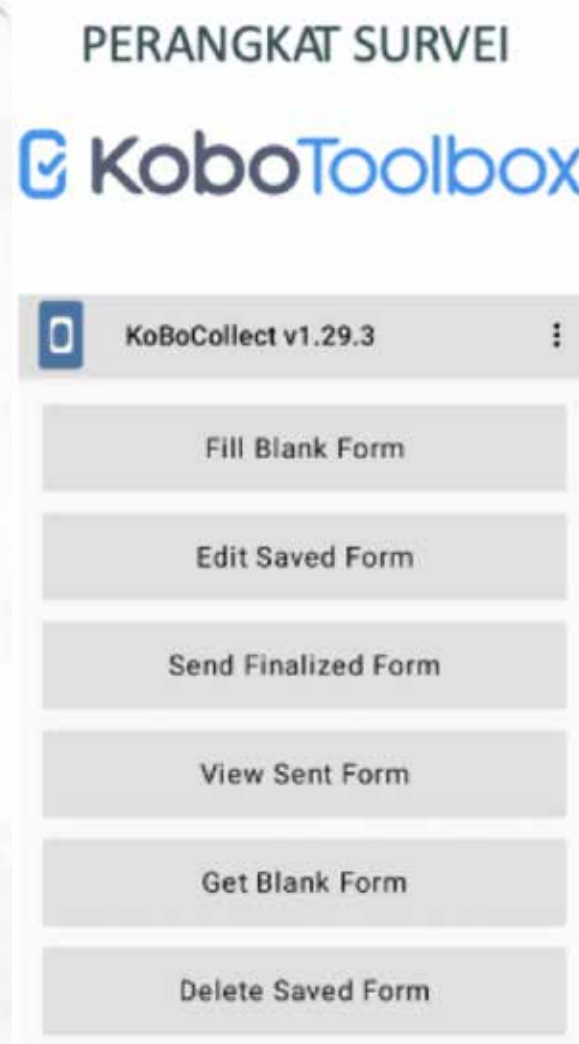
Beberapa tahapan yang akan dilakukan ketika dilaksanakannya pengumpulan data primer melalui kuesioner adalah sebagai berikut:

d. Persiapan perangkat survei

Menyusun perangkat survei secara online melalui <https://kc.kobotoolbox.org>, terdapat 6 bagian kuesioner yaitu (1) konfirmasi lokasi responden, (2) sosial ekonomi responden, (3) pendapat, (4) faktor penentu persoalan Kota Bandung, (5) pernyataan, dan (6) konfirmasi lokasi (pemetaan).

Gambar 2.5

Aplikasi Survei yang Digunakan Tahun 2023



Sumber: Hasil Analisis, 2023

e. Pembagian wilayah survey

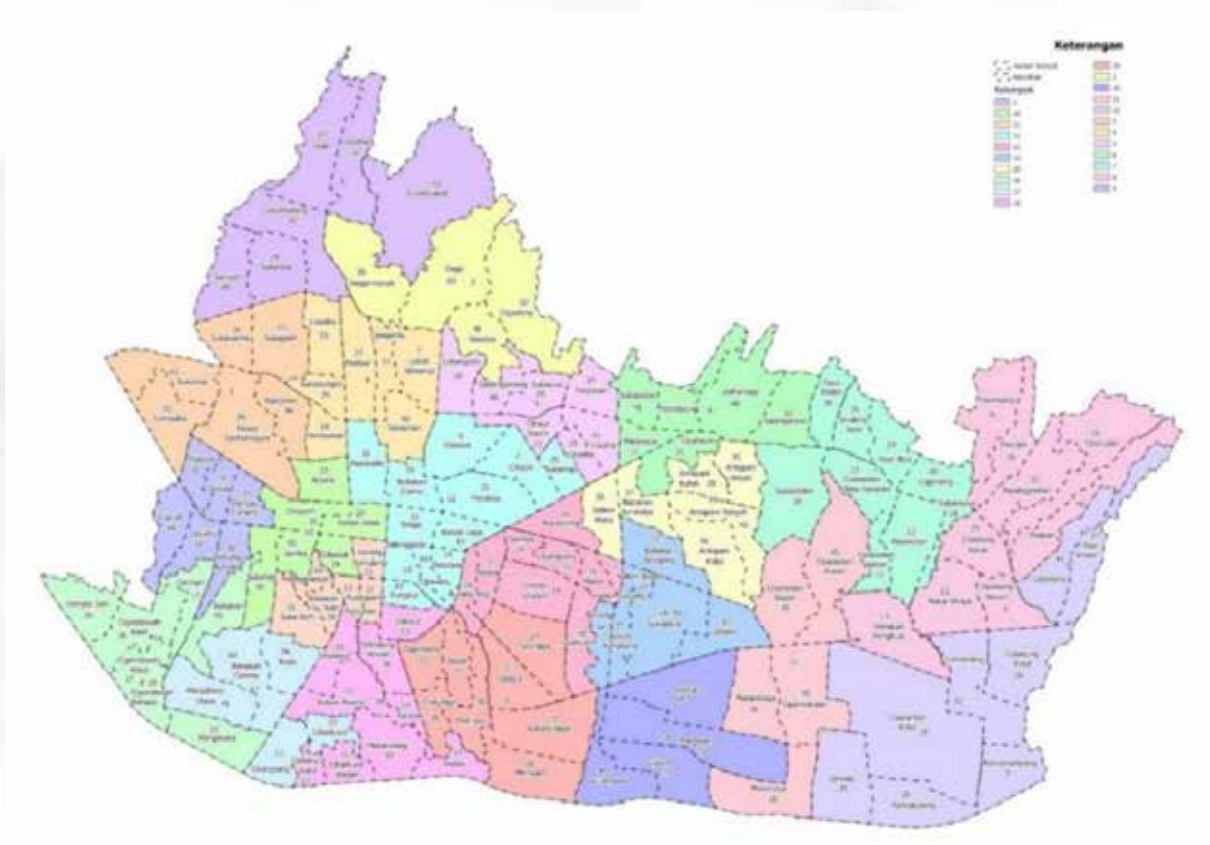
Pembagian wilayah dilakukan dengan lingkup kelurahan/desa agar memperoleh hasil pembagian kuesioner yang merata yaitu antara 200-210 kuesioner per survei.

f. Pelaksanaan pilot survey

Setiap survei menginstal aplikasi KoboCollect, lalu memasukkan user name dan password yang merujuk pada kuesioner yang telah disusun. Setelah itu, dari setiap survei mencoba untuk mengisi kuesioner dalam rangka melihat hasil pengisian kuesioner dan kekurangan perangkat kuesioner agar sebelum dilaksanakan survei dapat diperbaiki dan disempurnakan. Untuk jenis gawai yang tidak kompatibel/cocok dengan aplikasi KoboCollect maka dapat menggunakan GIC Collect maupun link berikut: <https://ee.kobotoolbox.org/single/NVXgpyHX>.

Gambar 2.6

Pembagian Wilayah Survei Menurut Kelurahan/ Desa di Kota Bandung



Sumber: Hasil Pengelolaan Data Survei, 2023

g. Pelaksanaan Survei

Dari setiap survei, mengumpulkan data dengan cara: (1) responden mengisi kuesioner online secara mandiri, maupun (2) survei membantu mengisi kuesioner berdasarkan jawaban responden. Data yang telah diperoleh dapat disimpan di gawai masing-masing respons dan dapat dilakukan pengecekan sebelum dikirimkan (bagi yang menggunakan aplikasi), sedangkan bagi survei yang melakukan survei melalui link hasil survei langsung terkirim. Perkembangan jumlah data yang masuk dapat langsung di cek pada <https://kc.kobotoolbox.org>.

h. Kompilasi Data Survei

Setelah data dikirim oleh survei, maka data-data tersebut dapat diunduh melalui <https://kc.kobotoolbox.org> dapat langsung diunduh dan dirapikan sesuai dengan kebutuhan analisis.

i. Validasi dan Perbaikan Data Survei

Pengecekan data dilakukan pada 6 bagian kuesioner yang telah disebutkan sebelumnya, apabila ada yang perlu diperbaiki maka survei melakukan perbaikan pada excel validasi. Setiap responden melakukan perbaikan sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Setelah itu dikirimkan Kembali kepada orang yang memvalidasi.

j. Finalisasi Data Survei

Pengecekan jumlah data survei sesuai dengan target yang telah diberikan menurut kelurahan dan kecamatan (target setiap survei)



Pengumpulan Data Sekunder

Beberapa tahapan yang akan dilakukan ketika dilaksanakannya pengumpulan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Perangkat Data Sekunder

Melist data yang dibutuhkan berdasarkan analisis yang digunakan dalam kajian, lalu memetakan lokasi data terhadap dinas yang ada di Kota Bandung.

2. Penyebaran Surat beserta Lampiran Data Sekunder

Kebutuhan data disebabkan sesuai dengan lokasi OPD, dan mencari kontak Pemegang data. Apabila data tidak ada di OPD tersbut maka memastikan lokasi data di OPD lainnya 3.

3. Follow-Up Data Setelah jelas OPD yang memiliki data dan kontak pemegang data, lalu dilakukan follow up secara langsung datang ke dinas maupun melalui media komunikasi jarak jauh/email.

4. Kompilasi Data Sekunder

Indikator Objektif didapatkan dari data sekunder yang telah dikumpulkan dari survei data sekunder. Data-data tersebut didapatkan dari instansi pemerintah serta dokumen-dokumen yang telah dipublikasi oleh instansi-instansi terkait. Hasil penjabaran indikator objektif . Dari penjabaran di setiap data dan sumber data tersebut, didapatkan untuk ketercapaian pengumpulan data mencapai 100%. Namun, terdapat beberapa data yang diminta belum tersedia di instansi terkait yang berwenang. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan hasil rekapitulasi ketercapaian data sekunder berdasarkan sumber data (instansi):

Tabel 2.34
Ketercapaian Data

Alokasi Kebutuhan Data	Persentase	Jumlah Data	Data Diterima
Bappelitbang	100%	23	23
DLH	100%	3	3
BPBD	100%	1	1
Disparbud	100%	1	1
Dinas Kesehatan	100%	11	11
Dinas Pendidikan	100%	5	5
Dinas Perhubungan	100%	5	5
Dinas Perumahan	100%	3	3
Polrestabes	100%	1	1
Total	100%	53	53

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 2.35
Indikator Objektif

No	Indikator	Tahun	Sumber	Jumlah	Keterangan
1	Cakupan pelayanan air bersih	2022	RPD	1	85,14 (Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2022)
2	Cakupan pelayanan air limbah domestik	2022	RPD	1	
3	Cakupan pelayanan persampahan	2022	RPD	1	98,70 (Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2022)
4	Cakupan penanganan gangguan trantibum	2022	RPD		
5	Indeks pembangunan gender	2022	RPD	1	Data didapatkan secara online
6	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	2022	RPD	1	Didapatkan dari Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2022
7	Panjang drainase dan trotoar dalam kondisi baik	2022	RPD	1	64,32% (Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2022)
8	Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	2022	RPD		
9	Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani	2022	RPD		
10	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	2022	RPD		
11	Persentase luasan kawasan kumuh	2022	RPD	1	2,32 (Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2022)
12	Persentase MBR yang menempati hunian layak	2022	RPD	1	83,09 (Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2022)
13	Persentase penanganan potensi konflik	2022	RPD		
14	Persentase pengangguran yang kompeten dan	2022	RPD		
15	Persentase penurunan titik genangan	2022	RPD	1	14,71 (Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2022)

16	Tingkat kemantapan jalan	2022	RPD	1	94,01 (Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2022)
17	Lama genangan yang tertangani	2022	RPJMD	1	Realisasi Tahun 2020 60,76 (Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2022)
18	Lokasi banjir	2022	RPJMD	1	Hanya terdapat jumlah kejadian banjir sebanyak 11 kejadian (Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2022)
19	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	2022	RPJMD		
20	Persentase luas kawasan kumuh	2022	RPJMD	1	2,32 (Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2022)
21	Persentase luas RTH	2022	RPJMD		
22	Tingkat pengangguran terbuka	2022	RPJMD	1	9,55% (Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2022)
23	Tingkat kejadian konflik sosial per penduduk	2022	RPJMD		
24	Indeks risiko bencana	2022	RPD	1	Data didapatkan secara online namun terdapat dokumen tambahan (KRB)
25	Indeks daya saing pariwisata	2022	RPD	1	3,41 (Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2022)
26	Jumlah FKTP (Puskesmas Dan Klinik Pratama) Sesuai	2022	RPD	1	
27	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	2022	RPD	1	
28	Persentase instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan	2022	RPD	1	
29	Persentase pencegahan dan penanggulangan penyakit	2022	RPD	1	
30	Persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik	2022	RPD	1	
31	Persentase unit pelayanan kesehatan milik pemerintah	2022	RPD	1	
32	Cakupan layanan fasilitas kesehatan	2022	RPJMD	1	Data yang tersedia didalam dokumen profil kesehatan berupa jumlah fasilitas kesehatan di setiap kecamatan
33	Persentase akses penduduk terhadap sanitasi dasar	2022	RPJMD	1	
34	Prevalensi penyakit (TB dan DBD)	2022	RPJMD	1	
35	Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	2022	RPJMD	1	
36	Rasio tenaga kesehatan per penduduk	2022	RPJMD	1	
37	Indeks kualitas lingkungan hidup	2022	RPJMD	1	
38	Indeks kualitas air	2022	RPD	1	
39	Indeks kualitas udara	2022	RPD	1	
	Partisipasi kasar paud	2022	RPD		Tidak ada APK PAUD karena termasuk kedalam sekolah non-formal
40	Partisipasi kasar SD	2022	RPD	1	
41	Pertisipasi kasar SMP	2022	RPD	1	

42	Cakupan layanan fasilitas pendidikan	2022	RPJMD	1	Data yang tersedia berupa jumlah rombongan belajar (kelas) perkecamatan, namun perlu updating data penduduk sesuai rentang usia sekolah untuk mendapatkan nilai persentase keterisian sekolah
43	Rasio fasilitas pendidikan per penduduk	2022	RPJMD	1	Lingkup Kecamatan
44	Jumlah fasilitas pendidikan per kelurahan	2022	RPJMD	1	Lingkup Kecamatan
45	Persentase penurunan kemacetan urusan perhubungan	2022	RPD	1	7,33 (LKIP Dishub Kota Bandung Tahun 2022)
46	Rasio pengguna angkutan umum vs angkutan pribadi	2022	RPD	1	
47	Cakupan layanan angkutan umum	2022	RPJMD	1	Data Trayek Angkutan Umum
48	Jumlah armada angkutan umum (angkot dan bus)	2022	RPD	1	
49	Penyebab kemacetan	2022	RPJMD	1	Urusan Perhubungan dan Non Perhubungan (rincian di LKIP Dishub Kota Bandung 2022)
50	Persentase RTH (kuantitas)	2022	RPD	1	
51	Jumlah taman per penduduk	2022	RPJMD	1	
52	Rasio fasilitas publik ramah difabel per penduduk	2022	RPJMD	1	Hanya berupa jumlah fasilitas taman ramah difabel, belum diolah sesuai jumlah penduduk
53	Tingkat kriminalitas	2022	RPJMD	1	BPS

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Jumlah responden yang diberikan kuesioner adalah sejumlah 4500 responden yang dibagi berdasarkan proporsi penduduk kelurahan di Kota Bandung secara merata. Berikut merupakan penjabaran jumlah responden per kecamatan yang telah dikumpulkan pada kajian ini.

Tabel 2.36
Sebaran Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal

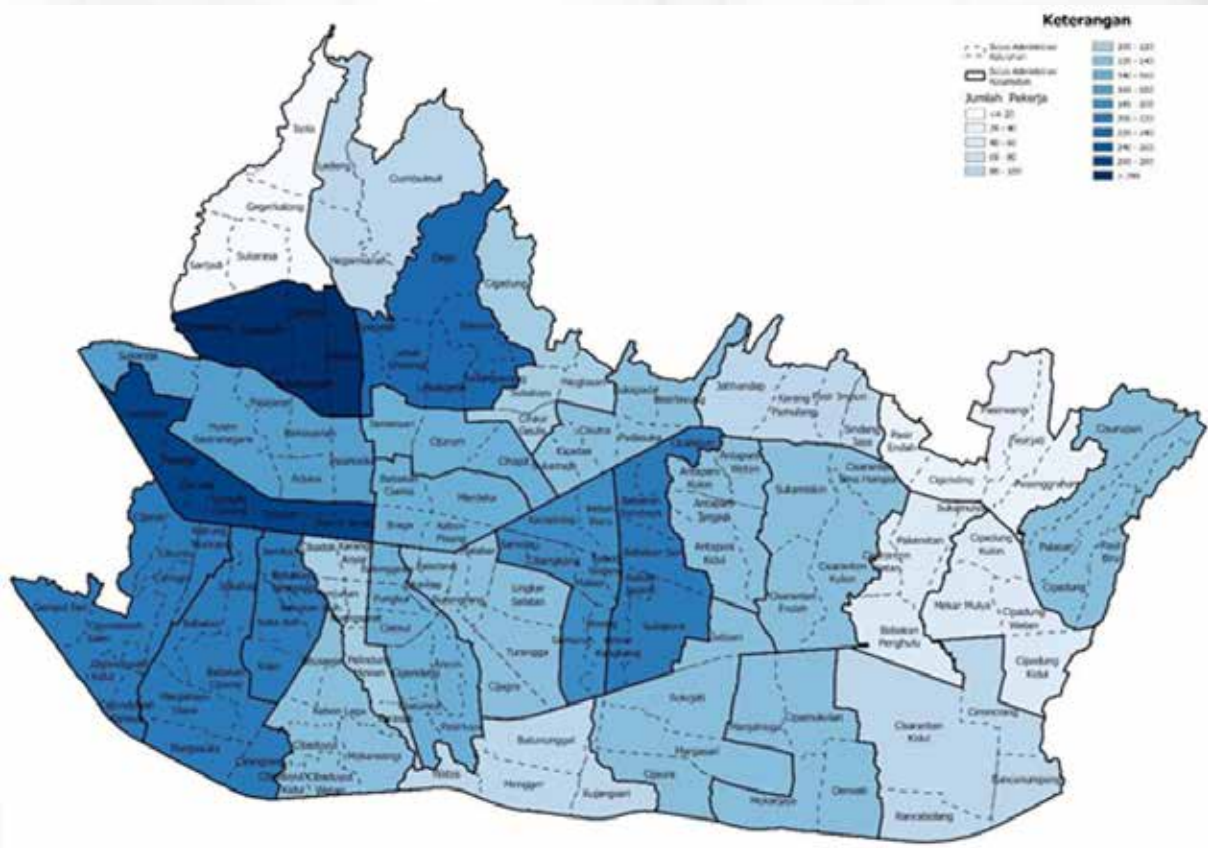
Kecamatan	Jumlah Responden (jiwa)
Andir	176
Antapani	144
Arcamanik	142
Astanaanyar	131
Babakan Ciparay	254
Bandung Kidul	110
Bandung Kulon	243
Bandung Wetan	51
Batununggal	216
Bojongloa Kaler	222
Bojongloa Kidul	156
Buahbatu	186
Cibeunying Kaler	126
Cibeunying Kidul	202
Cibiru	135
Cicendo	170
Cidadap	97
Cinambo	47
Coblong	206
Gedebage	75
Kiaracondong	234
Lengkong	126
Mandalajati	131
Panyileukan	72
Rancasari	154
Regol	143
Sukajadi	184
Sukasari	139
Sumur Bandung	68
Ujung Berung	160
Total	4500

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Persebaran Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Kerja

Setelah dilakukan survei primer dengan penyebaran kuesioner kepada masyarakat di seluruh kelurahan di Kota Bandung, didapatkan persebaran lokasi tempat kerja responden sebagai berikut:

Gambar 2.8
Sebaran Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Kerja



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan pada Gambar tersebut, dapat diketahui bahwa Kecamatan Sukajadi menjadi target terbesar lokasi bekerja bagi responden untuk bekerja di Kota Bandung. Namun, terdapat pula beberapa responden yang bekerja di luar Kota Bandung, seperti pada Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, hingga Jakarta dan Kalimantan.



Tabel 2.37
Sebaran Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Kerja

Lokasi Tempat Kerja Responden	Jumlah Responden (Jiwa)
Kota Bandung	
Dalam Kota Bandung, Namun Tidak Teridentifikasi	16
Andir	274
Antapani	123
Arcamanik	135
Astana Anyar	117
Babakan Ciparay	209
Bandung Kidul	81
Bandung Kulon	211
Bandung Wetan	150
Batununggal	186
Bojongloa Kaler	212
Bojongloa Kidul	131
Buahbatu	136
Cibeunying Kaler	116
Cibeunying Kidul	137
Cibiru	138
Cicendo	163
Cidadap	87
Cinambo	60
Coblong	225
Gedebage	87
Kiaracondong	219
Lengkong	137
Mandalajati	99
Panyileukan	47
Rancasari	112
Regol	146
Sukajadi	290
Sukasari	0
Sumur Bandung	95
Ujung Berung	154
Kota/Kabupaten Lain	
Kab. Bandung	36
Kab. Bandung Barat	3
Kab. Sumedang	8
Kalimantan Tengah	1
Kota Cimahi	21
Jakarta	2
Tidak Bekerja/Tidak Terdapat Lokasi Kerja	136
Total	4500

Sumber: Hasil Analisis, 2023



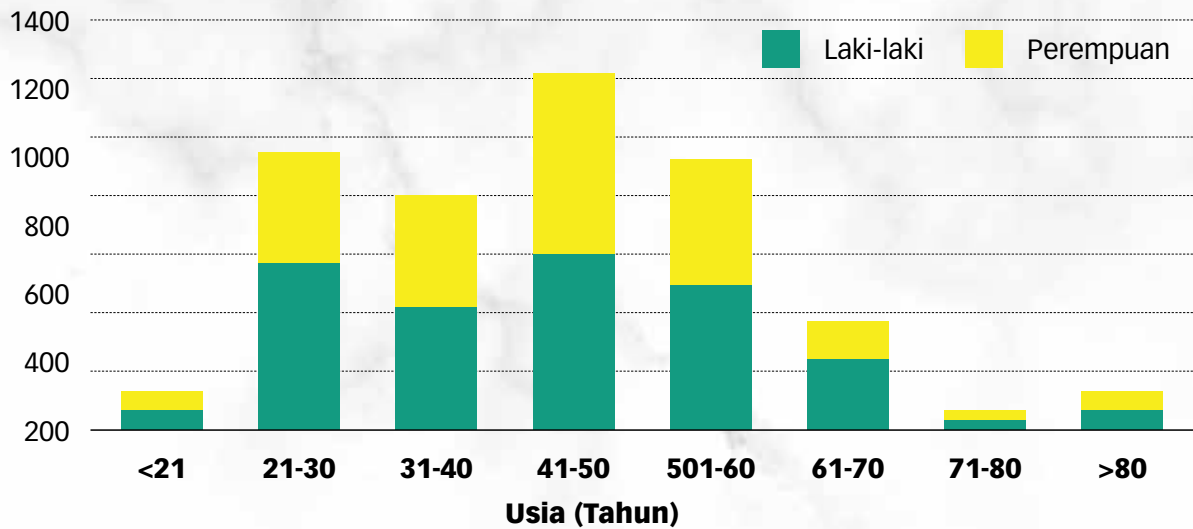
Karakteristik Sosio-Demografi Responden

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari responden, kami melakukan pengolahan dasar secara deskriptif untuk mengevaluasi karakteristik sosio-demografi dari kelompok responden yang telah disurvei. Hasil dari analisis deskriptif ini memberikan wawasan yang penting tentang komposisi dan profil masyarakat yang menjadi subjek survei. Dari pengolahan data ini, kami dapat mengidentifikasi sejumlah informasi kunci terkait dengan usia, tingkat pendidikan, lama tinggal di Kota Bandung, status perkawinan, luas bangunan dan tanah tempat tinggal, pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, serta faktor-faktor sosial ekonomi lainnya yang relevan. Data ini merupakan fondasi penting untuk merancang kebijakan yang lebih baik, memahami kebutuhan masyarakat, dan menjalankan program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

A. Usia dan Jenis Kelamin Responden

Data yang kami peroleh dari hasil kuesioner mengungkapkan bahwa mayoritas dari responden yang merupakan bagian dari masyarakat yang disurvei memiliki usia berada dalam rentang 41 hingga 50 tahun. Hasil ini mencerminkan distribusi usia yang signifikan dalam populasi yang disurvei, dan usia ini dapat dianggap sebagai salah satu karakteristik sosio-demografi yang mencolok dalam komunitas Kota Bandung. Hal ini memiliki implikasi yang penting dalam berbagai konteks, termasuk perencanaan sosial, ekonomi, dan layanan publik, karena usia responden dapat memengaruhi kebutuhan dan aspirasi mereka.

Grafik 2.8
Distribusi Responden Berdasarkan Usia



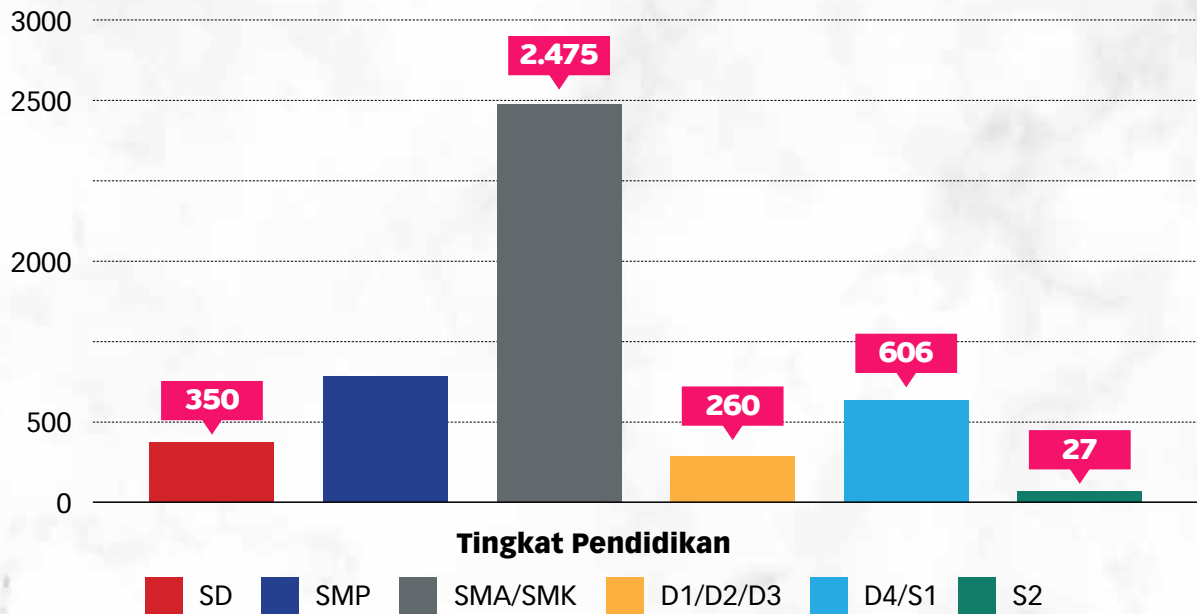
Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil dari data kuesioner yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang merupakan bagian dari masyarakat yang disurvei memiliki tingkat pendidikan terakhir setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan persentase yang signifikan mencapai 55%. Temuan ini mencerminkan profil pendidikan yang dominan dalam populasi yang disurvei di Kota Bandung. Fakta ini dapat memiliki implikasi yang penting dalam perencanaan pendidikan, pelatihan, dan upaya peningkatan kualifikasi tenaga kerja di kota ini.



Grafik 2.9
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Hasil Analisis, 2023

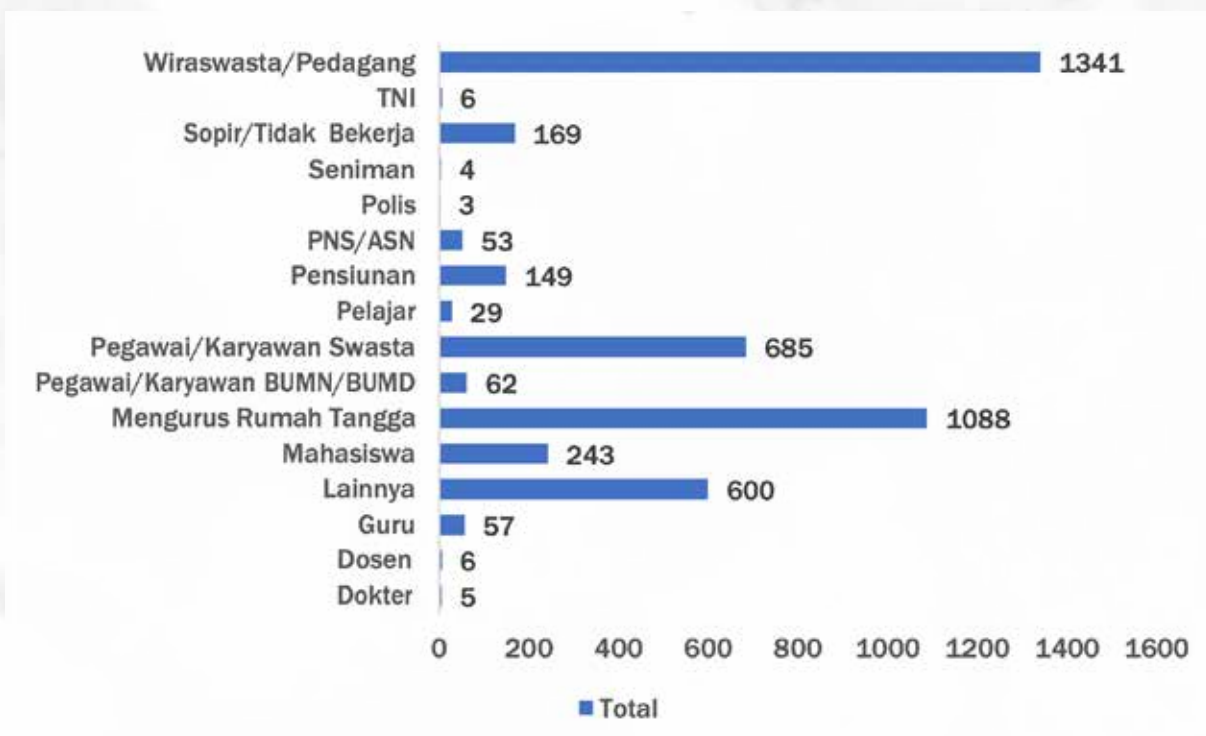


C. Pekerjaan/ Profesi

Data dari hasil kuesioner mengungkapkan bahwa mayoritas dari responden dalam masyarakat yang disurvei memiliki profesi yang bervariasi, dengan sejumlah besar responden yang bekerja sebagai wiraswasta/pedagang, mencapai 1.341 responden, dan juga sejumlah besar yang mengurus rumah tangga, sebanyak 1.088 responden. Temuan ini menunjukkan keberagaman dalam jenis pekerjaan yang ada dalam populasi Kota Bandung. Profesi wiraswasta/pedagang mencerminkan aktivitas ekonomi yang kuat dalam komunitas ini, sementara jumlah responden yang mengurus rumah tangga menyoroti pentingnya peran dalam pekerjaan rumah tangga dan pemeliharaan keluarga. Memahami keragaman dalam pekerjaan responden ini dapat menjadi dasar yang penting dalam perencanaan ekonomi, sosial, dan kebijakan untuk mendukung berbagai sektor dalam masyarakat.



Grafik 2.10
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

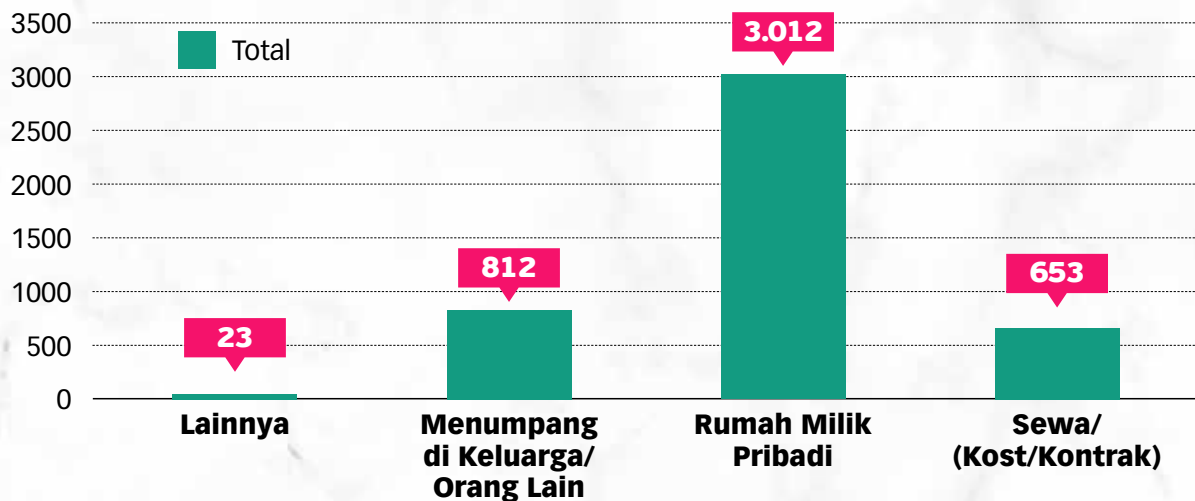


D. Status Tempat Tinggal

Data dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang merupakan bagian dari masyarakat yang disurvei memiliki status tempat tinggal sebagai pemilik rumah pribadi, dengan jumlah mencapai 3.012 responden. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan rumah pribadi adalah status tempat tinggal

yang dominan dalam populasi Kota Bandung yang disurvei. Kehadiran sejumlah besar pemilik rumah pribadi ini mencerminkan tingkat kepemilikan properti yang kuat dalam komunitas ini, yang juga dapat mencerminkan stabilitas ekonomi dan sosial di antara responden. Pentingnya status tempat tinggal ini dalam profil sosio-demografi dapat memengaruhi kebijakan perumahan, perencanaan perkotaan, dan sektor properti di Kota Bandung.

Grafik 2.11
Distribusi Responden Berdasarkan Status Tempat Tinggal



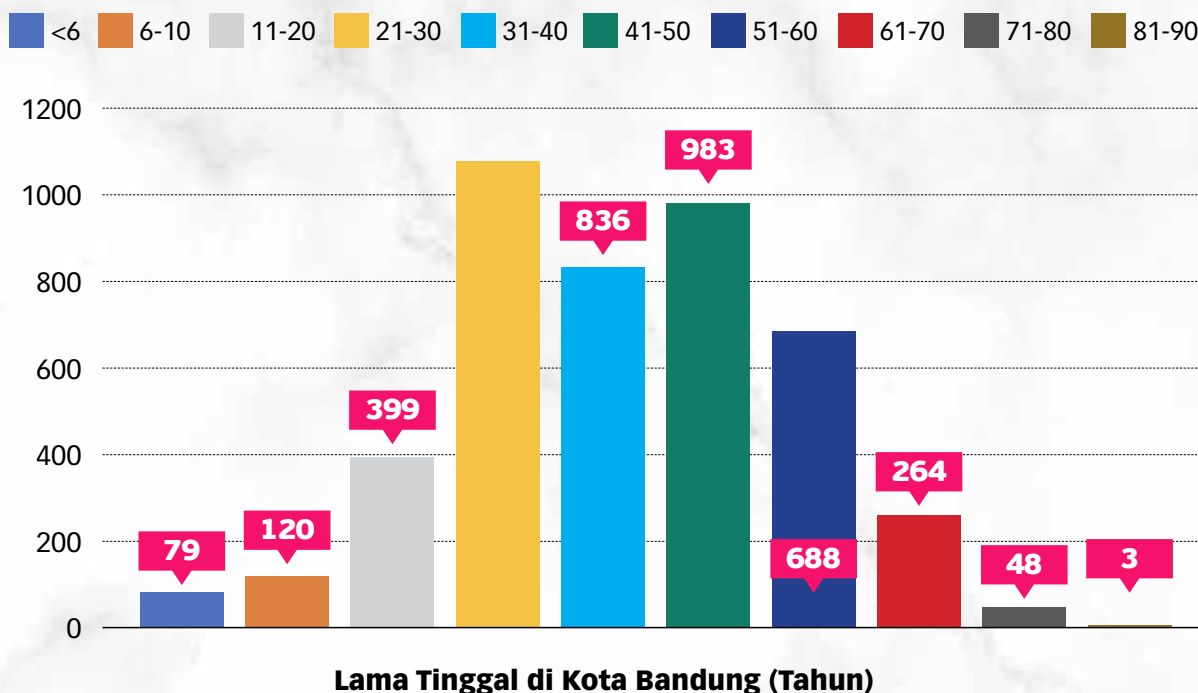
E. Lama Tinggal di Kota Bandung (Tahun)

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner membuka fakta menarik bahwa mayoritas responden masyarakat yang disurvei telah menjadi penduduk Kota Bandung selama periode 21 hingga 30 tahun, dengan persentase sebesar 24%. Temuan ini mencerminkan sejarah dan stabilitas tingkat hunian yang tinggi dalam komunitas ini, di mana sejumlah besar responden telah berakar kuat di Kota Bandung selama beberapa dekade. Informasi ini dapat memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek, seperti perencanaan perkotaan, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan sosial dan budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduk yang telah lama menetap di kota ini.



Grafik 2.12

Distribusi Responden Berdasarkan Lama Tinggal di Kota Bandung



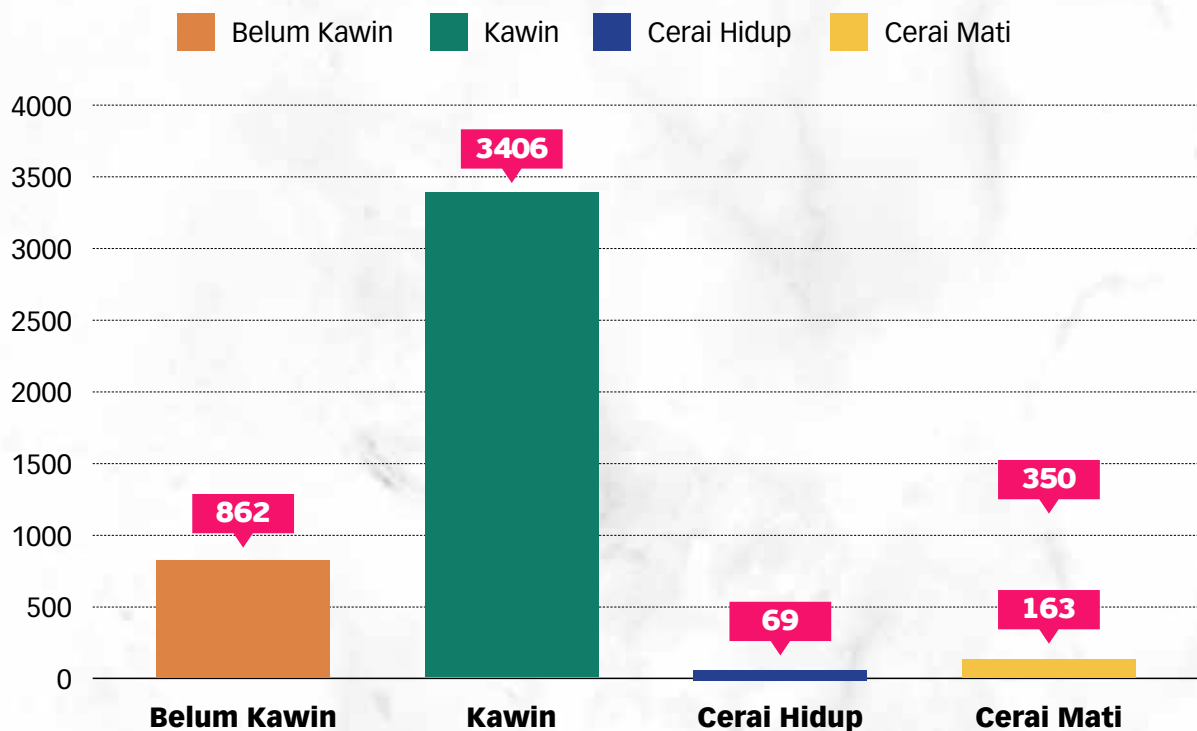
F. Status Pernikahan

Data dari hasil kuesioner menjelaskan bahwa mayoritas responden yang merupakan bagian dari masyarakat yang disurvei telah menjalani kehidupan berumah tangga, dengan persentase yang signifikan mencapai 76%. Temuan ini menyoroti pentingnya aspek kehidupan keluarga dalam komunitas Kota Bandung dan menunjukkan bahwa banyak responden telah memilih untuk menjalani hidup berkeluarga. Dalam konteks perencanaan perkotaan, informasi ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang memperhatikan kebutuhan keluarga dan mendorong pembangunan fasilitas dan layanan yang mendukung kehidupan berkeluarga.





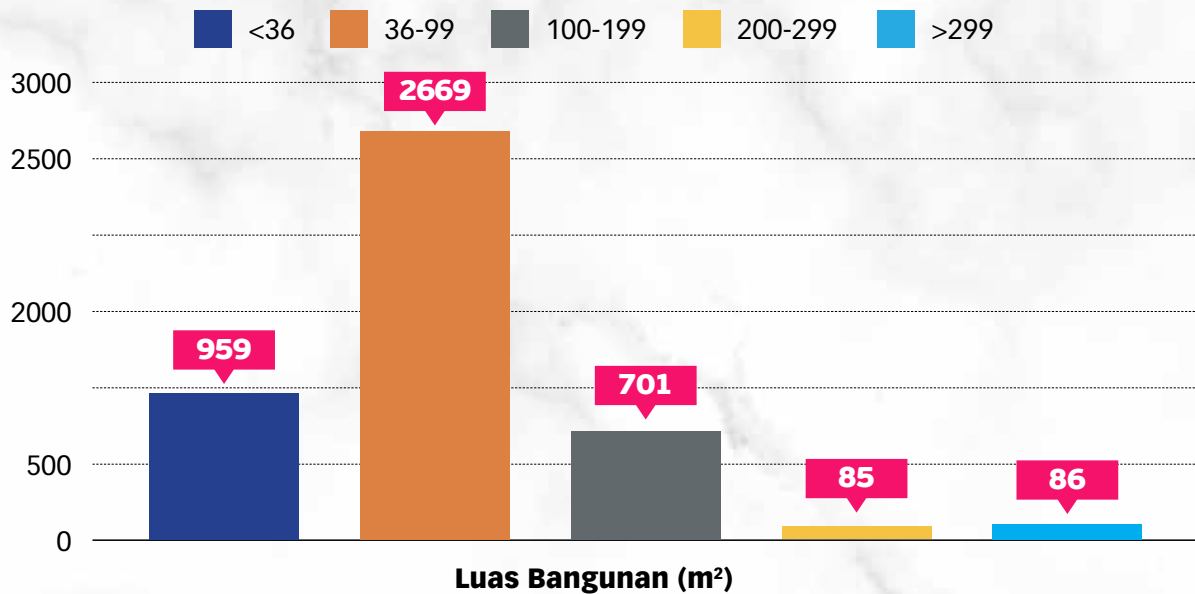
Grafik 2.13
Distribusi Responden Berdasarkan Status Pernikahan



G. Luas Bangunan Tempat Tinggal Responden

Berdasarkan hasil dari data kuesioner yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden masyarakat yang disurvei memiliki luas bangunan tempat tinggal seluas 36-99 m² dengan persentase yang mencapai 59,31%. Informasi ini memberikan wawasan yang penting tentang karakteristik perumahan di dalam komunitas Kota Bandung. Dengan mayoritas responden tinggal di rumah dengan ukuran dalam kisaran ini, hal ini menggambarkan pola umum dalam ukuran properti tempat tinggal di kota ini.

Grafik 2.14
Distribusi Responden Berdasarkan Luas Bangunan Tempat

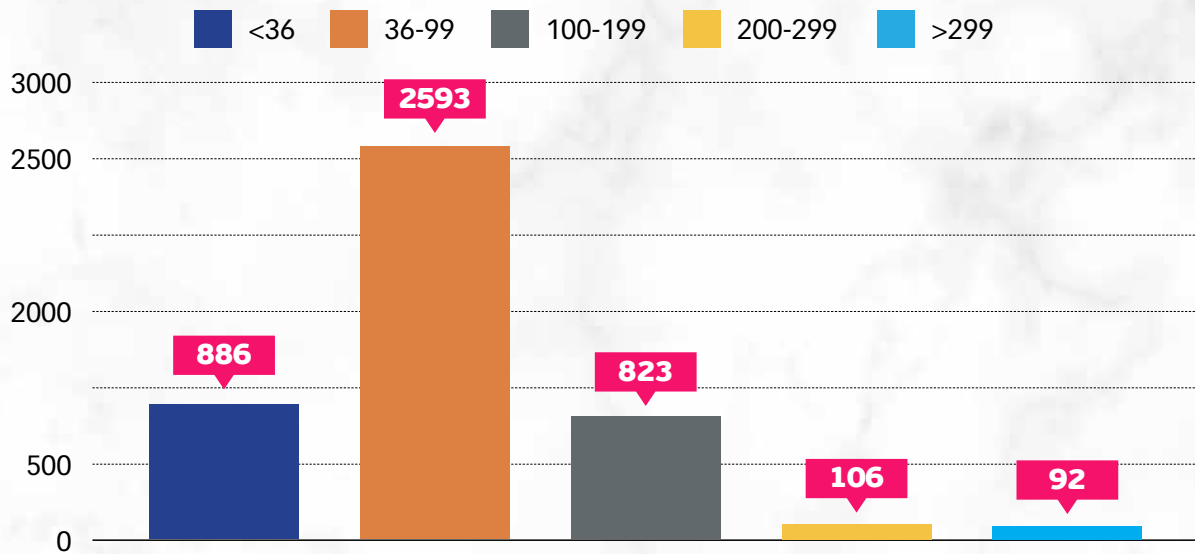


H. Luas Tanah Tempat Tinggal

Berdasarkan hasil dari data kuesioner yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden masyarakat yang disurvei memiliki luas tanah tempat tinggal seluas 36-99 m² dengan persentase sebesar 57,62%. Hasil ini mengindikasikan pola umum dalam tipe dan ukuran properti tempat tinggal di Kota Bandung. Dengan lebih dari setengah responden memiliki luas tanah dalam kisaran ini, hal ini mencerminkan pentingnya mengidentifikasi dan memahami tren perumahan di kota ini.

Grafik 2.15

Distribusi Responden Berdasarkan Luas Tanah Tempat Tinggal



I. Moda Transportasi Utama Harian

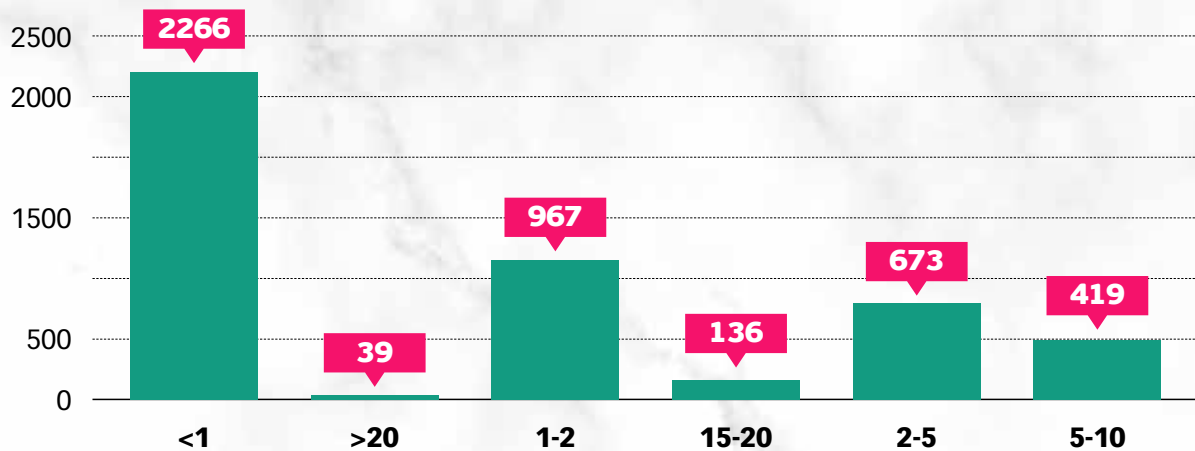
Hasil dari analisis data kuesioner diketahui bahwa mayoritas responden dalam masyarakat yang disurvei memilih motor pribadi sebagai moda transportasi utama mereka dalam aktivitas sehari-hari. Jumlah responden yang menggunakan motor pribadi mencapai 2.969 orang. Data ini memberikan gambaran yang kuat tentang dominasi penggunaan motor sebagai sarana transportasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Bandung, yang menjadi bagian penting dalam pemahaman mengenai mobilitas kota ini.

J. Jarak dari Tempat Tinggal menuju Tempat Kerja

Hasil analisis data kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas dari responden bekerja dalam jarak yang sangat dekat dengan tempat tinggal mereka. Sebanyak 2.266 responden melaporkan bahwa rata-rata jarak perjalanan dari tempat tinggal mereka ke tempat kerja adalah kurang dari 1 kilometer. Informasi ini memberikan gambaran yang signifikan tentang mobilitas penduduk Kota Bandung, di mana sebagian besar responden memiliki akses yang sangat dekat antara tempat tinggal dan tempat kerja mereka. Hal ini dapat berdampak pada pola transportasi dan penggunaan lahan perkotaan, dan memahaminya dapat menjadi dasar yang penting dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan.

Grafik 2.16

Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Menuju Tempat Kerja

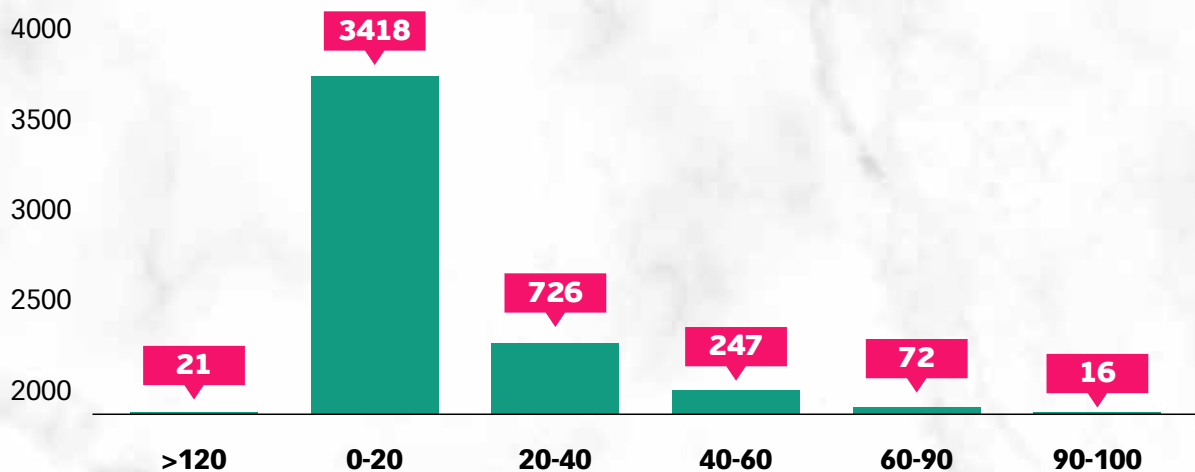


K. Waktu Tempuh dari Rumah menuju Tempat Kerja

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner menggambarkan bahwa mayoritas responden menempuh perjalanan yang relatif singkat setiap harinya. Sebanyak 3.418 responden melaporkan bahwa lama perjalanan rata-rata mereka setiap hari berkisar antara 0 hingga 20 menit. Temuan ini sesuai dengan informasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki jarak yang pendek antara rumah dan tempat kerja mereka. Kombinasi jarak yang dekat dan waktu perjalanan yang singkat ini mencerminkan potensi untuk penggunaan moda transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Grafik 2.17

Distribusi Responden Berdasarkan Waktu Tempuh

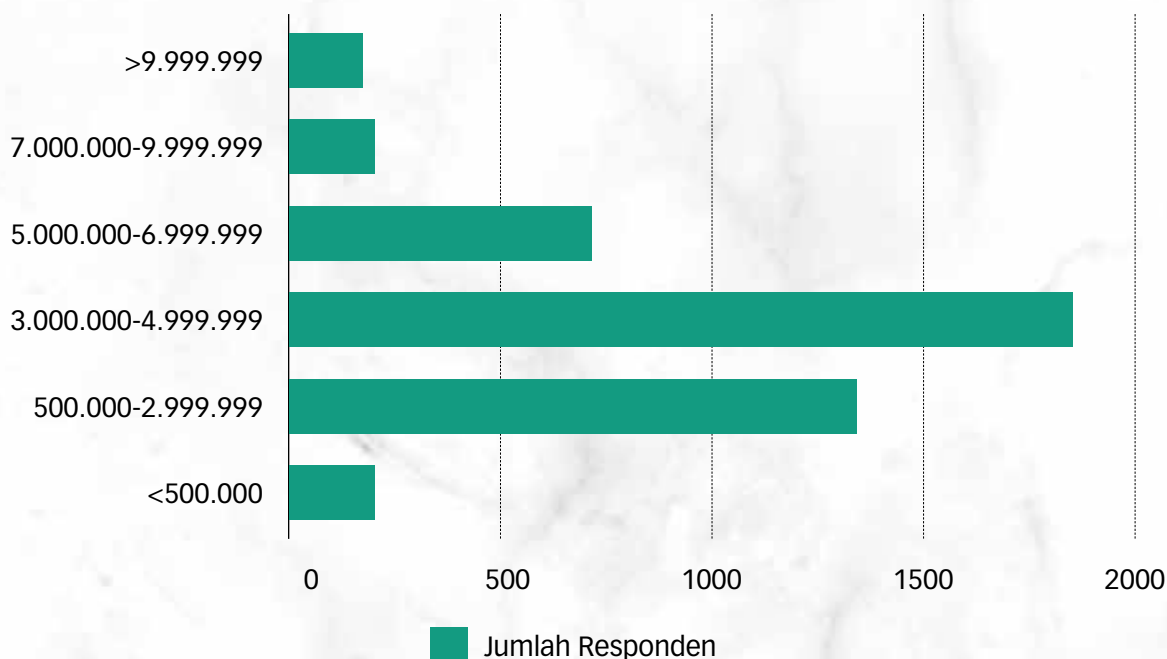


L. Rata-rata Pendapatan Keluarga Responden per Bulan

Berdasarkan hasil data kuesioner, sebagian besar responden di survei memiliki pendapatan keluarga per bulan antara Rp3.000.000 hingga Rp5.000.000. Ini adalah informasi yang relevan, mengingat bahwa pada tahun 2023, Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bandung adalah sekitar Rp4.048.462,69. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa mayoritas responden memiliki pendapatan yang sejalan dengan UMR, yang mungkin menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang memadai bagi sebagian besar populasi yang disurvei. Namun, data ini juga mengindikasikan perlunya mengeksplorasi ketidaksetaraan pendapatan di antara responden, mengidentifikasi masalah di pasar tenaga kerja, dan merumuskan kebijakan sosial dan ketenagakerjaan yang lebih baik yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi penduduk setempat serta biaya hidup yang relevan. Dalam konteks UMR Kota Bandung, data pendapatan responden dapat memberikan panduan berharga untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan perumusan kebijakan yang lebih efektif di wilayah tersebut. Pemahaman tentang hubungan antara pendapatan responden dan standar upah regional ini akan membantu pemerintah dan organisasi terkait dalam merespons permasalahan ketidaksetaraan ekonomi, ketersediaan pekerjaan, serta kebijakan sosial dan ketenagakerjaan yang lebih baik sesuai dengan realitas ekonomi setempat.

Grafik 2.18

Distribusi Responden Berdasarkan Rata-rata Pendapatan per Bulan

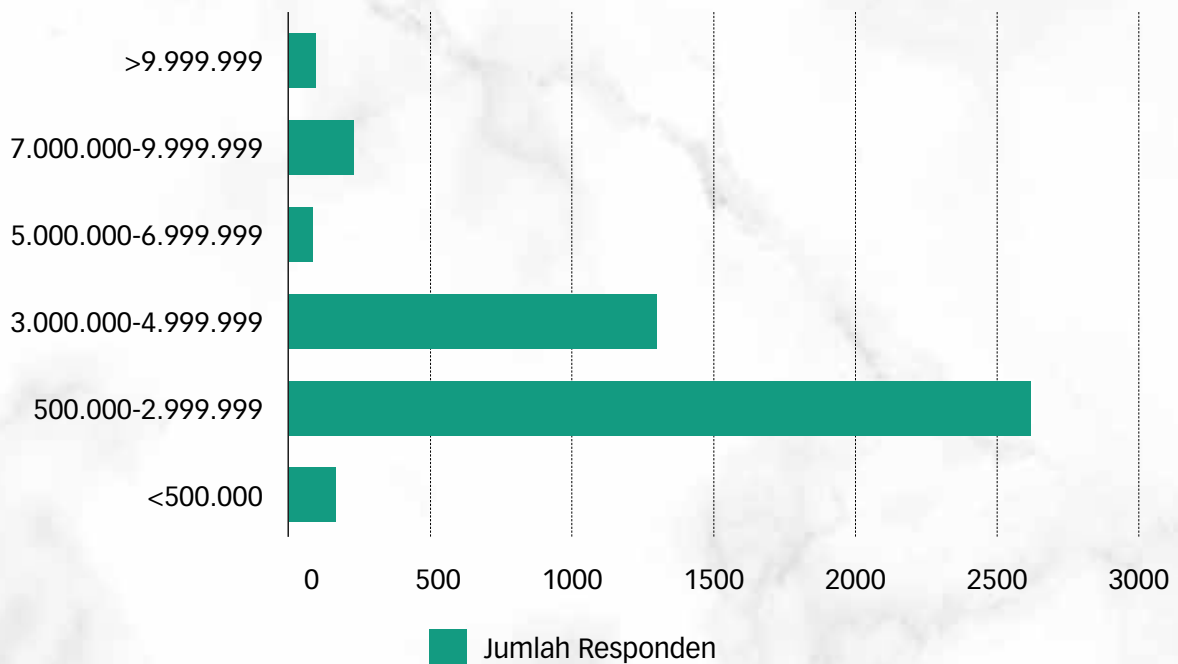


M. Rata-rata Pengeluaran Keluarga Responden per Bulan

Berdasarkan hasil dari data kuesioner yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden masyarakat yang disurvei memiliki pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp500.000 sampai Rp3.000.000. Hal ini memberikan gambaran lebih lengkap tentang kondisi ekonomi responden, karena pendapatan dan pengeluaran adalah dua aspek penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi. Penting juga untuk mencatat bahwa informasi ini dapat dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Bandung secara keseluruhan. Dengan membandingkan rata-rata pengeluaran responden dengan

rata-rata pengeluaran kota, kita dapat memahami sejauh mana responden berada dalam kisaran pengeluaran yang umum di wilayah tersebut. Ini juga akan membantu dalam mengevaluasi apakah ada kecenderungan pengeluaran yang berlebihan atau kurang dalam kelompok responden tertentu dan apakah perlu adanya perubahan dalam kebijakan ekonomi atau sosial yang memengaruhi pengeluaran masyarakat.

Grafik 2.19
Distribusi Responden Berdasarkan Rata-rata Pengeluaran per Bulan



Kajian penilaian Index Livable City Kota Bandung Tahun 2023 dilakukan dalam skala kecamatan dan agregasi pada skala kota. Perbedaan metodologi dan indikator yang digunakan dapat mempengaruhi hasil akhir sehingga penilaian tidak bisa disandingkan dengan LCI Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2022.

Berdasarkan hasil analisis dan ketercapaian data yang telah didapatkan dan dilakukan analisa, untuk indikator objektif, ketercapaian pengumpulan data mencapai 83% di seluruh Perangkat Daerah. Namun, masih terdapat sekitar 9 data indikator yang masih belum bisa dipenuhi oleh Perangkat Daerah. Mengacu pada hasil analisis LCI Kota Bandung Tahun 2023, diketahui bahwa skor tertinggi ada pada kesehatan, hal ini karena indikator-indikator dalam Aspek Fasilitas Kesehatan, khususnya indikator objektif telah mencapai skor yang tinggi. Sedangkan skor terendah ada pada aspek Lingkungan.

Livability City Index Kota Bandung Tahun 2023 adalah 6.67 berdasarkan RPJMD dan 6.84 berdasarkan RPD. Indeks kelayakhunian Kota Bandung pada tahun 2022 berdasarkan RPJMD adalah sebesar 7,46 atau terjadi penurunan 0.79 pada tahun 2023. Untuk indikator subjektif melalui wawancara secara langsung dengan masyarakat terkait dengan persepsi terhadap capaian pembangunan dan kondisi lingkungan, secara umum masuk dalam kategori baik. Masyarakat lebih banyak menganggap kondisi lingkungan dan kebijakan dianggap baik untuk menciptakan kondisi yang diinginkan, kecuali dalam pertanyaan terkait transportasi (kualitas angkutan umum, keamanan dalam angkutan umum, keamanan saat berjalan kaki) serta tata ruang (penanganan kawasan kumuh) di dua indikator subjektif tersebut, masyarakat lebih banyak netral.

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Indikator Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya adalah :

1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3.020.997.300	3.019.054.320
---	--	--	---------------	---------------

Faktor Penyebab Persolan Perkotaan

Masalah di perkotaan, seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, ketidaksetaraan ekonomi, kemacetan lalu lintas, polusi lingkungan, dan ketidaksetaraan akses pendidikan, memiliki dampak serius terhadap masyarakat dan kota itu sendiri. Dampaknya termasuk ketidakstabilan sosial, ketidaksetaraan dalam kualitas hidup, ketidakamanan, kerusakan lingkungan, peningkatan risiko bencana alam, dan potensi pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Upaya penanganan dan perencanaan perkotaan yang baik diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini dan meningkatkan kualitas hidup penduduk serta keberlanjutan perkotaan. Kami melakukan survei yang melibatkan 4.500 responden dalam rangka untuk lebih memahami urutan faktor penyebab persoalan perkotaan. Data primer yang kami peroleh berasal dari hasil survei menggunakan kuesioner yang disebarkan di Kota Bandung. Dalam kuesioner ini, kami meminta pendapat responden mengenai faktor-faktor umum yang menjadi penyebab berbagai persoalan perkotaan, dan mereka diminta untuk mengurutkan faktor-faktor tersebut dari rangking 1 hingga 5, sesuai dengan pandangan mereka tentang pengaruhnya. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat mengungkapkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi dinamika perkotaan di Kota Bandung.

Tabel 2.38
Faktor Penyebab Persoalan

Urutan	Faktor Penyebab	Jumlah Suara
Persoalan 1: Kemacetan di Perkotaan		
1	Persebaran fasilitas perkotaan yang tidak merata	2.719
2	Volume lalu lintas yang tinggi (jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dapat menyebabkan kemacetan)	2.693
3	Kurangnya infrastruktur jalan yang memadai (jalan yang sempit, kurangnya jalan akses)	1.705
4	Ketidakdisiplinan pengemudi	1.399
5	Kurangnya pelayanan transportasi publik yang efisien	1.368
Persoalan 2: Parkir Liar		
1	Kurangnya fasilitas/lokasi parkir yang memadai	2.100
2	Ketidaktersediaan transportasi publik yang memadai	1.922
3	Kurangnya penegakan hukum	1.300
4	Kesadaran dan perilaku pengendara	1.286
5	Biaya parkir yang mahal	1.192
Persoalan 3: Banjir		
1	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya	1.536
2	Infrastruktur drainase yang buruk	1.419
3	Penurunan kualitas lingkungan (penebangan hutan, kurangnya ruang terbuka hijau, dll.)	1.253
4	Pembangunan perkotaan yang tidak teratur	1.262
5	Curah hujan yang tinggi	1.248
Persoalan 4: Timbulan Sampah		
1	Kebijakan dan regulasi yang tidak efektif	2.620
2	Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di perkotaan	1.981
3	Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah	1.802
4	Konsumsi tinggi dan pola konsumsi masyarakat yang berlebihan	1.626
5	Kurangnya kesadaran dan edukasi lingkungan	1.598
Persoalan 5: Rendahnya Pejalan Kaki		
1	Desain perkotaan yang tidak ramah pejalan kaki (trotoar yang sempit, tidak terawat, atau tidak ada sama sekali, kurangnya penyeberangan pejalan kaki yang aman, dan kurangnya fasilitas penunjang seperti jalur sepeda dan ruang hijau)	2.716
2	Waktu tempuh yang terlalu lama	1.740
3	Ketidakamanan dari kejahatan jalanan, risiko kecelakaan lalu lintas, kurangnya penerangan.	1.603
4	Kurangnya penerangan bagi pejalan kaki di malam hari	1.598
5	Iklim perkotaan yang tidak mendukung untuk berjalan kaki (terlalu panas, terlalu dingin, dll.)	1.243
Persoalan 6: Reklame Ilegal		
1	Regulasi yang lemah atau kurang ditegakkan	1.980
2	Keterbatasan sumber daya dan prioritas untuk penertiban	1.944
3	Ketidakpedulian pihak pengiklan	1.801
4	Pertumbuhan perkotaan yang cepat dan tidak memberikan ruang memadai untuk reklame	1.757
5	Kurangnya kesadaran masyarakat	1.528
Persoalan 7: Pedagang Kaki Lima		

1	Regulasi dan penegakan hukum yang lemah	2.482
2	Keterbatasan peluang kerja formal bagi masyarakat	2.240
3	Regulasi yang rumit dan membebani untuk menjadi formal	1.385
4	Keterbatasan ruang untuk berdagang secara formal	1.354
5	Kehadiran permintaan/pelanggan yang tinggi di perkotaan	1.305
Persoalan 8: Permukiman Kumuh		
1	Regulasi dan penegakan hukum yang lemah	2.414
2	Pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan	2.151
3	Keterbatasan akses terhadap layanan dasar	1.550
4	Perubahan tatanan kota yang mendorong migrasi penduduk ke perkotaan	1.507
5	Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan perumahan terjangkau	1.391

Hasil pengurutan aspek-aspek ini dalam survei kuesioner mencerminkan prioritas dan preferensi masyarakat Kota Bandung terkait dengan kondisi perkotaan mereka. Pengurutan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang harapan dan aspirasi penduduk kota, serta memengaruhi perencanaan dan pengembangan kota di masa depan. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada responden, dilakukan pengurutan aspek-aspek di Kota Bandung dari yang terpenting hingga paling tidak penting:

1. Jalan Bandung bebas dari kemacetan

2. Bandung bebas dari banjir

3. Lingkungan kota, udara, dan air yang bersih

4. Bangunan di Kota Bandung tertata rapi

5. Warga bandung yang makmur dan sejahtera

Dengan memahami urutan prioritas ini, pemerintah dan perencana kota dapat mengarahkan upaya mereka dalam merencanakan, mengalokasikan sumber daya, dan mengambil kebijakan yang sesuai untuk mencapai visi perkotaan yang diinginkan oleh penduduk Kota Bandung. Implikasi dari urutan prioritas yang diungkapkan dalam survei kuesioner ini sangat penting dalam perencanaan kota dan dapat membentuk arah rencana untuk masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa implikasi utama dan rencana yang dapat diambil:

1. **Penanganan Kemacetan Lalu Lintas:** Dengan prioritas tertinggi pada mengatasi kemacetan lalu lintas, perencana kota dapat merencanakan dan mengimplementasikan solusi transportasi yang lebih efisien. Ini mungkin melibatkan pengembangan infrastruktur transportasi publik yang lebih baik, pengurangan kendaraan pribadi, dan penerapan kebijakan pengaturan lalu lintas yang lebih cerdas.
2. **Manajemen Banjir:** Untuk mengatasi prioritas kedua terkait banjir, pemerintah kota perlu berfokus pada pengembangan sistem pengelolaan air yang lebih baik. Ini bisa termasuk perbaikan drainase, pembangunan waduk, dan upaya konservasi

alam untuk mengurangi risiko banjir.

3. Lingkungan Bersih: Lingkungan bersih adalah kebutuhan mendasar, dan pemeliharannya harus menjadi prioritas. Rencana yang lebih ketat untuk pengelolaan sampah, pengurangan polusi udara, dan perlindungan sumber air adalah langkah penting dalam mencapai tujuan ini.
4. Tata Ruang yang Tertata Rapi: Prioritas ini menunjukkan keinginan untuk penataan kota yang lebih estetis. Perencana kota dapat mengembangkan peraturan zonasi yang mempromosikan desain bangunan yang tertata rapi dan menciptakan kawasan yang indah secara visual.
5. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan: Untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran, rencana pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus menjadi prioritas. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja, pengembangan sektor industri, dan program-program sosial yang memperbaiki taraf hidup warga kota.
6. Kerukunan Sosial dan Keamanan: Penting untuk menjaga kerukunan sosial dan keamanan. Pemerintah kota perlu bekerja sama dengan kepolisian dan komunitas untuk memperkuat rasa keamanan dan mendorong kerukunan antar warga.



Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian “Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya” terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

- a. Hubungan sosial dan kehidupan komunitas yang cukup kuat di Kota Bandung
- b. Hubungan yang baik dengan para Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Faktor Penghambat :

- a. Kurang meratanya sarana prasarana Kesehatan dan pendidikan.
- b. Masih terdapat inclusion dan exclusion error pada kemiskinan
- c. Kesulitan untuk memberikan layanan SPM Kesehatan bagi klien yang tidak diketahui identitasnya

Solusi atau Rekomendasi :

- a. Program yang dapat memperkuat hubungan sosial dan memajukan kehidupan komunitas (hubungan antarwarga dan interaksi di tingkat lingkungan). penjaminan keamanan, pemerataan fasilitas dan perluasan akses pendidikan serta kesehatan.

- b. Verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkala
- c. Penetapan Indikator Livable City Index yang Konsisten: Untuk merencanakan masa depan Kota Bandung yang lebih baik, perlu adanya penetapan indikator Livable City Index yang konsisten setiap tahunnya. Ini memungkinkan Pemerintah Kota Bandung untuk melihat tren perubahan dalam berbagai aspek kota dari waktu ke waktu, termasuk peningkatan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan perbaikan kondisi lingkungan. Dengan indikator yang seragam, evaluasi kinerja pemerintah akan menjadi lebih obyektif dan efektif. Selain itu, indikator yang konsisten memudahkan perbandingan kinerja antara tahun-tahun yang berbeda dan membantu dalam menentukan prioritas perbaikan.
- d. Standardisasi Nilai Indikator: Untuk memastikan akurasi dan keseragaman pengukuran, perlu ada standar nilai indikator yang digunakan setiap tahunnya. Ini membantu dalam menghindari distorsi data dan manipulasi skor. Penerapan nilai indikator yang jelas juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa evaluasi kinerja pemerintah dilakukan secara adil dan transparan. Dengan nilai indikator yang standar, perencanaan pembangunan Kota Bandung dapat lebih terarah dan efisien.
- e. Keterlibatan Stakeholders dan Legalitas: Rekomendasi ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak terkait, termasuk eksekutif dan legislatif, dalam penetapan indikator Livable City Index. Ini dapat dilakukan melalui dialog dan kesepakatan bersama untuk memastikan bahwa indikator yang ditetapkan mencerminkan kepentingan bersama. Selain itu, perlu adanya legalitas atau undang-undang yang mendukung penggunaan indeks ini dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan dukungan hukum, kebijakan ini dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memastikan konsistensi hingga akhir periode RPJMD.
- f. Penilaian yang Komprehensif: Perencanaan Kota Bandung juga dapat diinformasikan dengan lebih baik melalui penilaian yang komprehensif. Ini mencakup penggunaan metode penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, sehingga pemahaman tentang kebutuhan dan pandangan masyarakat dapat digabungkan dengan data kinerja pemerintah. Dengan pendekatan ini, rekomendasi kebijakan akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi warga Kota Bandung.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Sasaran-Sasarannya berupa Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”, Nilai AKIP, Opini BPK, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Nilai EPPD. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ke 5 atau tahun terakhir RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada 5 (lima) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”	60	60	66,67	70	96,67	138,10	80	68,33	85,42
2	Nilai AKIP	A	BB	97,49	A	BB	98,70	A	BB	98,75
3	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,0	3,72	124	3,01	3,20	113	3,25	3,19	98,15
5	Nilai EPPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,4023	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		N/A			N/A			N/A		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”	90	90	100	100	98,33	98,33
2	Nilai AKIP	A	A	100	A	A	100
3	Opini BPK	WTP	WDP	WDP	WTP	N/A	N/A
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,30	3,61	109,39	3,35	3,98	118,81
5	Nilai EPPD	3,4033	N/A	N/A	3,4044	3,3362	98,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		N/A			N/A		

Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dapat dilihat dari sebanyak 5 (lima) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator ke-1 (satu) “Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik” yaitu dari target 100% tercapai dibawah target yaitu 98,33% dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 98,33%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2022 sebesar 90% mengalami peningkatan sebesar 8,33%. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 100% maka capaian kerjanya 98,33%.

Capaian kinerja indikator ke-2 (dua) “Nilai AKIP” dari target A tercapai sesuai target yaitu A dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%. Realisasi tersebut sama dibandingkan tahun 2022 yaitu A. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu A maka capaian kerjanya 100%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Capaian kinerja indikator ke-3 (tiga) “Opini BPK” dari target WTP belum keluar hasil penilaian. Realisasi tahun 2022 Opini BPK yaitu WTP. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu WTP maka capaian kerjanya N/A atau belum keluar penilaian.

Capaian kinerja indikator ke-4 (empat) “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” dari target 3,35 tercapai melebihi target yaitu 3,98 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 118,81%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu 3,61. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 3,35 maka capaian kerjanya 118,81%.

Capaian kinerja indikator ke-5 (lima) “Nilai EPPD” dari target 3,4033 kurang target yaitu 3,3362 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 98,00%. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 3,4044 maka capaian kerjanya 98,00%.



1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, SKM dilakukan melalui 9 Unsur Pelayanan yang terdiri dari :

NO	UNSUR PELAYANAN	KODE UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	U1
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	U2
3	Waktu Penyelesaian	U3
4	Biaya/ Tarif	U4
5	Produk Spesifik Jenis Pelayanan	U5
6	Kompetensi Pelaksana	U6
7	Perilaku Pelaksana	U7
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	U8
9	Sarana dan Prasarana	U9

Pemerintah Kota Bandung telah melakukan langkah-langkah konkrit berupa:

- Facilitasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk melakukan SKM setiap semester, sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, bahwa survei dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1(satu) tahun sekali.
- Melakukan upaya penyeragaman metode survei melalui 9 Unsur Pelayanan berdasarkan Permenpan RB No.14 Tahun 2017;
- Pengumpulan data SKM melalui aplikasi e-SKM (skm.bandung.go.id)

Tabel 2.40

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,6044 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik



Tabel 2.41

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2023

No	PD/INSTANSI/ UNIT KERJA	NILAI SKM SEMESTER 1 TAHUN 2023			NILAI SKM SEMESTER II TAHUN 2023		
		IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Setda	90.24	A	Sangat Baik	90.54	A	Sangat Baik
2	Setwan	88.22	B	Baik	90.09	A	Sangat Baik
3	Inspektorat	89.37	A	Sangat Baik	90.56	A	Sangat Baik
4	Diskominfo	86.46	B	Baik	91.07	A	Sangat Baik
5	Disdagin	86.59	B	Baik	86.43	B	Baik
6	DPKP	85.55	B	Baiuk	85.57	B	Baik
7	DPPKB	82.52	B	Baik	89.36	A	Sangat Baik
8	Diarpus	88.71	A	Sangat Baik	90.01	A	Sangat Baik
9	Satpol PP	85.83	B	Baik	86.62	B	Baik
10	Dispora	84.51	B	Baik	85.70	B	Baik
11	DKPP	88.75	A	Sangat Baik	89.51	A	Sangat Baik
12	Diskop KUKM	85.99	B	Baik	85.13	B	Baik
13	Diskar PB	85.34	B	Baik	85.38	B	Baik
14	DSDABM	86.15	B	Baik	89.34	A	Sangat Baik
15	Diciptabintar	90.82	A	Sangat Baik	91.49	A	Sangat Baik
16	Disdukcapil	91.09	A	Sangat Baik	91.14	A	Sangat Baik
17	DISHUB	82.29	B	Baik	85.05	B	Baik
18	Dinas Ketenagakerjaan	85.88	B	Baik	88.45	A	Sangat Baik
19	DINSOS	87.61	B	Baik	87.92	B	Baik
20	Disbudpar	88.49	A	Sangat Baik	88.84	A	Sangat Baik
21	DINKES	86.96	B	Baik	87.04	B	Baik
22	DISDIK	85.30	B	Baik	85.71	B	Baik
23	DPMPTSP	94.67	A	Sangat Baik	93.59	A	Sangat Baik
24	DP3A	88.57	A	Sangat Baik	89.54	A	Sangat Baik
25	DLH	86.42	B	Baik	85.55	B	Baik
26	BKPSDM	97.09	A	Sangat Baik	96.78	A	Sangat Baik
27	Bappelitbang	88.36	A	Sangat Baik	88.48	A	Sangat Baik
28	BAKESBANGPOL	87.09	B	Baik	87.45	B	Baik
29	BPKA	86.38	B	Baik	86.71	B	Baik
30	BAPENDA	90.39	A	Sangat Baik	89.51	A	Sangat Baik
31	Kec. Cidadap	86.85	B	Baik	87.78	B	Baik
32	Kec. Gedebage	98.81	A	Sangat Baik	99.80	A	Sangat Baik
33	Kec. Cinambo	86.05	B	Baik	86.44	B	Baik
34	Kec. Bandung Kidul	86.20	B	Baik	88.77	A	Sangat Baik
35	Kec. Buah Batu	85.64	B	Baik	85.52	B	Baik
36	Kec. Rancasari	87.96	B	Baik	88.52	A	Sangat Baik
37	Kec. Panyileukan	87.22	B	Baik	88.86	A	Sangat Baik
38	Kec. Ujung Berung	86.30	B	Baik	86.41	B	Baik
39	Kec. Cibiru	86.94	B	Baik	86.37	B	Baik
40	Kec. Arcamanik	85.76	B	Baik	83.59	B	Baik

41	Kec. Mandalajati	85.67	B	Baik	85.67	Baik	Baik
42	Kec. Antapani	88.50	A	Sangat Baik	88.50	A	Sangat Baik
43	Kec. Bandung Kulon	85.57	B	Baik	88.78	A	Sangat Baik
44	Kec. Babakan Ciparay	85.21	B	Baik	94.44	A	Sangat Baik
45	Kec. Sukasari	94.34	A	Sangat Baik	91.09	A	Sangat Baik
46	Kec. Sukajadi	85.22	B	Baik	86.14	B	Baik
47	Kec. Cicendo	85.94	B	Baik	85.98	B	Baik
48	Kec. Andir	88.36	A	Sangat Baik	88.37	A	Sangat Baik
49	Kec. Coblong	90.56	A	Sangat Baik	87.06	B	Baik
50	Kec. Bandung Wetan	86.89	B	Baik	90.48	A	Sangat Baik
51	Kec. Sumur Bandung	85.75	B	Baik	85.92	B	Baik
52	Kec. Cibeunying Kaler	88.68	A	Sangat Baik	86.99	B	Baik
53	Kec. Cibeunying Kidul	82.14	B	Baik	98.33	B	Baik
54	Kec. Kiaracondong	85.36	B	Baik	85.36	B	Baik
55	Kec. Batununggal	87.69	B	Baik	87.83	B	Baik
56	Kec. Lengkong	85.93	B	Baik	86.09	B	Baik
57	Kec. Regol	84.36	B	Baik	88.79	A	Sangat Baik
58	Kec. Astana Anyar	86.17	B	Baik	87.22	B	Baik
59	Kec. Bojongloa Kaler	85.87	B	Baik	86.72	B	Baik
60	Kec. Bojongloa Kidul	86.37	B	Baik	88.72	A	Sangat Baik

Pengukuran IKM sesuai RPJMD untuk tahun 2023 yaitu persentase Perangkat Daerah/Instansi dengan Nilai Indeks Kepuasan “Baik” ditargetkan sebanyak 100% dengan indeks peayanan publik perangkat daerah kategori baik (minimal 85) dari jumlah keseluruhan Perangkat Daerah/Instansi. Sedangkan berdasarkan data IKM Semester II tahun 2023 baru mencapai 98,33%. Perangkat Daerah/Instansi dengan nilai di atas 85 yaitu 59 dari 60 Perangkat sehingga tidak mencapai target yaitu sebesar 98,33%.

No	Tahun	Jumlah Perangkat Daerah	Target RPJMD 2023	Capaian (%)	Capaian Jumlah Perangkat Daerah
1	Semester I Tahun 2023	60	100%	91,67%	55
2	Semester II Tahun 2023	60	100%	98,33%	59

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bandung Tahun 2023

Dari 60 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, berdasarkan data IKM Semester II tahun 2023, sebanyak 59 Perangkat Daerah sudah mencapai target IKM sesuai RPJMD minimal 85.

Program dan Kegiatan yang mendukung capaian “Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik” sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	128.823.750,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	227.084.750,00



Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian “Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik” terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung merupakan Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu :

- unsur pelayanan U4 (biaya tarif), yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- unsur pelayanan U9 (Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan), yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut yang direspon sangat baik dan cepat.

Faktor Penghambat merupakan Nilai dalam kelompok rendah yang harus ditingkatkan yaitu:

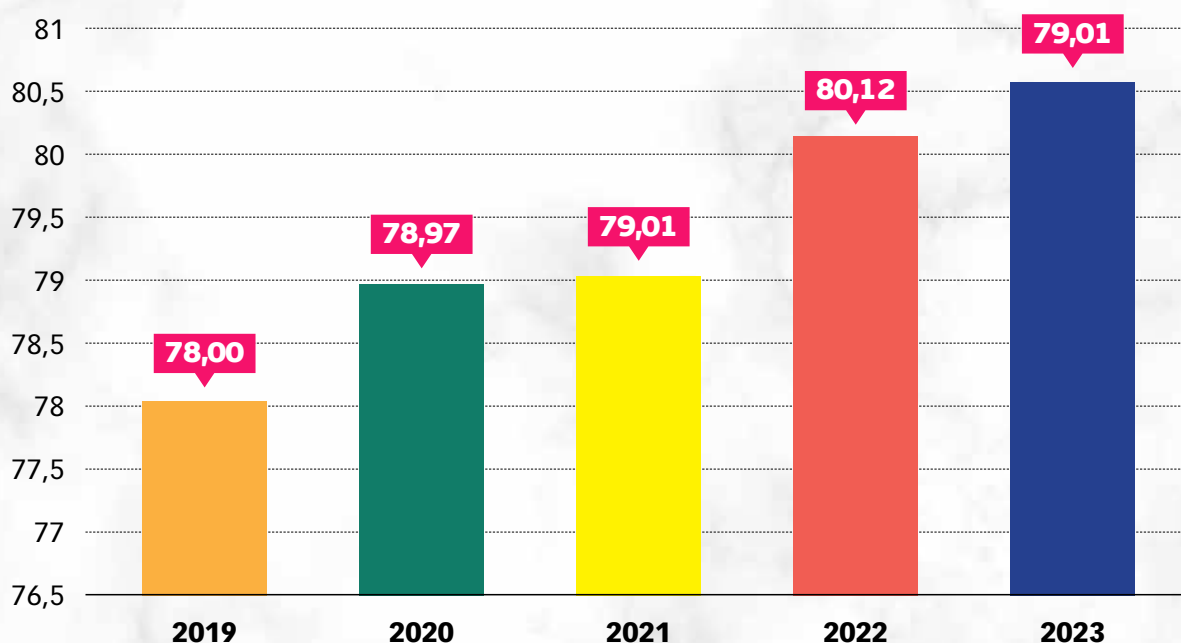
- unsur pelayanan U3 (waktu penyelesaian), yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan yang melewati batas waktu berdasarkan ketentuan.
- unsur pelayanan U8 (sarana dan prasarana), yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan serta prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses yang belum optimal.

2. Nilai AKIP

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung tahun 2023 adalah 80,56 atau kategori A sesuai target A yang dicanangkan pada target RPJMD. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Bandung tahun 2023 diukur dengan cara Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2023 dengan Predikat A maka capaiannya sesuai target atau 100%.

Grafik 2.20
Capaian Nilai AKIP Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2019-2023



Sumber: LHE SAKIP Kota Bandung Tahun 2019-2023

TAHUN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CAPAIAN	80,05	78,00	78,97	79,01	80,12	80,56
SELISIH		-2,05	+0,97	+0,04	+1,11	+0,44
PREDIKAT	A	BB	BB	BB	A	A

Sumber: LHE SAKIP Kota Bandung Tahun 2019-2023

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2022	NILAI 2023	SELISIH
1	Perencanaan Kinerja	30	23,32	23,33	+0,01
2	Pengukuran Kinerja	30	24,42	24,45	+0,03
3	Pelaporan Kinerja	15	11,88	11,93	+0,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50	20,85	+0,35
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,12	80,56	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A	

Sumber: LHE SAKIP Kota Bandung Tahun 2019-2023

Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan memperoleh nilai 78,00 atau predikat SAKIP BB, akan tetapi secara agregat nilai mengalami kenaikan pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dengan mendapatkan Kembali SAKIP kategori A.

Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran, sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah; 2. Pelaksanaan Konsultasi Publik; 3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota; dan 4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Daerah di Kabupaten/Kota
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 2. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; 3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan; 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 5. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; dan 6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 2. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;

			3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan 5. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
		Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 2. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; 3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 5. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; dan 6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Nilai AKIP Komponen Pelaporan, sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	172.729.250,00



Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Nilai AKIP Komponen Evaluasi, sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Penyelenggaraan Pengawasan	996.785.259,00
No	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	949.135.250,00
No	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Reviu Laporan Kinerja	254.446.000,00

Pemerintah Kota Bandung saat ini sedang membangun kembali Budaya Kinerja pada seluruh jenjang baik Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Individu. Terdapat beberapa catatan penting yang harus diperbaiki dan di implementasikan, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah mereviu RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen lainnya sehingga lebih berorientasi hasil. Pemkot Bandung juga telah melakukan penjabaran kinerja sampai ke unit terendah dan digunakan sebagai ukuran kinerja individu. Pemkot Bandung juga sudah memasukan unsur fok.us RB Tematik dalam perencanaan kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Terdapat PK 2023 Perangkat Daerah (PD) yang belum memasukan rumusan sasaran dan indikator yang merupakan isu strategis dari PD tersebut, seperti pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum menjadikan indikator terkait resporsivitas atas kasus yang terjadi, dan pada Dinas Perhubungan yang belum memasukan sasaran maupun indikator terkait keselamatan dan keamanan pengguna jalan maupun terkait konektivitas;
- Pemkot Bandung telah melakukan penyesuaian terhadap beberapa target kinerja yang sudah melebihi realisasi, namun terdapat target pada PK 2023 di level Pemkot yang masih ditetapkan dibawah realisasi Tahun 2022 seperti Indeks Daya Saing Pariwisata, dan seperti pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Indikator Persentase Usaha Mikro yang Omset dan atau kemampuan usahanya meningkat.

b. Pengukuran Kinerja

Pemkot Bandung telah menyusun manual Indikator Kinerja Utama dan juga pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi yang mengintegrasikan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Pada dokumen IKU PD masih ditemukan indikator kinerja utama yang belum dilengkapi dengan formulasi perhitungan dan penanggung jawab sumber data seperti pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

Pemkot Bandung telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2022 Pemkot maupun

Laporan Kinerja PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta sudah dipublikasi secara umum melalui website pemda. Untuk Laporan Kinerja Pemkot telah cukup komprehensif menyajikan analisa data maupun perbandingan dengan data-data lain yang diperlukan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja Pemkot dan sebagian besar PD sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembanding (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja, namun masih terdapat beberapa PD yang belum menyajikan analisa yang sama. Hal ini mengindikasikan implementasi standar pelaporan belum secara merata pada seluruh PD;
- Informasi kinerja yang dituangkan terutama pada Laporan Kinerja PD belum dimanfaatkan dengan baik untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.

d. Evaluasi Kinerja

Inspektorat Kota Bandung telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap seluruh PD dengan mengacu pada PermenPAN-RB88 Tahun 2021 dan menggunakan aplikasi. Di tahun 2023, Inspektorat Kota Bandung juga mengembangkan aplikasi tersebut untuk digunakan pada PD agar bisa melakukan evaluasi secara mandiri. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan di antaranya sebagai berikut:

- Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja belum dilakukan secara berkala, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemkot dan PD;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap PD belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan;
- Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sebagai alat dalam memberikan reward and punishment kepada PD.

Dalam melaksanakan catatan dan rekomendasi yang tertuang dalam LHE AKIP Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023, terdapat beberapa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kota Bandung dalam menindaklanjuti Rekomendasi terhadap Komponen Perencanaan Kinerja dengan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Bandung sedang melaksanakan Integrasi Sistem Perencanaan Kinerja, Sistem Penganggaran dan Informasi Kinerja (Performance Based Budgeting) dalam satu aplikasi terintegrasi untuk memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- b. Telah disusun kerangka logis perencanaan makro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka logis ini menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun pehon kinerja dan cascading kinerja Perangkat Daerah.
- c. Reviu Cascading RPD, RB Tematik Mandatory dan lokal bahan reviu perencanaan pemda tahun 2024 dan RKPD 2025
- d. Penyusunan Rencana Aksi Tematik
- e. Verifikasi keselarasan Rencana Aksi Tematik dengan Renja/DPA PD Tahun 2024
- f. Monev berkala atas Rencana Aksi



- g. Membantu penyusunan perencanaan mikro Tata Kelola Pemerintahan (RB General)

2. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Bandung dalam menindaklanjuti Rekomendasi terhadap Komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Bandung telah membangun Sistem Penilaian Kinerja Individu yang diselaraskan dengan ukuran kinerja organisasi, untuk memastikan setiap individu memiliki manfaat dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi
- b. Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Metode Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, untuk memastikan Validitas Data Kinerja
- c. Melengkapi manual IKU baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun PD dengan definisi operasional serta sumber data pada masing-masing indikatornya
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-SAKIP secara menyeluruh sebagai alat monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala dan menggunakan hasilnya sebagai dasar pemberian reward dan punishment
- e. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN
- f. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja individu telah dijadikan sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN.
 - Melaksanakan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil pemetaan kinerja dan kompetensi (box pengembangan kompetensi)
 - Proses pelaksanaan mutasi dan promosi di Pemerintah Kota Bandung melalui Sistem Manajemen Talenta dimana kami menggunakan berbagai aspek dalam mendukung pelaksanaan sistemnya.
- e. Adapun kami menggunakan dua Sumbu (X dan Y) :
 - Sumbu X (Potensial) terdiri dari Kompetensi, Potensi, Rekam Jejak dan Dimensi Pertimbangan Lainnya.
 - Sumbu Y (Kinerja) terdiri dari SKP 2 Tahun terakhir dan Prestasi yang bersangkutan



3. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kota Bandung dalam menindaklanjuti Rekomendasi terhadap Komponen Pelaporan Kinerja dengan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan verifikasi dan validasi LKIP Perangkat Daerah sesuai Kriteria PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014
- b. Melaksanakan Asistensi Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja dalam rangka verifikasi dan validasi ter-hadap data akhir target Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan da-lam bentuk Berita Acara

4. Evaluasi Kinerja

- a. Pemerintah Kota Bandung dalam menindaklanjuti Rekomendasi terhadap Komponen Pelaporan Kinerja dengan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut :
- b. Menyusun SOP terkait Monitoring atas Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP PD
- c. Melaksanakan Monitoring atas Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.
- d. Akan mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan Evaluasi Internal dengan menggunakan atau memanfaatkan aplikasi SEMAKIN PD serta mendorong Pimpinan Perangkat Daerah untuk memberikan Punish and Reward di internal Perangkat Daerah masing-masing.
- e. Inspektorat akan mengusulkan kepada Wali Kota Bandung untuk memberikan Punish and Reward berdasarkan hasil Penilaian Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat melalui Aplikasi SIMONES.

Selain beberapa Faktor Pendukung, dalam pelaksanaannya juga masih ditemukan hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian target SAKIP khususnya pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja. beberapa hambatan tersebut dapat terlihat dari beberapa rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB terhadap sebagai berikut:

- a. Kualitas Indikator Kinerja Utama pada beberapa Perangkat Daerah masih perlu penyempurnaan agar menggambarkan mandat dari keberadaan Perangkat Daerah;
- b. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Ukuran kinerja

dalam SKP belum seluruhnya menggambarkan tolak ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai, serta belum memperhatikan proses kerja yang telah dibangun, serta tugas fungsi dan peran setiap jabatan;

- c. Monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan sudah mulai dijalankan dengan baik, namun konsistensi dan keberlanjutannya belum seluruhnya diarahkan pada upaya perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
- d. Penelitian dan pengembangan memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak seperti peneliti, industri dan pemerintah. Kurangnya kerjasama atau koordinasi antara para pihak akan menjadi hambatan serius;
- e. Data yang tersedia tidak sepenuhnya terintegrasi;
- f. Rentang waktu pelaksanaan survey tidak mencukupi kebutuhan data dan analisis; dan
- g. Budaya organisasi tidak selaras dengan pengembangan inovasi yang berkelanjutan. Ketiadaan dorongan untuk mencoba hal baru dan menerima kegagalan sebagai bagian dari proses inovasi mengakibatkan situasi tidak berkembangnya riset.

Adapun rencana perbaikan atas tindaklanjut rekomendasi tersebut, tentunya akan dilakukan segera dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka percepatan perbaikan Manajemen Kinerja di Pemerintah Kota Bandung, diantaranya:

- a. Melakukan reviu IKU / Sasaran strategis Perangkat daerah dan atau Cascading kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023;
- b. Melakukan Reviu Pohon Kinerja, Cacscading Kinerja dan verifikasi PK serta penyelarasan IKI dan SKP Perangkat Daerah yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 berdasarkan Permenpan Nomor 89 Tahun 2021 dan permenpan Nomor 6 Tahun 2023;
- c. Menindaklanjuti hasil Rakortek AKIP Provinsi Jawa Barat;
- d. Reviu Kerangka logis Perubahan RPJMD 2018 2023 dilakukan sampai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (tabel panjang) untuk memastikan bahwa alokasi anggaran relevan terhadap pencapaian sasaran strategis; dan
- e. Pengembangan budaya inovasi melalui penciptaan pamong inovasi guna menciptakan iklim dan lingkungan inovasi di setiap perangkat daerah.



3. Opini BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan opini BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022, Nomor 32A/LHP/XVIII. BDG/05/2023, Tanggal 29 Mei 2023. Kota Bandung mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bandung tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar penetapan opini wajar dengan pengecualian (WDP) diantaranya adalah :

- a. Saldo aset tetap tanah belum mencerminkan saldo sebenarnya, dikarenakan masih terdapat Aset tetap tanah prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang sudah diserahkan oleh 124 pengembang perumahan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), akan tetapi belum diakui dan dicatat di neraca. Dari 124 pengembang tersebut, diantaranya 13 pengembang perumahan sudah mencantumkan nilai aset tetap tanah dalam BAST sebesar Rp. 3.435.425.945.200 yang mengakibatkan aset tetap tanah disajikan lebih rendah dari seharusnya.



- b. Terdapat belanja modal alat pemantau lalu lintas berupa CCTV sebanyak 13 unit sebesar Rp. 2.444.607.976 pada Dinas Perhubungan yang dilakukan tanpa analisis kebutuhan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak disusun berdasarkan survey harga pasar, pelaksanaan dilakukan dengan pemecahan kontrak diindikasikan untuk menghindari ketentuan pelelangan, dan pemberian fee kepada enam perusahaan yang dilakukan oleh PT. SMA. Pada tahun 2023 diketahui PT. SMA bersama Wali Kota Bandung, Kepala Dinas Perhubungan, dan Pejabat Pembuat Komitmen menghadapi proses hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Kota Bandung tanggal 13 Desember 2023 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi bersama-sama. BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian dan pengungkapan terkait hal tersebut.
- c. Terdapat belanja barang dan jasa atas pengadaan jaringan internet pada Dinas Perhubungan sebesar Rp. 2.072.070.000 yang dilaksanakan oleh PT. CIFO pada tahun 2022. Pengadaan jasa internet tahun 2022 berindikasikan proforma, pemilihan penyedia tidak didahului dengan survey harga. Pada tahun 2023 diketahui PT. CIFO bersama Wali Kota Bandung, Kepala Dinas Perhubungan, dan Pejabat Pembuat Komitmen menghadapi proses hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Kota Bandung tanggal 13 Desember 2023 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi bersama-sama. BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian dan pengungkapan terkait hal tersebut,

Opini BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 belum diumumkan sampai penyusunan laporan ini, sehingga capaian kinerjanya belum dapat diukur.

Dalam mendukung capaian kinerja “Indikator Opini BPK” terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung, sebagai berikut :

NO	SASARAN	NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.400.508.795	3.793.537.999	86,20
			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.769.903.066	1.541.420.185	87,09
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.556.802.491	1.522.310.064	97,78
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.073.803.238	729.807.750	67,96
II	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	2	Program Pengelolaan barang milik daerah	15.435.787.141	13.645.513.974	88
			Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	15.435.787.141	17.057.330.424	88
		3	Program Pengelolaan Izin Membuka Lahan (Pemanfaatan BMD/sewa tanah)	3.827.202.464	3.411.816.450	89
			Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	3.827.202.464	3.411.816.450	89

III	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (termasuk gaji dan tunjangan aparatur BKAD)	40.755.276.598	35.330.943.741	87,69
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.748.849.469	21.034.798.325	85%
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	662.379.588	649.114.400	98%
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.534.678.324	5.954.689.490	91%
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.068.082.118	3.414.814.665	84%
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.139.477.495	2.005.154.773	94%
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.601.809.604	2.272.372.088	87%
			JUMLAH	64.418.774.998	56.181.812.164	87,21

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Opini BPK terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

- Komitmen dan dukungan Pimpinan dalam memberikan arahan dan kebijakan untuk pencapaian kinerja
- Kemudahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal maupun dengan perangkat daerah
- Daya dukung anggaran sehingga kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan seperti kegiatan sensus barang milik daerah

Faktor Penghambat :

- Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD) yang masih dalam tahap pengembangan sampai dengan tahapan pelaksanaan/penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- Dinamisnya perubahan peraturan terkait pengelolaan keuangan dan aset;
- Belum tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan arsip/ aset yang memadai dan permanen.

Solusi :

- Penyesuaian produk hukum daerah dalam bentuk penyusunan Raperda/Raperwal mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Koordinasi secara intens dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengaplikasian SIPD sampai dengan tahapan pelaksanaan dan pelaporan keuangan;
- Pembangunan gudang arsip keuangan dan aset.

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.



Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.



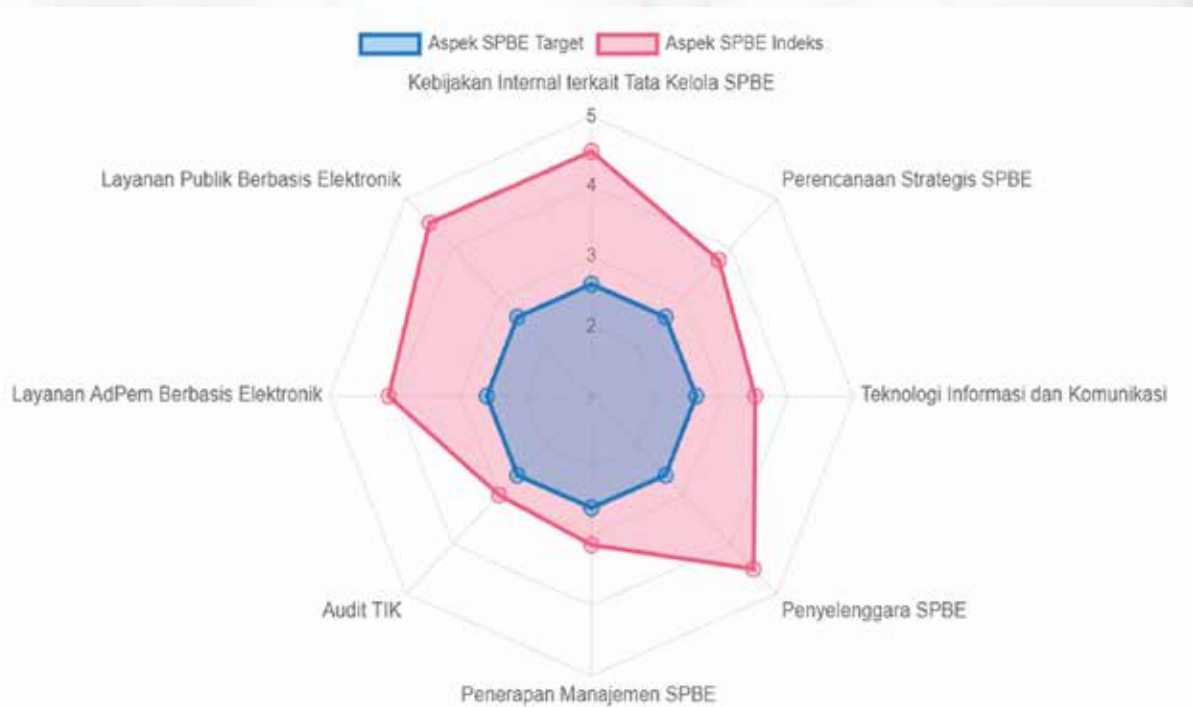
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

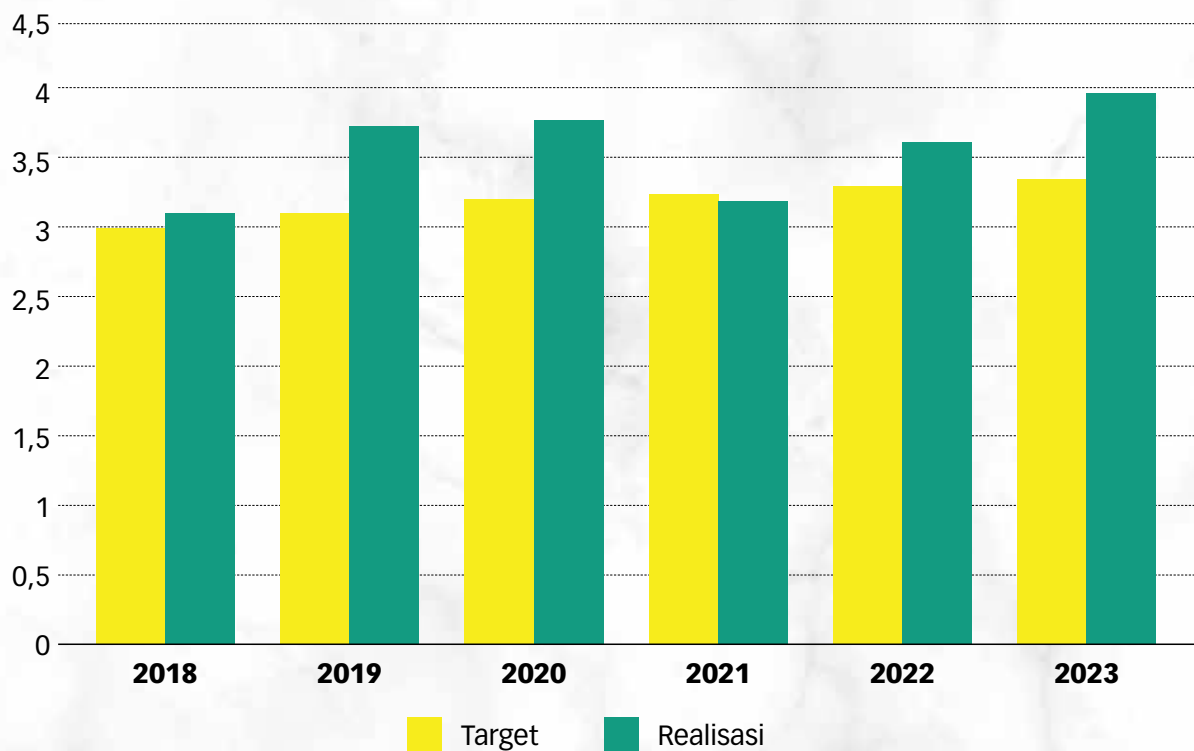
Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing- masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Grafik 2.21
Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek



Grafik 2.22
Target dan Realisasi SPBE Kota Bandung



Sumber: Diskominfo Kota Bandung 2023 (diolah)

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 108 Tahun 2024 tentang hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Tahun 2023, bahwa indeks SPBE Kota Bandung adalah 3,98 atau katagori “Sangat Baik” dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.42
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tahun 2022 - 2023

Aspek SPBE	Bobot	Tahun 2022	Tahun 2023
Domain Kebijakan SPBE	13	4,10	4,50
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13	4,10	4,50
Domain Tata Kelola SPBE	25	3,00	3,80
Perencanaan Strategis SPBE	10	2,75	3,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	10	2,50	3,50
Penyelenggara SPBE	5	4,50	4,50
Domain Manajemen SPBE	16,5	2,55	3,19
Penerapan Manajemen SPBE	12	2,50	3,13
Audit TIK	4,5	2,67	3,00
Domain Layanan SPBE	45,5	4,20	4,26
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5	4,00	4,10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	18	4,50	4,50
Indeks SPBE		3,61	3,98
Predikat SPBE		Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber: Diskominfo Kota Bandung 2023 (diolah)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung adalah sebesar 3,98 atau kategori Sangat Baik, yang berarti telah melebihi target tahun 2023 sebesar 3,35 atau capaian kinerja sebesar 118,81%. Adapun penjelasan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan indikator pada Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kekuatan

Kekuatan terdapat pada Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data, Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE, dimana dokumen kebijakan memuat penjelasan proses reuiu, evaluasi, dan menghasilkan kebijakan baru.

Kelemahan

Namun disisi lain, Hasil reuiu dan evaluasi Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi perlu ditindaklanjuti sehingga menghasilkan kebijakan baru.

b. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan indikator pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kekuatan

Kekuatan terdapat pada Kematangan Arsitektur SPBE Instansi, Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi, dan Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE, dimana kebijakan sudah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kelemahan

Namun disisi lain, terdapat kelemahan pada Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE belum menunjukkan proses reviu dan evaluasi secara periodik.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan indikator pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kekuatan

Kekuatan terdapat pada Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE yaitu pembuatan Aplikasi SPBE yang terkendali dan terpadu pada unit diskominfo dan terdapat hasil evaluasi. Kematangan Layanan Pusat Data yaitu terdapat Dokumen interkoneksi dengan pusat data, hasil evaluasi/reviu, dan perbaikan dari hasil reviu.

Kelemahan

Namun disisi lain, terdapat kelemahan pada Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi dan Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah belum tersedia penjelasan peningkatan pengoperasian jaringan intra.





d. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan indikator pada Aspek Penyelenggara SPBE telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kekuatan

Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi yang menunjukkan Tata Kelola Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE melalui dokumen Tim koordinasi SPBE, Sosialisasi Monev SPBE, Sosialisasi E Monev SPBE semua OPD, Asistensi dan Review, Rekomendasi tindak lanjut, Sentralisasi Layanan SPBE, Telaahan Staf Tindak Lanjut Reviu SPBE, Tindak Lanjut Reviu SPBE, dan Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Kelemahan

Namun disisi lain, terdapat kelemahan pada Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE belum menunjukkan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE dari hasil reviu dan evaluasi.

e. Penerapan Manajemen SPBE

Kekuatan

Kekuatan terdapat pada Penerapan Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dan Kematangan Penerapan Manajemen Data telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kelemahan

Namun disisi lain, terdapat kelemahan pada Penerapan Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan dan Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE belum dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

f. Audit TIK

Secara keseluruhan indikator pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kekuatan

Kekuatan terdapat pada Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman Audit.

Kelemahan

Namun disisi lain, terdapat kelemahan pada Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE belum dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

g. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan indikator pada Layanan Administrasi SPBE telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kekuatan

Kekuatan terdapat pada Kematangan Layanan Kepegawaian dan Kematangan Layanan Kinerja Pegawai telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi secara periodik.

Kelemahan

Namun disisi lain, terdapat kelemahan pada Kematangan Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah masih tinggal layanan interaksi, belum memberikan fitur kolaborasi dengan sistem SPBE lainnya.

h. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan indikator pada Layanan Publik Berbasis Elektronik telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kekuatan

Kematangan Layanan Publik Sektor 1 - 3 dimana Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi secara periodik.

Kelemahan

Namun disisi lain, terdapat kelemahan pada Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Kematangan Layanan Data Terbuka, dan Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) belum menunjukkan pelaksanaan proses perbaikan dari hasil reviu dan evaluasi secara periodik.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Pendukung :

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Faktor Pendukung :

1. Kebijakan Berupa Peraturan Walikota tentang Kebijakan Internal SPBE ,Arsitektur, Peta rencana dan manajemen SPBE
2. Regulasi, Manajemen & Tata Kelola yang baik sesuai peraturan yang berlaku, serta dukungan dari pimpinan, SDM dan infrastruktur.
3. Manajemen dan Tata Kelola yang baik, tersedianya pengembangan aplikasi monitoring jaringan dan server, serta SDM yang memiliki kualitas yang bagus.
4. Telah dilakukan beberapa langkah dalam peningkatan manajemen data dan layanan data diantaranya dengan penerapan replikasi Portal Data dan pelaksanaan Bimbingan teknis bagi para pengelola data.
5. Telah dibuatnya pedoman standar SMKI;
6. Telah dilakukan audit keamanan SPBE;
7. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan BSSN.
8. Instalasi sensor monitoring traffic berbasis open source oleh BSSN.
9. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan BSSN.

Faktor Penghambat :

1. Banyak Aplikasi yang telah di bangun belum terintegrasi.
2. Pemahaman terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik belum merata.
3. Keterbatasan penyimpanan data untuk berbagai macam aplikasi yang dikembangkan.

4. Banyaknya serangan siber terhadap berbagai aplikasi dan layanan online yang telah di bangun
5. Pembangunan SPBE belum terarah secara efektif
6. Telah dilakukan beberapa langkah dalam peningkatan manajemen data dan layanan data diantaranya dengan penerapan replikasi Portal Data dan pelaksanaan Bimbingan teknis bagi para pengelola data. Namun berdasarkan hasil evaluasi, keterbatasan sumber daya di Perangkat Daerah mengakibatkan beberapa kualitas data menurun sehingga perlu dilakukan beberapa alternatif penyelesaian, diantaranya proses input data beberapa Perangkat Daerah kembali dilakukan oleh Diskominfo
7. Kurangnya SDM yang kapasitas dan kompetensinya memadai dalam lingkup persandian dan keamanan informasi.
8. Tidak ada tenaga ahli keamanan sistem informasi dari ASN yang sudah bersertifikat keamanan informasi.
9. Pengelolaan Tim Tanggap Insiden Siber berikut tools (SIEM dan SOC) belum optimal.
10. Minimnya daya dukung anggaran untuk mendukung sarana prasarana persandian.



Solusi :

1. Membangun Platform Kolaborasi Bandung Sadayana dan memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan untuk berbagi pakai data.
2. Melakukan Monev SPBE ke masing-masing OPD dan Penerapan Manajemen Knowledge SPBE ke OPD lain serta membangun program literasi ngulik SPBE
3. Pemanfaatan Pusat Data Nasional yang disediakan oleh kementerian Kominfo
4. Penerapan ISO keamanan system informasi, lisensi keamanan dan penyediaan infrastruktur keamanan system informasi
5. Diperlukan Arsitektur SPBE yang jelas dan terukur sebagai pedoman dalam mengimplementasikan SPBE yang efektif dan efisien.

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya pada Perangkat Daerah
7. Sudah mengajukan formasi JFS dan JFMI sesuai Anjab/ABK untuk pemenuhan SDM.
8. Mendaftarkan ASN untuk mengikuti bimtek/ pelatihan dari BSSN (sertifikasi).
9. Merekrut tenaga ahli/konsultan perorangan yang berkompeten di bidang keamanan sistem informasi
10. Melakukan asistensi dan bimtek dengan BSSN terkait pemanfaatan SIEM dan juga bimbingan teknis pengelolaan tim tanggap insiden siber dan rencana inisiasi pembentukan SOC pada tahun 2024.
11. Penambahan anggaran untuk mendukung sarana dan prasarana persandian dan keamanan informasi pada tahun 2024

5. Nilai EPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam kerangka evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.9
Verifikasi dan Validasi LPPD di Sistem ELPPD
Kemendagri oleh Inspektorat Kota Bandung



Nilai EPPD diukur dari skor evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Nilai EPPD tahun 2020 dan 2021 terhadap LPPD tahun 2019 dan 2020 tidak dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan untuk Nilai EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD 2021 yang dikeluarkan nilainya tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor:100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja LPPD dan EPPD
Kota Bandung Tahun 2019 – 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023			TAHUN 2023
			REAL-ISASI	REAL-ISASI	REAL-ISASI	REAL-ISASI	TARGET	REAL-ISASI	%	TARGET AKHIR RPJMD
1	Nilai LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
2	Nilai EPPD	Skor			N/A	N/A	3.4044	3,3362	98,00	3.4044

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Indikator Nilai EPPD terdiri dari Program Pemerintahan dan Kesra, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai berikut :

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	TAHUN 2023			
	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan(Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.062.981.800	1.110.426.000	919.757.500	82,43%
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1.062.981.800	1.110.426.000	919.757.500	82,43%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.062.981.800	1.110.426.000	919.757.500	82,43%

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian “Nilai EPPD” terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain pembinaan kinerja perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi secara berkala dalam memantau kinerja perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar Perangkat daerah lebih optimal dapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci dan dokumentasi kinerja kota lainnya serta lebih optimal dalam menyajikan data pendukung kinerjanya.

Faktor Penghambat :

Kurang pahamnya pengolah data OPD dalam menyusun laporan dan tidak dapat menyajikan data pendukung secara lengkap, Adanya mutasi pegawai OPD yang

bertanggung jawab terhadap pengolahan data OPD, dan Rekam data OPD yang tidak lengkap.

Solusi :

Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis terhadap pengolah data dan penanggungjawab dokumen dokumen OPD, perlu adanya SDM khusus yang menangani pengolahan data LPPD OPD, dan harus adanya komitmen OPD untuk melakukan perekaman data secara akurat dan lengkap.

Sasaran 5 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota. Sasaran Sasarannya berupa Indeks Daya Saing Pariwisata, Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ke 5 atau tahun terakhir RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,39	3,41	100,59	3,55	3,29	92,68	3,29	3,29	100
2	Angka Kemiskinan	3,86	3,38	111,75	3,66	3,99	90,98	3,49	4,37	74,79
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,39	8,18	102,50	8,34	11,19	65,83	11,08	11,46	96,57
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		104,95			83,16			90,45		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,30	3,41	103,33	3,31	3,528	106,59
2	Angka Kemiskinan	3,32	4,25	71,99	3,14	3,96	73,89
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,86	9,55	112,06	10,26	8,83	113,94
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		95,79			98,14		

Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota dapat dilihat dari sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator ke-1 (satu) “Indeks Daya Saing Pariwisata” tahun 2023 yaitu 3,528 dari target tahun 2023 yaitu 3,31 atau melebihi target dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 106,59%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,41 mengalami peningkatan sebesar 0,12. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 3,31 maka capaian kerjanya 106,59%.

Capaian kinerja indikator ke-2 (dua) “Angka Kemiskinan” tahun 2023 yaitu 3,96 tidak tercapai dari target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu 3,14 dengan persentase realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 73,89%. Persentase capaian tersebut mengalami

kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu 71,99. Bila dibandingkan realisasi tahun 2022 dan 2023 Angka Kemiskinan di Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 0,29%. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 3,14 maka capaian kerjanya 73,89% atau tidak tercapai.

Capaian kinerja indikator ke-3 (tiga) “Tingkat Pengangguran Terbuka” dari target tahun 2023 10,26 tercapai melebihi target yaitu 8,83 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 113,94%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu 0,72%. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 10,26 maka capaian kerjanya 113,94%.



1. Indeks Daya Saing Pariwisata

Indeks Daya Saing Pariwisata atau Travel and Tourism Competitive Index (TTCI) adalah Laporan Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata adalah produk unggulan platform untuk membentuk masa depan mobilitas, yang menyatukan para pemimpin dunia untuk memastikan sistem perjalanan dan transportasi memenuhi tuntutan abad ke-21. Laporan ini menyediakan alat yang berharga untuk dipahami oleh para pembuat kebijakan, perusahaan dan sektor pelengkap dan mengantisipasi tren dan risiko yang muncul dalam perjalanan dan pariwisata global, mengadaptasi kebijakan dan praktik mereka, dan mempercepat model-model baru yang memastikan umur panjang dari sektor penting ini. Kombinasi ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menggabungkan wawasan dan tindakan ke dalam mempercepat perubahan.

Tabel 2.45
Indeks Daya Saing Pariwisata
Kota Bandung Tahun 2023

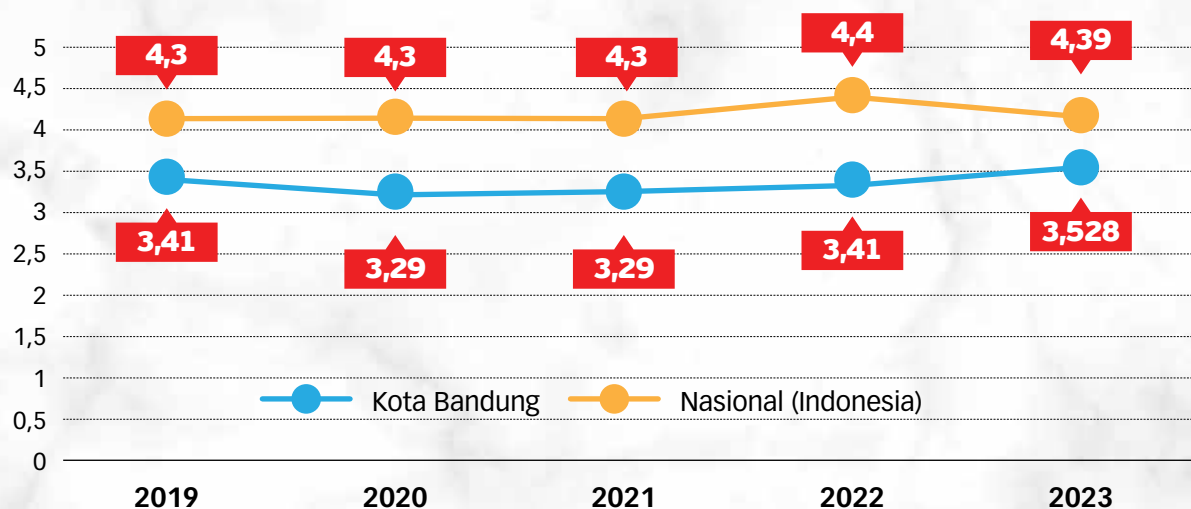
INDEX	BASLIN SCORE (1 – 7)	ACHIEVEMENT SCORE (1 – 7)	GAP	BASLIN SCORE (0 – 100)	ACHIEVEMENT SCORE (0 – 100)
Enabling Environment	1.75	1,102	37,03%	25	15,7
T & T Policy and Enabling Conditions	1.75	0,862	50,73%	25	12,3
Infrastructure	1.75	0,817	53,28%	25	11,7
Natural and Cultural Resources	1.75	0,807	53,89%	25	11,5
	7	3,588		100	51,26

Capaian Nilai TTCI = 3,588 (Skala 1 – 7) → Nilai default = 4
= 51,26 (Skala 0 – 100) → Nilai default = 70

Capaian kinerja indeks daya saing pariwisata pada tahun 2023 mencapai 106,59 atau 6,59% melampaui target kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja nyata indeks daya saing pariwisata tahun 2023 adalah 3,528 dari target 3,31. Capaian kinerja 2023 mengalami peningkatan 0,118 poin atau 3,46% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022. Sementara jika dibandingkan dengan target kinerja RPJMD 2018-2023, capaian kinerjanya telah mencapai 106,59% atau melampaui target kinerja. Dengan demikian capaian kinerja ini dapat dikatakan sangat berhasil.

Kemudian jika dibandingkan dengan capaian kinerja nasional (Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia), capaian kinerja ini berada di bawah capaian kinerja nasional sebesar 0,772 poin dari capaian kinerja nasional pada tahun 2021 yaitu 4,39. Namun demikian, capaian kinerja indeks daya saing pariwisata ini belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada kabupaten/kota lainnya karena belum terdapat data akhir dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

Grafik 2.23
Indeks Daya Saing Pariwisata
Indonesia dan Kota Bandung



Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung capaian “Indeks Daya Saing Pariwisata” terdiri dari :

No.	Program	Kegiatan	Indikator
A.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi berbasis community based tourism yang dikembangkan (rintisan)
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase UJP yang melakukan perbaikan standar hasil pembinaan
B.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Objek daya tarik pariwisata dipromosikan
C.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Prasarana ruang kreatif tersedia
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif berkembang / teraktivasi
D.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rata-rata Persentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang memenuhi passing grade pendidikan dan pelatihan
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks Daya Saing Pariwisata terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja tahun 2023, terdapat beberapa faktor yang mendorong capaian yaitu:

- Kesiapan TIK di Kota Bandung dapat mendorong pertumbuhan lingkungan bisnis pariwisata yang baik
- Kebijakan prioritas pariwisata di Kota Bandung.
- Infrastruktur darat dan udara cukup memadai.
- Sumber daya budaya dan perjalanan bisnis mencukupi.

Faktor Penghambat

Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yang justru menjadi faktor penghambat peningkatan daya saing pariwisata di Kota Bandung, yaitu sebagai berikut:

- Dapat disimpulkan bahwa Keempat indikator ini masuk dalam kategori “Below Average”.
- Tingkat keamanan menurun dengan banyaknya kasus kriminal di tempat wisata.
- Keterbukaan internasional terutama penerimaan terhadap turis asing serta tidak adanya akses langsung internasional ke Kota Bandung.
- Ketersediaan objek wisata buatan minim.

Solusi

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemkot Bandung untuk mengatasi faktor tersebut sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk melakukan kampanye dan pengamanan di lokasi wisata yang rawan terhadap tindak pelanggaran kriminal. Sementara Disbudpar dan Satpol PP dapat berkolaborasi dengan program pengamanan lokasi wisata dengan memperbanyak sosialisasi dan patroli secara berkala.
- Mengkampanyekan Bandung Soméah untuk membangun keterbukaan terhadap turis asing. Sementara terkait akses akan sangat bergantung situasi pandemi.
- Mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif yang berbasis pariwisata berkelanjutan untuk memberikan diferensiasi dan diversifikasi produk wisata. Selain itu, Pemkot perlu berbenah pada sektor destinasi wisata perkotaan dengan memperbaiki tata kota, mengatasi kemacetan, permasalahan lingkungan, serta menggeser pola pembangunan destinasi yang memegang prinsip berkelanjutan.
- Mengembangkan Dashboard Sistem Manajemen Data Kepariwisata

2. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan persentase suatu penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).



Sumber: BPS Kota Bandung



Pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kota Bandung mencapai 102,80 ribu orang (3,96 persen), berkurang sebanyak 7,02 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2022 yang sebanyak 109,82 ribu orang (4,25 persen). Garis Kemiskinan (GK) Kota Bandung pada Maret 2023 sebesar Rp.591.124 per kapita per bulan, terjadi peningkatan sebesar Rp45.449 dibandingkan GK pada Maret 2022 sebesar Rp545.675.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung capaian “Angka Kemiskinan” sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Indikator
A	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Cakupan warga miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
			Persentase DTKS terpilah yang dimanfaatkan dalam penanganan kemiskinan
			Cakupan anak terlantar dalam panti yang memperoleh layanan asuh sesuai NSPK
1		Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah dokumen pelaporan pemantauan pemeliharaan anak terlantar
2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan data fakir miskin yang valid dan mutakhir
			Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pengembangan ekonomi dan bantuan stimulan usaha ekonomi

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Angka Kemiskinan terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Pemberian layanan kepada warga miskin dan PPKS di Kota Bandung tentunya tidak terbatas hanya bersumber dari APBD Kota Bandung mengingat jumlah warga miskin dan PPKS di Kota Bandung yang relatif tinggi, oleh karena itu kami terus menjalin hubungan baik dengan seluruh stakeholder seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, para perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang turut aktif menanggulangi permasalahan kemiskinan serta Potensi Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Kota Bandung

Faktor Penghambat

Belum adanya anggaran untuk layanan perlindungan dan jaminan sosial yang bersumber dari APBD Kota Bandung

Solusi

Salah satu solusi guna meminimalisir kendala tersebut ialah mengalokasikan anggaran untuk layanan Perlindungan Sosial berupa Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Bandung

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Badan Pusat Statistik (2023) pengangguran merupakan Masyarakat yang aktif dalam mencari pekerjaan, masyarakat yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru, masyarakat yang tidak mencari pekerjaan karena dirasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan, serta masyarakat yang tidak aktif mencari pekerjaan karena sudah memiliki pekerjaan namun belum memulai pekerjaan tersebut.



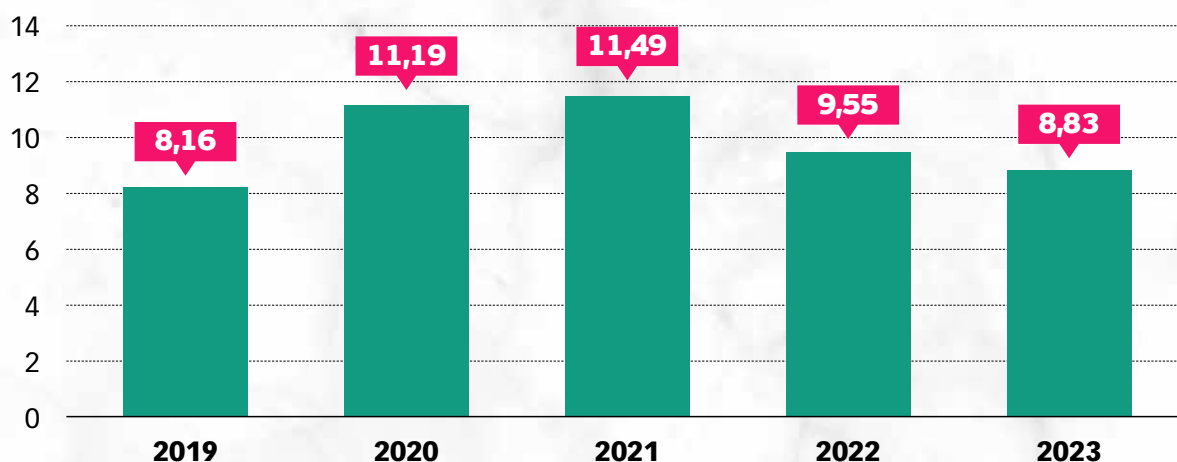
Menurut Mankiw dalam Yuniarti & Imaningsih (2022) pengangguran merupakan posisi dimana seseorang sedang menunggu untuk melakukan pekerjaan maupun seseorang yang telah diberhentikan dari tempat kerjanya terdahulu. Oleh karena itu indikasi besarnya persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka (Badan Pusat Statistik, 2023) jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja kondisi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran.

Formulasi Pengukuran

$$\text{TPT} = (\text{Jumlah Pengangguran} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) * 100\%$$

Selanjutnya Indikator sasaran ketiga capaian Misi 3 adalah Tingkat Pengangguran terbuka, berdasarkan tabel di atas Capaian Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung pada tahun 2023 sebesar 8.83 %, dari target 10,26 % capaian kinerja 113,94 %. Artinya Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,72 poin atau 7,53 % dari Tahun 2022. Mampunya menekan jumlah pengangguran atau menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023, sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mulai terkendali berdampak pada mulai aktifnya aktivitas industri perusahaan-perusahaan mulai membuka kembali lowongan pekerjaannya, begitu juga dengan sektor pariwisata di Kota Bandung telah membaik aktivitasnya, juga adanya konsentrasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia oleh pemerintah pusat melalui penguatan vokasi, sejalan dengan program pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan calon wirausaha baru. Selain itu adanya penyelenggaraan job fair sebanyak 2 (dua) kali sebagai upaya pemerintah Kota Bandung untuk berkontribusi dalam upaya menurunkan pengangguran. Tren pengangguran Kota Bandung seperti grafik dibawah ini :

Grafik 2.24
Perbandingan Capaian Kinerja TPT Tahun 2019-2023
Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber: Data BPS Kota Bandung Tahun 2023

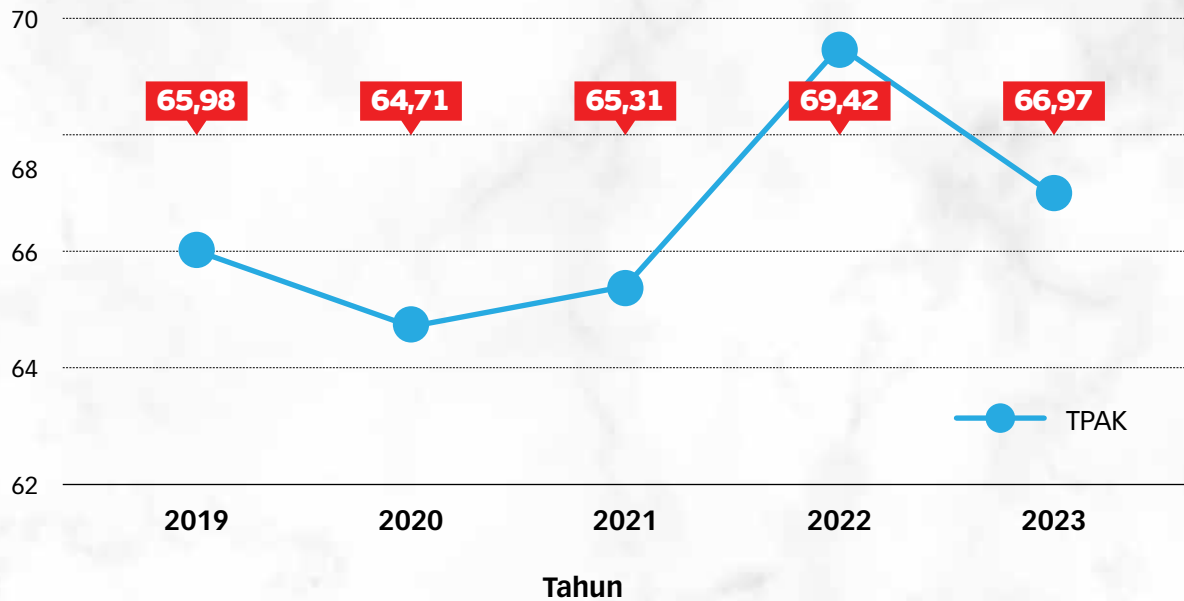


Data di atas memperlihatkan tren pengangguran rentang waktu Tahun 2019 – Tahun 2023 mengalami fluktuatif. Pada 2019 Kota Bandung menjadi peringkat pertama sebesar 8,16%, lalu mengalami kenaikan tahun 2020 menjadi 11,19%. Namun, tahun 2021 kembali naik sebesar 10,64%. Tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 11,19%, sebagai akibat Adanya pandemi Covid-19, jumlah lowongan pekerjaan mengalami penurunan, peningkatan jumlah pengangguran dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak COVID-19. Mulai dari yang dirumahkan, pengurangan jam kerja, hingga benar-benar tidak lagi bekerja, pada tahun 2021 terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT sebesar 11,46% lebih tinggi dari target tahun 2021 sebesar 11,08% atau capaian kinerja sebesar 96,57%, dikarenakan sektor-sektor usaha belum membuka kembali usahanya secara normal.

Pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka turun 9,55% mengalami penurunan sebesar 1.91 point atau capaian kinerja 112,06 %. Tahun 2023 turun kembali menjadi 8,83 % walaupun tidak signifikan dengan capaian kinerja 113,94% . Jumlah angkatan kerja yang berstatus pengangguran pada tahun 2023 adalah 116.4 ribu orang. Jika dibanding dengan tahun 2022 (137,1 ribu orang) maka jumlah pengangguran di Kota Bandung tahun 2023 berkurang 20.7 ribu orang, sedangkan komposisi angkatan kerja Tahun 2023 terdiri dari 1.202,5 ribu orang penduduk yang bekerja dan 116,4 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 116,7 ribu orang. Penduduk bekerja turun sebanyak 96,0 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 20,7 ribu orang. (BRS Kota Bandung 2023).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 66,97 persen, turun 2,45 persen poin dibandingkan Agustus 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah, berikut ini tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2019-2023.

Grafik 2.25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2023

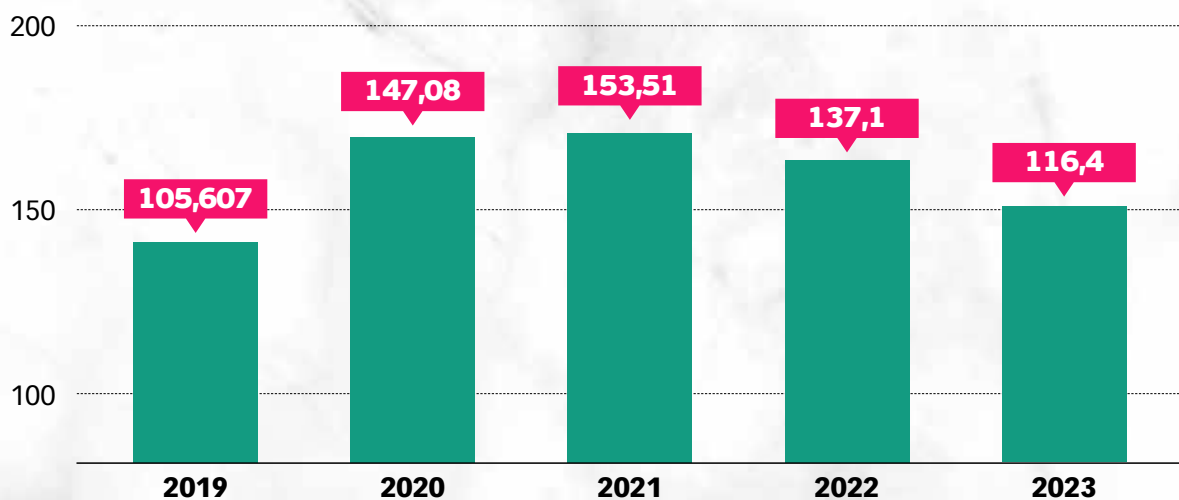


Sumber: BPS Tahun 2023

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 83,22 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 50,73 persen. Jika dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 2,07 persen poin (dari 85,29 persen menjadi 83,22 persen) sedangkan yang perempuan mengalami penurunan sebesar 2,64 persen poin (dari 53,37 persen menjadi 50,73 persen). (BRS Kota Bandung 2023).

Apabila dilihat dari karakteristik pengangguran di Kota Bandung TPT laki-laki sebesar 9,37 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 7,95 persen. Jumlah pengangguran di Kota Bandung dapat terlihat pada grafik di bawah ini :

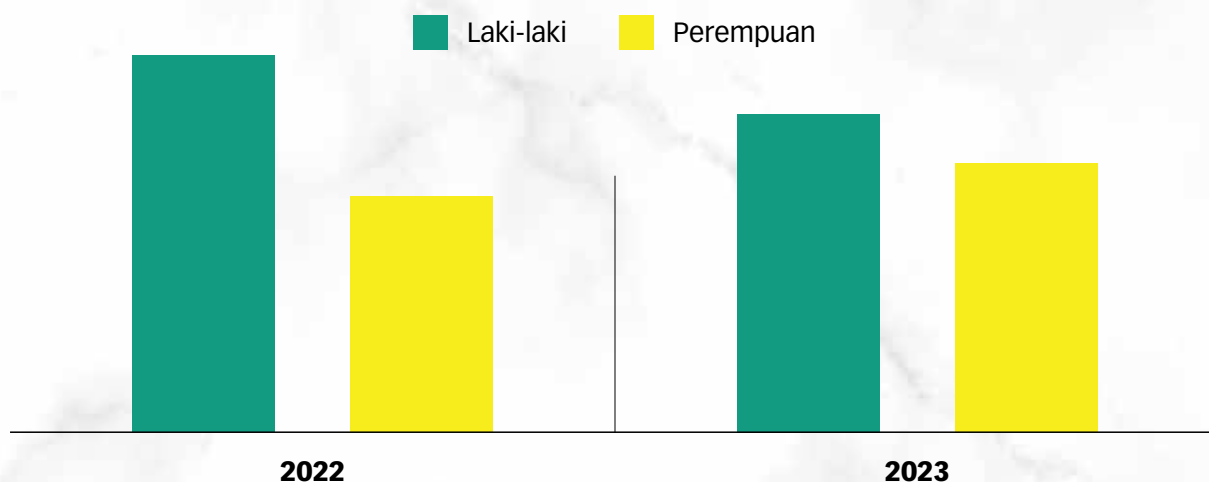
Grafik 2.26
Perbandingan Jumlah Pengangguran Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2023

TPT laki-laki sebesar 9,37 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 7,95 persen. Jika dibandingkan Agustus 2022, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,79 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,00 persen poin (BPS 2023), seperti grafik tabel dibawah ini :

Grafik 2.27
Perbandingan Jumlah Pengangguran Tahun 2022-2023
Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2023

Jumlah Pengaguran berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja adalah sebagaimana berikut :

Grafik 2.28
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen)



Lampiran 1. Karakteristik Penduduk Bekerja, Agustus 2023			
Karakteristik Penduduk Bekerja	Laki-Laki	Perempuan	Laki- Laki+Perempuan
	ribu orang	ribu orang	ribu orang
(1)	(2)	(3)	(4)
Status Pekerjaan Utama			
1 Berusaha sendiri	179.5	120.5	300.0
2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	39.3	19.8	59.1
3 Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	47.0	9.5	56.6
4 Buruh/karyawan/pegawai	429.5	250.2	679.7
5 Pekerja bebas di pertanian & non pertanian	21.3	14.0	35.3
6 Pekerja keluarga/tidak dibayar	25.9	45.9	71.8
Jumlah	742.5	459.9	1,202.5
Status Pekerjaan Formal/Informal			
Formal	476.5	259.7	736.3
Informal	266.0	200.2	466.2
Jumlah	742.5	459.9	1,202.5
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
< SD	103.0	76.0	179.0
SMP	120.3	66.5	186.7
SMA Umum	185.5	118.5	304.0
SMA Kejuruan	149.3	68.2	217.5
Diploma I/II/III	41.4	32.3	73.7
Universitas	143.1	98.4	241.5
Total	742.5	459.9	1,202.5

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, seluruh tamatan pendidikan mengalami penurunan selama setahun terakhir, kecuali pada tamatan SD ke bawah yang mengalami kenaikan cukup besar. Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Umum merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,08 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 5,21 persen.(BPS 2023).

Dibandingkan Agustus 2022, TPT pada seluruh jenjang pendidikan mengalami penurunan persen poin kecuali tamatan SD ke bawah yang naik cukup besar yaitu sebesar 6,68 persen poin. Penurunan persen poin TPT terbesar terjadi pada kategori pendidikan SMP yaitu sebesar 4,38 persen poin.

Program dan Kegiatan Pendukung tercapainya Indikator Tingakt Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Program pelatihan kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	1. Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	60
		2. Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	60
2.	Program perencanaan tenaga kerja	1. Jumlah dokumen ketenagakerjaan	Dokumen	2
3.	Program penempatan tenaga kerja	1. Cakupan pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	40
		2. Jumlah lowongan pekerjaan baru	orang	10.500
		3. Jumlah peserta kegiatan pemberi kerja (padat karya)	orang	800
4.	Program Hubungan Industrial	4. Cakupan kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	50
		5. Cakupan Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek aktif	%	50
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100

Penyerapan pencari kerja menunjukkan kinerja sangat baik, secara kuantitas menunjukkan adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Dari tahun sebelumnya, Tahun 2023 penempatan tenaga kerja 9000 orang naik 3114 orang dari Tahun 2022 (5886 orang) , tren penempatan tenaga kerja seperti pada grafik 3.7 di atas, penempatan di atas tahun 2020 ada penurunan penempatan yang sangat signifikan hal ini adanya pandemik Covid 19, Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 trennya meningkat, kenaikan yang cukup tinggi Tahun 2023 sebanyak 3114 orang dibanding Tahun 2022 , kondisi ini dikarenakan :

1. Ada peningkatan jumlah lowongan kerja dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2023 ada kegiatan job fair/bursa kerja luring dua kali dalam setahun, sebanyak 80 perusahaan dengan lowongan kerja (loker) yang tersedia 12727 Perusahaan yang paling banyak membuka loker berasal dari sektor ritel, seperti Alfamart, Indomart, Griya, Yogya, Circle K dan untuk kerja keluar negeri, dengan jumlah yang registrasi 250890 orang jumlah yang hadir 20791 orang.
2. Para pencari kerja baru, dapat langsung melamar lewat media daring dan tidak mensyaratkan adanya pendaftaran pencari kerja di disnaker, untuk mendapatkan AK 1.
3. Penempatan tenaga kerja AKL (Antar Kerja Lokal) secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan telah adanya komitmen stakeholder (Dinas Ketenagakerjaan dan Perusahaan) dalam memberikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan secara optimal melalui aplikasi New Bima.
4. Peningkatan kapasitas dan pelayanan informasi serta konsultasi kerja melalui fasilitas media daring, dimana pencari kerja tidak perlu datang tapi bisa melalui media online, pelaksanaan Job Fair Online, dan Bursa kerja Khusus BKK melalui IG, twitter, youTube dan Aplikasi New Bima.
5. Pelayanan job fair untuk perusahaan penyedia lowongan kerja telah difasilitasi di New Bima sehingga perusahaan dapat mendaftarkan lowongan kerja di New Bima dan dapat di akses langsung Pencari Kerja.

Sedangkan untuk penyerapan berdasarkan loker masih belum optimal dari 12727 loker yang tersedia hanya 9000 loker yang terisi atau 70,71 %, hal tersebut dikarenakan :

1. Pencari Kerja yang ingin memperoleh pekerjaan dari pemberi kerja untuk pengisian lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya,

serta tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang tersedia atau dalam istilah ketenagakerjaan disebut antara Lowongan Kerja Tersedia dengan Pencari Kerja tidak Link and Match.

2. Masih ada perusahaan yang mensyaratkan kualifikasi jabatan mempunyai pengalaman kerja 5 tahun.
3. Selain itu terjadi perubahan lanskap pasar tenaga kerja akibat krisis ekonomi dan pandemik Covid 19 pendorong terjadinya perubahan lanskap terhadap pasar tenaga kerja . Perusahaan hanya merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan multitasking persyaratan ini akan semakin dibutuhkan oleh perusahaan dalam proses rekrutmen pekerja.
4. Kurangnya tingkat kesadaran dari pihak perusahaan untuk wajib lapor lowongan dan penempatan, kurangnya atau belum optimalnya kinerja dari pengurus bursa kerja khusus untuk laporan penempatan, tidak adanya sanksi yang berat terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan wajib lapor.
5. Pelaksanaan job fair masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang setiap tahun meningkat job fair sebagai sarana dan prasarana mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja.



Alternatif solusi yang telah dilaksanakan guna mengoptimalkan angka penyerapan Tenaga Kerja di pasar kerja formal maupun di sektor informal adalah melalui :

1. Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja/Lowongan kerja melalui Job Fair/Pameran Kerja dan Sistem Bursa Kerja On-line, yaitu dengan memperbaiki layanan sistem ketenagakerjaan agar dapat diakses dengan mudah dan murah. Untuk mengatasi pengangguran, perlu adanya informasi yang cepat mengenai lowongan pekerjaan. Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi dan dapat diatasi dengan adanya website Disnaker dan aplikasi New Bimma yang tidak hanya menyediakan layanan bursa kerja, tetapi hampir 30 layanan ketenagakerjaan dapat diakses secara online.

2. Terobosan inovasi Job Fair melalui New Bimma semakin ditingkatkan. Inovasi yang dilakukan dengan peningkatan pelayanan di New Bimma bagi perusahaan, sehingga perusahaan penyedia lowongan kerja dapat mendaftar lowongan kerja di New Bimma dan diakses langsung Pekerja.
3. Lebih pengoptimalkan pelatihan berbasis kompetensi dan bersertifikasi terutama di bidang teknologi IT dan Teknologi tepatguna atau yang berbasis kebutuhan industri. Serta mendorong Balai Latihan Kerja untuk memiliki sarana dan prasarana sehingga bisa lebih optimal dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi .Selain itu juga memfasilitasi pelatihan kerja yang berbasis masyarakat.
4. Adanya dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif. Seperti; pembinaan mental, taat beragama, memperbaiki karakter, memiliki kepribadian yang baik, memperbaiki kapasitas dan kualitas yang menjadikan diri diterima di lapangan pekerjaan, karena diindikasikan penduduk Kota Bandung bila upah kerja rendah maka orang lebih suka menganggur.
5. Dengan adanya trasformasi digital semakin berkembang dalam memberikan pelayanan, perlu mengembangkan kemampuan pengantar kerja sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja.
6. Adanya Penambahan kegiatan job fair untuk pelaksanaan tahun 2024.



Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Sasaran-Sasarannya berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Luasan RTH dan Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ke 5 (lima) atau tahun terakhir RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	35,35	45,22	127,92	35,47	48,54	136,85	51,63	5,84	104,28
2	Persentase Luasan RTH	12,4	12,22	98,55	12,60	12,25	97,22	12,75	12,40	97,18
3	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	98,00	97,99	99,99	98,30	98,32	100,02	98,50	98,50	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		108,82			111,36			100,49		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,71	55,70	107,72	51,79	56,32	108,75
2	Persentase Luasan RTH	13,26	12,44	93,82	13,77	12,49	90,70
3	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	98,70	98,70	100	99,00	98,57	99,57
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		100,51			99,67		

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dapat dilihat dari sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator ke-1 (satu) “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” dari target tahun 2023 yaitu 51,79 dengan realisasi melebihi target yaitu 56,32 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 108,75%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2022 sebesar 55,70 mengalami peningkatan sebesar 0,62. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 51,79 maka capaian kerjanya 108,75% atau melebihi target.

Capaian kinerja indikator ke-2 (dua) “Persentase Luasan RTH” dari target tahun 2023 yaitu 13,77 dengan realisasi 12,49 atau tidak mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 90,70%. Capaian kinerja tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu 93,82%.

Capaian kinerja indikator ke-3 (tiga) “Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah” dari target tahun 2023 yaitu 99,00 atau tidak mencapai target dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 99,57%. Capaian kinerja tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2022 yaitu 100%.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

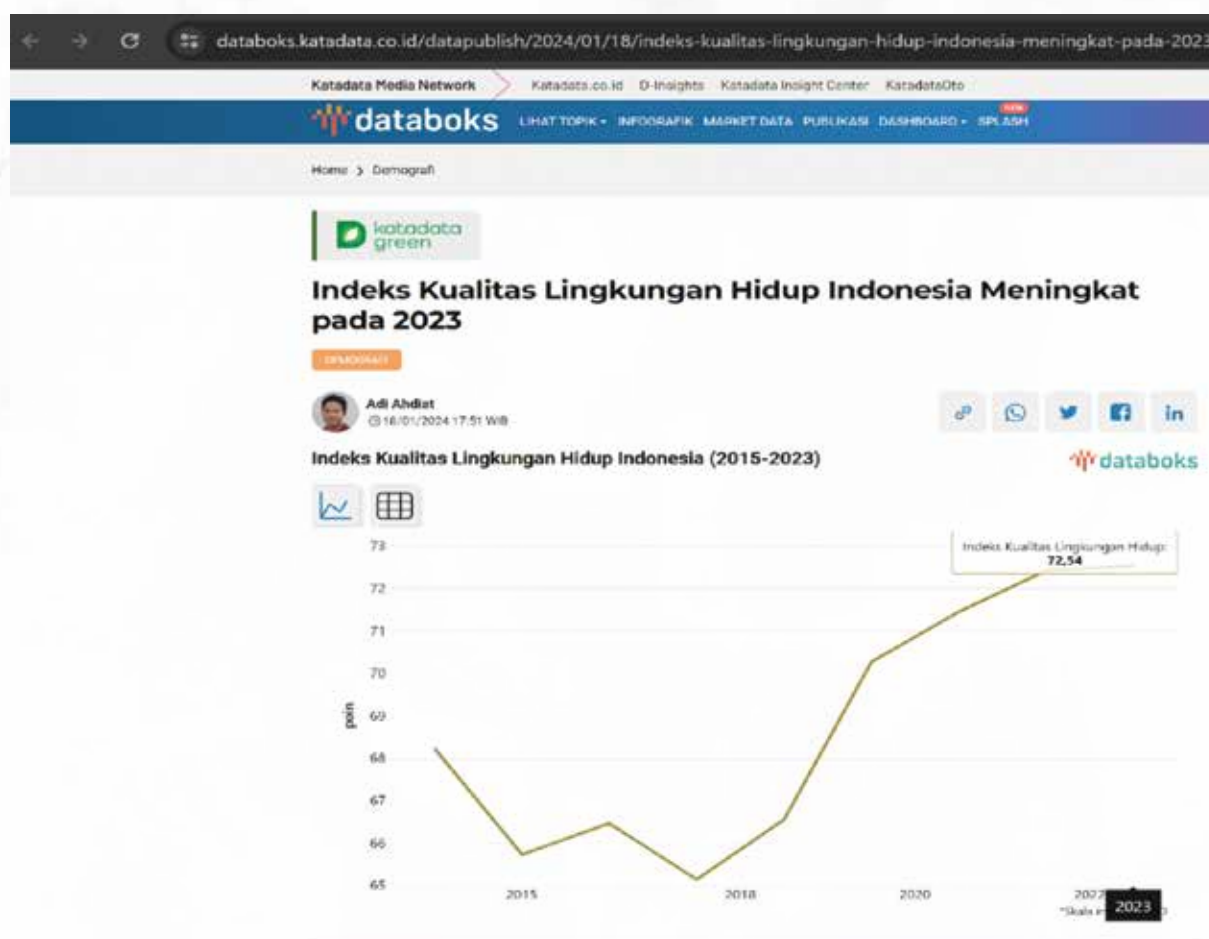
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan menjadi salah satu indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung karena indikator IKLH ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan formulasi baru, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27/2021, tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rumus pembobotan 0,376 pada Indeks Kualitas Air (IKA), 0,405 pada Indeks Kualitas Udara (IKU) dan 0,219 pada Indeks Kualitas Lahan (IKL).



Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Penggunaan IKLH sebagai indikator sasaran RPJMD telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 mengenai Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, yang merupakan pedoman muatan RPJMD yang berwawasan lingkungan. Sedangkan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD dan tahun terakhir Perubahan RPJMD, capaian kinerja indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun ini adalah sebesar 108,75%. Nilai capaian pada tahun 2023 ini adalah nilai capaian akhir RPJMD dengan capaian kinerja sebesar 108,75%.

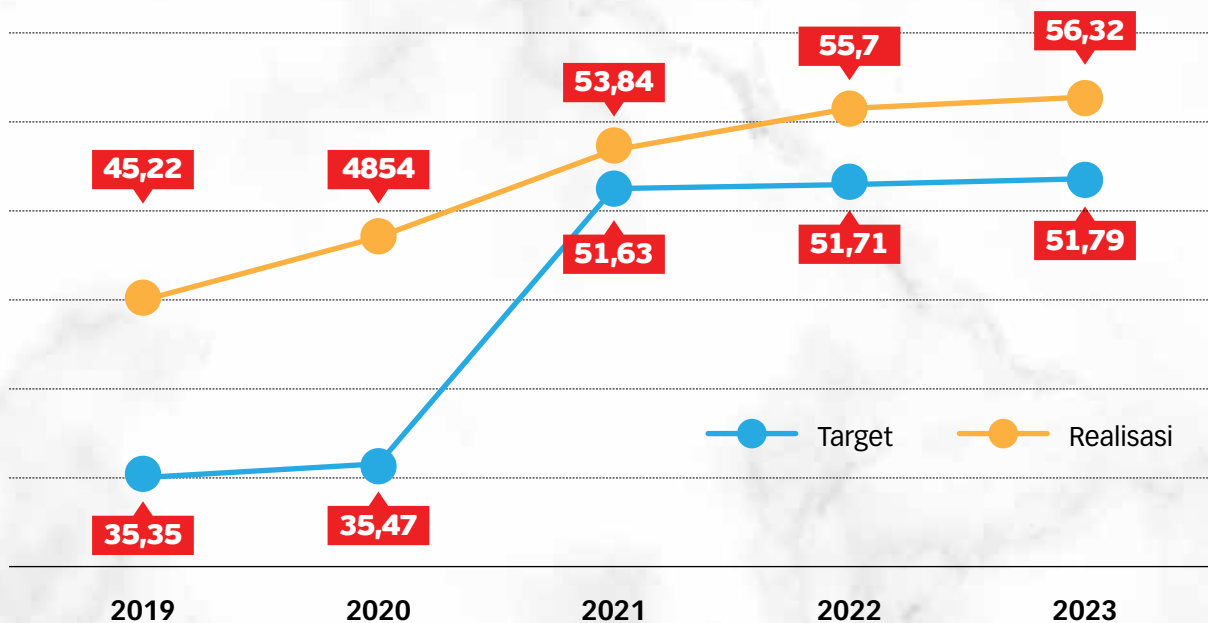


Capaian kinerja indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2023 ini meningkat sebesar 0,62 poin dari tahun 2022. Peningkatan nilai IKLH di Kota Bandung ini sebanding nilai IKLH Indonesia, seperti yang diberitakan di halaman website Katadata Media Network pada tanggal 18 Januari 2024 dengan judul “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Meningkat pada 2023”. Berdasarkan berita tersebut, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia pada 2023 mencapai 72,54 dari skala 100 poin, meningkat tipis dibanding 2022.

Berdasarkan berita tersebut, dikemukakan bahwa rincian nilai IKLH Indonesia pada 2023 berdasarkan komponen dan kategori kualitasnya adalah sebagai berikut:

- Indeks kualitas air : 54,59 (kualitas sedang)
- Indeks kualitas udara : 88,67 (kualitas baik)
- Indeks kualitas tutupan lahan : 61,79 (kualitas sedang)
- Indeks kualitas air laut : 78,84 (kualitas baik).

Grafik 2.29
Capaian IKLH Kota Bandung
Tahun 2019 - 2023



Perkembangan capaian kinerja indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari awal masa RPJMD, dapat dilihat pada grafik di samping ini. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa capaian IKLH naik dari tahun ke tahun yaitu naik sebanyak 3,32 poin pada tahun 2020, kemudian naik kembali sebesar 5,30 poin di tahun 2021, naik sebesar 1,86 poin di tahun 2022 dan naik kembali sebesar 0,62 poin di akhir tahun masa RPJMD yaitu di tahun 2023.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter derajat asam (pH), Oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), nitrat (NO₃-N), total fosfat (T-Phosphat) dan fecal coliform; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; dan (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Formulasi perhitungan IKLH adalah sebagai berikut :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Sedangkan untuk menghitung IKA, IKU dan IKL digunakan formulasi sebagai berikut :

$$IKA = \sum_{PIj=0}^{PIj>10} Koefisien \times Proporsi PIj$$

$$PIj = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)_M^2 + (Ci/Lij)_R^2}{2}}$$

Keterangan:

- $(Ci/Lij)_M$ adalah nilai maksimum dari Ci/Lij
- $(Ci/Lij)_R$ adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij
- Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut:
 - Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PIj \leq 1,0$
 - Tercemar ringan jika $1,0 < PIj \leq 5,0$
 - Tercemar sedang jika $5,0 < PIj \leq 10,0$
 - Tercemar berat jika $PIj > 10,0$

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

$$I_{eu} = \frac{I_{eu_{NO2}} + I_{eu_{SO2}}}{2}$$

$$I_{eu_{SO2}} = \frac{SO_{2rata-rata}}{20}$$

$$IKTL = 100 - \left(\frac{(84,3 - TH) \times (100 - 50)}{(84,3 - 30)} \right)$$

$$TH = \frac{LTH}{LW} \times 100\%$$

Keterangan:

TH : Persentase Tutupan Hutan

LTH : Luas Tutupan ber-Hutan (Untuk RTH, Taman Kehati, Taman Kota, dikali 0,6)

LW : Luas Wilayah

Indeks IKLH ini telah digunakan sebagai indikator di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target pencapaian nasional sebesar 69,7 poin pada tahun 2024 dan indikator tersebut menjadi indikator kinerja yang disarankan untuk digunakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017.

Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan, karenanya tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak lepas dari pengendalian dan aksi-aksi terhadap air, udara dan lahan yang ada di Kota Bandung.



Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	45,22	48,54	53,84	55,70	56,32
Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	41,97	45,78	45,94	48,33	48,32
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	69,79	61,55	78,75	80,56	79,63
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	29,24	29,24	23,20	22,38	26,94

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tercapainya nilai IKLH pada tahun 2023 dipengaruhi oleh meningkatnya nilai IKL. Nilai IKA terus meningkat dari tahun 2019 meskipun menurun sebesar 0,01 poin di tahun 2023, sedangkan nilai IKU mengalami fluktuasi dengan nilai terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 61,55 poin dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 0,93 poin. Peningkatan pada nilai IKL pada tahun 2023 dikarenakan diterimanya data laporan RTH taman oleh Tim verifikator Provinsi dan KLHK.

Tabel 2.47
Target dan Capaian IKLH
Kota Bandung 2023

INDIKATOR	TARGET/ BASELINE DATA (POIN) 2022	TARGET (POIN) 2023	CAPAIAN (POIN) 2023	Capaian Kinerja %
IKLH	55,70	51,79	56,32	108,75
IKA	48,33	46,08	48,32	104,86
IKU	80,56	71,20	79,63	111,84
IKL	22,38	-	26,94	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, 2023

Capaian kinerja IKLH tahun 2023 sebesar 56,32 bila dibandingkan dengan target sebesar 51,79 maka capaian kinerjanya sebesar 108,75%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 51,79 maka capaian kinerjanya sebesar 108,75%.

Capaian ini menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kota Bandung pada lingkup kualitas air, tutupan lahan/vegetasi dan udara selama setahun di Kota Bandung dalam kategori sedang. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Unit analisis terkecil dalam IKLH Nasional adalah Provinsi. Hal ini berarti bahwa intervensi yang dilakukan harus secara region dan menyeluruh di semua sektor pembangunan.

Kategori IKLH "sedang" ini ditunjukkan dengan kualitas udara di 9 lokasi yang mewakili area permukiman, industri, transportasi, dan perkantoran, dengan capaian sebesar 79,63 poin yang termasuk dalam kriteria kualitas udara "baik". Meskipun untuk kualitas air di 66 titik pantau yang mewakili daerah hulu, tengah dan hilir pada 26 sungai Kota Bandung, masih berada pada kategori "kurang" dengan capaian sebesar 48,32 poin.

Cenderung turunnya kualitas udara pada tahun 2023 ini diperkirakan diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah :

- Aktivitas masyarakat yang sudah kembali seperti keadaan saat sebelum terjadinya pandemi covid dengan intensitas transportasi yang kembali tinggi, menyebabkan meningkatnya gas ppolutan yang diemisikan ke udara sehingga kualitas udara cenderung menurun.

- Terjadinya kemarau panjang di tahun 2023 sehingga gas polutan terakumulasi di udara karena tidak terlarutkan oleh air hujan.



Untuk menganalisis lebih rinci maka dapat dilihat dari seluruh komponen lingkungan sebagai berikut :

I. Kualitas Udara Ambien

Kondisi udara ambien Kota Bandung saat ini berada dalam kondisi baik, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Kategori Lokasi Pemantauan	NO ₂ (µg/m ³)	SO ₂ (µg/m ³)	Ieu NO ₂	Ieu SO ₂	Ieu NO ₂ dan SO ₂	IKU	Ieu Gabungan	IKU Gabungan	Keterangan
Transportasi	24,82	12,89	0,62	0,64	0,63	70,41	0,47	79,63	Tidak Tercemar
Pemukiman	9,07	6,70	0,23	0,33	0,28	89,96			
Perkantoran	15,61	11,11	0,39	0,56	0,47	79,28			
Industri	14,59	11,92	0,36	0,60	0,48	78,86			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kadar SO₂ yang paling tinggi ternyata berada di lokasi pemantauan transportasi dan paling rendah di pemukiman. Kadar NO₂ pun sama, yaitu paling tinggi berada di wilayah yang mewakili transportasi dan yang paling rendah berada di pemukiman. Apabila dilihat dari data tersebut terlihat bahwa transportasi merupakan sumber pencemar udara parameter SO₂ dan parameter NO₂ yang paling tinggi.

Terkait keterwakilan titik pantau, pada tahun 2020 telah dilakukan kajian mengenai kesesuaian penetapan titik pantau ini, sehingga hasil dari pemantauan di atas dianggap dapat mewakili kondisi Kota Bandung secara keseluruhan. Namun, masih diperlukan kajian lanjutan yaitu untuk melihat kualitas udara per kategori lokasi yang lebih detail.

Apabila dianalisis lebih jauh lagi, terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi kualitas udara ambien Kota Bandung, yaitu :

- Kualitas Udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak;
- Kualitas Udara Emisi dari Sumber Bergerak, dan
- Pembakaran Sampah.

a. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak

Udara emisi sumber tidak bergerak adalah udara yang dihasilkan dari sumber-sumber polutan udara yang berada dalam bentuk statis seperti cerobong asap pada instalasi industri atau generator set (genset) yang terpasang secara tetap, yang merupakan hasil pembakaran dari bahan bakar yang digunakan. Bahan bakar yang lazim digunakan di Industri diantaranya adalah batubara, solar dan gas.

Kualitas udara hasil pembakaran yang dikeluarkan dari cerobong sangatlah dipengaruhi oleh kinerja instalasi pembakaran dan kualitas bahan bakarnya. Agar udara yang dihasilkan dari cerobong ini tidak mencemari lingkungan, maka kualitasnya harus memenuhi baku mutu yang telah dipersyaratkan. Karenanya, upaya pengawasan terhadap kualitas udara keluaran dari cerobong ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Pengawasan, seperti halnya pengawasan kualitas air, dilakukan secara administratif dan secara langsung di lapangan. Pengawasan secara administratif dilakukan melalui Laporan Penerapan Dokumen Lingkungan setiap 6 bulan sekali yang disampaikan oleh masing-masing pelaku usaha/kegiatan (Laporan Semesteran) ke DLH Kota Bandung. Tidak ada instrumen izin di dalam pengendalian kualitas udara emisi dari sumber tidak bergerak, tetapi rencana pembuatan instalasi pembakaran serta pembuatan cerobong harus disampaikan sejak penyusunan Dokumen Lingkungan.

Sehingga, pemantauan kualitas udara cerobong menjadi salah satu kewajiban pemantauan yang perlu dilaporkan ke DLH Kota Bandung setiap 6 bulan sekali. Kewajiban pemantauan ini tidak hanya meliputi pemantauan kualitas udara emisi cerobong, tetapi juga kualitas udara ambien di sekitar lokasi usaha/kegiatan.

Selain hasil pelaporan, DLH pun melaksanakan uji emisi cerobong sebagai bahan perbandingan atau untuk memverifikasi hasil laporan yang diberikan oleh pelaku usaha. Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan pengujian kualitas udara emisi cerobong di 20 lokasi pelaku usaha dan seluruhnya menunjukkan emisi yang masih di bawah baku mutu yang dipersyaratkan.



b. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Bergerak

Udara emisi sumber bergerak adalah udara yang dihasilkan dari sistem transportasi yaitu kendaraan bermotor. Meskipun jumlah emisi dari 1 unit kendaraan bermotor tidak besar, tetapi karena jumlah kendaraannya sangat banyak maka emisi dari kendaraan bermotor ini sangat mempengaruhi kualitas udara Kota Bandung.



Untuk mengurangi atau mengendalikan pencemaran udara oleh kendaraan bermotor ini, dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu :

- 1) Memastikan emisi yang dikeluarkan dari kendaraan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan

Di Kota Bandung, uji emisi digunakan sebagai salah satu syarat di dalam pelaksanaan uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Sehingga, emisi dari kendaraan umum dapat dikendalikan. Untuk mengendalikan emisi dari kendaraan pribadi, dilaksanakan uji emisi kendaraan bermotor secara teratur di beberapa lokasi. Pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan layanan bengkel sehingga kendaraan yang gas buangnya melebihi baku mutu, dapat segera

diperbaiki kinerjanya sehingga kualitas gas buangnya menjadi baik kembali. Namun, untuk kendaraan pribadi, uji emisi ini masih bersifat volunteer atau sukarela sehingga masih belum bisa dikatakan efektif di dalam mengendalikan kualitas udara emisi dari sumber bergerak.

Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan Uji Emisi Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

No.	Hari, Tanggal	Lokasi	Kendaraan Yang Memenuhi Ambang Batas		Kendaraan Yang Tidak Memenuhi Ambang Batas		Total	Jenis Kendaraan yang Diuji
			Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase		
I. PT Bio Farma (Persero)								
1	Selasa, 17 Januari 2023	PT Bio Farma (Persero)	268	99,63%	1	0,37%	269	Mobil
2	Rabu, 18 Januari 2023	PT Bio Farma (Persero)	264	98,88%	3	1,12%	267	Mobil
3	Kamis, 19 Januari 2023	PT Bio Farma (Persero)	200	100,00%	0	0,00%	200	Mobil
4	Rabu, 8 Februari 2023	PT Bio Farma (Persero)	316	98,14%	6	1,86%	322	Motor
5	Kamis, 9 Februari 2023	PT Bio Farma (Persero)	266	96,38%	10	3,62%	276	Motor
II. Gedung Sate								
6	Kamis, 23 Februari 2023	Gedung Sate	54	100,00%	0	0,00%	54	Mobil
III. Perumda Tirtawening Kota Bandung								
7	Kamis, 4 Mei 2023	Perumda Tirtawening Kota Bandung	153	93,87%	10	6,13%	163	Mobil
IV. Samsat Kawalayaan								
8	Selasa, 16 Mei 2023	Samsat Kawalayaan	103	96,26%	4	3,74%	107	Mobil
V. Samsat Soekarno-Hatta								
9	Rabu, 12 Juli 2023	VI. Samsat Soekarno-Hatta	67	95,71%	3	4,29%	70	Mobil
VI. Kantor Gojek Bandung I								
10	Selasa, 27 Juni 2023	Kantor Gojek Bandung	291	85,84%	48	14,16%	339	Motor
VII. Kantor Gojek Bandung II								
11	Rabu, 30 Agustus 2023	Kantor Gojek Bandung	531	82,71%	111	17,29%	642	Motor
12	Kamis, 31 Agustus 2023	Kantor Gojek Bandung	571	81,57%	129	18,43%	700	Motor
VIII. Balai Kota Bandung								
13	Selasa, 26 September 2023	Balai Kota Bandung	178	97,27%	5	2,73%	183	Mobil
			125	87,41%	18	12,59%	143	Motor
IX. RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung								
14	Kamis, 12 Oktober 2023	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	72	97,30%	2	2,70%	74	Mobil
X. Kantor Gojek Bandung III								
15	Rabu, 22 November 2023	Kantor Gojek Bandung	467	91,75%	42	8,25%	509	Motor
16	Kamis, 23 November 2023	Kantor Gojek Bandung	265	84,13%	50	15,87%	315	Motor
Jumlah			4.191	90,46%	442	9,54%	4.633	

2) Mengurangi jumlah kendaraan

Untuk mengurangi jumlah kendaraan maka disiapkan sistem transportasi massal yang per unitnya dapat mengangkut jumlah penumpang yang banyak atau dengan menyediakan sarana transportasi tanpa emisi seperti penyediaan fasilitas penyewaan sepeda di sekitaran Kota Bandung. Namun, tantangan utama dari pengurangan jumlah kendaraan ini adalah mengubah kebiasaan masyarakat agar bersedia beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.



c. Pembakaran Sampah

Meskipun jumlah asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah oleh masyarakat jumlahnya sedikit, namun apabila dilakukan berkali-kali di banyak tempat maka akan dapat mencemari kualitas udara ambien Kota Bandung. Hal ini diperparah oleh kondisi Kota Bandung yang berada pada wilayah cekungan yang membuat udara cenderung berkumpul dan terakumulasi sehingga tingkat bahayanya semakin bertambah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pencemaran udara yang terjadi secara luas, telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim bukan hanya secara lokal, tapi juga pada skala global. Terjadinya kekeringan dan banjir, peningkatan permukaan air laut, bermunculannya berbagai jenis penyakit baik generatif maupun degenaratif dan menurunnya produksi pertanian yang menyebabkan terancamnya ketersediaan pangan, merupakan beberapa akibat yang dirasakan karena adanya perubahan iklim. Pola-pola adaptasi perlu dilakukan untuk bertahan dari akibat-akibat yang ditimbulkan sekaligus melakukan upaya mitigasi untuk bertahan dari bencana yang mungkin terjadi dari adanya perubahan iklim.

Penerapan ecooffice dan kampung iklim adalah salah satu cara untuk beradaptasi terhadap dampak dari adanya perubahan iklim. Perkantoran yang menerapkan ecooffice dan RW yang telah menjalankan program kampung iklim diyakini dapat

beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, sehingga akibatnya dirasakan tidak terlalu berpengaruh bagi warganya. Karena itu, diharapkan seluruh wilayah di Kota Bandung dapat menerapkan Program Kampung Iklim sehingga lebih siap dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Pada Tahun 2023, terdapat 12 RW yang mendapatkan penghargaan sebagai Kampung Iklim, yaitu :



Selamat & Sukses

Atas Penghargaan Proklamasi Lestari, Piagam Sertifikat Proklamasi Utama dan Piagam Penghargaan Partisipasi Proklamasi Madya dan Pratama Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada

Proklamasi Lestari - RW 07 Cibunut, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung

Piagam Sertifikat Proklamasi Utama

1. Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung
2. RW 05 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung

Piagam Partisipasi Proklamasi Pratama

1. RW 05 Kel.Campaka Kec.Andir
2. RW 09 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.
3. RW 08 Kelurahan Ciskul, Kec Arcamanik.
4. RW 12 Antapani Tengah, Kec. Antapani

Piagam Partisipasi Proklamasi Madya

1. RW 14 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung
2. RW 03 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari Kota Bandung
3. RW 07 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari Kota Bandung
4. RW 19 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.
5. RW 13 Desa/Kelurahan Pasirjati, Kecamatan Ujungberung

II. Kualitas Air

Berdasarkan data hasil pengujian pada seluruh titik pantau kualitas air pada tahun 2023 pada periode 1 dan periode 2, didapat data hasil pemantauan sebagai berikut :

Nama Sungai	Titik Pantau	Degrees, Minutes, Seconds		Alamat Sungai	Periode 1		Periode 2		Tahun 2023	
		Latitude	Longitude		(Nilai IP) Pij	Status Mutu Air	(Nilai IP) Pij	Status Mutu Air	(Nilai IP) Pij	Status Mutu Air
Cikapundung	Hulu	6° 51' 45,021" S	107° 37' 24,491" E	Jl. Dago Bengkok	4,47	Cemar Ringan	2,57	Cemar Ringan	3,52	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 55,559" S	107° 36' 26,094" E	Jl. Viaduct						
	Hilir	6° 56' 57,689" S	107° 37' 18,531" E	Jl. Soerkarno Hatta (Dealer TATA MOTOR)						
Cinambo	Hulu	6° 54' 33,326" S	107° 42' 25,846" E	Jl. Sukalillah	3,77	Cemar Ringan	3,15	Cemar Ringan	3,46	Cemar Ringan
	Tengah	6° 55' 27,054" S	107° 41' 46,08" E	POM Bensin Perempatan Jl. Rumah Sakit						
	Hilir	6° 57' 51,31" S	107° 42' 16,924" E	Jl. Ranca pacing						
Citepus	Hulu	6° 54' 38,252" S	107° 35' 30,796" E	Jl. Padjadjaran (Toko Citra Percetakan)	3,32	Cemar Ringan	4,44	Cemar Ringan	3,88	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 59,459" S	107° 35' 45,096" E	Jl. Kebonjati						
	Hilir	6° 56' 39,57" S	107° 36' 9,115" E	Jl. Pagarsih (Toko Bintang Jaya)						
Cipamokolan	Hulu	6° 53' 35,185" S	107° 39' 38,007" E	Jl. Sasak Batu (Warung Pak Adang)	0,96	Memenuhi	3,10	Cemar Ringan	2,03	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 51,146" S	107° 39' 40,251" E	Mitra Dago (Jl. Tersusan Jakarta)						
	Hilir	6° 57' 17,996" S	107° 40' 42,582" E	Jl. Terusan Derwati (Perum DEMARRAKESH)						

Cibeunying	Hulu	6° 54' 28,827" S	107° 38' 7,195" E	Jl. Citamiang	4,13	Cemar Ringan	2,88	Cemar Ringan	3,50	Cemar Ringan
	Tengah	6° 55' 5,632" S	107° 38' 14,393" E	Jl. Anyer Dalam						
	Hilir	6° 55' 18,22" S	107° 38' 56,72" E	Jl. Babakan Surabaya						
Cibiru	Hulu	6° 54' 37,194" S	107° 43' 25,453" E	Jl. Galumpit (Cilengkrang 1)	3,73	Cemar Ringan	2,56	Cemar Ringan	3,15	Cemar Ringan
	Tengah	6° 55' 27,542" S	107° 42' 37,549" E	Jl. Ters Ujung Berung (PT. Genta Trikarya)						
	Hilir	6° 56' 10,156" S	107° 42' 8,983" E	Jl. Soekarno Hatta (PT. Professindo jaya Inti)						
Cibuntu	Hulu	6° 54' 37,111" S	107° 34' 8,611" E	Jl. Nasional III (Bengkel Nippon Motor)	2,01	Cemar Ringan	2,13	Cemar Ringan	2,07	Cemar Ringan
	Tengah	6° 55' 32,26" S	107° 33' 49,798" E	Jl. Melong Raya (Cijerah)						
	Hilir	6° 56' 22,436" S	107° 33' 29,338" E	Jl. Gempol Sari (PT. Kahatex garment)						
Cicadas	Hulu	6° 54' 18,874" S	107° 38' 22,109" E	Gg. Lemah Neundeut I (Cicadas)	3,67	Cemar Ringan	2,97	Cemar Ringan	3,32	Cemar Ringan
	Tengah	6° 55' 20,066" S	107° 38' 57,25" E	Jl. Babakan Sari						
	Hilir	6° 56' 30,362" S	107° 39' 9,721" E	Jl. Soekarno Hatta (Cidurian Selatan)						
Cidurian	Hulu	6° 53' 35,82" S	107° 38' 30,595" E	Jl. Cikutra (GUSPUSPAL I)	1,72	Cemar Ringan	1,98	Cemar Ringan	1,85	Cemar Ringan
	Tengah	6° 55' 57,417" S	107° 40' 0,304" E	Jl. Ters. Jakarta (Bengkel Motor Honda)						
	Hilir	6° 57' 19,179" S	107° 40' 20,276" E	Jl. Ciwastra						
Ciharalang	Hulu	6° 53' 41,038" S	107° 38' 46,422" E	Jl. Babakan Baru Sukapada (Belakang Kampus Widyatama)	3,72	Cemar Ringan	2,22	Cemar Ringan	2,97	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 23,5" S	107° 38' 50,5" E	Jl. PHH Mustofa						
	Hilir	6° 54' 9,299" S	107° 38' 51,621" E	Gg. Bbk H. Tamin						
Cikendal	Hulu	6° 55' 5,44" S	107° 34' 13,89" E	Jl. Raya Cijerah	6,61	Cemar sedang	4,67	Cemar Ringan	5,64	Cemar sedang
	Tengah	6° 56' 25,691" S	107° 34' 11,771" E	Permukiman Blok Tengah (Gempol sari)						
	Hilir	6° 57' 10,13" S	107° 34' 1,059" E	Belakang SMPN 55						
Cikiley	Hulu	6° 54' 9,221" S	107° 40' 5,704" E	Belakang PT. GRANDTEX	2,21	Cemar Ringan	2,41	Cemar Ringan	2,31	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 15,06" S	107° 40' 1,10" E	Jl. A.H. Nasution						
	Hilir	6° 54' 54,266" S	107° 40' 4,584" E	Jl. Cikajang Raya (RM. Talago Biru)						
Ciparumpung	Hulu	6° 53' 38,697" S	107° 39' 20,644" E	Jl. Ciparumpung (MTS-MA Mutazam)	3,05	Cemar Ringan	1,83	Cemar Ringan	2,44	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 17,905" S	107° 39' 1,819" E	Jl. Ahmad Yani (Showroom MAORI MOTOR)						
	Hilir	6° 54' 51,734" S	107° 39' 8,355" E	Jl. Purwakarta (Dealer WIJAYA TOYOTA)						
Cikapundung Kolot	Hulu	6° 55' 36,256" S	107° 38' 24,102" E	Jl. Maleer Indah	3,55	Cemar Ringan	2,22	Cemar Ringan	2,88	Cemar Ringan
	Tengah	6° 56' 27,817" S	107° 38' 24,422" E	Jl. Binong Jati (Gatot Subroto)						
	Hilir	6° 57' 13,743" S	107° 38' 20,218" E	Curug Ece (Pasar Kordon)						
Cipanjal	Hulu	6° 54' 32,676" S	107° 42' 12,497" E	Jl. Teritorial (Cigending)	3,52	Cemar Ringan	2,49	Cemar Ringan	3,00	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 44,601" S	107° 41' 29,009" E	Jl. A.H. Nasution (Showroom Sumber Mobil)						

	Hilir	6° 55' 38,136" S	107° 41' 13,872" E	Jl. GedeBage (PT. Tomskin)						
Cisaranten	Hulu	6° 53' 53,774" S	107° 40' 42,287" E	Jl. A.H. Nasution (Toko Bangunan PD. Asgar Jaya)	3,22	Cemar Ringan	1,80	Cemar Ringan	2,51	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 59,834" S	107° 40' 40,933" E	Jl. Cingised Raya (Komplek Pemda)						
	Hilir	6° 55' 44,792" S	107° 40' 35,507" E	Jl. Kali Lio Timur						
Ciateul*	Hulu	6° 55' 7,536" S	107° 36' 2,453" E	Kantor POS Jl. Padjadjaran	2,74	Cemar Ringan	2,75	Cemar Ringan	2,75	Cemar Ringan
	Hilir	6° 55' 25,222" S	107° 36' 9,393" E	Jl. Kalipah Apo (Toko Sunia-raja Optical)						
Cigondewah*	Hulu	6° 56' 30,178" S	107° 34' 0,367" E	ALFAMART (Jl. Taman Holis Indah)	3,93	Cemar Ringan	4,87	Cemar Ringan	4,40	Cemar Ringan
	Hilir	6° 56' 56,63" S	107° 33' 59,19" E	Jl. Cibolerang						
Cijalupang*	Hulu	6° 54' 32,033" S	107° 41' 19,433" E	Depan SMA 24	2,96	Cemar Ringan	2,31	Cemar Ringan	2,63	Cemar Ringan
	Hilir	6° 55' 58,026" S	107° 40' 53,528" E	Jl. Soekarno Hatta (Pinus Regensi)						
Curug Dogdog*	Hulu	6° 58' 18,501" S	107° 35' 2,526" E	Jl. Sukamenak Kopo	5,07	Cemar sedang	6,25	Cemar sedang	5,66	Cemar sedang
	Hilir	6° 58' 0,33" S	107° 35' 0,89" E	Dekat Griya Kopo Permai II						
Ciwastra*	Hulu	6° 57' 37,451" S	107° 39' 48,547" E	Jl. Ciwastra (Perum Jingga Residence)	7,76	Cemar sedang	5,28	Cemar sedang	6,52	Cemar sedang
	Hilir	6° 57' 31,71" S	107° 39' 50,53" E	Depan Komplek Graha Pelangi Elok						
Cipedes*	Hulu	6° 53' 32,13" S	107° 35' 02,73" E	Jl. DR. Djuunjunan (Hotel NYLAND)	3,79	Cemar Ringan	2,93	Cemar Ringan	3,36	Cemar Ringan
	Hilir	6° 54' 1,2" S	107° 35' 11,48" E	Depan Istana Regensi 2						
Cimuncang*	Hulu	6° 54' 1,404" S	107° 39' 3,192" E	Jl. Cimuncang	3,36	Cemar Ringan	2,69	Cemar Ringan	3,02	Cemar Ringan
	Hilir	6° 54' 27,01" S	107° 39' 06,0" E	Jl. Terusan Sulaksana Baru I						
Cihapit*	Hulu	6° 53' 52,693" S	107° 37' 47,088" E	Jl. Terusan Cisokan	3,11	Cemar Ringan	2,64	Cemar Ringan	2,87	Cemar Ringan

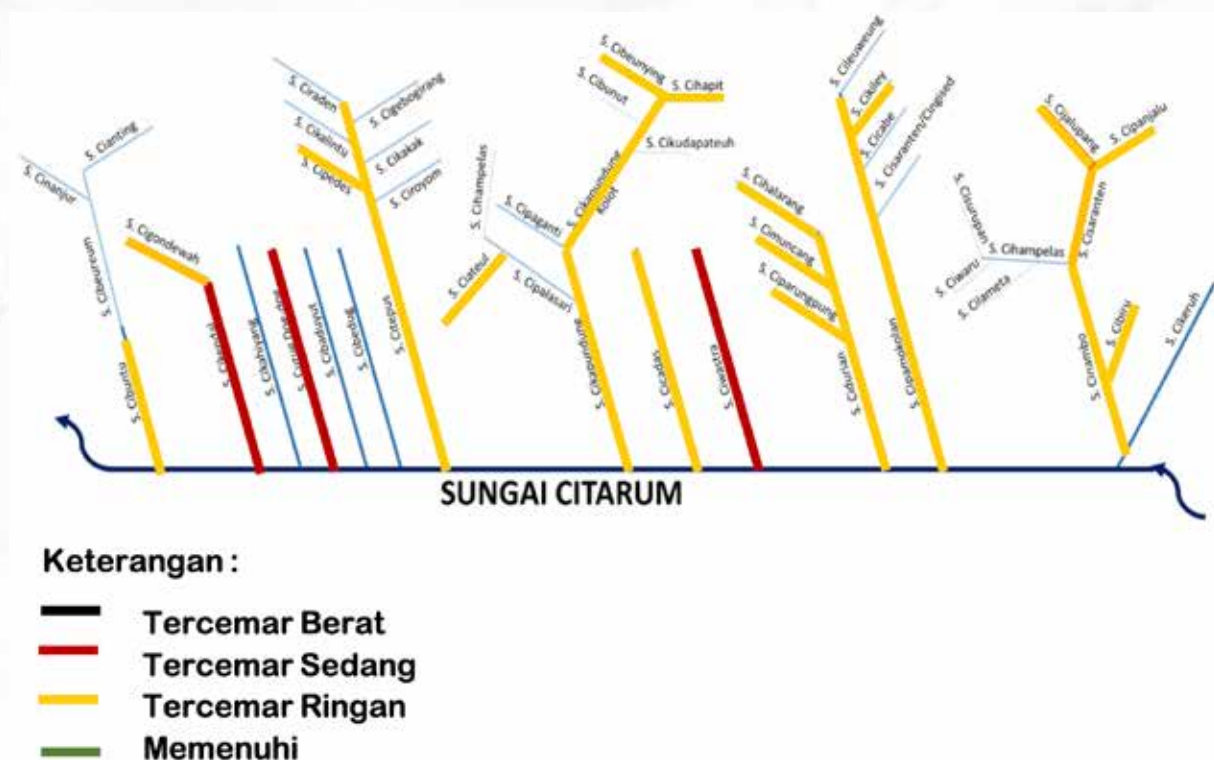
Berdasarkan data di atas kemudian direkapitulasi untuk melihat jumlah titik pantau air sungai yang berada pada status memenuhi, cemar ringan, cemar sedang atau cemar berat, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.48
Rekapitulasi Data Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai
Kota Bandung Tahun 2023

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	2	1,53%	70	1,07
Ringan	116	88,54%	50	44,27
Sedang	13	9,93%	30	2,98
Berat	0	0%	10	0
Jumlah	131			
Indeks Pencemaran Air				48,32
Status				KURANG

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar sungai berada pada status Cemar Ringan, yaitu sebesar 88,54 persen, sedangkan sungai dengan status Cemar Berat tidak ada dan 2 titik pantau sungai berada pada status memenuhi baku mutu. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Kota Bandung meskipun tercemar tetapi tidak berada dalam kondisi yang sangat buruk.

Apabila dianalisis, hal ini diakibatkan karena adanya upaya perbaikan pada pengelolaan sampah dan perbaikan sanitasi dasar masyarakat untuk menyelesaikan masalah stunting dan kemiskinan. Pembangunan Septic Tank komunal dalam rangka mencapai target ODF (Open Defecation Free) dan pembangunan septic tank komunal dari Program Citarum Harum, secara bertahap berhasil mengurangi tingkat pencemaran dari air limbah domestik. Meskipun masih belum mengembalikan kualitas air sungai hingga memenuhi baku mutu, tetapi terlihat adanya progres perbaikan.



Upaya lainnya yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kualitas air tersebut berasal dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih menyeluruh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah meliputi (a) perencanaan; (b) pemanfaatan; (c) pengendalian; (d) pemeliharaan; (e) pengawasan; dan (f) penegakan hukum. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen ini memiliki kekuatan yang sama dengan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta dokumen Perencanaan Pembangunan seperti RPJPD dan RPJMD.

Penyusunan Muatan teknis Dokumen RPPLH telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah untuk menetapkan telah disusun di tahun 2023 dan saat ini sedang menunggu pengesahan dari DPRD Kota Bandung. Selain itu, disusun juga Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak berdampak buruk pada lingkungan.

Kualitas Air Sungai sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber pencemar yang air buangnya masuk ke sungai. Berdasarkan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar di ruas sungai Cipamokolan dan Sungai Citepus pada Tahun 2019, diketahui bahwa terdapat beberapa sumber pencemar yang masuk ke sungai, yaitu :

- 1) Air limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai
- 2) Air limbah dari buangan hasil pengolahan IPAL atau over flow Septic Tank komunal
- 3) Air limbah dari sisa produksi UMKM
- 4) Air limbah dari buangan hasil pengolahan IPAL industri
- 5) Air drainase yang tercampur limbah domestik
- 6) Air drainase yang tercampur sisa produksi UMKM

a. Pengendalian Kualitas Air Limbah Domestik

Dilihat dari perhitungan beban pencemaran pada hasil Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar di ruas sungai Cipamokolan dan Sungai Citepus pada Tahun 2019, diketahui bahwa pencemaran terbesar di Sungai Cipamokolan dan Sungai Citepus adalah dari parameter BOD5 dan COD yang berasal dari limbah domestik. Beban pencemaran dari limbah domestik ini mencapai 98% dari total beban pencemaran yang masuk ke sungai. Namun, berdasarkan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar di Sungai Cemar Sedang Kota Bandung pada Tahun 2022 yaitu Sungai Cisaranten, Sungai Cigondewah, Sungai Curugdogdog dan Sungai Cikendal, penyebab pencemaran terbesar di Sungai Cikendal dan Sungai Cigondewah, penyebab pencemaran terbesar berasal dari limbah industri. Sedangkan di Sungai Curugdogdog dan Sungai Cisaranten berasal dari parameter BOD5 dan COD yang berasal dari limbah domestik.

Tabel 2.49

Perhitungan Beban Pencemaran dari Sumber Pencemar di Beberapa Ruas Sungai Kota Bandung

No.	Nama Sungai	Sektor	BOD5 (kg/hari)	COD (kg/hari)
1.	Sungai Cigondewah	Domestik	516,42	991,34
		Non Domestik	3.777,51	18.878,65
2.	Sungai Cikendal	Domestik	398,44	764,70
		Non Domestik	317,52	1.293,9
3.	Sungai Curugdogdog	Domestik	372,21	714,53
		Non Domestik	54,51	121,16
4.	Sungai Cisaranten	Domestik	706,48	1.356,35
		Non Domestik	5,45	16,14

Masing-masing sumber pencemar ini memerlukan penanganan yang berbeda agar bisa diselesaikan dengan efektif. Namun, aksi yang sangat penting dilakukan sekarang adalah pengendalian pencemaran akibat limbah domestik ini.

Untuk menangani sumber pencemar air limbah domestik ini maka dapat dilihat dari pengelolaan air limbah domestik Kota Bandung yang saat ini dilakukan, yaitu :

- 1) Layanan Pengelolaan Air Kotor oleh PDAM;
- 2) Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh DPKP sebagai OPD pengampu urusan pemukiman dan yang dibangun secara swakelola oleh masyarakat dengan sumber dana berasal dari hibah Program Kotaku;
- 3) Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh pengembang perumahan;
- 4) Pengolahan secara mandiri di masing-masing rumah, dan
- 5) Dibuang secara langsung ke sungai atau saluran yang terhubung ke sungai.



Layanan pengelolaan air kotor/air limbah domestik oleh PDAM Tirtawening dilakukan dengan cara pengumpulan melalui saluran pipa dan diolah di sarana IPAL di Daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung. Hasil pengolahan kemudian dibuang ke Sungai Citarum setelah dipastikan telah memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Karenanya, pencemaran kualitas air akibat layanan air kotor PDAM seharusnya tidak terjadi, kecuali apabila terdapat kebocoran pipa sepanjang perjalanan ke sarana IPAL.

Pencemaran kualitas air dapat pula terjadi apabila hasil buangan dari IPAL Komunal, tidak memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan DPKP, diketahui bahwa sebagian besar IPAL Komunal yang telah dibangun tidak berfungsi dengan baik dan yang masih berfungsi pun, kualitas air hasil pengolahannya masih belum memenuhi Baku Mutu. Karenanya, meskipun air limbah domestik masuk ke fasilitas IPAL Komunal, air hasil pengolahannya tetap mencemari kualitas air sungai. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka perlu dilakukan upaya untuk memfungsikan kembali IPAL yang tidak berfungsi dan memperbaiki kinerja IPAL yang masih berfungsi.

Pengolahan air limbah domestik secara onsite di Kota Bandung pun masih mencemari kualitas air, karena teknologi yang digunakannya bukan Septic Tank tersekat sehingga air limbah masih diresapkan ke tanah dan berpotensi mencemari air tanah di Kota Bandung. Karena itu, upaya sosialisasi untuk mengganti teknologi septic tank pun harus dilakukan secara terus menerus agar perumahan dan pemukiman baru yang akan dibangun, akan menggunakan teknologi yang tidak mencemari lingkungan.

Keseluruhan upaya pengendalian ini masih merupakan upaya yang sama dengan upaya pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena upaya pengendalian air limbah domestik ini memerlukan kesamaan visi dan kesamaan sudut pandang untuk menetapkan upaya perbaikan pengelolaannya sebagai kesepakatan bersama antara seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pengelolaan air limbah domestik, yaitu DLH sebagai pengawas kualitas lingkungan, DPKP sebagai pengelola pemukiman dan perumahan termasuk di dalamnya fasilitas pengolahan limbah domestik, PDAM sebagai pengelola air kotor Kota Bandung dan pemerintah kewilayahan sebagai pengelola urusan masyarakat di tingkat yang paling bawah dan di garda paling depan.

b. Pengendalian Kualitas Air Limbah Industri

Pengendalian Kualitas Air Limbah Industri dilakukan melalui instrumen ijin yang terdiri dari Ijin Lingkungan, Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dan Ijin Penyimpan Sementara Limbah B3. Ijin dikeluarkan oleh DPMPTSP sesuai rekomendasi oleh atau komitmen dengan DLHK Kota Bandung. Ijin Lingkungan dikeluarkan berdasarkan Dokumen Lingkungan (AMDAL/DELH/DPLH dan UKL/UPL) yang disusun oleh Pemrakarsa atau pemilik usaha/kegiatan. Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi atas Kajian Pengelolaan Air Limbah dan hasil verifikasi lapangan. Sedangkan Ijin TPS Limbah B3 dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi atas Kajian Pengelolaan Limbah B3 dan hasil verifikasi lapangan.

Kajian Pengelolaan Air Limbah harus meliputi : (1) perhitungan neraca air, yaitu kesetimbangan antara air yang diambil atau digunakan untuk produksi dengan air limbah yang dihasilkan; (2) kapasitas produksi; (3) kualitas air limbah yang masuk ke dalam sarana IPAL, hasil pengolahan dari sarana IPAL, kualitas upstream badan air sebelum titik pembuangan air limbah dan downstream badan air setelah titik pembuangan air limbah pelaku usaha/kegiatan; dan (4) Spesifikasi teknis IPAL. Dipersyaratkannya kajian ini untuk memastikan bahwa air limbah yang dibuang tidak akan mencemari sungai Kota Bandung.

Kajian Pengelolaan Limbah B3 harus meliputi : (1) perhitungan timbulan limbah B3; (2) Jenis dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan; (3) Pengemasan dan Penyimpanan masing-masing Limbah B3 yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan jumlahnya; (4) Kerjasama dengan perusahaan pengumpul Limbah B3 yang akan mengangkut limbah tersebut dan perusahaan pengolah Limbah B3 yang akan mengolah limbahnya lebih lanjut; dan (5) Layout penyimpanan Limbah B3 beserta kelengkapannya.

Pada Tahun 2023, DLH Kota Bandung telah menerbitkan Persetujuan Lingkungan, Rekomendasi Teknis Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dan Rekomendasi Teknis TPS Limbah B3, total kepada 78 pelaku usaha. Rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.50

Rekapitulasi Persetujuan Lingkungan, Rekomendasi SPPL dan Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan Tahun 2023

No	Nama Layanan	Produk Layanan	Jumlah
1	Persetujuan Lingkungan AMDAL	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) - AMDAL	9
2	Persetujuan Lingkungan UKL-UPL	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	13
3	Rekomendasi SPPL	Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	507
4	Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Dokumen Persetujuan Teknis	13
5	Verifikasi Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	Dokumen Rincian Teknis	22
Jumlah			564

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa ijin yang dikeluarkan, yang berisi Rencana Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya sesuai komitmen yang telah dibuat. Pengawasan dilakukan secara administratif melalui laporan teratur setiap 6 bulan (semester) untuk laporan menyeluruh dan setiap 1

(satu) bulan untuk laporan pemantauan kualitas air limbah. Pengawasan pun dilakukan di lapangan untuk melihat bukti upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara langsung, misalnya saja kesesuaian hasil laporan kualitas air limbah bulanan dengan kondisi IPAL di lapangan. Atau jalan tidaknya proses pengolahan di lapangan.

Apabila dari hasil pengawasan didapat hasil bahwa pelaku usaha tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan benar, maka diberikan sanksi administrasi secara bertahap, dimulai dari surat teguran hingga upaya pemaksaan melalui proses penegakan hukum. Pemberian sanksi dilakukan bertahap sebagai bentuk pembinaan dan untuk memberi efek jera kepada pelaku usaha. Apabila tahap pertama sanksi telah ditindaklanjuti dengan perbaikan yang signifikan maka tahap sanksi berikutnya tidak akan ditempuh dan pelaku usaha telah dianggap taat terhadap aturan pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2023, DLH Kota Bandung bersama DLH Propinsi telah memberikan sanksi administrasi kepada 8 Pelaku Usaha.

Pengaduan mengenai terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu upaya di dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Air. Pengaduan yang diterima bisa melalui media sosial seperti Instagram atau Twitter atau melalui aplikasi LAPOR yang dikelola oleh Diskominfo.

Pada Tahun 2023, terdapat 54 pengaduan yang masuk yang keseluruhannya ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. Hasil dari pengujian ini kemudian dijadikan dasar untuk menentukan penyebab pencemaran utama dan menindak pelaku pencemaran.



III. Kualitas Lahan

Untuk memperbaiki kualitas tutupan lahan, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menghilangkan perkerasan dan menanami setiap lahan yang kosong dengan tanaman pelindung maupun tanaman produktif. Lahan yang dipenuhi dengan tanaman akan mengundang berbagai jenis serangga dan hewan sehingga terbentuk ekosistem yang lengkap. Hal ini akan menyebabkan fungsi ekologis lahan akan terbangun dan tanaman yang tumbuh akan meningkatkan fungsi hidrologis lahan.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan membuat biopori, sumur resapan atau sumur imbuhan. Sumur-sumur ini berfungsi untuk meningkatkan aspek hidrologis lahan karena berguna untuk memasukkan air langsung ke dalam tanah sehingga dapat mempercepat recovery air tanah yang telah banyak di-eksploitasi. Sedangkan biopori, berfungsi untuk memperbaiki porositas tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik di tanah tersebut karena akar tanaman mudah bergerak mencari sumber air dan bahan makanan.

Berdasarkan data Ruang Terbuka Hijau, diketahui bahwa lahan yang dapat dimaksimalkan perbaikan kualitasnya terdiri dari sempadan sungai, jalur hijau jalan, sempadan KA, lahan kritis dan daerah dengan Tegangan Tinggi. DLH bertanggung jawab di dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup, dimana kesetimbangan ekosistem dan ekologi menjadi fokus utama sehingga upaya yang dilakukan akan terkait pada keseimbangan sumber daya alam hayati dan non hayati meliputi flora, fauna, energi, air, udara dan tanah secara menyeluruh. Upaya pelestarian lingkungan ini dilakukan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati).

No	Sasaran	Indikator		Sat	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.1	Indeks Kualitas Air	Poin	46,08	48,32	104,86	1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.253.452.199	1.212.265.135	96,71
		1.2	Indeks Kualitas Udara	Poin	71,20	79,63	111,84	2	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.000.049.800	992.494.515	99,24
								3	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	500.052.785	492.468.870	98,48
								4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.442.416.680	1.392.807.060	96,56
								5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6.132.519.847	5.208.899.408	84,94
								6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.039.067.500	3.218.052.467	79,67
								7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	299.844.600	288.662.810	96,27
RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR				108,35			TOTAL PER SASARAN	14.667.403.411	12.805.650.265	87,31		
TINGKAT EFISIENSI 20,44 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 123,26 %												

No	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome/Output	Realisasi Outcome/Output	%
I.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1,442,416,680	1,392,807,060	96.56%	Jumlah dokumen kebijakan lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RP-PLH) Kabupaten/ Kota	592,431,680	553,546,360	93.44%	Jumlah Dokumen Rancangan Kebijakan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	592,431,680	553,546,360	93.44%	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup Jumlah Dokumen Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup yang dibuat	2 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen	100% 100%

2.	Kegiatan Penyeleng- garan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	849,985,000	839,260,700	98.74%	Jumlah dokumen KLHS	1 Doku- men	1 Doku- men	100%
2.	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Ber- potensi Menimbul- kan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	849,985,000	839,260,700	98.74%	Dokumen KLHS untuk K/R/P	1 doku- men	1 doku- men	100%
II.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERU- SAKAN LINGKUN- GAN HIDUP	4,039,067,500	3,218,052,467	79.67%	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar- ringan" Indeks SO2	81,25 persen	88,00 persen	108,31%
						0,68 poin	0,53 poin	122,06%
3.	Kegiatan Pencega- han Pencemaran dan/atau Kerusa- kan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	3,489,067,500	2,684,010,167	76.93%	Kadar SO2 dalam udara ambien den- gan passive sampler	13,60 ug/ Nm3	10,66 ug/ Nm3	121,62%
					Jumlah titik sungai dengan status indeks pencemaran "cemar- ringan"	104 titik	114 titik	109,62%
3.	Sub Kegiatan Koor- dinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pence- maran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	800,000,000	788,815,960	98.60%	Cakupan verifikasi ijin pembuangan air limbah Jumlah kegiatan uji emisi kendaraan bermotor	100 persen	100 persen	100%
						9 lokasi	9 lokasi	100%
4.	Sub Kegiatan Koor- dinasi, Sinkronisa- si dan Pelaksana- an Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Peruba- han Iklim	1,096,667,500	1,048,158,757	95.58%	Jumlah RW yang mengikuti Program kampung iklim	3 RW	13 RW	433,33%
5.	Sub Kegiatan Pen- gelolaan Laboratori- um Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,592,400,000	847,035,450	53.19%	Jumlah laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge Jumlah laporan hasil uji kualitas udara ambien Jumlah parameter uji yang dapat dikerjakan Jumlah sungai yang dipantau	25 Lapo- ran Hasil Uji	25 Lapo- ran Hasil Uji	100%
						27 Lapo- ran Hasil Uji	27 Lapo- ran Hasil Uji	100%
						7 param- eter	7 param- eter	100%
						26 sungai	26 sungai	100%
4.	Kegiatan Pemuli- han Pencemaran dan /atau Kerusa- kan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	550,000,000	534,042,300	97.10%	Jumlah titik Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar sedang"	24 titik	14 titik	141,67%
6.	Sub Kegiatan Koor- dinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	550,000,000	534,042,300	97.10%	Jumlah kecamatan yang dilakukan upaya rehabili- tasi kualitas lingkungan hidup	3 kecam- tan	3 kecam- tan	100%
III.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA- MAN HAYATI (KEHATI)	6,132,519,847	5,208,899,408	84.94%	Cakupan kawasan konservasi terpelihara	100 persen	100 persen	100%
5.	Kegiatan Pengelo- laan Keanekaraga- man Hayati Kabu- upaten/Kota	6,132,519,847	5,208,899,408	84.94%	Cakupan kawasan konservasi terpelihara	100 persen	100 persen	100%
7.	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Ka- wasan Hutan	6,132,519,847	5,208,899,408	84.94%	Jumlah kawasan kon- servasi yang dipelihara	1 kawasan	1 kawasan	100%

IV.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1,253,452,199	1,212,265,135	96.71%	Persentase pelaku usaha yang taat	22,94 persen	22,94 persen	100%
6.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,253,452,199	1,212,265,135	96.71%	Persentase pelaku usaha yang taat	22,94 persen	22,94 persen	100%
8.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	253,398,383	215,845,000	85.18%	Cakupan layanan dokumen lingkungan	100 persen	100 persen	100%
9.	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	500,010,546	498,142,580	99.63%	Jumlah pelaku usaha yang menaati aturan pengelolaan lingkungan	83 pelaku usaha	83 pelaku usaha	100%
10.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	500,043,270	498,277,555	99.65%	Jumlah sanksi administrasi yang diberikan	2 sanksi	8 sanksi	400%
V.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	299,844,600	288,662,810	96.27%	Cakupan Penyuluhan Lingkungan Hidup	100,00 persen	100,00 persen	100%
7.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	299,844,600	288,662,810	96.27%	Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
11.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	299,844,600	288,662,810	96.27%	Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
VI.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1,000,049,800	992,494,515	99.24%	Jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria	5 jenis	6 jenis	120%
8.	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,000,049,800	992,494,515	99.24%	Jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria	100%	6 jenis	120%
12.	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1,000,049,800	992,494,515	99.24%	Jumlah kegiatan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup	3 kegiatan	3 kegiatan	100%

VII.	PROGRAM PENAN- GANAN PENGADU- AN LINGKUNGAN HIDUP	500,052,785	492,468,870	98.48%	Cakupan Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100%
9.	Kegiatan Penyele- saian Pengaduan Masyarakat di Bi- dang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	500,052,785	492,468,870	98.48%	Laporan triwulan penanganan pen- gaduan	4 laporan	4 laporan	100%
13.	Sub Kegiatan Pen- gelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	500,052,785	492,468,870	98.48%	Laporan triwulan penan- gangan pengaduan	4 laporan	4 laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien karena hampir seluruhnya telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan serapan anggaran sebesar 100 persen, sehingga efisiensinya lebih dari 100 persen. Anggaran yang digunakan untuk mencapai output dan outcome tersebut pun cukup memadai dan dapat terserap dengan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rencana yang telah disusun dapat dijalankan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula.

Terdapat 7 Program, 9 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung, yaitu :

I. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini dilaksanakan untuk merencanakan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh, sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perencanaan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Perencanaan pun dilakukan di tingkat pengendalian, yaitu melalui penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan pembangunan tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup.

Dokumen perencanaan lingkungan hidup merupakan salah satu jenis dari dokumen kebijakan lingkungan. Dokumen Kebijakan lingkungan terdiri dari berbagai jenis, baik dokumen perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan maupun draft rancangan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Rancangan peraturan baik berupa draft raperda, raperwal maupun rakepwal dibuat sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya.

Indikator dari program ini adalah Jumlah dokumen kebijakan lingkungan. Banyaknya jumlah dokumen kebijakan lingkungan yang dibuat menunjukkan banyaknya upaya untuk mengelola lingkungan hidup karena dibuatnya aturan merupakan salah satu cara di dalam mengelola lingkungan hidup. Pada tahun 2023 terdapat 2 dokumen kebijakan lingkungan yaitu Materi Teknis Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta penyusunan KLHS untuk RPJPD.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah :

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan salah satu rangkaian upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yaitu melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Rancangan Kebijakan Lingkungan Hidup yang dibuat.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang merupakan bahan penyusunan kebijakan lingkungan hidup, serta Jumlah Dokumen Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup yang dibuat sebagai tindak lanjut dari kajian perencanaan yang telah disusun.
2. Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan salah satu rangkaian upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yaitu melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen KLHS yang disusun, disesuaikan dengan dokumen kebijakan pembangunan yang disusun di Kota Bandung.
 - 1) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen KLHS untuk K/R/P yang disusun. Pada Tahun 2021, dokumen KLHS yang disusun adalah KLHS untuk dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung dan KLHS untuk dokumen Perubahan RTRW Kota Bandung.



II. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini dilaksanakan sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup selalu terjaga dan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indikator program ini terdiri dari dua indikator, yaitu :

- 1) Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran “cemar ringan”
- 2) Indeks SO₂

Status mutu air sungai ditunjukkan salah satunya melalui Indeks Pencemaran yang membagi kualitas air sungai ke dalam 4 kategori yaitu cemar berat, cemar sedang, cemar ringan, memenuhi baku mutu. Pada Tahun 2023, sebanyak 88,54 persen sungai atau sebanyak 116 titik dari 131 titik pantau air sungai Kota Bandung berada pada status Indeks Pencemaran “Cemar Ringan” dan sebanyak 9,93% masih dalam status “cemar sedang” dan diupayakan untuk turun menjadi cemar ringan.

Sedangkan untuk kualitas udara ambien pada tahun 2023, Indeks SO₂ dari hasil pengukuran secara passive sampler adalah sebesar 0,53 poin, yang memiliki arti bahwa terjadi penurunan kadar polutan SO₂ di udara dan kualitas udara semakin membaik. Diharapkan dengan adanya intervensi program ini, kualitas air sungai serta udara ambien Kota Bandung akan mengalami perbaikan dan akan berubah menjadi lebih baik.

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi

III. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, yaitu asas keanekaragaman hayati.

Berdasarkan penjelasan mengenai UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan program ini adalah Cakupan kawasan konservasi terpelihara. Pada Tahun 2023, terdapat 2 kawasan konservasi yang dipelihara, yaitu 1 Kawasan Taman Keanekaragaman hayati, yaitu di Jl. Cigagak Kelurahan Palasari Kec. Cibiru dan 1 Kawasan Resapan Mata Air Tjikendi di Kecamatan Cidadap. Pembangunan sarana Taman Kehati telah dilaksanakan yaitu pembangunan jalan akses, sarana parkir, toilet dan musholla, serta pemeliharaan pun terus dilakukan meliputi perbaikan kualitas tanah melalui pemupukan dan pemberian regulator pH tanah. Sedangkan pemeliharaan kawasan resapan mata air Tjikendi yang dilaksanakan adalah penanaman pohon keras.

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga kondisi lingkungan hidup Kota Bandung saat ini agar tidak rusak atau menjadi lebih buruk. Upaya yang dilakukan adalah dengan menangani setiap kasus pencemaran yang terjadi dan menegakkan aturan pengelolaan lingkungan hidup dengan benar.

Indikator ketercapaian program ini adalah Persentase Pelaku Usaha yang Taat. Indikator ini menunjukkan jumlah pelaku usaha yang telah mentaati aturan pengelolaan lingkungan hidup level 2. Pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha yang telah memenuhi ketaatan level 2 adalah sebanyak 138 pelaku usaha yang telah memiliki ijin lengkap dan telah memenuhi persyaratan teknis terkait pengelolaan limbah B3 dan air limbah dari 564 pelaku usaha yang memiliki Ijin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

V. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan. Pemberian penghargaan lingkungan hidup diharapkan dapat memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup.

Penghargaan ini bisa diberikan kepada perseorangan atau lembaga atau organisasi yang berhasil menurunkan tingkat pencemaran atau aspek lingkungan lainnya. Kriteria dan persyaratan khusus untuk penilaian pemberian penghargaan ini ditetapkan dan diformalkan melalui perwal.

Indikator dari program ini adalah Cakupan Penghargaan sesuai kriteria. Indikator ini menunjukkan persentase penghargaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria penerima penghargaan. Apabila setiap orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria mendapatkan penghargaan, diharapkan masyarakat lainnya akan berupaya untuk memenuhi kriteria tersebut. Pada Tahun 2023, terdapat 6 jenis penghargaan yang diserahkan kepada masyarakat, yaitu terdiri dari penghargaan Program Pemeringkatan Pelaku Usaha (PROPER), Sekolah Adiwiyata, Eco-Office kategori kelurahan, Eco-office kategori perangkat daerah mandiri, Eco-office kategori perangkat daerah kawasan dan Program Kampung Iklim (Proklam).

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



VI. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan diharapkan dapat mempermudah proses komunikasi terkait kebijakan lingkungan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga bisa mempercepat upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan.

Indikator dari program ini adalah Cakupan Penyuluhan Lingkungan Hidup. Indikator ini menunjukkan persentase masyarakat/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan. Pada Tahun 2023, seluruh pelaku usaha yang berada di wilayah sungai dengan status cemar sedang, telah menerima penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan dan kewajiban pelaku usaha untuk mengelola dan memantau kualitas lingkungannya.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.

VII. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari layanan kepada masyarakat, yaitu dengan menangani pengaduan pencemaran lingkungan. Indikator dari program ini adalah Cakupan pengaduan yang ditindaklanjuti. Indikator ini menunjukkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti maksimal 48 jam setelah pengaduan diterima.

Pencemaran lingkungan hidup seringkali dirasakan melalui pengamatan mata atau penciuman sehingga untuk memverifikasi pencemaran yang terjadi diperlukan pengukuran laboratorium untuk mendapatkan status pencemaran yang lebih akurat. Diperlukan waktu koordinasi untuk menindaklanjuti laporan karena melibatkan pihak laboratorium. Hal ini yang menyebabkan batasan 48 jam diterapkan. Pada Tahun 2023, terdapat 54 pengaduan mengenai pencemaran lingkungan yang seluruhnya segera ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan pengambilan contoh uji oleh laboratorium, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.



1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Implementasi kebijakan strategis yang dilakukan untuk memenuhi Indeks Kualitas Lahan (IKL) dalam upaya memenuhi target IKLH pada tahun 2023, dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kondisi penggunaan lahan berdasarkan data Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung. Kualitas tutupan lahan maksimal yang diharapkan adalah hutan dan apabila tidak digunakan untuk hutan, diharapkan lahan ditutupi oleh vegetasi sehingga fungsi ekologis dan hidrologisnya dapat terpenuhi. Semakin luas lahan yang tertutupi oleh pohon pelindung ataupun pohon produktif maka kualitas lahan dianggap lebih baik, dibandingkan dengan lahan yang hanya tertutupi tanaman perdu, semak atau rumput. Upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lahan secara langsung adalah dari penambahan kuantitas RTH. Sedangkan perbaikan pada kualitas RTH tidak secara langsung dapat meningkatkan nilai IKL, kecuali apabila dapat mengubah luasan hutan. Oleh karenanya, upaya implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Upaya memperbaiki kualitas RTH untuk meningkatkan luasan hutan dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan capaian cakupan, 1 kawasan yang berlokasi di Jl. Cigagak Kelurahan Palasari Kec. Cibiru) kawasan konservasi terpelihara sebesar 100% dari target 100%, yaitu dengan Pembangunan sarana Taman Kehati telah dilaksanakan yaitu pembangunan jalan akses, sarana parkir, toilet dan musholla, serta pemeliharaan pun terus dilakukan meliputi perbaikan kualitas tanah melalui pemupukan dan pemberian regulator pH tanah di Jl. Cigagak Kelurahan Palasari Kec. Cibiru.
- b. Pemeliharaan dan penataan makam melalui kegiatan pembersihan makam, pembabatan rumput, penyiangan, penanaman pohon, oleh Petugas Harian Lepas (PHL) di areal Pemakaman melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator Persentase areal pemakaman yang tertata dengan capaian 35,00% Dari target 35,00%.

- c. Meningkatkan pemeliharaan taman, median, jalur hijau jalan dan utan kota melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator luasan RTH publik taman, median, jalur hijau jalan dan hutan kota terpelihara dengan target kinerja sebesar 26,02% dapat terealisasi sebesar 26,02%.
- d. Program yang berkaitan langsung dengan penambahan luasan RTH Publik adalah Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), yang mengalokasikan anggaran untuk penambahan luasan RTH berupa pengalihan hak PSU dengan penambahan luasan RTH 45.438,87 M2 (4,54 Ha) dan pengadaan lahan untuk RTH dan taman bermain dengan penambahan luasan RTH seluas 8.116 M2 (0,81 Ha).

Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023 dalam pencapaian sasaran IKLH yaitu:

1. Tingginya alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun, terutama menjadi permukiman dan industri, menyebabkan rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki fungsi ekosistem sehingga menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas air bersih akibat rendahnya daya tampung lingkungan menyebabkan kesulitan di dalam penyediaan air baku untuk air bersih.
3. Rendahnya kualitas air, kualitas tanah dan luasan RTH, mengakibatkan Kota Bandung memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap wilayah di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
4. Rendahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan pun menyebabkan kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, serta belum optimalnya upaya mitigasi bencana.
5. Rendahnya tingkat pemahaman dan tingkat partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan, menyebabkan berbagai upaya yang membutuhkan partisipasi masyarakat, menjadi berjalan dengan lambat dan kurang efektif untuk dijalankan.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang masih timbul di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi lahan-lahan yang beralih fungsi tidak sesuai peruntukannya serta mendorong upaya penindakan serta pengembalian fungsi lahan sesuai peruntukannya.
2. Mengembalikan fungsi ekosistem dari Ruang Terbuka Hijau yang telah ada.
3. Meningkatkan upaya untuk merehabilitasi kualitas air baik melalui pengendalian perijinan serta pengawasan terhadap sumber pencemar, juga melalui upaya rehabilitasi secara teknis dan ekologis.
4. Melakukan upaya edukasi kepada masyarakat secara terus menerus agar terjadi perubahan perilaku masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan secara umum serta kesiapan di dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana alam.

2. Presentasi Luasan RTH

Karakteristik fisik kota Bandung dilihat dari letak geografis berada di lembah/cekungan dengan potensi pencemaran udara cukup tinggi sebagai akibat sirkulasi udara yang terpusat dan terakumulasi akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Perkembangan Kota Bandung yang pesat dalam berbagai sektor telah menyebabkan adanya perubahan tata ruang kota dengan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau Kota baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Dalam menjaga keseimbangan ekosistem kota, perlu adanya keseimbangan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka hijau secara proporsional. Karakteristik Kota Bandung yang berada di cekungan dengan luas lahan 16.729,65 Ha dan jumlah penduduk $\pm$ 2,8 juta jiwa tergolong kota padat penduduk, yang tentunya sebagai konsekuensi logis akan membawa berbagai dampak pembangunan, antara lain apabila tidak ada keseimbangan dalam pemanfaatan ruang terbangun dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan terjadi degradasi lingkungan.

Kualitas lingkungan hidup ditentukan dari kelayakan lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Salah satu kriteria ruang kota yang nyaman adalah memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kota. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman atau area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan kota. Selain berfungsi sebagai sumber oksigen dan penyerap polusi udara yang ditimbulkan oleh pabrik-pabrik dan kendaraan, RTH juga berfungsi memperindah penampilan kota. RTH memiliki beragam fungsi meliputi fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. RTH ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Keberadaan RTH tidak hanya menjadikan kota sebagai tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri.

Dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, maka pembangunan infrastruktur dan sarana kota merupakan faktor yang penting dalam pembangunan skala prioritas Kota Bandung, termasuk penataan dan pengelolaan RTH sebagai sarana publik. RTH selain mempunyai fungsi sebagai penyeimbang ekosistem kota yaitu fungsi ekologis, juga mempunyai fungsi sosial dan estetika kota sehingga dalam penataan maupun pengelolaannya harus dapat mencerminkan fungsi-fungsi tersebut, agar terbentuk kota yang representatif dan mempunyai ciri khas yang dapat dibanggakan sehingga dapat meningkatkan "nilai jual" Kota Bandung.

Kota Bandung dengan luas 16.729,65 Ha sampai tahun 2023 luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia seluas 2.086,53 Ha atau sekitar 12,47% dari luas Kota Bandung. RTH tersebut tersebar di beberapa wilayah Kota Bandung. Pada Tabel dapat kita lihat bahwa meskipun pencapaian persentase RTH tidak mencapai target RPJMD, namun dari tahun ke tahun persentase RTH mengalami kenaikan.

Pada tahun 2020 tercapai persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 12,25% dari target 12,60%. Pada tahun 2021 tercapai persentase luasan RTH sebesar 12,40% dari target 12,75%. Pada tahun 2022 tercapai persentase luasan RTH sebesar 12,44% dari target 13,26%. Pada tahun 2023 tercapai persentase luasan RTH sebesar 12,47% dari target 13,77%.

Persentase RTH dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase RTH} = \frac{\text{Luas RTH di Kota Bandung}}{\text{Luas wilayah Kota Bandung}} \times 100\%$$

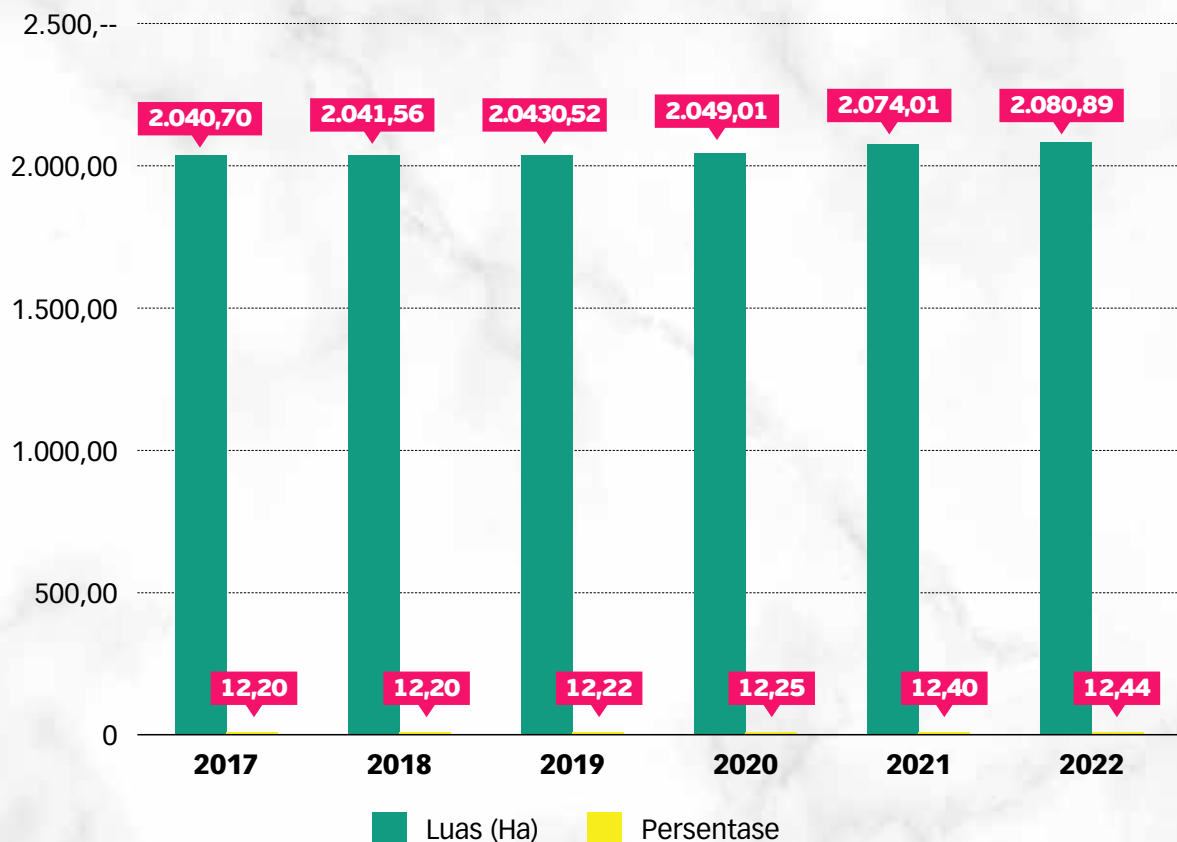
Rincian luasan RTH pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	RTH	Proposi Terhadap Wilayah Kota Bandung (16.729,65 Ha)		Keterangan
		Ha	%	
1	Taman Kota / Taman Lingkungan	239,20	1,43%	Penambahan tahun 2020 dari pembangunan Taman RW seluas 0,0366 Ha Penambahan tahun 2020 dari serah terima PSU untuk RTH seluas 5,45 Ha Penambahan tahun 2021 dari pembangunan Taman RW seluas 2.430,28 M2 (0,24 Ha) Penambahan tahun 2021 dari serah terima PSU untuk RTH seluas 5,5 Ha Penambahan tahun 2022 dari pembangunan Taman RW seluas 1.462,15 M2 (0,15 Ha) Penambahan tahun 2022 dari serah terima PSU untuk RTH seluas 63.152,37 M2 (6,31 Ha) Penambahan tahun 2023 dari pembangunan Taman RW seluas 3.811 M2 (0,38 Ha) Penambahan tahun 2023 dari serah terima PSU untuk RTH seluas 45.438,87 M2 (4,54 Ha)
2	Kebun Bibit	1,69	0,01%	
3	RTH Pemakaman	149,98	0,90%	
4	Tegangan Tinggi	10,17	0,06%	
5	Sempadan Sungai	23,26	0,14%	
6	Jalur Hijau Jalan	176,91	1,06%	
7	Sempadan KA	6,42	0,04%	
8	Hutan Konservasi	4,12	0,02%	
9	Penanganan Lahan Kritis	416,92	2,49%	
10	Aset Potensi RTH Pemkot Bandung	99,39	0,59%	Penambahan tahun 2022 dari pengadaan lahan makam seluas 4,440 M2 (0,44 Ha) Penambahan tahun 2022 dari pengadaan lahan untuk RTH dan taman bermain seluas 4.197 M2 (0,42 Ha) Pengurangan tahun 2022 seluas 1.462,15 M2 (0,15 Ha) berasal dari pembangunan Taman RW Penambahan tahun 2023 dari pengadaan lahan untuk RTH dan taman bermain seluas 8.116 M2 (0,81 Ha) Pengurangan tahun 2023 seluas 3.811 M2 (0,38 Ha) berasal dari pembangunan Taman RW
	Jumlah RTH Publik	1.128,06	6,74%	
11	RTH Privat	958,47	5,73%	
	Jumlah RTH Privat	958,47	5,73%	
	Jumlah I + II ...	2.086,53	12,47%	

Pada tahun 2023 terdapat penambahan luas RTH sebesar 5,36 Ha dari serah terima PSU Perumahan oleh Pengembang Perumahan dan warga ke Pemerintah Kota Bandung sebanyak 38 Perumahan seluas 45.438,87 M2 (4,54 Ha), pembangunan taman RW sebanyak 35 lokasi seluas 3.811 M2 (0,38 Ha) serta pengadaan lahan untuk RTH dan taman bermain sebanyak 7 lokasi seluas 8.116 M2 (0,81 Ha). Sehingga luasan RTH publik yang tersedia di Kota Bandung seluas 1.128,06 Ha atau sebesar 6,74% dari total luas wilayah keseluruhan Kota Bandung 16.729,65 Ha.

Peningkatan kuantitas RTH Privat dengan meningkatkan kepatuhan penyediaan RTH Privat dan verifikasi validasi RTH Privat dengan pendataan lapangan untuk 1 (satu) Sub Wilayah Kota (SWK) yaitu SWK Ujung Berung melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang terverifikasi sebesar 670.897,32 m2 (67,09 Ha).

Grafik 2.30
Perkembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kota Bandung



Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dilaksanakan dengan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan serta Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

Pagu anggaran Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yang mendukung sasaran meningkatnya kuantitas RTH publik pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.11.870.633.851,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.380.419.323,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau 95,87% dengan rincian sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Pagu anggaran Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.4.847.358.958,- (Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan

Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.4.825.406.722,- (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau sekitar 99,55%.

Untuk memperoleh baseline data RTH privat di Kota Bandung, Dinas Cipta Bintang telah melakukan pengambilan data RTH dengan metode pengukuran digitasi pada foto udara (citra satelit). Pada tahun 2021, terdata RTH privat di SWK Cibeunying seluas 8,810,173 m² (881,02 Ha). Pada tahun 2022, terdata RTH privat di SWK Arcamanik seluas 597.092,26 m² (59,71 Ha). Terakhir pada tahun 2023, terdata RTH privat di SWK Ujung Berung seluas 670.897,32 m² (67,09 Ha).

Adapun total luas RTH privat dari ketiga SWK tersebut sebesar 10.078.162,58 (1007,82 Ha). Proporsi luas RTH privat pada Tahun 2023 terhadap luas wilayah Kota Bandung (16.729,65 Ha) adalah 6,03%.

Berikut adalah tabel dan grafik yang merupakan rincian data luas RTH di Kota Bandung sebagaimana yang diuraikan diatas:

Tabel 2.51
Rekapitulasi RTH di Kota Bandung
sampai dengan Tahun 2023

No	RTH	Proporsi terhadap Luas Wilayah Kota Bandung (16.729,65 Ha)		Keterangan
		Ha	%	
1	Taman Kota/Taman Lingkungan	243,86	1,46%	Penambahan tahun 2020 dari pembangunan Taman RW seluas 0,0366 Ha.
				Penambahan tahun 2020 lahan RTH dari serah terima PSU untuk RTH seluas 5,45 Ha.
				Penambahan tahun 2021 dari pembangunan Taman RW seluas 2.430,28 M2 (0,24 Ha).
				Penambahan tahun 2021 lahan RTH dari serah terima PSU untuk RTH seluas 5,5 Ha.
				Penambahan tahun 2022 dari pembangunan Taman RW seluas 1.462,15 M2 (0,15 Ha).
				Penambahan tahun 2022 dari serah terima PSU untuk RTH seluas 63.152,37 M2 (6,31 Ha).
				Penambahan tahun 2023 dari pembangunan Taman RW seluas 3.811 M2 (0,38 Ha).
				Penambahan tahun 2023 dari serah terima PSU untuk RTH seluas 45.438,87 M2 (4,54 Ha).
				Penambahan tahun 2023 dari Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati seluas 46.570 M2 (4,66 Ha).
2	Kebun Bibit	1,69	0,01%	
3	RTH Pemakaman	153,51	0,92%	Pada Tahun 2019 ada penambahan lahan makam sebesar 5.664 M2 (0,57 Ha) dari serah terima PSU.
				Pada Tahun 2020 ada penambahan lahan makam sebesar 2.811 M2 (0,29 Ha) dari serah terima PSU.
				Pada Tahun 2021 ada penambahan lahan makam sebesar 7.275 M2 (0,73 Ha) dari serah terima PSU.
				Pada Tahun 2023 ada pemutakhiran data lahan makam seluas 1.535.141 M2 (153,51 Ha) pada 13 TPU.
4	Tegangan Tinggi	10,17	0,06%	
5	Sempadan Sungai	23,26	0,14%	
6	Jalur Hijau Jalan	176,91	1,06%	

7	Sempadan KA	6,42	0,04%	
8	Hutan Konservasi	4,12	0,02%	Tahura Djuanda
9	Penanganan Lahan kritis	416,92	2,49%	
10	Aset Potensi RTH Pemkot Bandung	94,29	0,56%	Inventarisasi data RTH Bidang Aset BPKA Tahun 2019=100,11 Ha Pengurang=penambahan taman RW tahun 2020 dan 2021 serta PSU lahan makam=0,0366+0,24+1.59=1,86 Ha sehingga aset RTH Pemkot Bandung berkurang menjadi 100,11-1,86=98,25 Pada Tahun 2022 ada penambahan lahan makam seluas 4.440 M2 (0,44 Ha) dari pengadaan lahan serta penambahan dari pengadaan lahan untuk taman bermain seluas 4.197 M2 (0,42 Ha). Pengurangan tahun 2022 seluas 1.462,15 M2 (0,15 Ha) berasal dari pembangunan Taman RW. Penambahan tahun 2023 dari pengadaan lahan untuk RTH dan taman bermain seluas 8.116 M2 (0,81 Ha). Pengurangan tahun 2023 seluas 3.811 M2 (0,38 Ha) berasal dari pembangunan Taman RW. Pengurangan tahun 2023 seluas 4.440 M2 (0,44 Ha) berasal dari Pengadaan lahan untuk makam berdasarkan hasil pemutakhiran data lahan pemakaman di 13 TPU. Pengurangan tahun 2023 seluas 46.570 M2 (4,66 Ha) dari Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati.
Jumlah RTH Publik		1.131,05	6,74%	
11	RTH Privat	958,47	5,73%	
Jumlah RTH Privat		958,47	5,73%	
Jumlah I + II ..		2.089,52	12,47%	

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Cipta Bintang Kota Bandung, diolah 2023

Implementasi kebijakan strategis untuk memenuhi target Persentase Luasan RTH pada tahun 2023 dimaksudkan untuk meningkatkan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kuantitas RTH publik dengan menambah ketersediaan lahan melalui serah terima PSU Perumahan yang berpotensi RTH, pengadaan lahan untuk RTH dan taman bermain serta pembangunan taman RW yang menjadi RTH Publik menghasilkan luasan RTH seluas total 53.554,47 M2 atau sekitar 5,36 Ha.
- Persentase Luasan RTH Privat tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil pendataan lapangan untuk 1 (satu) Sub Wilayah Kota (SWK) yaitu SWK Ujung Berung melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang terverifikasi sebesar 670.897,32 m2 (67,09 Ha).
- Meningkatkan Kualitas RTH Publik dengan meningkatkan penataan pemakaman dan meningkatkan pemeliharaan taman, Median, Jalur Hijau Jalan dan Hutan Kota melalui :
 - Peringkatan Sarana dan Prasarana pada Lahan Taman Pemakaman Umum (TPU), serta upaya penambahan luas lahan melalui kewajiban penyerahan PSU dari pihak pengembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan;
 - Melakukan kegiatan rumputisasi terhadap areal pemakaman yang masih memungkinkan dilaksanakan rumputisasi;

- (3) Pemeliharaan dan penataan makam melalui kegiatan pembersihan makam, pembabatan rumput, penyiangan, penanaman pohon, oleh Petugas Harian Lepas (PHL) di areal Pemakaman melalui Program Pengembangan Permukiman dengan indikator Persentase areal pemakaman yang tertata dengan capaian 35,00% dari target 35,00%;
- (4) Meningkatkan pemeliharaan taman, median, jalur hijau jalan dan Hutan Kota melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator luasan RTH publik taman, median, jalur hijau jalan dan hutan kota terpelihara dengan target kinerja sebesar 26,02% dapat terealisasi sebesar 26,02%.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian “Presentasi Luasan RTH” terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

- a. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada, serta tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain.
- b. Melaksanakan intensifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik
- c. Pengembangan pola kemitraan mengenai pengelolaan RTH dengan berbagai stakeholder.
- d. Melaksanakan peralihan PSU Perumahan dari Pengembang menjadi Aset Pemerintah Kota Bandung

Faktor Penghambat :

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan lahan untuk RTH publik yang tersedia di Kota Bandung dan masih banyak Pengembang Perumahan yang belum melakukan serah terima PSU ke Pemerintah Kota Bandung.
- b. Harga tanah/lahan di Kota Bandung yang cenderung meningkat sehingga menjadi kendala dalam pengadaan lahan untuk menambah luasan RTH.
- c. Kesulitan dalam pendataan RTH privat:



1. Peta dasar yang digunakan masih merupakan peta citra tahun 2016 dan belum terupdate;
2. Kesulitan memperoleh akses ke beberapa lokasi pendataan, misalnya perumahan elite.
3. Kesulitan mendapatkan informasi tentang IMB/PBG saat survey.
4. Kesulitan mendapatkan data sekunder terkait dengan lahan.
5. Responden yang ditemui dilapangan terkadang bukan pemilik bangunan dan tidak memiliki info lengkap tentang bangunan.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan RTH.
- b. Melibatkan peran serta aktif dari unsur kewilayahan dalam pengelolaan dan pengendalian RTH terutama yang berada di lingkungan sekitarnya.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi tentang pentingnya peranan RTH yang memiliki fungsi ekologi, sosial dan estetika.
- d. Melakukan inventarisasi lokasi pengadaan lahan dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Bandung yang akan berdampak positif dalam penambahan luasan RTH.
- e. Menetapkan kebijakan tentang Penyerahan PSU Perumahan yang disesuaikan dengan kondisi eksisting agar dapat memberikan kontribusi luasan RTH Publik berupa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Perumahan dan Permukiman yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 berupa Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Umum Perumahan, Permukiman, Perdagangan dan Industri serta tahun 2024 telah dialokasikan anggaran untuk Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Perumahan dan Permukiman.
- f. Sejak tahun 2019, DPKP telah melakukan pendataan Perumahan yang belum melakukan penyerahan PSU ke Pemerintah Kota Bandung dan saat ini masih dilakukan pemanggilan kepada para Pengembang yang membangun Perumahan di Kota Bandung agar segera menyerahkan lahan PSU ke Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2023 telah terlaksana penyerahan PSU berupa RTH Publik dari 38 Perumahan dengan total luas 4,54 Ha;
- g. Pengadaan lahan dan penambahan RTH Publik dari perumahan yang diserahkan oleh pengembang minimal 0,20 Ha setiap tahun;
- h. Melakukan Inventarisasi pengembalian fungsi RTH Publik yang telah beralih fungsi;
- i. Melakukan Inventarisasi lahan luas sempadan sungai, sempadan SUTET, sempadan rel kereta api yang berpotensi sebagai bagian dari RTH Publik;
- j. Mencari data sekunder dari instansi terkait seperti data IMB/PBG dan PBB agar kegiatan pendataan RTH Privat dapat berjalan dengan baik dan akurat;
- k. Berkoordinasi dengan petugas kewilayahan seperti RT, RW, kelurahan untuk memudahkan proses pendataan RTH Privat;
- l. Melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah dan Kewilayahan mengenai adanya kegiatan pendataan RTH privat.

3. Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah

Cakupan Pengelolaan Sampah Kota dijadikan indikator sasaran RPJMD Kota Bandung karena indikator ini menunjukkan apakah seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Bandung telah ditangani dengan baik sehingga tidak ada lagi sampah yang ditimbun di pinggir jalan atau dibuang ke sungai. Semakin tinggi cakupan pengelolaan sampah kota harus ditunjukkan dengan kondisi bersih tanpa cecceran sampah di seluruh wilayah Kota Bandung.



Sedangkan Capaian kinerja Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah sebesar 98,57% dari target sebesar 99,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,57%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja indikator “Cakupan Pengelolaan Sampah Kota” tahun ini menurun 0.42 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100%. Capaian kinerja indikator “Cakupan Pengelolaan Sampah Kota” tahun ini adalah sebesar 99,57%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerjanya mencapai 99,57%.





Berdasarkan data pada aplikasi SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) diketahui bahwa capaian pengurangan sampah nasional Tahun 2023 adalah sebesar 15,98% dan capaian penanganan sampah adalah sebesar 50,49% atau cakupan pengelolaan sampah sebesar 66,47%. Sedangkan di Kota Bandung, capaian pengurangan sampah adalah sebesar 27,63% dan capaian penanganan sampah adalah sebesar 70,93% atau cakupan pengelolaan sampah sebesar 98,57%.

Perkembangan capaian kinerja indikator sasaran Cakupan Pengelolaan Sampah Kota dari awal masa RPJMD, dapat dilihat pada grafik di bawah. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa capaian Cakupan Pengelolaan Sampah Kota terus meningkat dari tahun ke tahun namun mengalami penurunan di Tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena terjadinya darurat sampah di Kota Bandung.

Pada tahun 2023, terjadi darurat sampah yang diawali dengan terjadinya kebakaran di TPA Sarimukti pada hari sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. Sebanyak 188 armada truk pengangkutan sampah dari Kota Bandung yang sedang antri, diinstruksikan untuk pulang kembali ke Kota Bandung dengan membawa sampahnya kembali.

Tanggal 24 Agustus 2023 terbit Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor. 658/Kep.579-DLH/2023 yang menetapkan Status Darurat Sampah Bandung Raya mulai tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan 24 September 2023. Berdasarkan surat tersebut, selama penetapan Status Darurat Pengelolaan Sampah Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi harus melakukan pengelolaan sampah secara mandiri sebagai dampak penutupan TPA Sarimukti.

Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya ini kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.1843-DLH/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Sampah Kota Bandung terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 24 September 2023, yang dilanjutkan dengan keluarnya Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.1844-DLH/2023 tentang

Satuan Tugas Penanganan Darurat Sampah Kota Bandung. Hingga batas waktu berakhirnya status darurat sampah, penumpukan sampah masih belum terselesaikan sehingga pada tanggal 25 September 2023, Status Darurat Sampah Bandung Raya telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 658.1/Kep.677-DLH/2023, ditindaklanjuti dengan Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Sampah Kota Bandung melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 658.1/Kep.2403-DLH/2023.

Penumpukan sampah masih terjadi di Kota Bandung hingga batas akhir masa berlakunya perpanjangan status darurat sampah. Hal ini menyebabkan, meskipun tidak ada perpanjangan kembali Status Darurat Sampah Bandung Raya, Kota Bandung memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Wali Kota Bandung nomor 658.1/Kep.2523-DLH/2023 tentang Penetapan Situasi Darurat Pengelolaan Sampah.

Selama masa darurat sampah, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Upaya tersebut dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu :

A. Penanganan sampah tercampur yang sudah tertumpuk lama

Upaya untuk menangani tumpukan sampah yang sudah tercampur, terdiri dari :

- Melakukan penjajakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencari lahan-lahan yang bisa digunakan sebagai tempat penampungan sampah, diantaranya dengan TNI dan Pemda Kabupaten/Kota sekitar Kota Bandung, diantaranya Pemerintah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya.
- Pembelian mesin gibrak dengan menggunakan anggaran BTT untuk melakukan pemilahan sampah tercampur di TPS-TPS sehingga sampah yang sudah terpilahnya dapat dimanfaatkan dan tidak perlu dibuang ke TPA.
- Mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan peralatan yang dapat mempercepat proses pengangkutan sampah dan untuk menambah jumlah kuota sampah yang diperbolehkan dibuang ke TPA Sarimukti.
- Menghentikan pembuangan sampah tercampur dari rumah tangga ke TPS dan hanya memperbolehkan sampah residu yang dapat dibuang ke TPS. Untuk memastikan hal tersebut dilakukan juga monitoring dan penjagaan pada seluruh TPS.
- Memanfaatkan lahan pemkot dan lahan-lahan kosong untuk menangani sampah organik yaitu dengan membuat Lobang Olah Organik, seperti di Taman Tegalega dan di kewilayahan-kewilayahan. Hal ini dilakukan untuk menampung sampah organik seperti sampah daun dan sampah dapur yang sudah terpilah.

B. Pengurangan timbulan sampah baru untuk mengurangi beban pembuangan sampah ke TPA

Ketaatan pembuangan sampah residu ke TPS akan tercapai apabila pengolahan sampah organik skala rumah tangga serta skala kawasan/kelurahan dan kota, sudah berjalan. Apabila pengolahan sampah mandiri telah berjalan maka sampah yang dibuang ke TPS hanya akan sampah residu sehingga jumlah sampah yang dibuang ke TPA bisa berkurang. Berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan, yaitu :

- Memasifkan Gerakan Kang PisMan yaitu Kurangi-Pisahkan-Manfaatkan sampah dengan melakukan door to door education untuk meningkatkan ketaatan masyarakat untuk memilah sampah dan kemudian mendamping warga untuk dapat mengolah sampah secara mandiri baik di rumah tangganya masing-masing maupun di skala RW. RW yang warganya telah melakukan pemilahan dan

pengolahan sampah secara mandiri, dapat dikategorikan sebagai KBS (Kawasan Bebas Sampah).

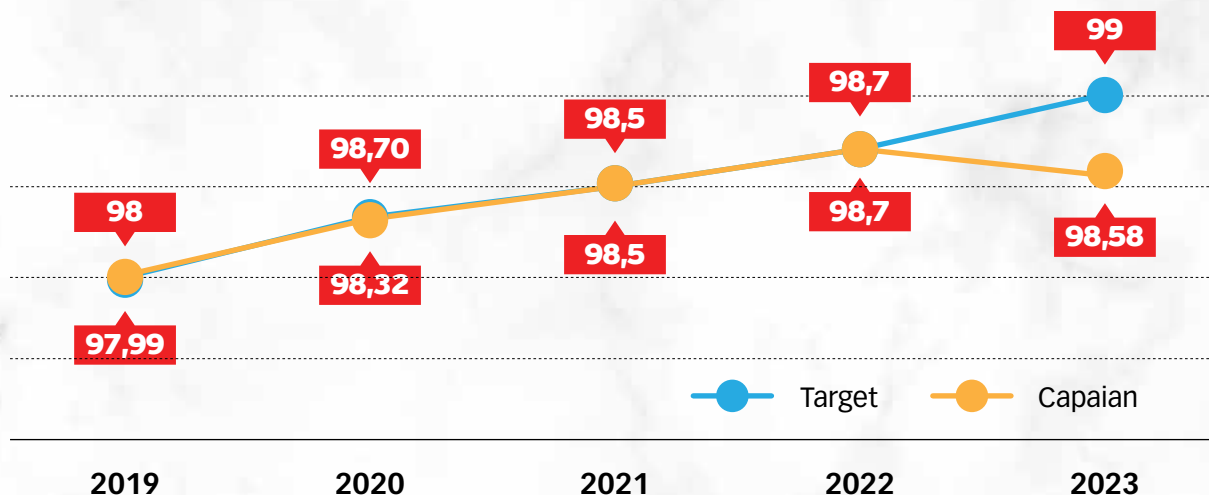
- Hingga saat ini telah terdapat 329 RW KBS di Kota Bandung. Meskipun RW KBS ini belum dapat menyelesaikan seluruh sampah di wilayahnya, tetapi upaya untuk mengurangi sampah di sumber, telah mulai bergeliat di RW-RW ini.
- Mengeluarkan Instruksi Wali Kota Nomor 012-DLH/2023 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 146-DLH/2023 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Berkelanjutan yang mewajibkan seluruh lapisan masyarakat baik di kewilayahan maupun di klaster-klaster ekonomi dan sosial, untuk melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah secara mandiri.
- Menyediakan anggaran pembelian Kang Empos di Kelurahan untuk dibagikan kepada 20% Kepala Keluarga di setiap kelurahan dengan target penyelesaian 166 ton per hari sampah organik dari rumah tinggal.
- Menyediakan anggaran untuk penyediaan sarana magotisasi di kelurahan dengan target penyelesaian 151 ton sampah organik per hari.
- Membangun sarana pengolahan sampah organik skala kota di Gedebage yang ditargetkan dapat menyelesaikan 180 ton per hari sampah organik.
- Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Instruksi Wali Kota Nomor 012-DLH/2023 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 146-DLH/2023 yaitu untuk meningkatkan upaya pengurangan sampah di seluruh klaster sosial dan ekonomi masyarakat, yaitu pada klaster:
 - Perkantoran Pemerintah Kota Bandung
 - Fasilitas Kesehatan
 - Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
 - Jasa Kepariwisata
 - Rumah Ibadah dan Keagamaan
 - Fasilitas Pendidikan
 - Taman
 - Pasar
 - Perkantoran non Pemkot Bandung

Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan pengelolaan sampah kota merupakan penjumlahan dari capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun).

Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan pengelolaan sampah kota merupakan penjumlahan dari capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun).

Perkembangan capaian kinerja indikator sasaran Cakupan Pengelolaan Sampah Kota dari awal masa RPJMD, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.31
Cakupan Pengelolaan Sampah Kota Bandung
Tahun 2019 - 2023



Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa capaian Cakupan Pengelolaan Sampah Kota terus meningkat dari tahun ke tahun dan hal tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat baik.

Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan pengelolaan sampah kota merupakan penjumlahan dari capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun).

Formulasi perhitungan cakupan layanan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

$$\text{Cakupan pengelolaan sampah kota} = \frac{\text{capaian pengurangan sampah} + \text{capaian penanganan sampah}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

Capaian pengurangan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun).

Capaian pengurangan sampah = ((Tonase sampah organik yang diolah di Kawasan Bebas Sampah + Tonase sampah organik yang diolah di Pasar + Tonase sampah yang dikelola oleh sektor komersil + Tonase sampah yang dikelola di Sekolah Adiwiyata + Tonase sampah yang dikelola oleh Bank Sampah + Tonase sampah yang dikelola di TPS dan TPS 3R + Tonase sampah yang dikelola oleh pemulung)/Total timbulan sampah) × 100%

Capaian penanganan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator capaian penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya.

Capaian penanganan sampah = (Tonase sampah yang dibuang ke TPA)/(Total timbulan sampah) × 100%

Capaian penanganan sampah pada tahun 2023 sebesar 70,94% dihitung dari sampah yang dibuang ke TPA dan capaian pengurangan sampah didapat dari data pengolahan sampah di sumber dampak dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan Pengurangan	Jumlah	Satuan	Jumlah untuk Jakstada (Ton/Hari) Timbunan
A.	PENANGANAN SAMPAH (rata-rata setelah darurat sampah)			1,252.96
B.	PENGURANGAN SAMPAH			488.05
1	RUMAH TINGGAL			
	KBS RW dengan pendampingan	98	RW	21.50
	KBS RW tanpa pendampingan	212	RW	23.26
	RW belum KBS	1287	RW	56.48
2	NON RUMAH TINGGAL			
	Komersial (mall, retail, hotel, kampus, kawasan berpengelola)	5	Kategori	7.18
	Kawasan berpengelola belum mendapat pendampingan	2	Kategori	0.58
	Sekolah adiwiyata tanpa pendampingan	204	Lokasi	0.45
	Sekolah belum adiwiyata	2106	Lokasi	1.85
	Bank Sampah Induk Kota Bandung	1	BSI	2.49
	Bank Sampah Unit di Kecamatan	361	unit	7.54
	TPS	135	TPS	95.67
3	TPST/POO/PDU			
	Taman Tega Lega (LOO)	1	Lokasi	2.93
	RPH Arjuna	1	Lokasi	0.30
	Babakan Sari	1	Lokasi	0.69
	Ex TPA Jelekong	1	Lokasi	0.27
	Gede Bage	1	Lokasi	0.87
	Rumah Kompos Batu Nunggal	1	Lokasi	0.47
4	Pemulung	5310	Pemulung	139.82
5	Pengolah sampah swasta	1	Lokasi	5.79
6	Pengurangan Pasca Situasi Darurat			
	Klaster	9	Klaster	64.44
	TPSS Gedebage	1	Lokasi	5.38
	Rumah Kompos Batu Nunggal	1	Lokasi	0.22
	Bank Sampah Induk Kota Bandung	1	BSI	0.44
	TPST Cicukang Holis	1	Lokasi	5.16
	TPS3R/POO	7	Lokasi	5.27
	Mesin Gibrig	6	Line TPS	19.75
	Incinerator	2	Lokasi	7.68
	Pengolah sampah swasta (Waste for Change)	2	Lokasi	11.59
PENGELOLAAN SAMPAH (Penanganan Sampah + Pengurangan Sampah)				1,747.98
Timbunan Sampah Harian				1,766.17
Cakupan Pengelolaan Sampah				98,58%
Capaian Penanganan Sampah				70,94%
Capaian Pengurangan Sampah				27,63%

Pengurangan di sektor rumah tinggal berasal dari sampah yang dipilah dan diolah di RW-RW yang menerapkan pola Kawasan Bebas Sampah (KBS) dan dari Kelurahan yang telah menerapkan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS). Pada Tahun 2023, terdapat 272 RW yang menerapkan KBS di Kota Bandung dan 85 RW yang sedang didampingi untuk menjadi KBS, yaitu :

Tabel 2.52**Daftar RW di Kota Bandung yang Telah Menerapkan Pola Kawasan Bebas Sampah (KBS)**

SWK	KECAMATAN	RW KBS AKTIF	RENCANA KBS
Bojonegara	Sukasari	8	0
	Sukajadi	10	0
	Cicendo	4	6
	Andir	2	9
Ubermanik	Ujungberung	8	0
	Cibiru	2	1
	Cinambo	4	1
	Panyileukan	37	0
	Arcamanik	28	0
	Antapani	5	1
	Mandalajati	5	0
Cibeunying	Cidadap	1	2
	Coblong	12	5
	Bandung Wetan	2	2
	Sumur Bandung	10	5
	Cibeunying Kidul	7	10
	Cibeunying Kaler	26	3
Tegallega	Bandung Kulon	7	1
	Babakan Ciparay	1	2
	Bojongloa Kaler	0	1
	Bojongloa Kidul	3	6
	Astana Anyar	7	4
Kordoba	Bandung Kidul	26	0
	Gedebage	20	2
	Buah Batu	3	0
	Rancasari	15	1
Karees	Regol	4	6
	Lengkong	3	0
	Kiaracondong	7	16
	Batununggal	5	1
REKAPITULASI		272	85

Sedangkan Kelurahan yang telah menerapkan pola RTPS terdiri dari 2 Kelurahan, yaitu :

Tabel 2.53**Daftar Kelurahan di Kota Bandung yang Telah Menerapkan Pola Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS)**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	ARCAMANIK	SUKAMISKIN
2	BOJONGLOA KALER	CIHAURGEULIS

Pengurangan di sektor non rumah tinggal diserahkan kepada pengelolanya masing-masing, baik Mall, Hotel, Sekolah, Pasar, taman ataupun RPH. DLH memberikan bimbingan teknis dan pendampingan sampai petugas pengelola memahami proses pengolahan sampah dan dapat melakukan pengolahan secara mandiri.

Meningkatnya capaian pengurangan sampah, tidak lepas dari mulai terbangunnya budaya pengelolaan sampah yang baru di masyarakat yaitu pola Kurangi – Pisahkan – Manfaatkan yang di-masiv-kan melalui Gerakan KangPisMan. Dengan pola ini, daya kreasi dan inovasi masyarakat pun terbentuk, karena setelah melakukan pemilahan, masyarakat terpicu untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah semaksimal mungkin. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan pola ini adalah agar :

- 1) Masyarakat melihat sampah sebagai komoditi yang bermanfaat sehingga tidak ada lagi yang membuang sampah ke sungai atau membakar sampah.
- 2) Masyarakat memahami manfaat dari masing-masing jenis sampah sehingga mau memilah sampah dan memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar mereka, baik melalui bank sampah atau pembuatan kompos, magot BSF dan pemanfaatan lainnya. Hanya sampah residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi yang dibuang ke TPA.
- 3) Masyarakat memahami bahwa pengelolaan sampah memerlukan usaha yang cukup besar sehingga mereka bersedia untuk mengurangi produksinya sejak awal dimulai dari perubahan pola konsumsi, misalnya diet kantong plastik serta penggunaan tumbler dan tempat makan.

Upaya ini diperkuat dengan dilaksanakannya Pelatihan dan bimbingan teknis persampahan yang diberikan kepada kader PKK, Lurah, Camat, Pelaku usaha hotel, mall, restoran, pengelola kawasan komersil, asosiasi pelaku usaha, warga perumahan, murid sekolah, pengelola kantor SKPD, ASN, petugas pengumpul sampah, pengelola TPS hingga pegawai PD Kebersihan. Pada Tahun 2023, sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis yang terselenggara adalah sebanyak 8 tema dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 150 kali.

No	Sasaran	Indikator		Sat	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
2	Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan sampah	2.1	Cakupan layanan pengelolaan sampah	Persen	99,00	98,58	99,58	1	Program Pengelolaan Persampahan	216,277,344,102	192,774,962,041	89,13
								2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	383,236,250	377,470,490	98,50
		CAPAIAN DARI INDIKATOR						99,58		TOTAL PER SASARAN	216.660.580.352	193.152.432.531
TINGKAT EFISIENSI 10,43 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 111,70 %												

No	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome/Output	Realisasi Outcome/Output	%
I.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	383,236,250	377,470,490	98.50%	Cakupan penanganan limbah B3	18,45 persen	57,06 persen	309,27%
1.	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	214,997,000	213,752,900	99.42%	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang telah melakukan pengelolaan limbah B3	20 pelaku usaha	22 pelaku usaha	110%

1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	151,647,000	150,402,900	99.18%	Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang telah memiliki kajian pengelolaan limbah B3	20 pelaku usaha	22 pelaku usaha	110%
2.	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	63,350,000	63,350,000	100.00%	Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang dibina terkait pengelolaan limbah B3	20 pelaku usaha	22 pelaku usaha	110%
2.	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	168,239,250	163,717,590	97.31%	Cakupan layanan pengelolaan sampah spesifik	100 persen	14,13 persen	14,13%
3.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	168,239,250	163,717,590	97.31%	Cakupan layanan pengelolaan sampah spesifik	100 persen	14,13 persen	14,13%
II.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	216,277,344,102	192,774,962,041	89.13%	Capaian Penanganan Sampah	464.150 ton	457.329 ton	
					Capaian Pengurangan Sampah	174.056 ton	178.140 ton	
3.	Kegiatan Pengelolaan Sampah	216,277,344,102	192,774,962,041	89.13%	Jumlah sampah yang di daur ulang di sumber	174.056 ton	178.140 ton	
4.	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	229,113,750	193,673,725	84.53%	Jumlah draft kebijakan yang dibuat	5 dokumen	5 dokumen	
5.	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaan Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4,050,220,000	3,025,044,709	74.69%	Optimalisasi kinerja KBS yang sudah terbentuk	30 Kecamatan	30 Kecamatan	
6.	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	182,710,364,057	164,110,712,526	89.82%	Terselesainya pembayaran KJP dan KDN Kota Bandung	100 persen	100 persen	
7.	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	870,373,411	814,599,904	93.59%	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	
8.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	11,535,950,723	10,274,743,660	89.07%	Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan	16 jenis	16 jenis	
9.	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	293,450,000	290,330,000	98.94%	Jumlah laporan pelaksanaan kerjasama pengelolaan persampahan	12 laporan	12 laporan	
10.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	16,587,872,161	14,065,857,517	84.80%	Jumlah bangunan pengolahan sampah (TPST/TPS 3R) yang beroperasi	5 lokasi	5 lokasi	



Apabila dilihat dari tabel di atas terlihat, bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai output dan outcome yang diharapkan dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dalam rangka mencapai Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota, digunakan dengan baik, dengan efektifitas sebesar 111,70 persen. Meskipun anggaran ini hanya diserap sebesar 89,15% dari target yang ditetapkan, tetapi dapat mencapai kinerja sebesar 99,58% sehingga terdapat efisiensi sebesar 10,43%. Penyerapan rata-rata sebesar 89,15% ini terjadi karena terjadi efisiensi anggaran di UPT Pengelolaan Sampah dari menurunnya pembayaran gaji pegawai akibat adanya pegawai yang pensiun dan menurunnya pembayaran KJP dan KDN Pengelolaan Sampah akibat adanya darurat sampah.

Faktor Penghambat

Secara umum, faktor penghambat tercapainya sasaran startegis Kota yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan adalah :

1. Tingginya alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun, terutama menjadi permukiman dan industri, menyebabkan rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki fungsi ekosistem sehingga menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas air bersih akibat rendahnya daya tampung lingkungan menyebabkan kesulitan di dalam penyediaan air baku untuk air bersih.
3. Rendahnya kualitas air, kualitas tanah dan luasan RTH, mengakibatkan Kota Bandung memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap wilayah di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
4. Peningkatan timbunan sampah dan limbah akibat peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan menyebabkan pengelolaan sampah dan limbah menjadi belum tertangani secara optimal.
5. Rendahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan pun menyebabkan kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, serta belum optimalnya upaya mitigasi bencana.

6. Rendahnya tingkat pemahaman dan tingkat partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan, menyebabkan berbagai upaya yang membutuhkan partisipasi masyarakat, menjadi berjalan dengan lambat dan kurang efektif untuk dijalankan.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung tercapainya Sasaran Strategis Kota yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Adanya kondisi darurat sampah menyebabkan berbagai pihak terlibat serius di dalam menangani permasalahan sampah. Dibentuknya Satuan Tugas Tanggap Darurat Sampah Kota Bandung dan disusunnya Surat Edaran serta Instruksi Wali Kota Bandung tentang Pengelolaan Sampah Mandiri dan berkelanjutan menjadi bukti bahwa semua pihak sudah dilibatkan untuk secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan sampah. Hal ini menjadi faktor pendukung utama tercapainya Capaian Pengurangan Sampah di Kota Bandung.
2. Persampahan merupakan satu bagian dari pengelolaan lingkungan hidup secara umum. Meningkatkan keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sampah, pada akhirnya meningkatkan juga keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan secara umum. Diantaranya dengan keterlibatan dalam Program Kampung Iklim maupun Penerapan Eco-office, sehingga hal ini pun menjadi faktor pendukung tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat dunia yang bergerak ke arah green living pun, menjadi faktor pendukung tercapainya sasaran karena generasi muda sudah mulai tertarik untuk terlibat di dalam pengelolaan lingkungan.

Solusi

Untuk mengurangi faktor-faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung yang ada dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka solusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Bersama-sama dengan dinas pengampu urusan tata ruang, untuk mengidentifikasi lahan-lahan yang beralih fungsi tidak sesuai peruntukannya serta mendorong upaya penindakan serta pengembalian fungsi lahan sesuai peruntukannya.
2. Bersama-sama dengan dinas pengampu urusan terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mengembalikan fungsi ekosistem dari RTH yang telah ada.
3. Meningkatkan upaya untuk merehabilitasi kualitas air baik melalui pengendalian perijinan serta pengawasan terhadap sumber pencemar, juga melalui upaya rehabilitasi secara teknis dan ekologis.
4. Melakukan upaya edukasi kepada masyarakat secara terus menerus agar terjadi perubahan perilaku masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan secara umum serta kesiapan di dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana alam.

Sasaran 7 : Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas

Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas. Sasaran-Sasarannya berupa Persentase Penurunan Kemacetan, Persentase Luasan Kawasan Kumuh, Cakupan Pelayanan Air Minum dan Persentase Penurunan Titik Genangan. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ke 5 atau terakhir RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada 4 (empat) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penurunan Kemacetan	-	-	-	-	-	-	20,87	20,87	100
2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	4,55	4,28	105,93	3,96	2,94	125,76	2,80	2,79	100,36
3	Cakupan Pelayanan Air Minum	79,00	80,24	101,57	80,00	79,38	99,22	81,00	82,19	101,47
4	Persentase Penurunan Titik Genangan	100	63,3	136,70	80,00	60,76	124,05	58,82	14,71	174,99
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		114,73			116,34			119,21		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penurunan Kemacetan	14,78	14,78	100	7,83	7,83	100
2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	2,76	2,32	115,94	2,16	1,88	112,96
3	Cakupan Pelayanan Air Minum	82,00	85,14	103,83	83,00	91,30	110
4	Persentase Penurunan Titik Genangan	50,00	14,71	170,59	40,18	11,76	171,44
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		122,59			123,60		

Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas dapat dilihat dari sebanyak 4 (empat) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator ke-1 (satu) “Persentase Penurunan Kemacetan” dari target tahun 2023 yaitu 7,83 dengan realisasi sesuai dengan target yaitu 7,83 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2022 sebesar 14,78 mengalami peningkatan kinerja sebesar 6,95. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 7,83 maka capaian kerjanya 100 % atau sesuai dengan target.

Capaian kinerja indikator ke-2 (dua) “Persentase Luasan Kawasan Kumuh” dari target tahun 2023 yaitu 2,16 dengan realisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu 1,88 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 112,96%. Persentase capaian tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu 0,28. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 2,16 maka capaian kerjanya 112,96% atau melebihi target yang sudah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator ke-3 (tiga) “Cakupan Pelayanan Air Minum” dari target tahun 2023 yaitu 83,00 tercapai melebihi target yaitu 91,30 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 110%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu 0,48. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 83,00 maka capaian kerjanya 110 % atau melebihi target yang sudah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator ke-4 (tiga) “Persentase Penurunan Titik Genangan” dari target tahun 2023 yaitu 41,18 tercapai melebihi target yaitu 11,76 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 171,44%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu 2,94. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 41,18 maka capaian kerjanya 171,44 % atau melebihi target yang sudah ditetapkan.



1. Presentase Penurunan Kemacetan

Kemacetan adalah kondisi di mana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati 0 km/jam sehingga menyebabkan terjadinya antrian. Indikator ini dicapai dengan strategi meningkatnya pelayanan jalan dengan indikator Persentase tingkat pelayanan jalan.

Dari 115 ruas jalan yang ditangani, maka sesuai target yang telah ditetapkan

dalam RPJMD 2018-2023 pada tahun 2022 targetnya menurun dari 24 menjadi 17 ruas jalan yang ditangani dan sudah diselesaikan sebanyak 7 ruas jalan. Pada tahun 2023 targetnya menurun juga dari 17 ruas jalan menjadi 9 ruas jalan dan sudah diselesaikan sebanyak 8 ruas jalan. Capaian kinerja presentase penurunan kemacetan sebesar $9/115 \times 100\% = 7,83\%$ dengan target 7,83%, sehingga dapat dikatakan presentase penurunan kemacetan sudah mencapai target sebesar 100%.

Adapun ruas jalan yang diatasi pada tahun 2023 yaitu, berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, berada di Jl. H. Ibrahim Aji, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Terusan Jakarta, Jl. Surya Sumantri, Jl. Dr. Djundjuran, Jl. Pasteur Dan Jl. Ciroyom dan Jl. Pasirkaliki. Dari hasil survey di lapangan didapat data-data sebagai berikut :

NO	RUAS JALAN		LANGKAH NYATA PENAGGULANGAN KEMACETAN	
Ruas Jalan yang di Atasi Tahun 2023				
1	JL. H. IBRAHIM AJI			
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
	1	Ngetem Angkutan Umum	1. Depan Borma Kiara-condong; 2. Sekitar Pasar Kiara-condong	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	Parkir On Street	jl. Ibrahim adjie (bawah flyover, dekat pasar kircon)	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	3	Penyebrang jalan / Gerakan pejalan kaki	Didepan Taman Kiara Artha Park	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	4	APILL Persimpangan	Sp Cicadas- Sp Antapani Sp Soekarno Hatta - Pasar Kordon Sp Antapani - Sp Pindad Sp Pindad - Sp Soekarno Hatta	Pengaturan waktu siklusnya di atur ulang atau di evaluasi
	5	Disiplin Pengemudi angkum	1. Depan Borma Kiara-condong; 2. Sekitar Pasar Kiara-condong	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	6	U Turn	Di Jalan antara Sp pindad - Sp soekarno Hatta Disekitar jalan Bawah Fly Over	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Non Perhubungan			
	7	Pasar tumpah	depan garmen dese	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	8	PKL	dibawah jalan Fly Over	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	9	Kualitas / kondisi infrastruktur jalan	Binong	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	10	Perlintasan Sebi-dang KA	Stasiun Kiaracondong	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	11	Volume lalu lintas yang tinggi	4012 smp/jam	4136 smp/jam
2	JL. JENDERAL SUDIRMAN			
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
	1	Parkir On street	Sp Otista - sp Gardujati Sp Gardujati - Sp Klen-teng Sp klenteng - Sp Jamika	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	Penyebrang jalan / Gerakan pejalan kaki	Depan SD raya barat, SMA/SMP bpk penabur	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	3	APILL Persimpangan	Sp Otista - sp Gardujati Sp Gardujati - Sp Klen-teng Sp klenteng - Sp Jamika Sp Jamika - Sp Bunder-an Cibereum	Pengaturan waktu siklusnya di atur ulang atau di evaluasi

Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
4	Aksesibilitas Gang / Jalan	Sp Otista - sp Gardujati Sp klenteng - Sp Jamika Sp Gardujati - Sp Klenteng	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
5	Aksesibilitas keluar masuk area per-tokoan / pendidikan	Jalan Astana Anyar, Jalan Otista, Jalan Jamika	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
6	Pasar tumpah	Sp Otista - sp Gardujati Sp klenteng - Sp Jamika Sp Gardujati - Sp Klen- teng	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
7	Kualitas / kondisi infrastruktur jalan	Jamika – Sudirman	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
8	Volume lalu lintas yang tinggi	3361 smp/jam	3501 smp/jam
3 JL. TERUSAN JAKARTA			
Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
1	Disiplin Pengemudi angkum	di bawah fly over pel- angi, depan rsia grabun	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
2	U Turn	Didekat Jalan Purwa- karta	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
3	Aksesibilitas Gang / Jalan	Jalan Purwakarta	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
4	Aksesibilitas keluar masuk area per-tokoan / pendidikan	Yogya	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
5	PKL	Sepanjang Jalan Terusan Jakarta	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
6	Volume lalu lintas yang tinggi	6401 smp/jam	7112 smp/jam
4 JL. SURYA SUMANTRI			
Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
1	Ngetem angkutan umum	Depan Giant / Pizza Hutt	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
2	Parkir On street	belakang holiday inn	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
3	APILL Persimpangan	Simpang Pasteur	Pengaturan waktu siklusnya di atur ulang atau di evaluasi
4	Disiplin Pengemudi angkum	Disiplin	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
5	Aksesibilitas Gang / Jalan	Jl. Setra Sari	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
6	Aksesibilitas keluar masuk area per-tokoan / pendidikan	Universitas Kristen Maranatha	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
7	Volume lalu lintas yang tinggi	2008 smp/jam	2136 smp/jam
5 JL. DR. DJUNDJUNAN			
Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
1	Ngetem angkutan umum	PEREMPATAN JUNJU- NAN-SURYASUMANTRI, DEPAN RS.HASAN SADIKIN	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban

	2	APILL Persimpangan	Sp. Pasteur	Pengaturan waktu siklusnya di atur ulang atau di evaluasi
	3	Disiplin Pengemudi angkum	PEREMPATAN JUNJUNAN-SURYASUMANTRI, DEPAN RS.HASAN SADIKIN	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Non Perhubungan			
	4	Aksesibilitas keluar masuk area per-tokoan / pendidikan	Mall BTC	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	5	Banjir / Genangan	Di depan Mall BTC	Pengalihan arus yang sebelumnya di pantau lewat CCTV kemudian di infokan melalui media social atau di infokan langsung lewat pengeras suara yang ada di persimpangan oleh anggota ATCS
	6	Volume lalu lintas yang tinggi	8113	9325 smp/jam
6	JL. PASTEUR			
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Perhubungan			
	1	Ngetem angkutan umum	PREMPATAN CIHAMPELAS	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	APILL Persimpangan	Sp. Pasteur	Pengaturan waktu siklusnya di atur ulang atau di evaluasi
	3	Disiplin Pengemudi angkum	PREMPATAN CIHAMPELAS	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Non Perhubungan			
7	4	Aksesibilitas keluar masuk area per-tokoan / pendidikan	Mall BTC	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	5	Volume lalu lintas yang tinggi	3582 smp/jam	422 smp/jam
	JL. CIROYOM			
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Perhubungan			
	1	Ngetem angkutan umum	DEPAN PASAR CIROYOM	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	Parkir On street	Di depan SMA Trinitas	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
7	3	Penyebrang jalan / Gerakan pejalan kaki	Di Sekitar Area Pasar	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Non Perhubungan			
	4	Aksesibilitas keluar masuk area per-tokoan / pendidikan	SMA Trinitas, Pasar Ciroyom	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	5	Pasar Tumpah	Pasar Ciroyom	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	6	PKL	Pasar Ciroyom	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	7	Banjir / Genangan	jl. Andir	Pengalihan arus yang sebelumnya di pantau lewat CCTV kemudian di infokan melalui media social atau di infokan langsung lewat pengeras suara yang ada di persimpangan oleh anggota ATCS

	8	Kualitas / kondisi infrastruktur jalan	Jln. Andir	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	9	Volume lalu lintas yang tinggi	1460 smp/jam	1738 smp/jam
	10	Aksesibilitas keluar masuk area per-tokoan / pendidikan	SMA Trinitas, Pasar Ciroyom	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
8	JL. PASIRKALIKI			
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Perhubungan			
	1	Ngetem Angkutan Umum	DEPAN PASAR ANDIR DAN PEREMPATAN PASIR KALIKI-KEBON JATI	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	Penyebrang jalan / Gerakan pejalan kaki	depan IP	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	3	APILL Persimpangan	Simpang Kebon Jati Paskal	Pengaturan waktu siklusnya di atur ulang atau di evaluasi
	4	U Turn	- Pintu Keluar IP - Jln. Tjokro	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Non Perhubungan			
	5	Aksesibilitas Gang / Jalan	jl. Sangkuning	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	6	Aksesibilitas keluar masuk area per-tokoan / pendidikan	IP, ariyanti, BPK penabur	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	7	PKL	jl sangkuning	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	8	Volume lalu lintas yang tinggi	2309 smp/jam	2594 smp/jam

Program dan Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian kinerja Indikator Persentase Penurunan Kemacetan sebagai berikut :

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Out put	Anggaran	Penyerapan	Analisis
A	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	3.85	147.667.371.382	122.380.850.450	Data eksisting ada 805 aspek, 59 aspek masih kategori merah, tahun ini sudah diselesaikan 28 aspek jadi tinggal 31 aspek. Formula perhitungan $31/805 = 3.85\%$
		Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan	4.24			Data eksisting ada 920 aspek, 71 aspek masih kategori merah, tahun ini sudah diselesaikan 32 aspek jadi tinggal 39 aspek. Formula perhitungan $39/920 = 4.24\%$
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evauasi	17 Dokumen	3.604.431.950	2.821.774.209	Dari target 17 dokumen telah terealisasi 17 dokumen dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 17/17 \times 100\% = 100\%$
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan dan penguku-ran kinerja	17 Dokumen	3.604.431.950	2.821.774.209	Dari target 17 dokumen telah terealisasi 17 dokumen dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 17/17 \times 100\% = 100\%$

2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis prasarana jalan yang terbangun	2 Jenis	98.930.682.833	76.985.016.986	Dari target 3 jenis telah terealisasi 2 jenis dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 2/3x100% = 66.67%
		Jumlah jenis perlengkapan jalan yang terbangun	2 Jenis			Dari target 2 jenis telah terealisasi 2 jenis dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 2/2x100% = 100%
		Jumlah jenis prasarana jalan yang dipelihara	3 Jenis			Dari target 3 jenis telah terealisasi 3 jenis dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 3/3x100% = 100%
		Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	5 Jenis			Dari target 5 jenis telah terealisasi 5 jenis dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 5/5x100% = 100%
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang	0 buah	9.388.431.638	7.318.699.354	Dari target 1 unit telah terealisasi 0 unit dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 0/1x100% = 0% (Target tidak tercapai)
		Terbangunnya sarana / fasilitas bike sharing	1 unit			Dari target 1 unit telah terealisasi 1 unit dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 1/1x100% = 100%
		Terbangunnya halte	2 buah			Dari target 2 buah telah terealisasi 2 buah dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 2/2x100% = 100%
		Terbangunnya signage	10 buah			Dari target 10 buah telah terealisasi 10 buah dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 10/10x100% = 100%
		Tersedianya fasilitas pendukung prasarana jalan	1 set			Dari target 1 set telah terealisasi 1 set dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 1/1x100% = 100%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PJU Musrenbang yang terpasang	378 titik	65.946.861.916	52.980.395.331	Dari target 378 titik telah terealisasi 378 titik dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 378/378x100% = 100%
		Jumlah PJU Reses yang terpasang	228 titik			Dari target 228 titik telah terealisasi 228 titik dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 228/228x100% = 100%
		Jumlah PJL musrenbang yang terpasang	3059 titik			Dari target 3059 titik telah terealisasi 3059 titik dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 3059/3059x100% = 100%
		Jumlah PJL reses yang terpasang	3192 titik			Dari target 3803 titik telah terealisasi 3192 titik dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 3192/3803x100% = 89.93%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Pemeliharaan BITS	1 set	1.951.485.423	1.830.463.172	Dari target 1 set telah terealisasi 1 set dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 1/1x100% = 100%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya ATCS	137 titik	21.643.903.856	14.855.459.129	Dari target 137 titik telah terealisasi 137 titik dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 137/137x100% = 100%
3	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal penumpang tipe C yang dikelola Jumlah Terminal penumpang tipe C yang dikelola	12 Lokasi	6.649.315.239	5.716.990.700	Dari target 12 lokasi telah terealisasi 12 lokasi dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah terminal yang berkembang sarana prasarananya	12 Lokasi	4.345.403.668	4.031.612.100	Dari target 12 lokasi telah terealisasi 12 lokasi dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
		Tersedianya tenaga kebersihan di lingkungan terminal	12 Bulan			Dari target 12 bulan telah terealisasi 12 bulan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang dipelihara	12 Lokasi	2.303.911.571	1.685.378.600	Dari target 12 lokasi telah terealisasi 12 lokasi dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%

4	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan umum yang lulus uji	97%	7.612.159.132	7.361.322.088	Dari target 91% telah terealisasi 97% dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 97/91x100% = 106.59%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana/prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 set	272.988.994	260.700.800	Dari target 1 set telah terealisasi 1 set dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 1/1x100% = 100%
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Uji petik kendaraan bermotor	6 kali	86.648.905	81.510.700	Dari target 6 kali telah terealisasi 6 kali dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 6/6x100% = 100%
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 set	4.359.618.855	4.210.506.006	Dari target 1 set telah terealisasi 1 set dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 1/1x100% = 100%
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi/Edukasi SOP dan Kebijakan Bidang Perhubungan	4 kali	2.177.281.376	2.132.136.308	Dari target 6 kali telah terealisasi 6 kali dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 2/2x100% = 100%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 set	715.621.002	676.468.274	Dari target 2 set telah terealisasi 2 set dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 2/2x100% = 100%
5	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan pengaturan lalu lintas	12 Laporan	11.751.048.400	11.398.539.915	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	4 laporan	200.000.000	-	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 4/4x100% = 100%
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Laporan pengaturan lalu lintas	12 laporan	11.051.048.400	10.978.879.750	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Forum LLAJ kota	4 Laporan	500.000.000	419.660.165	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 4/4x100% = 100%
6	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	12 Laporan	3.789.516.204	3.481.245.490	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah kampanye publik	4 laporan	1.380.304.904	1.171.812.930	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 4/4x100% = 100%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan penertiban angkutan di jalan raya	12 Laporan	2.409.211.300	2.309.432.560	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%

7	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	IKM Lingkup Angkutan	85.05 indeks	15.330.217.624	14.615.961.062	Dari target 85 indeks telah terealisasi 85.05 indeks dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi}/\text{target} \times 100\% = 85/85.05 \times 100\% = 100.05\%$
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan umum massal	9 Koridor	15.180.217.624	14.478.410.712	Dari target 9 koridor telah terealisasi 9 koridor dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi}/\text{target} \times 100\% = 9/9 \times 100\% = 100\%$
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru	2 buah	150.000.000	137.550.350	Dari target 2 buah telah terealisasi 2 buah dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi}/\text{target} \times 100\% = 2/2 \times 100\% = 100\%$
B	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian Dalam Kota	1 Dokumen	410.991.320	280.194.000	Dari target 1 Dokumen telah terealisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi}/\text{target} \times 100\% = 1/1 \times 100\% = 100\%$
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen LRT	1 Dokumen	410.991.320	280.194.000	Dari target 1 Dokumen telah terealisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi}/\text{target} \times 100\% = 1/1 \times 100\% = 100\%$
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen LRT	1 Dokumen	410.991.320	280.194.000	Dari target 1 Dokumen telah terealisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi}/\text{target} \times 100\% = 1/1 \times 100\% = 100\%$

Strategi meningkatkan pelayanan jalan dengan indikator tingkat kemantapan jalan akan dicapai dengan kebijakan:

1. Meningkatkan kemantapan jalan indikator tingkat kemantapan jalan;
2. Meningkatkan kualitas trotoar dengan indikator luas trotoar dengan kondisi baik; dan
3. Meningkatkan cakupan PJU menyala dengan indikator cakupan PJU menyala.

Strategi tersebut dijalankan melalui kebijakan untuk mendukung meningkatnya pelayanan jalan dan kebijakan untuk menurunkan aspek penyebab kemacetan baik urusan perhubungan dan non perhubungan. Berikut adalah aspek-aspek penyebab kemacetan yang termasuk ke dalam:

1. Aspek perhubungan : “Ngetem” Angkutan umum, Parkir on street, Penyebrang jalan/ Gerakan Pejalan kaki, Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang harus disettingu lang siklus waktu fasa, Disiplin Pengemudi Angkutan Umum dan U Turn Kendaraan.
2. Aspek Non Perhubungan : Aksesibilitas gang/jalan, Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan/pendidikan, Pasar Tumpah, PKL, Banjir/Genangan, Kualitas/Kondisi Infrastruktur Jalan, Volume Lalu Lintas yang Tinggi.

Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan:

Sementara untuk capaian kinerja program, sisa aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sampai dengan TW 4 2020 sebanyak 87 aspek, dan pada TW 4 2021 berhasil menyelesaikan 10 aspek penyebab kemacetan, sehingga sampai dengan TW 4 2021 sisa aspek penyebab kemacetan sebanyak 77 aspek, kemudian di TW 4 Tahun 2022 berhasil menyelesaikan sebanyak 18 aspek sehingga sisa aspek penyebab kemacetan sebesar

59 aspek sampai dengan TW 4 2022, dengan persentase 7.33%, target di TW 4 2022 sebesar 7.33%, dan capaian kinerja TW 4 2022 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 100%.

Pada Triwulan 1 2023 berhasil menyelesaikan 3 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan, sehingga sampai dengan TW 1 2023 sisa aspek penyebab kemacetan sebanyak 56 aspek dengan persentase 6.96%, target di TW 1 2023 sebesar 6.96%, dan capaian kinerja TW 1 2023 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 100%. Kemudian Triwulan 2 2023 berhasil menyelesaikan 5 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan, sehingga sampai dengan TW 2 2023 sisa aspek penyebab kemacetan sebanyak 51 aspek dengan persentase 6.34%, target di TW 2 2023 sebesar 6.34%, dan capaian kinerja TW 2 2023 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 100%. Dan pada Triwulan 3 2023 berhasil menyelesaikan 7 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan, sehingga sampai dengan TW 3 2023 sisa aspek penyebab kemacetan sebanyak 44 aspek dengan persentase 5.47%, target di TW 3 2023 sebesar 5.47%, dan capaian kinerja TW 3 2023 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 100%.

Pada Triwulan 4 2023 berhasil menyelesaikan 13 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan, sehingga sampai dengan TW 4 2023 sisa aspek penyebab kemacetan sebanyak 31 aspek dengan persentase 3.85%, target di TW 4 2023 sebesar 3.85%, dan capaian kinerja TW 4 2023 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 100%.



Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan:

Sedangkan sisa aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan sampai dengan TW 4 2020 sebanyak 117 aspek, dan pada TW 4 2021 berhasil menyelesaikan 14 aspek penyebab kemacetan, sehingga sampai dengan TW 4 2021 sisa aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan sebanyak 103 aspek, kemudian pada TW 4 2022 berhasil menyelesaikan sebanyak 32 aspek sehingga sampai dengan TW 4 2022 sisa aspek

penyebab kemacetan urusan non perhubungan sebanyak 71 aspek dengan persentase 7,72%, target di TW 4 2022 sebesar 7,72% dan capaian kinerja TW 4 2022 untuk aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan sebesar 100%.

Pada Triwulan 1 2023 berhasil menyelesaikan 2 aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan, sehingga sampai dengan TW 1 2023 sisa aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan sebanyak 69 aspek dengan persentase 7,50%, target di TW 1 2023 sebesar 7,50% dan capaian kinerja TW 1 2023 untuk aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan sebesar 100%.

Kemudian Triwulan 2 2023 berhasil menyelesaikan 7 aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan, sehingga sampai dengan TW 2 2023 sisa aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan sebanyak 62 aspek dengan persentase 6,74%, target di TW 2 2023 sebesar 6,74% dan capaian kinerja TW 2 2023 untuk aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan sebesar 100%.

Dan pada Triwulan 3 2023 berhasil menyelesaikan 8 aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan, sehingga sampai dengan TW 3 2023 sisa aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan sebanyak 54 aspek dengan persentase 5,87%, target di TW 3 2023 sebesar 5,87% dan capaian kinerja TW 3 2023 untuk aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan sebesar 100%.

Pada Triwulan 4 2023 berhasil menyelesaikan 15 aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan, sehingga sampai dengan TW 4 2023 sisa aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan sebanyak 39 aspek dengan persentase 4,24%, target di TW 4 2023 sebesar 4,24% dan capaian kinerja TW 4 2023 untuk aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan sebesar 100%.

Tabel 2.55
Presentase Tingkat Pelayanan Jalan

NO	RUAS	KECEPATAN	LOS	KETERANGAN
		>21	Min.C	
1	JL. H. IBRAHIM AJI	21.54	C	Teratasi
2	JL. JENDERAL SUDIRMAN	21.23	C	Teratasi
3	JL. TERUSAN JAKARTA	24.20	C	Teratasi
4	JL. SURYA SUMANTRI	21.00	C	Teratasi
5	JL. DR. DJUNDJUNAN	21.75	C	Teratasi
6	JL. PASTEUR	22.26	C	Teratasi
7	JL. CIROYOM	21.97	C	Teratasi
8	JL. PASIRKALIKI	22.22	C	Teratasi

a	Jumlah ruas jalan	: 115
b	Jumlah teratasi eksisting	: 98
c	Jumlah ruas teratasi pada tahun 2022	: 8
d	Jumlah ruas teratasi	: 106
e	Presentasi	: $106/115 \times 100\%$
		92.17%
f	Target tahun 2022	92.17%
g	Realisasi 2022	92.17%
h	Presentase	100%

Sumber: Data Hasil Kajian Dinas Perhubungan kota Bandung

Dari table di atas dapat dilihat bahwa kondisi di 8 ruas jalan tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa di 8 ruas jalan tersebut sudah dapat teratasi.

Perhitungan capaian kinerja :

Persentase capaian kinerja = $((2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}) \times 100\%) / \text{Target} = ((2 \times 14,78 - 14,78) \times 100\%) / 14,78 = 100\%$

Rumus diatas digunakan untuk menghitung persentase capaian kinerja yang memiliki indikator negatif. Dimana semakin kecil nilainya maka semakin baik kinerjanya.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 /PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Perkembangan kondisi jalan di Kota Bandung dari tahun ke tahun ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Kondisi Jalan Kota Bandung

Kondisi Jalan (%)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kondisi Baik	(1)	75.50	77.01	79.55	80.64	73,35	78,81	74,65	69,41
Kondisi Sedang	(2)	15.24	14.85	12.79	11.74	18,52	16,00	19,36	25,86
Kondisi Rusak Ringan	(3)	7.49	6.76	6.38	6.12	0,30	2,09	2,77	0,42
Kondisi Rusak Berat	(4)	1.78	1.38	1.27	1.49	7,83	3,09	3,23	4,31
Kondisi Mantap	(5) = (1) + (2)	90.74	91.86	92.34	92.38	91,87	94,81	94,01	95,28
Kondisi Tidak Mantap	(6) = (3) + (4)	9.27	8.14	7.65	7.61	8,13	5,19	5,99	4,72

Sumber: DSDABM Kota Bandung, 2023

Target tingkat kemantapan jalan pada Tahun 2023 adalah sebesar 95%. Berdasarkan hasil survey kondisi jalan yang telah dilaksanakan, jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah sepanjang 636.313 m dari 667.869 m dengan panjang jalan yang disurvey atau sebesar 95,28%. Dengan demikian realisasi tingkat kemantapan jalan pada tahun 2023 telah melampaui target dengan capaian sebesar $95,28/95 = 100,29\%$.

Target luas trotoar dalam kondisi baik pada Tahun 2023 adalah sebesar 441.945 m². Realisasi luas trotoar dalam kondisi baik pada Tahun 2023 adalah sebesar 467.976 m². Dengan demikian realisasi luas trotoar dalam kondisi baik pada tahun 2023 telah melampaui target dengan capaian sebesar $467.976 / 441.945 = 105,89\%$.

Mulai tahun 2022 pembangunan dan pemeliharaan PJU yang semula menjadi kewenangan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga berubah menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, begitu pula PJJ yang semula menjadi kewenangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berubah menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Target cakupan Alat Penerangan Jalan (APJ) menyala pada Tahun 2023 adalah sebesar 91%. Realisasi cakupan APJ menyala pada Tahun 2023 adalah 91.86%, yang terdiri dari 6.908 Titik APJ Menyala dari total 7520 titik APJ yang ada. Dengan demikian realisasi cakupan APJ menyala pada tahun 2023 telah melampaui target dengan capaian sebesar $91,86\%/91\% = 100,95\%$.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tingkat kemantapan jalan adalah:

- a. Pasca Pandemi COVID-19, Pagu Anggaran Program Penyelenggaraan Jalan telah berangsur pulih, namun demikian alokasinya belum memadai untuk mencapai kebutuhan ideal.
- b. Lingkup survey kondisi jalan secara keseluruhan tidak memiliki kecocokan angka dengan jumlah jalan yang terdapat di SK Jalan Wali Kota, sehingga harus ada sinkronisasi data supaya bisa menghasilkan data yang lebih valid.
- c. Curah hujan yang ekstrem serta kapasitas drainase yang tidak memadai menimbulkan limpasan air ke jalan, sehingga mempercepat terjadinya kerusakan yang masif pada ruas jalan.

Sehubungan kendala tersebut diatas, dilakukan upaya-upaya mencapai target tingkat kemantapan jalan antara lain:

- a. Menyempurnakan dan memutakhirkan data jalan kota agar tersedia informasi yang lengkap dalam perencanaan penyelenggaraan jalan; Dengan telah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep.883-DBMTR/2022 Tentang Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal, Jalan Lingkungan, Dan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan, maka perlu segera dilakukan pemutakhiran Keputusan Wali Kota terkait Status dan Fungsi Jalan Kota Bandung.
- b. Melaksanakan preservasi kondisi jalan secara strategis dengan menyusun skala prioritas preservasi kondisi jalan;
- c. Meningkatkan kinerja pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan dalam kondisi sudah mantap dan trotoar dalam kondisi baik;
- d. Mensinergikan pembangunan jalan dengan pembangunan saluran drainase jalan yang memadai dalam kondisi cuaca ekstrem sekalipun;
- e. Melakukan survey kondisi jalan yang lebih menyeluruh, mensurvey seluruh jalan yang termasuk dalam SK Jalan Kota Bandung, agar memperoleh tingkat kemantapan yang lebih presisi dan akurat.



Implementasi kebijakan strategis meningkatkan infrastruktur kota terpadu dan berkualitas pada tahun 2023 khususnya yang terkait dengan persentase penurunan kemacetan dilaksanakan melalui strategi berikut:

- a. Menurunkan aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan yang menghasilkan berkurangnya aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar 3,85% dari target 3,85%.
- b. Menurunkan aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan yang menghasilkan berkurangnya aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar 4,24% dari target 4,24 %.
- c. Meningkatkan Kemantapan Jalan menghasilkan tingkat kemantapan jalan sebesar 95,28% dari target 95 % serta menghasilkan luas trotoar dalam kondisi baik seluas 467.976 m2 dari target 441.945 m2.

Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah didukung oleh tingkat konektivitas jalan dan tingkat konektivitas angkutan umum. Tingkat konektivitas jalan dan tingkat konektivitas angkutan umum digunakan untuk melihat tingkat keterhubungan wilayah dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi. Pada tahun 2023, keseluruhan total jalan di kota Bandung adalah sepanjang 1480, 8 km, panjang jalan yang sudah terlayani dengan angkutan umum antara lain angkot, TMB, dan DAMRI sepanjang 536,7 km, dengan jumlah trayek angkutan kota sebanyak 39 trayek, jumlah koridor Trans Metro Bandung sebanyak 5 koridor, maka jumlah trayek angkutan umum di wilayah Kota Bandung adalah 44 trayek. Dari data tersebut didapatkan tingkat konektivitas angkutan umum di Kota Bandung adalah sebesar $536,7 : 1.480,8 = 36,24\%$.

2. Presentase Luasan Kawasan Kumuh

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan fasilitasi kebutuhan hunian bagi masyarakat kurang mampu serta mengupayakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman.

Pada tahun 2020 tercapai persentase luasan kawasan kumuh sebesar 2,94% dari target 3,96%. Pada tahun 2021 tercapai persentase luasan kawasan kumuh sebesar 2,79% dari target 2,80%. Pada tahun 2022 tercapai persentase luasan kawasan kumuh sebesar 2,32% dari target 2,76%. Pada tahun 2023 tercapai persentase luasan kawasan kumuh sebesar 1,88% dari target 2,16%. Tercapainya target ini dengan peremajaan kawasan kumuh serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Persentase luasan kawasan kumuh dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

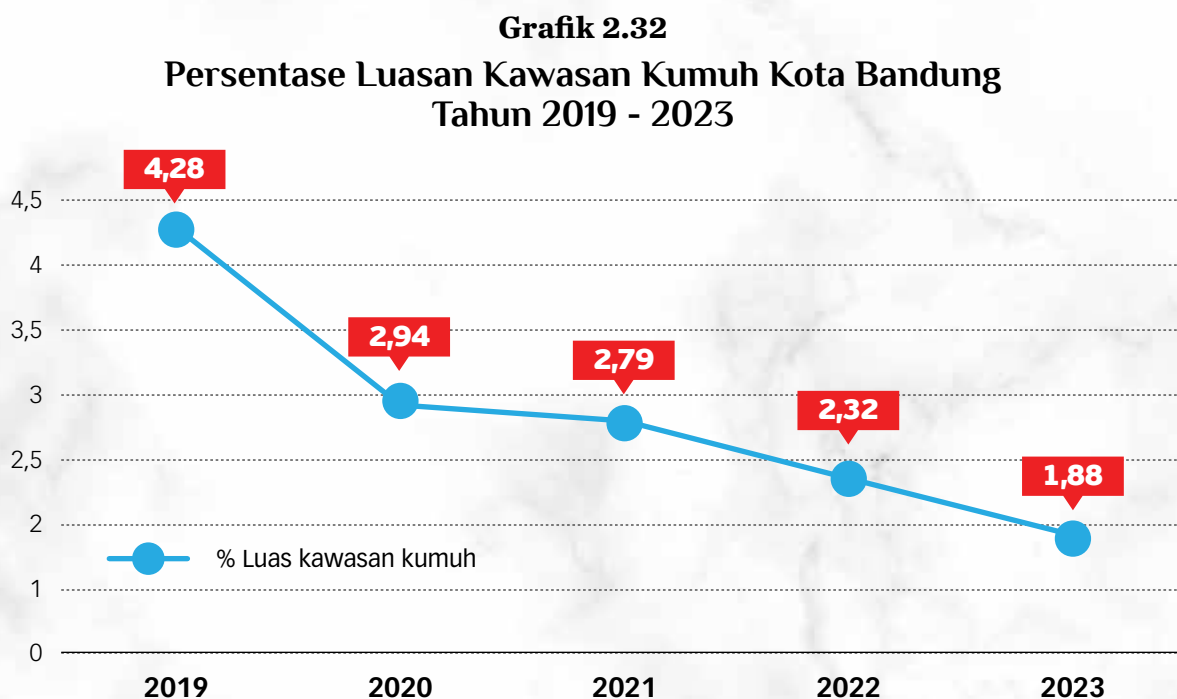
$$\text{Persentase luasan kawasan kumuh} = \frac{\text{Luas permukiman kumuh di Kota Bandung}}{\text{Luas wilayah Kota Bandung}} \times 100\%$$

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penghitungan dan Penetapan Luasan Kumuh tanggal 29 November 2023, diperoleh sisa luas permukiman kumuh seluas 315,33 Ha. Dengan luas Kota Bandung 16.729,65 Ha diperoleh persentase luasan kawasan kumuh sekitar 1,88%.

Pengukuran kawasan kumuh meliputi 7 (tujuh) aspek sebagai berikut :

- Tersedianya proteksi kebakaran/bencana
- Terpenuhi kuantitas dan kualitas bangunan
- Terpenuhi kualitas jalan lingkungan
- Terpenuhi kualitas drainase lingkungan
- Tersedianya pengolahan air limbah rumah tangga
- Tersedianya cakupan layanan air minum
- Terlaksananya pengelolaan sampah

Perubahan persentase luasan kawasan kumuh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat terlihat pada grafik di bawah ini :



Sasaran meningkatkan infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas dilaksanakan dengan Program Kawasan Permukiman yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, Program Pengembangan Perumahan yang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.

Perhitungan persentase luasan kawasan permukiman kumuh dihitung berdasarkan rumus luas permukiman kumuh di Kota Bandung di bagi luas wilayah area Kota Bandung atau sebesar $(315,33 \text{ Ha} : 16.729,65 \text{ Ha}) \times 100\% = 1,88\%$.

Indikator persentase luasan kawasan kumuh dihitung berdasarkan kawasan permukiman yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung, pada tahun 2020 ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota Nomor 648/Kep.1227-DPKP/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung seluas 491,95 hektar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.57

**Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
di Kota Bandung berdasarkan SK Wali Kota
Nomor 648/Kep.1227-DPKP/2020 (per Kecamatan)**

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh	
			[Ha]	[M2]
1	ANDIR	KEBON JERUK	2.8100	28,100
2	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	6.4910	64,910
		ANTAPANI TENGAH	1.8400	18,400
3	ASTANA ANYAR	CIBADAK	5.3701	53,701
		NYENGSERET	9.5300	95,300
		PELINDUNG HEWAN	2.7100	27,100
4	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	17.4100	174,100
		BABAKAN CIPARAY	16.6200	166,200
		CIRANGRANG	7.0810	70,810
		SUKAHAJI	30.8500	308,500
5	BANDUNG KIDUL	KUJANG SARI	5.4000	54,000
		WATES	4.7670	47,670
6	BANDUNG KULON	CARINGIN	4.3930	43,930
		CIGONDEWAH KALER	4.6700	46,700
		CIGONDEWAH RAHAYU	9.1200	91,200
		CIJERAH	18.0280	180,280
		WARUNG MUNCANG	4.8600	48,600
7	BANDUNG WETAN	CITARUM	0.3500	3,500
8	BATUNUNGGAL	CIBANGKONG	10.2000	102,000
		GUMURUH	6.6700	66,700
		KACAPIRING	1.2400	12,400
		MALEER	1.3400	13,400
		SAMOJA	0.7500	7,500
9	BOJONGLOA KALER	BABAKAN ASIH	10.1927	101,927
		BABAKAN TAROGONG	4.9800	49,800
		JAMIKA	10.4100	104,100
		KOPO	13.7821	137,821
		SUKAASIH	6.4482	64,482
10	BOJONGLOA KIDUL	CIBADUYUT	6.1700	61,700
		CIBADUYUT KIDUL	3.7800	37,800
		MEKAR WANGI	2.1500	21,500
11	CIBEUNYING KALER	CIGADUNG	2.2800	22,800
12	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	7.2800	72,800
		PASIRLAYUNG	4.2800	42,800
13	CICENDO	ARJUNA	4.0400	40,400
		HUSEIN SASTRANEGARA	3.3545	33,545
		PAJAJARAN	19.9100	199,100
		PASIR KALI	0.7600	7,600
		SUKARAJA	37.4300	374,300
14	CIDADAP	CIUMBULEUIT	34.1100	341,100

15	CINAMBO	BABAKAN PENGHULU	9.8000	98,000
16	COBLONG	SADANG SERANG	10.2200	102,200
17	GEDEBAGE	CISARANTEN KIDUL	6.2300	62,300
		RANCABOLANG	2.2500	22,500
18	KIARACONDONG	KEBON JAYANTI	10.2636	102,636
		KEBON KANGKUNG	7.3310	73,310
19	LENGKONG	BURANGRANG	5.8600	58,600
		CIJAGRA	2.7300	27,300
		CIKAWAO	1.5100	15,100
		MALABAR	1.9453	19,453
		TURANGGA	8.0000	80,000
20	MANDALAJATI	SINDANG JAYA	1.9300	19,300
21	PANYILEUKAN	CIPADUNG KULON	8.8100	88,100
		CIPADUNG WETAN	8.0400	80,400
22	REGOL	CIATEUL	3.6947	36,947
		CISEUREUH	8.1544	81,544
		PASIRLUYU	6.8226	68,226
23	SUKAJADI	SUKABUNGAH	10.3600	103,600
24	SUMUR BANDUNG	KEBON PISANG	0.3100	3,100
		MERDEKA	3.4300	34,300
25	UJUNG BERUNG	PASANGGRAHAN	9.4300	94,300
		PASIR ENDAH	9.2100	92,100
		PASIRWANGI	11.7567	117,567
Total			491.9459	4,919,459

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, 2023

Hasil perhitungan pengurangan luasan kumuh berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Kota Bandung Nomor 070/001/Satker-PIP/DPKP-BDG/2023, tercapai sisa luasan kumuh seluas 315,33 Ha dan berkurang sebesar 73,81 Ha, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.58
Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh
Tahun 2023 Kota Bandung

No	Kecamatan	Kelurahan	Sisa Luasan Kumuh 2022 [Ha]	Pengurangan Kumuh (Ha)	Sisa Luasan Kumuh 2023 (Ha)
1	Andir	Kebon Jeruk	1,160	0,240	0,920
2	Antapani	Antapani Kidul	4,079	0,738	3,341
3	Antapani	Antapani Tengah	0,450	0,000	0,450
4	Astana Anyar	Cibadak	3,301	0,600	2,701
5	Astana Anyar	Nyengseret	7,080	3,700	3,380
6	Astana Anyar	Pelindung Hewan	2,080	0,610	1,470
7	Babakan Ciparay	Babakan	17,410	2,730	14,680
8	Babakan Ciparay	Babakan Ciparay	15,820	0,000	15,820
9	Babakan Ciparay	Cirangrang	6,131	1,860	4,271

10	Babakan Ciparay	Sukahaji	28,950	2,900	26,050
11	Bandung Kidul	Kujangsari	3,200	0,400	2,800
12	Bandung Kidul	Wates	0,970	0,000	0,970
13	Bandung Kulon	Caringin	4,393	0,000	4,393
14	Bandung Kulon	Cigondewah Kaler	4,670	0,000	4,670
15	Bandung Kulon	Cigondewah Rahayu	5,690	0,000	5,690
16	Bandung Kulon	Cijerah	17,528	0,000	17,528
17	Bandung Kulon	Warung Muncang	4,860	0,000	4,860
18	Batununggal	Cibangkong	9,150	3,220	5,930
19	Batununggal	Gumuruh	5,170	0,500	4,670
20	Batununggal	Samoja	0,750	0,000	0,750
21	Bojongloa Kaler	Babakan Asih	10,193	0,260	9,933
22	Bojongloa Kaler	Babakan Tarogong	4,980	0,000	4,980
23	Bojongloa Kaler	Jamika	10,290	0,000	10,290
24	Bojongloa Kaler	Kopo	9,313	0,000	9,313
25	Bojongloa Kaler	Sukaasih	2,901	0,000	2,901
26	Bojongloa Kidul	Cibaduyut	6,170	0,000	6,170
27	Bojongloa Kidul	Cibaduyut Kidul	3,780	0,170	3,610
28	Bojongloa Kidul	Mekarwangi	2,150	0,000	2,150
29	Cibeunying Kidul	Cikutra	4,460	1,420	3,040
30	Cibeunying Kidul	Pasirlayung	2,680	1,480	1,200
31	Cicendo	Arjuna	3,700	3,700	0,000
32	Cicendo	Husein Sastranegara	2,587	1,718	0,868
33	Cicendo	Pajajaran	13,350	3,960	9,390
34	Cicendo	Pasirkaliki	0,380	0,150	0,230
35	Cicendo	Sukaraja	26,970	6,560	20,410
36	Cidadap	Ciumbuleuit	26,530	5,420	21,110
37	Cinambo	Babakan Penghulu	9,800	3,900	5,900
38	Coblong	Sadang Serang	6,690	1,630	5,060
39	Gedebage	Cisaranten Kidul	5,920	1,310	4,610
40	Gedebage	Rancabolang	2,250	0,000	2,250
41	Kiaracondong	Kebon Jayanti	7,404	0,420	6,984
42	Kiaracondong	Kebon Kangkung	1,650	0,000	1,650
43	Lengkong	Burangrang	4,390	0,000	4,390
44	Lengkong	Cijagra	2,030	0,000	2,030
45	Lengkong	Cikawao	1,510	0,710	0,800
46	Lengkong	Malabar	1,945	0,915	1,030
47	Lengkong	Turangga	7,400	3,400	4,000
48	Panyileukan	Cipadung Kulon	8,810	1,060	7,750
49	Panyileukan	Cipadung Wetan	8,040	0,400	7,640
50	Regol	Ciateul	2,895	1,000	1,895
51	Regol	Ciseureuh	3,222	0,000	3,222
52	Regol	Pasirluyu	5,602	0,345	5,257
53	Sukajadi	Sukabungah	7,310	3,970	3,340
54	Sumur Bandung	Kebon Pisang	0,310	0,000	0,310

55	Sumur Bandung	Merdeka	0,200	0,200	0,000
56	Ujung Berung	Pasangrahan	8,300	2,450	5,850
57	Ujung Berung	Pasir Endah	9,210	3,730	5,480
58	Ujung Berung	Pasirwangi	10,987	6,037	4,950
Jumlah			389,150	73,813	315,337

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, 2023

Pagu anggaran Program Kawasan Permukiman pada tahun 2023 sebesar Rp.72.653.586.612,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.61.317.347.208,- (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah) atau sekitar 84,40% dengan rincian sebagai berikut.:

- Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
- Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan.

Pagu anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat pada tahun 2023 sebesar Rp.1.710.810.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.710.627.325,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau sekitar 99,99%.

Pagu anggaran Program Pengembangan Perumahan pada tahun 2023 sebesar Rp.72.158.263.481,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.64.506.968.516,- (Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) atau sekitar 69,74% dengan rincian sebagai berikut.:

- Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun.
- Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.



Pagu anggaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dan Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang pada tahun 2023 sebesar Rp.29.867.930.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.27.468.790.419,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau sekitar 91,97%.

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

- a. Sinergitas pembiayaan pembangunan pusat dan daerah
- b. Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau
- c. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria bangunan Gedung dengan indikator persentase penurunan kumuh kriteria bangunan gedung dilakukan melalui Program Kawasan Permukiman yang menangani perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada tahun 2023 terlaksana sebanyak 1.493 unit, untuk penanganan rutilahu di kawasan kumuh sebanyak 126 unit pada 27 Kelurahan.
- d. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria penyediaan air minum berupa peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses air minum dilaksanakan melalui Program Kawasan Permukiman yang menyediakan prasarana dan sarana air minum. Pada tahun 2023 terlaksana sebanyak 2.320 SR (Sambungan Rumah) diantaranya 380 SR untuk akses air minum di Kawasan kumuh di 19 lokasi pada 15 Kelurahan.



- e. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria pengelolaan air limbah pada tahun 2023 berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik melalui Program Kawasan Permukiman yang terlaksana sebanyak 120 SR pada 16 lokasi, dimana 1 Kelurahan berada pada kawasan kumuh, yaitu di Kelurahan Sadang Serang sebanyak 15 SR. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan pekerjaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Setempat (SPALD-S) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi Tahun 2023 terlaksana sebanyak 31 SR di 5 Kelurahan, dimana 1 Kelurahan berada pada kawasan kumuh yaitu Kujangsari sebanyak 7 SR. Selain itu terdapat pula implementasi program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terlaksana pembangunan sarana prasarana sanitasi tangki septik individual sebanyak 38 KK pada Kelurahan Binong dengan jumlah unit sebanyak 35 unit.
- f. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria jalan lingkungan yaitu melakukan perbaikan jalan lingkungan di Kawasan permukiman dimana pada tahun 2023 terlaksana di 170 lokasi dengan capaian 91.288 M² dimana 27 lokasi di 20 Kelurahan diantaranya berada pada kawasan kumuh dengan capaian seluas 13.964 M².
- g. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria drainase lingkungan terlaksana sebanyak 64 lokasi dengan capaian 6.662 M dan 18 lokasi diantaranya pada kawasan kumuh, seluas 1.738 M di 9 Kelurahan.
- h. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria pengelolaan persampahan Pengelolaan Sampah di kawasan kumuh dilaksanakan pada 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Gumuruh, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Antapani Kidul, Kelurahan Babakan Tarogong, Kelurahan Cipadung, Kelurahan Cicendo dan Kelurahan Kujangsari berupa penataan TPS menjadi TPS 3R/TPST.
- i. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran tahun 2023 dilakukan penghitungan terhadap ketidaktersediaan

sarana proteksi kebakaran yang dihitung di 42 titik Springkler warga pada 11 kelurahan yang telah tersedia Sumber air. Selain itu, jumlah kendaraan unit, mobil tangga, dan jangkauan response time ke Kawasan kumuh dengan radius 2,5 KM yang dilakukan oleh wilayah manajemen kebakaran Diskar PB melalui 4 (empat) UPT yaitu UPT Timur, Barat, Selatan, dan Utara.

- j. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran tahun 2023 tercakup pada ketersediaan prasarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran dan atau data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan telah tersedia 2.548 orang relawan diantaranya yang telah terlatih sebanyak 525 orang yang tersebar di 151 Kelurahan sedangkan yang terdapat di wilayah kumuh pada 58 Kelurahan sebanyak 870 orang terlatih dan belum terlatih.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

- a. Terkendala status lahan yang bukan aset Pemerintah Kota.
- b. Terbatasnya lahan milik Pemerintah Kota di wilayah penerima manfaat.
- c. Padatnya permukiman menyulitkan pembangunan sarana pengolahan air limbah.

Rekomendasi untuk pencapaian kinerja berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru serta mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- b. Mencari terobosan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait lahan-lahan yang statusnya belum menjadi aset Pemerintah Kota agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan.
- c. Penggunaan kode rekening belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang merupakan kode rekening barang/jasa sehingga tidak mengharuskan status lahan milik Pemerintah Kota Bandung.

3. Cakupan Pelayanan Air Minum

Di Kota Bandung pada saat ini terdapat 2 (dua) jenis pelayanan air bersih, yaitu perpipaan dan non perpipaan. Jenis penyediaan air bersih perpipaan pada dasarnya merupakan air minum yang telah disediakan oleh Perumda Tirtawening Kota Bandung untuk melayani kebutuhan aktivitas di Kota Bandung, sedangkan penyediaan air bersih non perpipaan tidak bersumber pada Perumda Tirtawening melainkan dari sumber air baku yang dapat diambil dari sumur gali/bor, mata air dan lain-lain. Sasaran meningkatnya layanan air bersih dengan indikator cakupan layanan air bersih dilaksanakan secara kolaborasi dengan Perumda Tirtawening.

Capaian cakupan layanan air bersih sampai tahun 2020 tercapai sebesar 79,38% dari target 80%, dimana DPKP bertanggung jawab atas pengelolaan non perpipaan dengan jumlah yang terlayani sebanyak 41.983 SR atau 6,54% dari jumlah penduduk 2.566.641 jiwa sedangkan sisanya sebesar 72,84% merupakan kewenangan Perumda Tirtawening. Capaian cakupan layanan air bersih sampai tahun 2021 tercapai sebesar 82,19% dari target 81%, dimana DPKP bertanggung jawab atas pengelolaan non perpipaan dengan jumlah yang terlayani sebanyak 42.783 SR dari jumlah penduduk 2.518.260 jiwa sedangkan sisanya merupakan kewenangan Perumda Tirtawening.

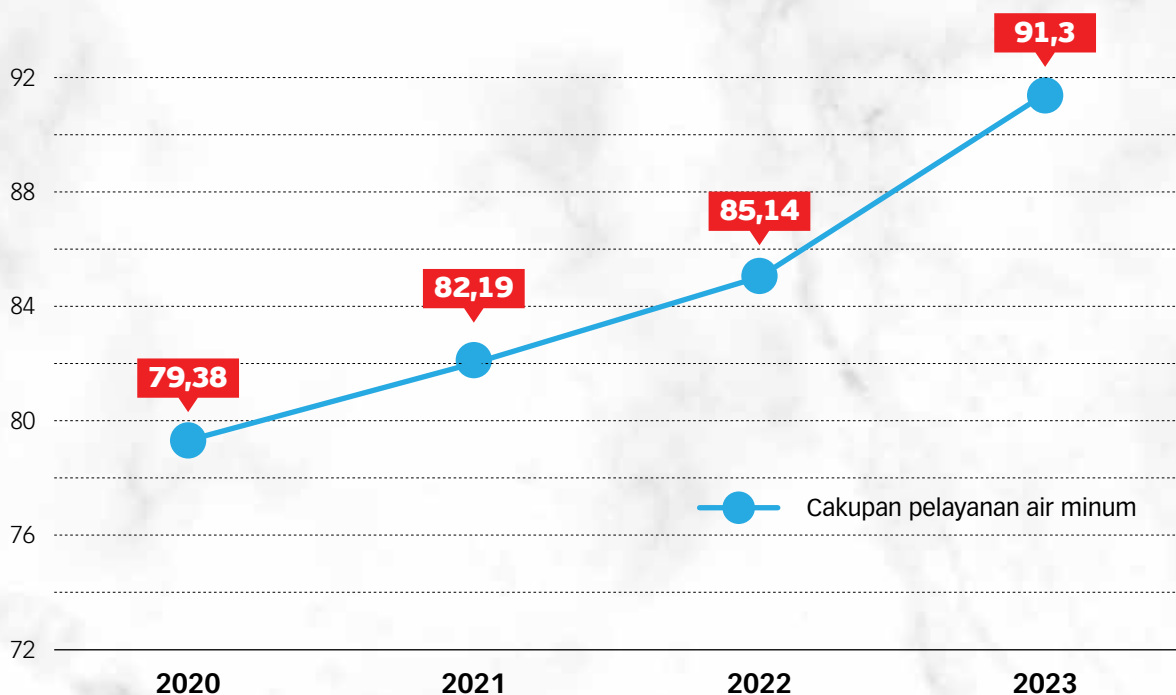
Capaian cakupan layanan air bersih sampai tahun 2022 tercapai sebesar 85,14% dari target 82%, dimana DPKP bertanggung jawab atas pengelolaan non perpipaan dengan jumlah yang terlayani sebanyak 49.883 SR dari jumlah penduduk 2.530.448 jiwa sedangkan sisanya merupakan kewenangan Perumda Tirtawening. Capaian cakupan layanan air bersih sampai tahun 2023 tercapai sebesar 91,30% dari target 83%, dimana DPKP bertanggung jawab atas pengelolaan non perpipaan dengan jumlah yang terlayani sebanyak 52.203 Sambungan Rumah (SR) dari jumlah penduduk 2.555.187 jiwa sedangkan sisanya merupakan kewenangan Perumda Tirtawening yaitu pengelolaan perpipaan sebanyak 169.273 Sambungan Langganan (SL). Pada tahun 2023 telah terlaksana sambungan non perpipaan sebanyak 2.320 SR pada 116 lokasi dan Sambungan Baru Perpipaan sebanyak 3.317 SL.

Cakupan layanan air bersih dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Cakupan layanan air bersih} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani}}{\text{Jumlah penduduk di Kota Bandung}} \times 100\%$$

Perubahan cakupan pelayanan air minum dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.33
Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Bandung
Tahun 2020 - 2023



Data sambungan perpipaan sesuai dari data Mutasi Pelanggan Perumda Tirtawening sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.59
Data Sambungan Langganan Tahun 2023

Tahun	Pasangan Baru	Pemutusan	Total Jumlah SL	Keterangan
2019	6.279	4.173	177.014	Pemutusan sambungan karena pelanggan menunggak lebih dari satu tahun.
2020	1.618	1.689	176.943	
2021	1.492	3.373	175.062	
2022	1.923	3.354	173.955	
2023	3.317	6.179	169.373	
TOTAL	14.629	18.768		

Sumber: Perumda Tirtawening, 2023

Jumlah Sambungan Langganan (SL) secara keseluruhan merupakan penambahan SL dari pasangan baru dan pembukaan kembali dari pelanggan yang menunggak (PK SPT) . Data sambungan non perpipaan di Kota Bandung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.60
Data Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) Tahun 2019-2023

No	Sumber Pendanaan	Unit	Sambungan Rumah (SR)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	APBD	116*	430	-	800	1140	2.320
2	KOTAKU	-	4090	-	-	-	-
3	APBN SPAM Padat Karya	-	-	190	450	-	-
Jumlah			4520	190	1250	1140	2.320

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, 2023
*Capaian pada tahun 2023

Implementasi kebijakan strategis pelayanan air bersih pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses air minum melalui layanan non perpipaan yang dilaksanakan oleh DPKP melalui Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha sebanyak 2.320 sambungan rumah dari APBD.
2. Meningkatkan cakupan pelayanan dengan menambah supply air bersih serta pembangunan jaringan distribusi melalui kerja sama B to B, baik dengan skema jual beli air curah maupun skema terintegrasi (Hulu-Hilir)
3. Menurunkan tingkat kehilangan air dari 41,44% menjadi 40% melalui skema kerja sama B to B dengan berbasis kontrak kinerja.

Sasaran meningkatkan infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas indikator Cakupan Pelayanan Air Minum dilaksanakan dengan Program Kawasan Permukiman yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan.

Pagu anggaran Program Kawasan Permukiman yang mendukung sasaran meningkatkan infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas indikator Cakupan Pelayanan Air Minum

pada perubahan anggaran tahun 2023 adalah sebesar **Rp.21.916.058.226,-** (Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.21.059.790.069,-** (Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) atau 96,09%.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian “Cakupan Pelayanan Air Minum” terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja cakupan layanan air bersih adalah sinergitas pembiayaan pembangunan pusat dan daerah.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sumber air baku pada pelayanan air minum perpipaan juga keterbatasan pendanaan dalam pembiayaan infrastruktur air minum.
- b. Pelayanan air minum non perpipaan adalah terkendala status lahan lokasi yang akan dibangun.
- c. Akses air minum masih belum dapat memenuhi standar kelayakan dan potensial terancam oleh padatnya permukiman dan perubahan fisik lingkungan



Agar pencapaian sasaran dapat terwujud, diperlukan perbaikan kinerja sebagai solusi/rekomendasi untuk tahun yang akan datang; yaitu :

- a. Melakukan inventarisasi titik lokasi yang akan dibangun dalam penyediaan sanitasi dan air bersih.
- b. Melakukan perubahan kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait lahan yang statusnya belum menjadi aset Pemerintah Kota agar terkait lahan-lahan yang statusnya belum menjadi aset Pemerintah Kota agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan.

- c. Menata kawasan mata air dan mengembangkan ruang publik yang telah dilaksanakan pada mata air Cikendi, Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadak.
- d. Pengujian kualitas air sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup pada 64 titik secara rutin untuk dicek kualitas air berkolaborasi Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan Perumda Tirta Wening Kota Bandung sebagai laboratorium pengujinya.
- e. Pembangunan SPAM Gedebage dengan kapasitas 700 L/det yang mana saat ini IPA, Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Bagi (JDB) sudah selesai dibangun, dan pembangunan Jaringan Distribusi Langsung (JDL) serta DMA (District Meter Area) berikut sambungan rumah akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan target 30.000 SL.
- f. Tindak lanjut kerjasama Perumda Tirtawening dan Perumda Jasa Tirta II terkait penyediaan air curah sebanyak 3500 L/detik dan pembangunan jaringan distribusi di 16 kecamatan dimana sampai tahun 2023 dokumen studi kelayakan, evaluasi studi kelayakan dari BPKP dan review studi kelayakan dari Ahli UNPAD sudah selesai dilaksanakan, untuk kemudian dilakukan tahap penunjukan Pemrakarsa serta dilanjutkan dengan tahap pemilihan badan usaha pelaksana.
- g. Tindak lanjut kerja sama B to B berbasis kinerja dengan PT Adaro Tirtawening telah sampai pada tahap pelaksanaan sesuai ruang lingkup yaitu pekerjaan infrastruktur serta pekerjaan pemeliharaan dan perawatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.61
Rekapitulasi Pekerjaan Kerja Sama B to B PT Adaro

No	Ruang Lingkup	Capaian Tahun 2023
Pekerjaan Infrastruktur		
1	Pembentukan Zona Pelayanan	7 Zona
2	Pembentukan DMA	29 DMA
3	Pengadaan Peralatan Pendeteksi Kebocoran	5 Unit
4	Rehabilitasi Jaringan Perpipaan	Pemasangan Pipa HDPE 1.869 m, Pemasangan air valve 14 unit dan blow off 4 unit
5	Pemasangan Smart Water Meter	Pemenuhan Hak Cipta dan perijinan
6	Penggantian water meter pelanggan	2.554 Unit
Pekerjaan Operasional dan Perawatan		
1	Perbaikan kebocoran pipa	992 Titik
2	Aplikasi AWS	Aplikasi berfungsi sebagian
3	Penggantian sambungan ACP	36 Titik

- h. Kerja sama jual beli air curah antara Perumda Tirtawening dengan PT Tirta Gemah Ripah (SPAM Regional) baru dapat dimanfaatkan sebesar 35 L/det dari target 45 L/det pada Tahun 2023. Adapun kendala pencapaian target disamping akibat dari pipa transmisi TGR yang masih terkendala teknis dalam meningkatkan kapasitas pendistribusiannya adalah kesulitan dalam pemasaran disebabkan penggunaan air bawah tanah/sumur bor baik yang dikelola oleh kompleks perumahan, peyediaan melalui program KOTAKU serta perorangan.
- i. Untuk kerja sama dengan PT.BII terkait pengembangan IPA Pakar sedang dalam proses persetujuan KPM (Kuasa Pemilik Modal).
- j. Telah dilaksanakan perubahan kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait lahan yang statusnya belum menjadi aset Pemerintah Kota agar terkait lahan-lahan yang statusnya belum menjadi aset Pemerintah Kota agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan.

4. Presentase Penurunan Titik Genangan

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, genangan adalah terendahnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. Semakin rendah nilai persentase penurunan titik genangan, maka semakin rendah jumlah titik genangan yang terjadi. Berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023, kriteria keberhasilan yang diukur adalah tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dan waktu surut tidak lebih dari 60 menit.

Persentase Penurunan Titik Genangan diperoleh dari perbandingan jumlah titik genangan yang belum memenuhi kriteria keberhasilan terhadap 68 titik genangan yang sudah ditetapkan. Target kinerja persentase penurunan titik genangan pada tahun 2023 adalah sebesar 41,18%. Pada tahun 2023, jumlah titik genangan yang belum memenuhi kriteria keberhasilan adalah sebanyak 8 titik genangan, dengan demikian realisasi kinerja persentase penurunan titik genangan pada tahun 2023 adalah sebesar $8/68 = 11,76\%$. Maka capaian kinerja indikator persentase penurunan titik genangan telah melebihi target, dimana capaian kinerja sebesar 171,43%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 41,18% maka capaian kinerjanya sebesar 171,43%.

Data lokasi titik genangan berikut statusnya berdasarkan kriteria keberhasilan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62
Data Lokasi Titik Genangan/Cileuncang Kota Bandung Tahun 2023

NO	LOKASI	TINGGI (CM)	WAKTU SURUT (MENIT)	STATUS
TITIK GENANGAN BELUM MEMENUHI KRITERIA (8 TITIK)				
1.	Jl. Kopo - Sal. Citarip	60	120	Waktu surut > 60 menit
2.	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta & Jl. Pasirkoja ke arah gerbang Tol	60	120	Waktu surut > 60 menit
3.	Pasar Induk Gedebage Sal. Cipamulihan	40	180	Tinggi > 30 cm, waktu surut > 60 menit
4.	Jl. Cibaduyut - Jl. Tol	40	60	Tinggi > 30 cm
5.	Jl. Raya Sudirman (Sal. Irigasi Leuwilimus I & Sal. Pembuang)	20	105	Waktu surut > 60 menit
6.	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Rumah Sakit	30	120	Waktu surut > 60 menit
7.	Jl. Layang Cimindi / Gunung Batu (Sal. Ciwarga)	50	60	Tinggi > 30 cm
8.	Jl. Pagarsih - S. Citepus	40	60	Tinggi > 30 cm
TITIK GENANGAN DALAM BATAS KRITERIA (11 TITIK)				
1.	S. Cipagalo	30	60	Dalam Batas Kriteria
2.	Jl. Cikutra Barat - Jl. Pahlawan (sal. Cikutra Barat)	25	60	Dalam Batas Kriteria
3.	Fly Over Kiaracandong / Sal. Cibeunying	20	60	Dalam Batas Kriteria
4.	Terminal Leuwipanjang	20	60	Dalam Batas Kriteria
5.	Sal. Rancabolang - Pasantren Jl. Rancabolang	30	60	Dalam Batas Kriteria
6.	Jl. A.H. Nasution S. Cikiley	30	60	Dalam Batas Kriteria
7.	Sal. Lebak larang - UNPAD	30	60	Dalam Batas Kriteria

8.	Jl.Moch. Toha - Sal. Cipalasari / Sal. Ciateul	20	60	Dalam Batas Kriteria
9.	SMA 9 - Lapang Husen Sal. Cianting	30	60	Dalam Batas Kriteria
10.	S. Cicendo Jl. Kebon Kawung	20	60	Dalam Batas Kriteria
11.	Jl. Dian Molek - Sal. Cibuntu	20	60	Dalam Batas Kriteria
TITIK GENANGAN YANG TELAH TERTANGANI (43 TITIK)				
1.	Perumahan Bumi Panyileukan (Sal. Cisolatri)	-	-	Tidak Terjadi Genangan
2.	Sal. Cilimus Jl. Sukajadi	-	-	Tidak Terjadi Genangan
3.	Jl. Sukamulya - S. Cipedes	-	-	Tidak Terjadi Genangan
4.	Sal. Cikapayang - Jl. Supratman - Cisokan	-	-	Tidak Terjadi Genangan
5.	Sal. Ciganitri Jl. Ciwastra	-	-	Tidak Terjadi Genangan
6.	S. Cikapundung Kolot - belakang TSM	-	-	Tidak Terjadi Genangan
7.	Simpang Jl. Jakarta - Jl. Kiaracondong	-	-	Tidak Terjadi Genangan
8.	S. Ciroyom Jl. Kopo	-	-	Tidak Terjadi Genangan
9.	Jl. Caringin Sal. Leuwi Limus I	-	-	Tidak Terjadi Genangan
10.	Jl. Cibodas - antapani	-	-	Tidak Terjadi Genangan
11.	Jl. Terusan Pasteur - S. Cianting (depan Hotel Topaz & BTC)	-	-	Tidak Terjadi Genangan
12.	Jl. Cipaganti - Jl. Setiabudi / Sal. Cikalintu	-	-	Tidak Terjadi Genangan
13.	Jalan Cibogo / Sal. Cibogo	-	-	Tidak Terjadi Genangan
14.	Jl. Prof. Eickman - Sal. Leuwilimus I	-	-	Tidak Terjadi Genangan
15.	S. Citepus Jl. Arjuna	-	-	Tidak Terjadi Genangan
16.	Jl. Sukahaji - Jl. Gegerkalong	-	-	Tidak Terjadi Genangan
17.	Pasar Sederhana Sal. Cikalintu	-	-	Tidak Terjadi Genangan
18.	Persimpangan Jl. Pasirkoja - Sal. Cilimus I	-	-	Tidak Terjadi Genangan
19.	Fly Over Jl. Cimindi	-	-	Tidak Terjadi Genangan
20.	Jalan Naripan / Sal. Cikapayang	-	-	Tidak Terjadi Genangan
21.	Pusdai Jl. Suci / Sal. Lebak Larang	-	-	Tidak Terjadi Genangan
22.	Sal. Cikapayang - Gasibu	-	-	Tidak Terjadi Genangan
23.	S. Cibunut - Baranangsiang	-	-	Tidak Terjadi Genangan
24.	Sal. Ciborete - Alamanda	-	-	Tidak Terjadi Genangan
25.	Jl. Sukamaju / Jl. Cikaso S. Cibeunying	-	-	Tidak Terjadi Genangan
26.	Sal. Ciharalang - S. Cidurian	-	-	Tidak Terjadi Genangan
27.	Sal. Babakan Dese Antara Jl. A. Yani - Jl. Jakarta	-	-	Tidak Terjadi Genangan
28.	Jl. Sumatra - SMPN 5 dan 2 (Sal. Melintas ke Jl. Jawa)	-	-	Tidak Terjadi Genangan
29.	Jl. Stasiun Timur Kebon Jeruk	-	-	Tidak Terjadi Genangan
30.	Sal. Cikudapateuh - Jl. Kacapiring, Jl. Gudang Utara	-	-	Tidak Terjadi Genangan
31.	Jl. Masuk FKOK UPI Sal. Ciparungpung	-	-	Tidak Terjadi Genangan
32.	Sal. Crossing Jl. Soekarno Hatta - Sal. Cijagra (depan Hotel Lingga)	-	-	Tidak Terjadi Genangan
33.	S. Cikapundung Gg. Apandi Jl. Braga	-	-	Tidak Terjadi Genangan
34.	Sal. Mercuri Jl. Tata Surya & Jl. Mercuri	-	-	Tidak Terjadi Genangan
35.	Sal. Drainase Jl. Komplek Santosa Asih	-	-	Tidak Terjadi Genangan
36.	S. Cipariuk	-	-	Tidak Terjadi Genangan
37.	Perumahan Riung Bandung	-	-	Tidak Terjadi Genangan
38.	Jl. Windu - Jl. Galunggung - Seskoad	-	-	Tidak Terjadi Genangan
39.	S. Cibunut - Pasar Kosambi	-	-	Tidak Terjadi Genangan
40.	Jl. Nilem	-	-	Tidak Terjadi Genangan
41.	Terusan Jl. Kiaracondong - Jl. Soekarno Hatta	-	-	Tidak Terjadi Genangan

42.	S. Cirangrang	-	-	Tidak Terjadi Genangan
43.	S. Cibeureum - Cigondewah / Gempolsari / Sudiplak	-	-	Tidak Terjadi Genangan
44.	Sal. Irigasi Dungusema Jl. Moch. Toha	-	-	Tidak Terjadi Genangan
45.	S. Cijalupang - Leger Jalan	-	-	Tidak Terjadi Genangan
46.	Jl. Cilengkrang II Sal. Cipalasari	-	-	Tidak Terjadi Genangan
47.	Jl. Plered Sal. Antapani	-	-	Tidak Terjadi Genangan
48.	Jl. Purwakarta Sal. Ciparungpung	-	-	Tidak Terjadi Genangan
49.	Jl. Ujung Beuring - Polresta Bandung Timur	-	-	Tidak Terjadi Genangan

Sumber: DSDABM Kota Bandung, 2023

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian “Presentase Penurunan Titik Genangan” terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Implementasi kebijakan strategis menurunkan genangan pada tahun 2023 dilaksanakan melalui 2 (dua) program dengan total pagu anggaran sebesar Rp.114.193.602.677 dengan realisasi sebesar Rp.105.005.335.415 atau penyerapan sebesar 91,95%, dengan hasil sebagai berikut :

1. peningkatan kapasitas resapan air, aliran sungai, dan parkir air menghasilkan:
 - a. persentase penurunan titik genangan sebesar 11,76% sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2023 sebesar 171,43% dari target 41,18%;
 - b. persentase kebutuhan sumur imbuhan sebesar 3,43% sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2023 sebesar 111,90% dari target 3,06%;
 - c. panjang sungai dalam kondisi baik sebesar 265,05 km sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2023 sebesar 100,00% dari target 265,05 km;
 - d. persentase kapasitas parkir air (kolam retensi) sebesar 50,50% sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2023 sebesar 70,13% dari target 72,01%;
2. peningkatan kapasitas saluran drainase jalan menghasilkan persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 66,51% sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2023 sebesar 101,51% dari target 65,52%.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam penanganan permasalahan genangan adalah perlunya keterlibatan perangkat daerah lainnya dalam penyelesaian akar masalah genangan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

AKAR MASALAH GENANGAN	INSTANSI TERKAIT (CROSSCUTTING)
Belum adanya pembagian wewenang pengelolaan sungai secara formal	DSDABM, DSDA JABAR, BBWS CITARUM
Belum adanya pembagian wewenang yang jelas terkait pemeliharaan drainase lingkungan	DPKP, KEWILAYAHAN
Belum optimalnya pengawasan pembangunan pada kawasan pemukiman	DICIPTABINTAR, DPMPTSP
Belum optimalnya pengawasan pembangunan pada kawasan perkotaan	DICIPTABINTAR, DPMPTSP
Belum optimalnya pengendalian penataan ruang pada Kawasan resapan / hulu	DICIPTABINTAR, DPMPTSP, LINTAS KABUPATEN / KOTA
Belum optimalnya pengendalian penataan ruang pada Kawasan sempadan sungai	DICIPTABINTAR, DPMPTSP, BBWS CITARUM
Belum optimalnya pengendalian penataan ruang terkait fungsi resapan pada Kawasan pemukiman	DICIPTABINTAR, DPMPTSP, DLHK, DPKP

Belum optimalnya penyediaan lahan hunian untuk relokasi warga di sempadan sungai	DICIPTABINTAR
Belum tertatanya pemanfaatan saluran drainase untuk utilitas	DSDABM, DPMPSTP
Kurangnya pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah di badan jalan	DLHK, PERUMDA PASAR, SATPOL PP, KEWILAYAHAN
Kurangnya pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah di badan sungai	DLHK, PERUMDA PASAR, SATPOL PP, KEWILAYAHAN
Kurangnya pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah di hulu sungai	DLHK, SATPOL PP, KEWILAYAHAN, LINTAS KABUPATEN / KOTA
Kurangnya pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah di saluran drainase	DLHK, PERUMDA PASAR, SATPOL PP, KEWILAYAHAN
Praktik penutupan sebagian atau seluruh badan saluran oleh pemilik / penyewa persil	DSDABM, DPKP, DICIPTABINTAR, SATPOL PP, KEWILAYAHAN
Terbatasnya SDM untuk pemantauan tali-tali air secara intensif	DSDABM, DPKP
Terbatasnya SDM untuk pengangkatan sampah saluran drainase secara intensif	DSDABM, DPKP, DLHK, PERUMDA PASAR, KEWILAYAHAN
Terbatasnya SDM untuk pengangkatan sampah sungai secara intensif	DSDABM, DLHK, PERUMDA PASAR, BBWS CITARUM
Tingginya deforestasi kawasan resapan / hulu	DKPP (D/H DISPANGTAN), DICIPTABINTAR, LINTAS KABUPATEN / KOTA
Terbatasnya anggaran pemeliharaan jalan untuk overlay jalan dilengkapi pengupasan lapis perkerasan	DSDABM, DBMPR JABAR, BPJN

Faktor Pendukung pencapaian target persentase penurunan titik genangan adalah:

- Telah terbangunnya beberapa infrastruktur pendukung penurunan lama genangan, antara lain kolam retensi, sumur imbuhan, sumur resapan, dan rehabilitasi lahan kritis untuk meningkatkan resapan air hujan di kawasan hulu
- Telah berjalannya pemeliharaan sungai dan saluran melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan oleh UPT OP Kewilayahan dan UPT Daerah Aliran Sungai
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membuat sumur resapan dalam rangka mengurangi limpasan air hujan, didukung oleh edukasi dari Dinas dengan pembuatan drum pori di lingkungan pemukiman dan perkantoran
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga daerah resapan air, didukung oleh edukasi dari Dinas dengan gerakan menanam pohon di kawasan hulu.

Faktor-faktor yang menghambat pencapaian target persentase penurunan titik genangan adalah:

- Kurang optimalnya kerjasama / kolaborasi dalam upaya penurunan genangan yang pada hakikatnya membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak selain DSDABM. Hingga saat ini masih terdapat paradigma bahwa penyelesaian banjir dan genangan hanya merupakan tanggung jawab DSDABM. Pada kenyataannya penyebab banjir dan genangan yang terjadi di Kota Bandung bersifat multidimensi dan lintas sektoral, misalnya karena adanya alih fungsi lahan, tingginya volume sampah di sungai/saluran dan rendahnya kapasitas jaringan drainase lingkungan/pemukiman.
- Kondisi curah hujan ekstrim yang menyebabkan kapasitas saluran tidak mampu menampung seluruh limpasan hujan.
- Masih tingginya praktik membuang sampah ke sungai/saluran, sehingga saluran mampat dan aliran air dari hulu ke hilir saluran terhambat.

- d. Masih adanya bangunan di sempadan sungai dan di atas badan saluran sehingga menghambat kelancaran normalisasi sungai/saluran.
- e. Berkurangnya daerah resapan air terutama di daerah hulu, sehingga menambah debit air limpasan hujan.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan jumlah titik genangan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab penanganan banjir dan genangan secara lebih terperinci, yakni melalui penjenjangan kinerja dan cascading yang melibatkan seluruh sektor terkait yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandung. Perlu dibentuk tim koordinasi penanganan banjir baik lingkup kota maupun lingkup lintas kabupaten /kota
- b. Perlu dibuat kebijakan dan perencanaan strategis skala kota untuk upaya penurunan genangan secara terkoordinasi dan kolaboratif
- c. Pencegahan daya rusak air pada kawasan hulu dengan memperbaiki lahan kritis untuk meningkatkan daya resap air dan membuat tampungan air seperti embung dan kolam retensi
- d. Pencegahan daya rusak air pada kawasan hilir dengan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran melalui pembangunan saluran dan normalisasi sungai/saluran
- e. Penanggulangan dampak genangan/banjir dengan melakukan rehabilitasi tanggul sungai dan saluran
- f. Inovasi dengan pendekatan kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui edukasi untuk giat menanam, membuat sumur resapan dan tidak membuang sampah ke sungai/saluran.



Sasaran 8 : Meningkatkan Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan

Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan. Sasarannya berupa Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ke 5 atau terakhir RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	-	-	-	-	-	-	5,98	20,68	345,82
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		-			-			345,82		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	6,48	10,75	165,90	6,69	10,56	157,85
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		165,90			157,85		

Sasaran Meningkatkan Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan dapat dilihat dari sebanyak 1 (satu) indikator yaitu : Capaian indikator kinerja “Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan” dari target tahun 2023 yaitu 6,69 dengan realisasi sesuai dengan target yaitu 10,56 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 157,85%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2022 sebesar 10,75 mengalami penurunan sebesar 0,19. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 6,69 maka capaian kerjanya 157,85% atau melebihi target kinerja.

1. Presentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan

Kinerja Misi 5 difokuskan pada partisipasi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan infrastruktur Kota yang dibiayai dari Non-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Sumber-sumber tersebut antara lain APBN, APBD Provinsi, Kerjasama Daerah, KPBU, PINA, Obligasi Daerah, Tanggung Jawab Sosial, dan Lingkungan (TJSL), Sumbangan Pihak Ketiga dan Swadaya Masyarakat.

Pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, Tujuan dari Misi 5 adalah Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan dengan target akhir pada Tahun 2023 adalah sebesar 6,69%, dengan formulasi pencapaian target dihitung dari 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatkan Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan.

Capaian Kinerja Tujuan Misi 5 di Tahun 2023 adalah sebesar 157,85% dimana capaian

pada sasaran realisasi Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan adalah sebesar 10,56% dari target 6,69%, atau mengalami penurunan sebesar 0,19% dari realisasi tahun 2022 sebesar 10,75%, dengan akumulasi biaya Non-APBD Kota Bandung pada tahun 2023 sebesar Rp729.448.518.174,00 bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp6.905.926.043.905,00. Adapun rincian akumulasi biaya Non-APBD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.64
Akumulasi Biaya Non-APBD Kota Bandung

No	Kegiatan Non APBD	2023 (Rp)	Terkait Misi RPJMD
I Meningkatnya Partisipasi Masyarakat			
1	Partisipasi/Swadaya Masyarakat pada Program PIPPK	88.823.204.949	Misi 1, 2, 3 dan 4
2	Partisipasi/Swadaya Murni Masyarakat	126.169.814.574	Misi 1, 2, 3 dan 4
3	Partisipasi/Swadaya Masyarakat pada Program Rutilahu	11.191.356.900	Misi 1 dan 4
II Meningkatnya Inovasi Skema Pembiayaan Pembangunan			
1	TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	18.432.149.227	Misi 1, 2, 3 dan 4
2	Kerja sama Daerah	2.449.337.000	Misi 5
3	Pembiayaan Proyek Strategis	118.622.705.525	Misi 4
4	Bantuan Sosial	363.759.950.000	Misi 3
Jumlah		729.448.518.174	

Sumber: Bappelitbang, DPKP, DLH, Dinsos, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah, (data diolah), 2024

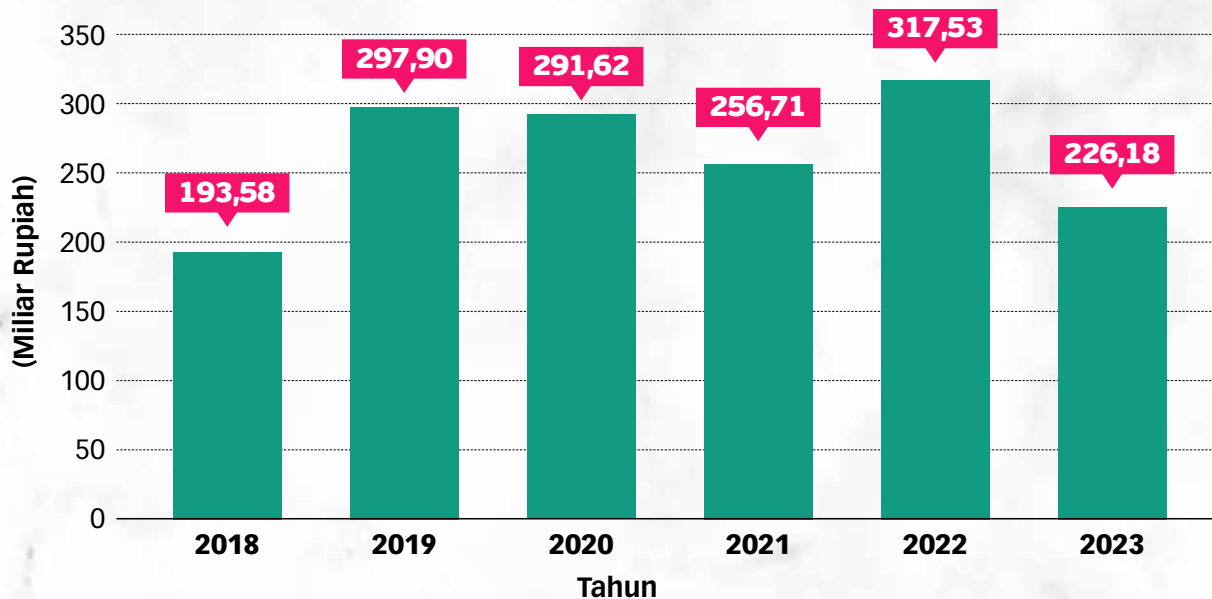
A. Partisipasi/Swadaya Masyarakat

Partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Bandung dihitung dari partisipasi masyarakat dalam mendukung program PIPPK, partisipasi masyarakat (swadaya murni) dan partisipasi dalam program lainnya baik itu program Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2023 partisipasi masyarakat sebesar Rp226,18 Miliar turun sebesar Rp91,34 Miliar bila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp317,53 Miliar.



Grafik 2.34

Capaian Partisipasi Masyarakat
Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)

Sumber: Bappelitbang, (data diolah) 2024

Implementasi Partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan melalui Program Pemberdayaan Kewilayahan dengan pagu anggaran pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp225.421.456.863,00 dengan realisasi sebesar Rp211.764.387.386,00 atau penyerapan sebesar 93,94%, yang menghasilkan Partisipasi swadaya masyarakat pada kegiatan PIPPK sebesar Rp88.823.204.949,00.

Dengan adanya kegiatan PIPPK mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di wilayahnya, berbagai partisipasi masyarakat untuk melakukan gotong-royong dalam rangka ikut serta dalam pembangunan di Kota Bandung, adapun data partisipasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan PIPPK terdapat pada Sub Bab Janji Wali Kota.

Selain berpartisipasi dalam swadaya program PIPPK, masyarakat juga melakukan partisipasi dalam berbagai kegiatan dalam rangka mendukung pembangunan di Kota Bandung, pada tahun 2023, partisipasi masyarakat (swadaya murni) adalah sebesar Rp126.169.814.574. Adapun rincian pada masing-masing jenis swadaya murni (Fisik dan Non Fisik) dan kegiatan (Kemasyarakatan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dan Lingkungan) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.65

Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat (Swadaya Murni)
Per Kecamatan Tahun 2023

No	KECAMATAN	FISIK/ NON FISIK	BIDANG				JUMLAH (Rp)
			KEMASYA- RAKATAN (Rp)	EKONOMI (Rp)	SOSBUD & AGAMA(Rp)	LINGKUNGAN (Rp)	
1	ANDIR	FISIK	81.082.250	31.311.000	258.768.000	210.787.000	581.948.250
		NON FISIK	275.842.400	55.502.500	236.304.200	101.456.475	669.105.575
TOTAL			356.924.650	86.813.500	495.072.200	312.243.475	1.251.053.825

2	ANTAPANI	FISIK	44.678.569	2.700.000	71.149.500	78.012.700	196.540.769
		NON FISIK	434.399.200	252.460.000	644.348.000	494.830.100	1.826.037.300
TOTAL			479.077.769	255.160.000	715.497.500	572.842.800	2.022.578.069
3	ARCAMANIK	FISIK	362.121.100	56.500.000	512.500.000	3.399.019.000	4.330.140.100
		NON FISIK	302.400.000	207.840.000	623.305.000	805.500.000	1.939.045.000
TOTAL			664.521.100	264.340.000	1.135.805.000	4.204.519.000	6.269.185.100
4	ASTANA ANYAR	FISIK	141.702.000	84.000.000	380.000.000	146.050.000	751.752.000
		NON FISIK	717.702.500	27.000.000	1.105.691.000	200.000.000	2.050.393.500
TOTAL			859.404.500	111.000.000	1.485.691.000	346.050.000	2.802.145.500
5	BABAKAN CIPARAY	FISIK	431.138.750	203.970.500	364.291.600	393.931.700	1.393.332.550
		NON FISIK	850.070.000	144.344.000	562.848.800	339.775.100	1.897.037.900
TOTAL			1.281.208.750	348.314.500	927.140.400	733.706.800	3.290.370.450
6	BANDUNG KIDUL	FISIK	268.173.605	76.657.434	130.174.614	41.079.311	516.084.964
		NON FISIK	569.479.875	84.760.586	175.614.038	216.580.752	1.046.435.251
TOTAL			837.653.480	161.418.020	305.788.652	257.660.063	1.562.520.215
7	BANDUNG KULON	FISIK	111.082.000	92.750.000	732.500.000	291.679.500	1.228.011.500
		NON FISIK	374.055.000	913.890.000	515.089.900	374.213.280	2.177.248.180
TOTAL			485.137.000	1.006.640.000	1.247.589.900	665.892.780	3.405.259.680
8	BANDUNG WETAN	FISIK	9.380.000	51.965.500	6.170.000	64.345.000	131.860.500
		NON FISIK	13.400.000	190.750.000	140.830.000	131.637.000	476.617.000
TOTAL			22.780.000	242.715.500	147.000.000	195.982.000	608.477.500
9	BATUNUNGGAL	FISIK	50.650.000	-	9.000.000	189.975.000	249.625.000
		NON FISIK	57.388.799	230.067.286	82.829.801	43.678.314	413.964.200
TOTAL			108.038.799	230.067.286	91.829.801	233.653.314	663.589.200
10	BOJONGLOA KALER	FISIK	43.066.050	28.400.000	156.499.450	264.429.450	492.394.950
		NON FISIK	540.139.640	205.185.000	416.685.000	255.644.200	1.417.653.840
TOTAL			583.205.690	233.585.000	573.184.450	520.073.650	1.910.048.790
11	BOJONGLOA KIDUL	FISIK	1.151.517.485	43.562.000	160.775.746	2.354.413.467	3.710.268.698
		NON FISIK	307.078.822	40.195.388	218.357.314	166.714.057	732.345.581
TOTAL			1.458.596.307	83.757.388	379.133.060	2.521.127.524	4.442.614.279
12	BUAHBATU	FISIK	3.250.000	2.350.000	74.869.000	196.176.000	276.645.000
		NON FISIK	1.093.850.000	17.700.000	239.090.000	634.674.000	1.985.314.000
TOTAL			1.097.100.000	20.050.000	313.959.000	830.850.000	2.261.959.000
13	CIBEUNYING KALER	FISIK	55.710.000	29.450.000	118.470.000	80.210.500	283.840.500
		NON FISIK	387.883.500	79.612.500	262.456.000	168.187.000	898.139.000
TOTAL			443.593.500	109.062.500	380.926.000	248.397.500	1.181.979.500
14	CIBEUNYING KIDUL	FISIK	26.800.000	17.500.000	43.300.000	177.248.000	264.848.000
		NON FISIK	415.137.800	55.003.000	558.864.200	152.955.000	1.181.960.000
TOTAL			441.937.800	72.503.000	602.164.200	330.203.000	1.446.808.000
15	CIBIRU	FISIK	75.886.000	1.000.000	555.700.000	43.310.000	675.896.000
		NON FISIK	298.400.000	34.400.000	52.000.000	141.700.000	526.500.000
TOTAL			374.286.000	35.400.000	607.700.000	185.010.000	1.202.396.000
16	CICENDO	FISIK	58.917.000	39.800.000	221.025.000	479.387.500	799.129.500
		NON FISIK	1.062.650.500	146.176.000	578.760.000	583.792.000	2.371.378.500
TOTAL			1.121.567.500	185.976.000	799.785.000	1.063.179.500	3.170.508.000
17	CIDADAP	FISIK	-	-	-	17.500.000	17.500.000
		NON FISIK	37.000.000	11.000.000	57.000.000	25.000.000	130.000.000
TOTAL			37.000.000	11.000.000	57.000.000	42.500.000	147.500.000

18	CINAMBO	FISIK	82.811.669	-	-	20.000.000	102.811.669
		NON FISIK	41.800.000	11.476.290	19.918.105	174.581.701	247.776.096
TOTAL			124.611.669	11.476.290	19.918.105	194.581.701	350.587.765
19	COBLONG	FISIK	176.998.262	61.433.925	98.726.450	198.992.609	536.151.246
		NON FISIK	253.405.311	99.933.725	92.584.663	322.024.306	767.948.005
TOTAL			430.403.573	161.367.650	191.311.113	521.016.915	1.304.099.251
20	GEDEBAGE	FISIK	245.016.234	-	2.207.032.642	468.418.000	2.920.466.876
		NON FISIK	4.337.837.427	468.620.000	7.126.159.795	5.099.814.587	17.032.431.809
TOTAL			4.582.853.661	468.620.000	9.333.192.437	5.568.232.587	19.952.898.685
21	KIARACON-DONG	FISIK	101.650.000	14.400.000	89.800.000	64.180.000	270.030.000
		NON FISIK	314.367.500	104.775.000	230.998.900	107.060.000	757.201.400
TOTAL			416.017.500	119.175.000	320.798.900	171.240.000	1.027.231.400
22	LENGKONG	FISIK	76.560.000	15.298.000	77.190.000	125.991.650	295.039.650
		NON FISIK	366.190.000	27.500.000	316.240.000	186.879.200	896.809.200
TOTAL			442.750.000	42.798.000	393.430.000	312.870.850	1.191.848.850
23	MANDALAJATI	FISIK	750.936.875	171.406.275	364.894.090	517.791.810	1.805.029.050
		NON FISIK	983.634.240	255.620.880	488.476.400	367.587.400	2.095.318.920
TOTAL			1.734.571.115	427.027.155	853.370.490	885.379.210	3.900.347.970
24	PANYILEUKAN	FISIK	110.438.550	14.301.000	1.621.766.450	370.589.250	2.117.095.250
		NON FISIK	3.028.274.650	716.850.000	5.594.485.600	1.012.597.800	10.352.208.050
TOTAL			3.138.713.200	731.151.000	7.216.252.050	1.383.187.050	12.469.303.300
25	RANCASARI	FISIK	399.466.000	59.152.000	1.610.292.000	2.009.525.000	4.078.435.000
		NON FISIK	1.695.116.500	1.189.442.500	6.769.863.000	1.468.009.416	11.122.431.416
TOTAL			2.094.582.500	1.248.594.500	8.380.155.000	3.477.534.416	15.200.866.416
26	REGOL	FISIK	22.500.000	1.500.000.000	158.580.000	114.841.500	1.795.921.500
		NON FISIK	998.006.258	12.256.600	1.112.215.150	959.024.600	3.081.502.608
TOTAL			1.020.506.258	1.512.256.600	1.270.795.150	1.073.866.100	4.877.424.108
27	SUKAJADI	FISIK	155.075.000	17.350.000	7.083.370.000	916.851.000	8.172.646.000
		NON FISIK	1.631.388.500	43.900.000	2.687.149.500	1.073.661.000	5.436.099.000
TOTAL			1.786.463.500	61.250.000	9.770.519.500	1.990.512.000	13.608.745.000
28	SUKASARI	FISIK	87.410.000	38.500.000	124.646.500	118.645.000	369.201.500
		NON FISIK	329.599.500	45.539.000	816.290.000	313.051.471	1.504.479.971
TOTAL			417.009.500	84.039.000	940.936.500	431.696.471	1.873.681.471
29	SUMUR BANDUNG	FISIK	16.028.500	-	9.575.000	41.263.000	66.866.500
		NON FISIK	634.131.500	61.438.750	796.839.900	262.865.500	1.755.275.650
TOTAL			650.160.000	61.438.750	806.414.900	304.128.500	1.822.142.150
30	UJUNGBERUNG	FISIK	239.600.000	61.500.000	289.460.000	676.585.500	1.267.145.500
		NON FISIK	3.267.440.400	465.325.000	4.282.230.200	1.669.504.000	9.684.499.600
TOTAL			3.507.040.400	526.825.000	4.571.690.200	2.346.089.500	10.951.645.100

FISIK/NON FISIK	BIDANG				JUMLAH (Rp)
	KEMASYA-RAKATAN (Rp)	EKONOMI (Rp)	SOSBUD & AGAMA (Rp)	LINGKUNGAN (Rp)	
FISIK	5.379.645.899	2.715.257.634	17.530.526.042	14.071.228.447	39.696.658.022
NON FISIK	25.618.069.822	6.198.564.005	36.803.524.466	17.852.998.259	86.473.156.552
TOTAL	30.997.715.721	8.913.821.639	54.334.050.508	31.924.226.706	126.169.814.574

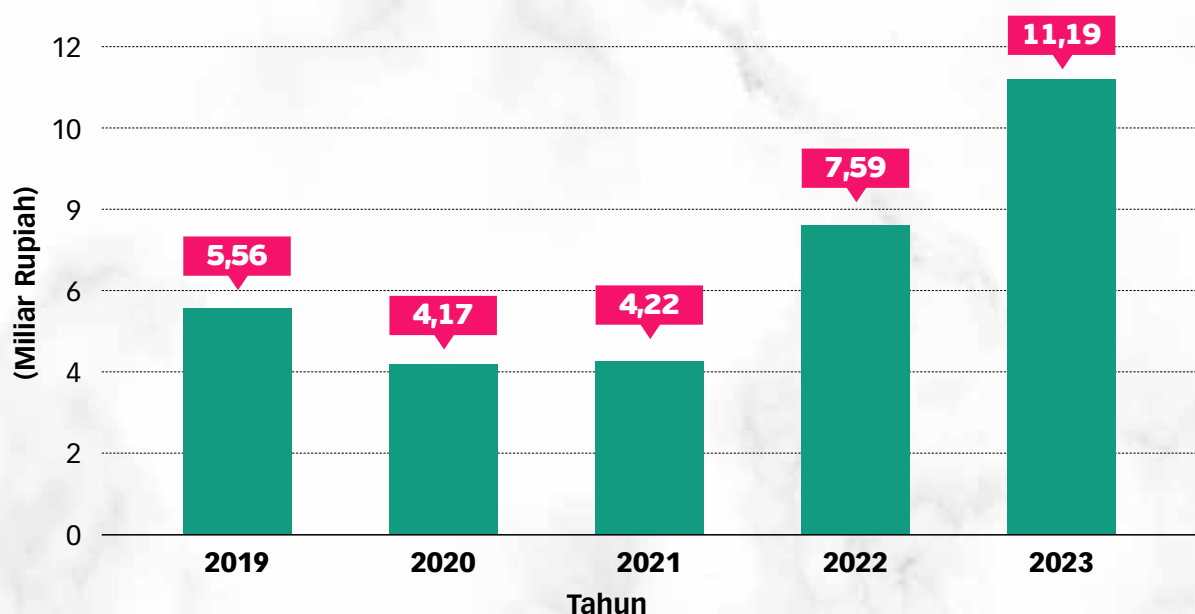
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2022.

Capaian Realisasi partisipasi masyarakat pada Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan pada tahun 2023 sebesar Rp11,19 Miliar, naik sebesar Rp3,60 Miliar dari tahun 2022.

Selama 5 tahun RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 cenderung mengalami kenaikan, hanya pada tahun 2020 (Rp4,17 Miliar) mengalami penurunan dari tahun 2019 (Rp5,56 Miliar). Adapun jumlah realisasi swadaya program Rutilahu Tahun 2019-2023 di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Grafik 2.35

Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024.

Data partisipasi masyarakat pada Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan pada kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp11.191.356.900,00. Adapun rincian pada masing-masing program, kegiatan serta lokasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.66

Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 Sumber Biaya APBD Kota Bandung

No	Kecamatan	Kelurahan	Unit	Total
1	Andir	Campaka	7	94.472.000
2	Andir	Ciroyom	10	57.100.000
3	Andir	Dungus Cariang	2	13.500.000
4	Andir	Garuda	18	91.800.000
5	Andir	Kebon Jeruk	4	32.000.000
6	Andir	Maleber	25	89.275.900
7	Antapani	Antapani Kidul	1	3.000.000

8	Antapani	Antapani Kulon	8	45.900.000
9	Antapani	Antapani Tengah	2	26.500.000
10	Antapani	Antapani Wetan	1	3.500.000
11	Arcamanik	Cisaranten Bina Harapan	9	30.500.000
12	Arcamanik	Cisaranten Kulon	10	49.500.000
13	Arcamanik	Sukamiskin	9	78.500.000
14	Astana Anyar	Cibadak	10	34.100.000
15	Astana Anyar	Karang Anyar	3	6.000.000
16	Astana Anyar	Karasak	17	100.250.000
17	Astana Anyar	Nyengseret	3	27.145.000
18	Astana Anyar	Panjunan	14	98.000.000
19	Astana Anyar	Pelindung Hewan	12	55.500.000
20	Babakan Ciparay	Babakan	23	163.850.000
21	Babakan Ciparay	Babakan Ciparay	10	53.000.000
22	Babakan Ciparay	Cirangrang	16	115.500.000
23	Babakan Ciparay	Margahayu Utara	8	29.050.000
24	Babakan Ciparay	Margasuka	18	422.304.000
25	Babakan Ciparay	Sukahaji	44	328.000.000
26	Bandung Kidul	Batununggal	7	109.740.000
27	Bandung Kidul	Kujangsari	1	500.000
28	Bandung Kidul	Mengger	11	91.219.500
29	Bandung Kidul	Wates	13	111.780.000
30	Bandung Kulon	Caringin	3	27.000.000
31	Bandung Kulon	Cigondewah Kaler	4	53.196.500
32	Bandung Kulon	Cijerah	4	13.500.000
33	Bandung Kulon	Gempolsari	4	48.365.700
34	Bandung Kulon	Warung Muncang	10	102.000.000
35	Bandung Wetan	Tamansari	2	3.894.000
36	Batununggal	Binong	16	128.000.000
37	Batununggal	Cibangkong	10	51.000.000
38	Batununggal	Gumuruh	6	36.000.000
39	Batununggal	Kebon Gedang	9	50.500.000
40	Batununggal	Kebon Waru	1	3.000.000
41	Batununggal	Maleer	1	12.000.000
42	Batununggal	Samoja	1	30.000.000
43	Bojongloa Kaler	Babakan Asih	17	118.500.000
44	Bojongloa Kaler	Babakan Tarogong	10	82.750.000
45	Bojongloa Kaler	Kopo	18	200.994.000
46	Bojongloa Kaler	Sukaasih	22	246.800.000
47	Bojongloa Kidul	Cibaduyut	13	144.152.200
48	Bojongloa Kidul	Cibaduyut Kidul	25	221.500.000
49	Bojongloa Kidul	Cibaduyut Wetan	12	60.000.000
50	Bojongloa Kidul	Kebonlega	8	36.524.200
51	Bojongloa Kidul	Mekarwangi	2	8.500.000
52	Bojongloa Kidul	Situsaeur	14	122.868.000
53	Buahbatu	Margasari	4	51.643.000
54	Buahbatu	Sekejati	4	49.237.000

55	Cibeunying Kaler	Cigadung	3	28.000.000
56	Cibeunying Kaler	Cihaurgeulis	4	24.000.000
57	Cibeunying Kaler	Sukaluyu	1	10.000.000
58	Cibeunying Kidul	Cicadas	4	11.184.000
59	Cibeunying Kidul	Cikutra	3	33.600.000
60	Cibeunying Kidul	Pasirlayung	2	3.500.000
61	Cibeunying Kidul	Sukamaju	9	66.028.500
62	Cibeunying Kidul	Sukapada	21	58.800.000
63	Cibiru	Cisurupan	6	25.250.000
64	Cibiru	Palasari	12	79.000.000
65	Cibiru	Pasirbiru	11	90.700.000
66	Cicendo	Pajajaran	2	16.000.000
67	Cicendo	Pasirkaliki	1	5.000.000
68	Cicendo	Sukaraja	21	133.400.000
69	Cidadap	Ciumbuleuit	3	21.000.000
70	Cidadap	Hegarmannah	1	2.520.000
71	Cidadap	Ledeng	1	5.000.000
72	Cinambo	Babakan Penghulu	9	74.500.000
73	Cinambo	Pakemitan	5	55.524.000
74	Cinambo	Sukamulya	1	5.250.000
75	Coblong	Cipaganti	16	52.000.000
76	Coblong	Dago	5	71.750.000
77	Coblong	Sadang Serang	33	147.600.000
78	Coblong	Sekeloa	16	102.898.000
79	Gedebage	Cimincrang	4	13.500.000
80	Gedebage	Rancabolang	1	4.000.000
81	Gedebage	Rancanumpang	4	14.500.000
82	Kiaraconding	Babakan Sari	13	49.700.000
83	Kiaraconding	Kebon Jayanti	1	5.000.000
84	Kiaraconding	Kebon Kangkung	33	290.200.000
85	Kiaraconding	Sukapura	30	149.200.000
86	Lengkong	Burangrang	1	8.000.000
87	Lengkong	Paledang	4	11.000.000
88	Mandalajati	Jatihandap	4	22.500.000
89	Mandalajati	Karang Pamulang	8	53.800.000
90	Mandalajati	Pasir Impun	14	70.415.000
91	Mandalajati	Sindang Jaya	5	45.000.000
92	Panyileukan	Mekarmulya	1	2.000.000
93	Rancasari	Mekarjaya	4	15.500.000
94	Regol	Ancol	4	15.100.000
95	Regol	Balong Gede	11	60.900.000
96	Regol	Cigereleng	1	3.000.000
97	Rego!	Ciseureuh	2	9.500.000
98	Rego!	Pasirluyu	15	89.750.000
99	Rego!	Pungkur	4	11.000.000
100	Situsaeur	Bojongloa Kaler	1	300.000
101	Sukajadi	Cipedes	19	149.438.200

102	Sukajadi	Sukabungah	3	15.500.000
103	Sukajadi	Sukagalih	3	11.633.600
104	Sukajadi	Sukawarna	10	36.000.000
105	Sukasari	Gegerkalong	1	4.500.000
106	Sukasari	Sarijadi	1	700.000
107	Sukasari	Sukarasa	2	6.100.000
108	Sumur Bandung	Kebon Pisang	1	5.429.600
109	Ujungberung	Cigending	4	115.000.000
110	Ujungberung	Pasanggrahan	4	19.300.000
111	Ujungberung	Pasirjati	7	27.500.000
Jumlah			946	6.720.881.900

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024.

Tabel 2.67

**Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung
Tahun Anggaran 2023 Sumber Biaya APBD Provinsi Jawa Barat**

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Unit	Nilai (Rp)
1	Andir	Campaka	20	95.390.000
2	Antapani	Antapani Kulon	20	215.395.000
3	Antapani	Antapani Tengah	20	127.976.000
4	Arcamanik	Cisaranten Endah	20	150.500.000
5	Astana Anyar	Nyengseret	20	107.020.000
6	Bandung Kulon	Cigondewah Kaler	20	265.200.000
7	Bandung Kulon	Cigondewah Kidul	20	126.954.000
8	Bandung Kulon	Cijerah	20	111.238.000
9	Batununggal	Samoja	20	425.000.000
10	Cibiru	Cisurupan	20	127.800.000
11	Cicendo	Pasirkalliki	20	118.325.000
12	Cicendo	Sukaraja	20	117.197.000
13	Cidadap	Ciumbuleuit	20	76.355.000
14	Cinambo	Babakan Penghulu	20	179.500.000
15	Sukasari	Sukarasa	20	146.875.000
Jumlah			300	2.390.725.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024.

Tabel 2.68
Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung
Tahun Anggaran 2023 Sumber Biaya Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR

No	Kecamatan	Kelurahan	Unit	Nilai (Rp)
1	Andir	Campaka	3	70.000.000
2	Andir	Dunguscariang	3	28.000.000
3	Andir	Garuda	1	10.000.000
4	Andir	Maleber	1	4.000.000
5	Antapani	Antapani Kulon	1	65.000.000
6	Arcamanik	Sukamiskin	6	113.000.000
7	Bandung Kidul	Kujangsari	1	6.000.000
8	Bandung Kulon	Caringin	2	2.500.000
9	Bandung Kulon	Cibuntu	1	55.000.000
10	Bandung Kulon	Cigondewah Kaler	2	63.000.000
11	Bandung Kulon	Cijerah	6	99.000.000
12	Bandung Kulon	Gempol Sari	1	7.000.000
13	Batununggal	Binong	3	35.500.000
14	Batununggal	Gumuruh	4	38.000.000
15	Batununggal	Kebon Gedang	9	73.000.000
16	Batununggal	Kebon Waru	1	2.000.000
17	Bojongloa Kaler	Suka Asih	5	48.500.000
18	Bojongloa Kidul	Cibaduyut	1	1.000.000
19	Bojongloa Kidul	Situsaeur	2	8.000.000
20	Buahbatu	Margasari	2	25.000.000
21	Buahbatu	Sekejati	4	28.500.000
22	Cibeunying Kaler	Cigadung	7	212.500.000
23	Cibeunying Kaler	Neglasari	14	223.250.000
24	Cibeunying Kidul	Sukamaju	1	1.000.000
25	Cibiru	Cipadung	1	50.000.000
26	Kiaracondong	Babakan Surabaya	4	119.000.000
27	Kiaracondong	Cicaheum	1	10.000.000
28	Kiaracondong	Kebon Jayanti	4	29.000.000
29	Kiaracondong	Kebon Kangkung	2	28.000.000
30	Lengkong	Burangrang	2	8.500.000
31	Lengkong	Cikawao	2	19.000.000
32	Mandalajati	Jatihandap	4	64.500.000
33	Mandalajati	Karang Pamulang	5	14.000.000
34	Mandalajati	Sindangjaya	1	6.000.000
35	Rancasari	Derwati	6	104.000.000
36	Regal	Cigereleng	2	43.500.000
37	Regal	Cisereuh	3	33.000.000
38	Regal	Pasirluyu	12	132.000.000
39	Sukajadi	Sukabungah	1	1.500.000
40	Sukajadi	Sukawarna	1	4.000.000

41	Ujungberung	Pasirendah	5	42.000.000
42	Ujungberung	Pasirjati	1	30.000.000
43	Ujungberung	Pasirwangi	12	123.000.000
Jumlah			150	2.079.750.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024.

B. Inovasi Skema Pembiayaan Pembangunan

1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Sumbangan Pihak Ketiga

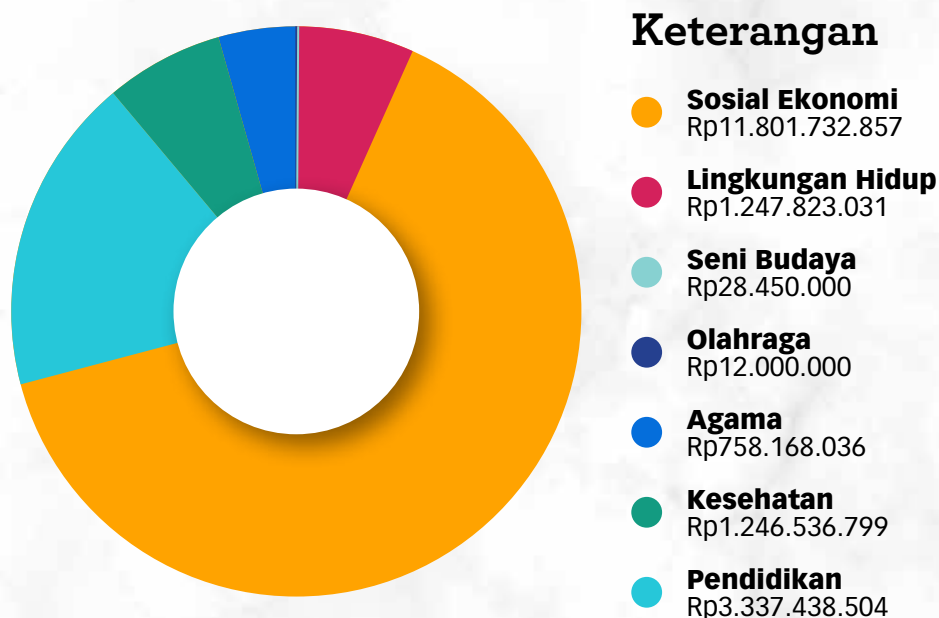
Adapun Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSL dan sumbangan pihak ketiga diukur berdasarkan jumlah bidang Program TJSL yang meliputi 7 (tujuh) Program Bidang Prioritas yaitu: Lingkungan Hidup, Sosial Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Olah Raga, Seni dan Budaya.

Realisasi program bidang prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL pada tahun 2023 sebesar Rp18.432.149.227,00 (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Du Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang tersebar pada 7 (tujuh) Program Bidang Prioritas dengan rincian besaran sebagai berikut: Lingkungan Hidup sebesar Rp1,24 Miliar (6,77%), Sosial Ekonomi sebesar Rp11,80 Miliar (64,03%), Pendidikan sebesar Rp3,34 Miliar (18,11%), Kesehatan sebesar Rp1,25 Miliar (6,76%), Agama sebesar Rp758 Juta (4,11%), Olahraga sebesar Rp12 Juta (0,07%), Seni dan Budaya sebesar Rp28 Juta (0,15%).

Perusahaan yang tercatat berkontribusi dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebanyak 160 (seratus enam puluh).

Grafik 2.36

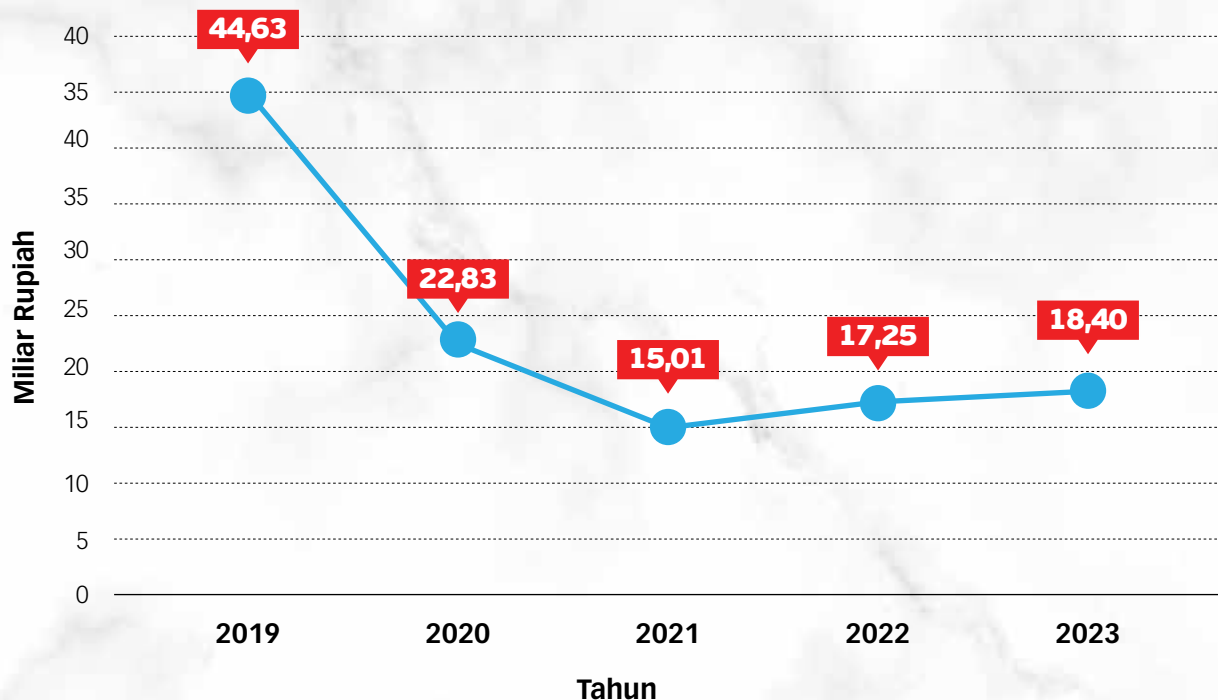
Rekapitulasi Besaran TJLS Tahun 2023 Per Bidang Prioritas



Sumber: Bappelitbang Kota Bandung, 2024.

Grafik 2.37

Realisasi Program TJLS Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)



Sumber: Bappelitbang Kota Bandung, 2024 (diolah).

2) Skema Kerjasama dengan Swasta/Badan Usaha

Program/Agenda Prioritas Pembangunan Kota Bandung yang dibiayai dari Swasta dengan skema Kerjasama Daerah, KPBU, dan Penugasan BUMD atau Obligasi Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Untuk mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut dalam rangka Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah melalui Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lengkong Nangka yang pada saat ini prosesnya sudah pada tahap transaksi.

Pemerintah Kota Bandung juga terus berupaya menggagas proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan dan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada tahun 2023 Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi melakukan perjanjian kerja sama terkait pembangunan Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan.

Proyek Rusun Cisaranten Bina Harapan merupakan salah satu proyek KPBU yang menjadi pilot project pada sektor perumahan dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024 pada penyediaan 1 juta rumah susun. Kementerian PUPR selaku PJPK memperhatikan perumahan Rusun Cisaranten untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, Rusun Cisaranten direncanakan akan menggunakan skema KPBU berupa DBFMT (Design – Build – Finance – Maintain – Transfer). Rusun Cisaranten akan memiliki 1.879 unit, termasuk 8 unit difabel dan mengadopsi green building concept, yang seluruhnya dengan Skema Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), yaitu kepemilikan atas unit sarusun di atas barang milik

negara, dengan jangka waktu tertentu.

Belum terlaksananya mekanisme KPBU, Penerbitan Obligasi Daerah dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) Pemerintah antara lain disebabkan karena mekanisme pembiayaan tersebut yang masih baru bagi Pemerintah Kota Bandung dan juga prosesnya yang panjang. Pada skema pembiayaan KPBU, Penerbitan Obligasi dan PINA banyaknya parameter yang harus dihitung pada dokumen proses perencanaan dan penyiapan mengakibatkan waktu pelaksanaannya menjadi lebih lama, serta pemahaman aparaturnya serta stakeholder lainnya masih perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) semua stakeholder dalam rangka percepatan pelaksanaan mekanisme pembiayaan tersebut juga perlunya pendampingan dari Pemerintah Pusat serta stakeholder lainnya.

3) Fasilitasi Kerjasama Daerah (Dalam Negeri dan Luar Negeri)

Dalam rangka peningkatan pembiayaan pembangunan dari Non-APBD dan optimalisasi kerjasama daerah dengan berbagai pihak, Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2023 melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Lembaga Donor Swasta/Lembaga lainnya. Adapun besaran pembiayaan pembangunan melalui skema kerja sama pada Tahun 2023 sebesar Rp2,45 menurun sebesar 7,28 Miliar pada tahun 2022, dengan rincian kegiatannya yaitu:



Tabel 2.69
Rekapitulasi Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta Melalui Fasilitas Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Tahun 2023

No	MITRA PEM-BERI BANTUAN	JENIS BANTUAN	NILAI BANTUAN	PERANGKAT DAERAH YANG TERLIBAT	KETERANGAN
1	Pemerintah Kota Kawasaki, Jepang (Melalui pendanaan MOEJ)	Pelatihan dan Lokakarya Rencana Perbaikan Kualitas/Mutu Air Anak Sungai Citarum di Kota Bandung	Rp. 1.519.011.000,-/ (untuk 3 tahun) Rp. 506.337.000,- / tahun	Bappelitbang, DLH, DSDABM, DPKP3, DISCIP-TABINTAR	Tindaklanjuti kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Kawasaki
	Pemerintah Kota Kawasaki, Jepang melalui program Bandung-Gesuido Project (BKG)	Pelatihan terkait Pembuatan Materi Edukasi mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik yang baik dan benar untuk peningkatan kompetensi staf dinas terkait dan Perumda Tirtawening serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik	Rp. 3.382.500.000,- (untuk pelaksanaan tahun 2023-2026) Rp. 1.127.500.000,- / tahun dokumen kerja sama Minute of Meeting (MoM) telah ditandatangani pada bulan Oktober tahun 2022	DLH, DSDABM, DPKP, Perumda Tirtawening	
2	Pemerintah Kota Daegu, Korea Selatan	Program Beasiswa K2H (Korea Heart to Heart) bagi 2 orang Aparatur Sipil Negara Kota Bandung	Rp. 114.000.000 Biaya tersebut meliputi : KRW 1.600.000/ 2 Orang yang dipe-runtukan untuk jaminan kecelakaan, biaya pra pelatihan, upacara perpisahan (termasuk akomodasi dan makanan selama pra-program), biaya transportasi untuk urusan resmi selama program utama.	BKPSDM	Tindaklanjuti kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Daegu, Korea Selatan
3	PT. SMI	Hibah bantuan teknis berupa studi kelayakan terkait tatakelola kawasan kumuh	Rp. 500.000.000	DPKP3	-
4	Sekolah Tinggi Teknologi Bandung (STTB)	- Pembuatan materi kampanye pencitraan produk siap ekspor berupa logo yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota - Memperindah ruang publik - Logo Pemajuan Kebudayaan	Rp. 201.500.000 (Estimasi harga dari E-Katalog)	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung	Tindaklanjuti kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Sekolah Tinggi Teknologi Bandung (STTB)

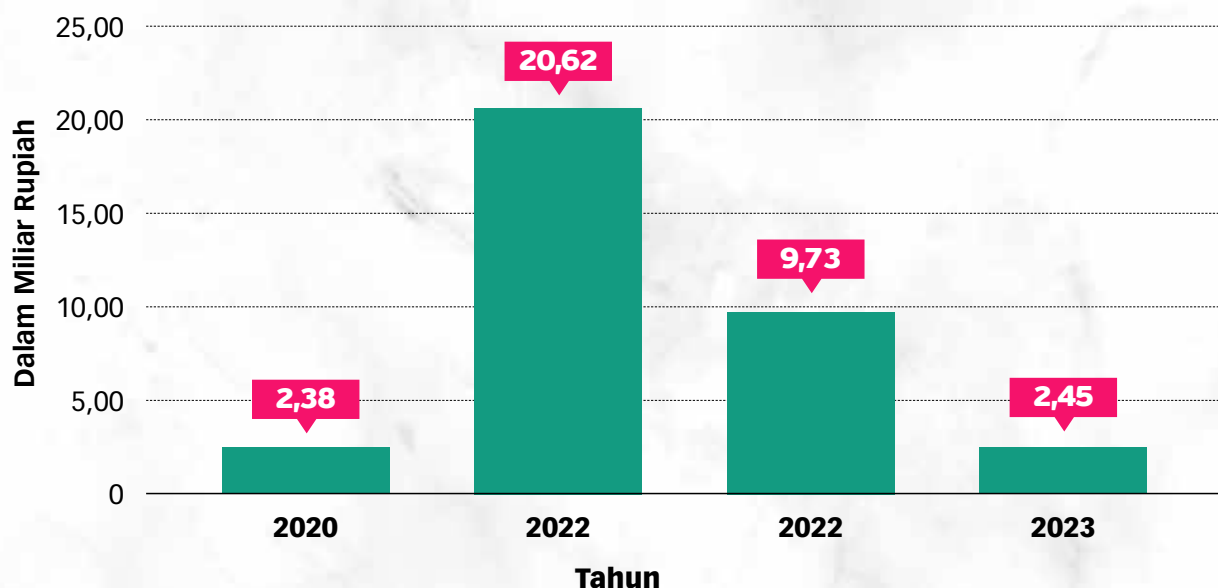
	- Pembuatan Aplikasi ASIK, aplikasi yang dibangun dalam rangka penyediaan informasi terkait produk-produk UMKM Kota Bandung secara digital - Pengembangan Sistem Informasi JDIH - Pembangunan Website Bagian Kerja Sama dan penyediaan sistem informasi pengajuan kerja sama secara online - Pengembangan tim sosial media /dokumentasi kegiatan Bagian Kerja Sama - Branding Logo Instansi		• Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung • Bagian Hukum Setda Kota Bandung • Bagian Kerja Sama Setda Kota Bandung	
TOTAL PEROLEHAN DARI PERAN SERTA PIHAK SWASTA SELAMA TAHUN ANGGARAN 2023		± Rp. 2.449.337.000,-	Terbilang: Dua miliar empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah	

Sumber: Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah, 2024.

Adapun jumlah realisasi swadaya program Rutilahu Tahun 2020-2023 di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Grafik 2.38

Rekapitulasi Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta Melalui Fasilitas Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Tahun 2020 – 2023 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah, 2024.



4) Pembiayaan Proyek Strategis dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat

Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities atau disingkat ISWMP adalah sebuah program peningkatan pengelolaan sampah nasional dengan target utama kota metropolitan dan skala regional. ISWMP diimplementasikan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, bekerja sama dengan Bank Dunia. Tujuan dari ISWMP di Kota Bandung adalah Memperoleh dukungan investasi pembangunan infrastruktur pengolahan sampah yang menerapkan prinsip sirkular ekonomi, kepastian keberlanjutan pemanfaatan hasil olahan sampah dan kepastian kinerja pengurangan sampah yang harus dicapai berdasarkan target RPJMD Tahun 2018-2023 dan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Tabel 2.70

Status Implementasi Infrastuktur ISWMP – Kota Bandung

Tahap	Lokasi	Nilai Kontrak	Progress Pekerjaan hingga akhir Tahun 2023	Keterangan
Tahap I	TPST Cicukang Holis I	5.266.561.928	Telah dioperasikan dan masa pendampingan operasional akan berakhir pada bulan April Tahun 2024	Kapasitas pegolahan sampah sebanyak 10 ton/hari
Tahap II	(1) TPST Nyengseret	11.762.391.081,71	Pembangunan telah berjalan sekitar 29,17%	
	(2) TPST Tegalega	12.183.315.533,35	Pembangunan telah berjalan sekitar 28,56%	
	(3) TPST Cicukang Holis II	27.460.475.508,94	Progres pembangunan masih 0% karena saat ini masih dalam proses pembersihan lahan	Lokasi awal adalah di ex. TPA Cicabe. Akan tetapi mengalami penolakan dari warga sekitar sehingga lokasi dipindah ke TPST Cicukang holis yang akan diperluas dan ditingkatkan kapasitasnya
Tahap III	Jelekong, Kel. Jelekong Kab Bandung	-	Dalam pengajuan Kesesuaian Ruang ke Pemkab Bandung	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, 2023.

Total pelaksanaan program ISWMP tahun 2023 sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar 15,75% atau Rp8.096.473.684,53 dan akan dilanjutkan pembangunannya di Tahun 2024.

Selain program ISWMP, Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2023 mendapatkan pembiayaan pembangunan strategis yang berasal dari APBN-Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yaitu Pembangunan Flyover Ciroyom sebesar Rp86.656.656.000,00 dengan pelaksana kegiatan dari Kementerian Perhubungan. Flyover Ciroyom itu dibangun untuk mendukung operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Direncanakan rel di bawah flyover akan dimanfaatkan juga untuk feeder atau angkutan pengumpan kereta cepat.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Bandung juga mendapatkan pembiayaan Pembangunan strategis dari APBD Provinsi Jawa Barat, yaitu Penataan Kawasan Monumen Perjuangan Rakyat sebesar Rp23.869.575.840,00. Ruang publik ini bisa dimanfaatkan bagi wisatawan baik dari Kota Bandung maupun luar Kota Bandung untuk menikmati suasana Kota Bandung, ruang publik Monumen Perjuangan terdiri dari bermain anak, ada amphiteater, dan ruang-ruang lainnya.

5) Bantuan Sosial

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial Kota Bandung mendapatkan bantuan sosial dari APBN yang langsung disalurkan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh Kecamatan/Kelurahan di Kota Bandung. Pada Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) jumlah besaran realisasi anggaran sebesar Rp224.259.600.000,00 dengan jumlah KPM sebanyak 95.129.

Untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin, jumlah besaran realisasi anggaran sebesar Rp139.500.350.000,00 dengan jumlah KPM sebanyak 53.187.

Dari tahun 2019-2023 program Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bandung sudah terdapat 137.607 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp894.855.850.000,00. Sedangkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandung terdapat 53.187 Kelompok Penerima Manfaat (KPH) dengan realisasi anggaran Rp642.094.724.000,00.

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Indikator Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan adalah :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indikator Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Adanya komitmen dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Lembaga untuk ikut serta dalam pembiayaan Pembangunan di Kota Bandung;
2. Adanya Kemajuan teknologi serta pembiayaan daerah untuk pengembangan sistem informasi TJSL.

Faktor Penghambat :

1. Terdapat beberapa usulan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen teknis (Design Engineering Detail) sehingga menyulitkan pemberi bantuan (baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun swasta) untuk menghitung besaran kebutuhan biaya kegiatan yang diusulkan;
2. Kurangnya penyampaian informasi tentang rencana program dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung kepada Pemerintah Pusat/Provinsi/Lembaga sehingga Pemerintah Kota Bandung kurang mendapatkan prioritas bantuan pembiayaan Pusat/Provinsi/Lembaga;
3. Belum Optimalnya Peran Pimpinan dalam mendukung upaya perolehan pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari Non PAD;
4. Belum optimalnya sarana informasi TJSL Kota Bandung sebagai media informasi program dan kegiatan yang dapat dikolaborasikan.

Solusi :

1. Mendorong Perangkat Daerah terkait untuk membuat DED pada kegiatan yang akan dibiayai oleh anggaran Non PAD;
2. Meningkatkan koordinasi kepada Pemerintah Pusat/Provinsi/Lembaga dalam rangka penyampaian informasi rencana program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh anggaran Non PAD;
3. Mendorong peran pimpinan untuk menentukan program dan kegiatan prioritas Pembangunan yang akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat/Provinsi/Lembaga;
4. Pengembangan sistem informasi TJSL Kota Bandung.



KESIMPULAN

Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 merupakan capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ke 5 atau tahun terakhir RPJMD Kota Bandung 2018-2023 yang merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik atau Good Governance Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.

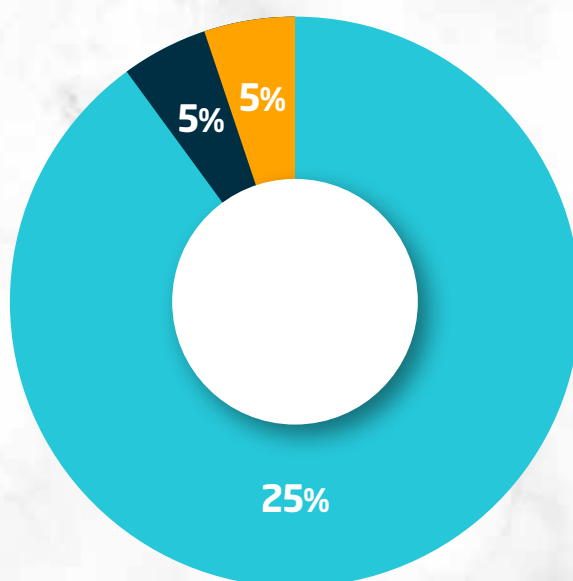
Pembuatan Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Bandung dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai. Selain itu, dilaporkan juga hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan dari setiap sasaran kinerja.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung yang telah ditetapkan pada tahun 2023, sebagai berikut :

1. Indikator dengan kategori Sangat Baik dengan jumlah 18 atau 90,00%
2. Indikator dengan kategori Baik dengan jumlah 0 atau 0,00%
3. Indikator dengan kategori Cukup dengan jumlah 1 atau 5,00%
4. Indikator dengan kategori Kurang dengan jumlah 0 atau 0,00%
5. Indikator dengan kriteria Sangat Kurang dengan jumlah 1 atau 5,00%

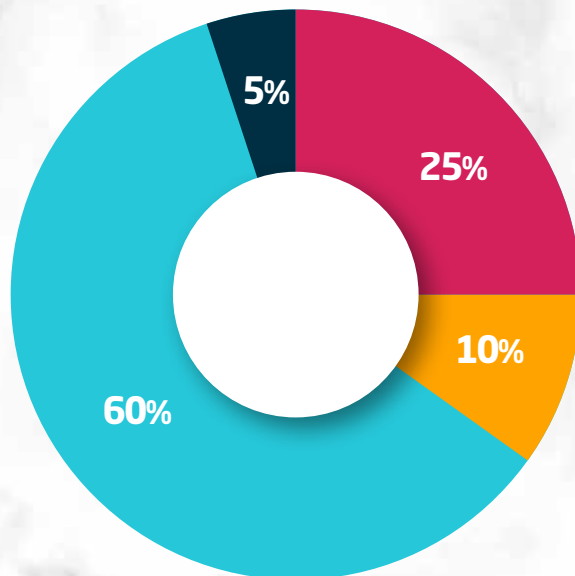
No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	





Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran dengan 20 (dua puluh) Indikator Sasaran. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

1. Indikator dengan kriteria Melebihi Target dengan jumlah 12 atau 60,00%
2. Indikator dengan kriteria Sesuai Target atau Tercapai dengan jumlah 2 atau 10,00%
3. Indikator dengan kriteria Tidak Mencapai Target dengan jumlah 5 atau 25,00%
4. Indikator dengan kriteria N/A atau Tidak Diukur dengan jumlah 1 atau 5,00%



Keterangan

- Tidak Tercapai <100
- Melebihi Tercapai <100
- Tercapai/Sesuai Target 100
- Tidak Diukur N/A

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	
N/A	Tidak Diukur	

Tahun Anggaran 2023, untuk pencapaian kinerja 8 (delapan) Indikator Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Sasaran pada RPJMD Tahun 2018-2023 Kota Bandung termasuk 20 (dua puluh) Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Bagian serta Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7.813.746.736.717 dengan capaian realisasi Rp6.743.350.893. 479 atau 86,30%

Berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran, masih terdapat beberapa Indikator Kinerja yang belum mencapai target. Pemerintah Kota Bandung menyikapi hal tersebut dengan mempersiapkan beberapa langkah sebagai upaya tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya. Beberapa upaya atau Solusi dalam memperbaiki kinerja tahun 2023 dari setiap Indikator Kinerja sebagai berikut :

Guna mempertanggungjawabkan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Bandung menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung. Sebelum pembahasan lebih jauh, ada baiknya memahami terlebih dahulu pengertian Akuntabilitas Kinerja.

Secara umum, Akuntabilitas Kinerja artinya jawaban transparan terkait keberhasilan misi dan kegagalan misi. Jawaban tentang dua hal itu, disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menerima laporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Lantas, siapa saja yang punya kewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja itu sendiri? Jawabannya, ada tiga: Perorangan, Badan Hukum, Pimpinan Kolektif. Berakuntabilitas jadi hal wajib dilakukan Pemerintah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat. Kewajiban ini sudah dilakukan dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung.



Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2023, RKPD Tahun 2023, dan PK Tahun 2023. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).





PEMERINTAH
KOTA BANDUNG